



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR **7** TAHUN **2025**
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. dimana dokumen yang maksud adalah dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah Pemerintah Papua Selatan Tahun 2025-2045, yang memuat penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan serta membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan

martabat Orang Asli Papua, sesuai cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN
dan
GUBERNUR PAPUA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Selatan yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua Selatan.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Sasaran Pokok adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang

untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

- (2) RPJPD wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
 - e. Bab V Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok; dan
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 4

- (1) RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RPJPD menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2045.
- (5) RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD secara berkala.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (4) Teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal, 19 Desember 2025
GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal, 19 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN **2025** NOMOR: **7**
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN: **9-254/2025**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN, SH., MM
PEMBAINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016



PROVINSI PAPUA SELATAN
2025-2045



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	5
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen.....	9
1.3.1 RPJPN 2025-2045	9
1.3.2 Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041	9
1.3.3 RTRW Provinsi.....	10
1.3.4 Pembangunan Berkelanjutan	11
1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJPD.....	12
1.5 Sistematika RPJPD	13
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	16
2.1 Aspek Geografi Dan Demografi.....	16
2.1.1 Aspek Geografi.....	16
2.1.2. Aspek Demografi.....	60
2.2 Aspek Pelayanan Umum.....	86
2.2.1 Urusan Layanan Wajib Pelayanan Dasar	86
2.2.2 Urusan Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar	141
2.2.3 Urusan Layanan Pilihan.....	178
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	209
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah.....	209
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM).....	211
2.3.3 Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah.....	216
2.4 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	224
2.4.1 Hasil Capaian Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025.....	224
2.4.2 Rekomendasi hasil evaluasi RPJPD 2005-2025.....	237
2.5 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	238
2.5.1 Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045...238	
2.5.2 Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana sampai tahun 2045.....244	

2.6	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	249
2.5.3	Arahan sentra industri pertanian	253
2.5.4	Arahan sentra industri perkebunan	255
2.5.5	Arahan sentra industri perikanan	258
2.5.6	Arahan sentra destinasi pariwisata budaya.....	260
2.6	Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus Di Tanah Papua	270
2.6.1	Penerapan Otonomi Khusus.....	271
2.6.2	Perlindungan, Keberpihakan, dan Pemberdayaan.....	274
2.6.3	Hak-Hak Dasar	275
2.6.4	Politik, Hukum dan HAM.....	276
2.6.5	Kewenangan Pemerintahan Otonomi Khusus.....	277
BAB 3	PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS.....	280
3.1	Masalah Pembangunan Daerah	280
3.1.1	Kependudukan	286
3.1.2	Pendidikan	288
3.1.3	Kesehatan	290
3.1.4	Pekerjaan Umum	294
3.1.5	Perhubungan	298
3.1.6	Ketahanan Pangan.....	304
3.1.7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	308
3.1.8	Sumber Daya Alam dan Lingkungan	312
3.1.9	Perekonomian dan Keuangan Daerah	320
3.1.10	Pertanahan	323
3.1.11	Ketersediaan Listrik	325
3.1.12	Sarana Air Bersih	327
3.1.13	Sanitasi.....	329
3.1.14	Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan.....	330
3.1.15	Penataan Ruang.....	336
3.1.16	Perencanaan Pembangunan.....	336
3.1.17	Pemberdayaan Masyarakat, Distrik dan Kampung	340
3.1.18	Ketentraman dan Ketertiban	345
3.2	Isu Strategis.....	348
3.2.1	Isu Internasional	348
3.2.2	Pembangunan Berkelanjutan / SDGs.....	349

3.2.3 Isu Nasional.....	351
3.2.4 Isu Daerah.....	351
BAB 4 VISI DAN MISI PAPUA SELATAN.....	352
4.1 Visi Dan Misi RPJPN 2025-2045	352
4.2 Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua	354
4.3 Visi RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045	356
4.3.1 Sejahtera.....	357
4.3.2 Adil.....	358
4.3.3 Maju.....	358
4.3.4 Makmur Berkelanjutan	359
4.3.5 Berbasis Kearifan Budaya HA-ANIM	360
4.4 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045.....	363
4.5 Misi RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045.....	365
BAB 5 ARAH KEBIJAKAN & SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH.....	370
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang PPPS 2025 – 2045	370
5.1.1 Transformasi Papua Selatan 20 Tahun ke Depan	371
5.1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan PPS2025-2045.....	375
5.1.3 Penyelarasan 17 Arah Pembangunan Rpjpn Ke Dalam RPJPD.....	407
5.2 Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang PPS 2025-2045.....	413
5.2.1 Arah Kebijakan Transformasi.....	435
BAB 6 PENUTUP	442
6.1 Pedoman Transisi	442
6.2 Kaidah Pelaksanaan	443

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kabupaten Provinsi Papua Selatan Tahun 2022	16
Tabel 2. 2	Luas Wilayah Kabupaten Provinsi Papua Selatan Tahun 2022	17
Tabel 2. 3	Kelerengan per kabupaten	20
Tabel 2. 4	Jenis Tanah mineral per kabupaten	21
Tabel 2. 5	Jenis dan karakteristik tanah di Provinsi Papua Selatan	21
Tabel 2. 6	Luas dan Persentase Daerah Aliran Sungai di Provinsi Papua Selatan	25
Tabel 2. 7	Luas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Papua Selatan	27
Tabel 2. 8	Kedalaman gambut di Provinsi Papua Selatan Berdasarkan Kabupaten	30
Tabel 2. 9	Sebaran Gambut di Provinsi Papua Selatan	30
Tabel 2.10	Pengamatan Unsur Iklim di stasiun Pengamatan (BMKG) di Provinsi Papua	31
Tabel 2.11	Bentang alam dari fisiografi Papua	33
Tabel 2.12	Luas dan Persentase Penutupan Lahan di Provinsi Papua Selatan	35
Tabel 2.13	Rencana Pola Ruang Provinsi Papua Selatan	36
Tabel 2.14	Kondisi Kawasan Hutan Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 (Ha)	37
Tabel 2.15	Pembagian Zonasi Khusus Wilayah Kelola MHA dalam 12 Mil Laut	50
Tabel 2.16	Potensi Pengembangan Wilayah Provinsi Papua Selatan	51
Tabel 2.17	Nilai Indeks Risiko Provinsi Papua Selatan Tahun 2015-2024	52
Tabel 2.18	Kelas Risiko Bencana di Provinsi Papua Selatan 2024	53
Tabel 2.19	Ancaman dan kelas bahaya banjir setiap kabupaten/kota	54
Tabel 2.20	Ancaman dan kelas bahaya banjir bandang setiap kabupaten	56
Tabel 2.21	Ancaman dan kelas bahaya longsor setiap kabupaten	56
Tabel 2.22	Ancaman dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di kabupaten/kota	57
Tabel 2.23	Ancaman dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan setiap kabupaten/kota	58
Tabel 2.24	Ancaman dan kelas bahaya kekeringan setiap kabupaten/kota	58
Tabel 2.25	Ancaman dan kelas bahaya gempa bumi setiap kabupaten/kota	58
Tabel 2.26	Ancaman dan kelas bahaya tsunami setiap kabupaten	58
Tabel 2.27	Ancaman dan kelas bahaya likuifaksi setiap kabupaten	59
Tabel 2.28	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di dalam wilayah PPS 2020- 2025	60
Tabel 2.29	Laju Pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2021	61
Tabel 2.30	Produk Domestik Regional Bruto Atas (ADHK) menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023 (juta rupiah)	62
Tabel 2.31	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Belaku (ADHB) menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023 (juta rupiah)	63
Tabel 2.32	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023 (persen)	63
Tabel 2.33	Indeks Gini Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023	65
Tabel 2.34	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua Selatan 2018-2022	65
Tabel 2.35	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Selatan Tahun 2018 dan 2022	65
Tabel 2.36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten di Papua Selatan Tahun 2019-2023 (%)	74
Tabel 2.37	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan di Provinsi Papua Selatan, 2023	75
Tabel 2.38	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2021	77
Tabel 2.39	Nama dan Jumlah Suku Bangsa di Papua Selatan	79
Tabel 2.40	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis	

	Kelamin di Provinsi Papua, 2022.....	84
Tabel 2.41	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) di Provinsi Papua Selatan	84
Tabel 2.42	Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan, 2022	97
Tabel 2.43	APK Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022	99
Tabel 2.44	APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kabupaten di PPS, 2022	100
Tabel 2.45	Proporsi Sekolah Terakreditasi menurut Jenjang Pendidikan di PPS, 2023	102
Tabel 2.46	Persentase Puskesmas di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan serta Obat dan Vaksin Esensial	104
Tabel 2.47	Nama, Kelas dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Papua Selatan	105
Tabel 2.48	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Provinsi Papua Selatan, 2021....	106
Tabel 2.49	Distribusi Tenaga Medis di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	110
Tabel 2.50	Distribusi Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif berdasarkan Jenisnya di Masing- Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	111
Tabel 2.51	Jumlah dan Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021.....	112
Tabel 2.52	Cakupan K1 dan K4 di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	113
Tabel 2.53	Cakupan Kunjungan Nifas Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	115
Tabel 2.54	Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021.....	117
Tabel 2.55	Jumlah dan Persentase Kampung/ Kelurahan UCI Menurut Kabupaten di PPS, 2021	118
Tabel 2.56	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Kabupaten di PPS, Tahun 2021.....	119
Tabel 2.57	TC dan TSR Tuberkulosis Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021.....	120
Tabel 2.58	Cakupan Pelayanan Kasus Diare Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	121
Tabel 2.59	Cakupan Penanganan Kasus Malaria Menurut Kabupaten di PPS, 2021	127
Tabel 2.60	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jaringan Jalan di PPS 2018-2022	129
Tabel 2.61	Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan 2022	130
Tabel 2.62	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak 2017-2021.....	130
Tabel 2.63	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 2022 ...	131
Tabel 2.64	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak 2018-2022	132
Tabel 2.65	Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Utama, 2022.....	132
Tabel 2.66	Persentase Rumah Tangga Kabupaten/ Kota dan Jenis Atap Terluas 2022	133
Tabel 2.67	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, 2022	132
Tabel 2.68	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Terluas, 2022.....	134
Tabel 2.69	Jumlah Persentase Kampung Berdasarkan Jenis Perkelahian Massal di PPS Tahun 2021.....	135
Tabel 2.70	Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021	136
Tabel 2.71	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jamsos Tahun 2018-2022	137
Tabel 2.72	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menjadi Penerima Program KKS, BPNT dan PKH di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022.....	140
Tabel 2.73	penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Selatan menurut jenis kegiatan pada tahun 2021	142
Tabel 2.74	yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020	144
Tabel 2.75	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Informal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah) di Papua Selatan Tahun 2020	145
Tabel 2.76	Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Pendidikan Tertinggi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022	145
Tabel 2.77	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Selatan.....	146
Tabel 2.78	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Papua Selatan	147
Tabel 2.79	Perempuan sebagai Tenaga Profesional (%) di Provinsi Papua Selatan.....	148
Tabel 2.80	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) di Provinsi Papua Selatan	149

Tabel 2.81	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) di Provinsi Papua Selatan	149
Tabel 2.82	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Papua Selatan	149
Tabel 2.83	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2020	153
Tabel 2.84	Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di PPS Tahun 2022.....	154
Tabel 2.85	Penduduk yang Mempunyai Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Tahun 2022.....	156
Tabel 2.86	Cakupan Penduduk OAP dan non-OAP yang Terdata SIO Papua (update: 21 Maret 2023) ..	156
Tabel 2.87	Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	157
Tabel 2.88	Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.....	157
Tabel 2.89	Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Selatan	160
Tabel 2.90	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Berdasarkan Status Penggunaan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan.....	161
Tabel 2.91	Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Tidak Menggunakan Alat KB Berdasarkan Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat KB Tahun 2022.....	162
Tabel 2.92	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2022	161
Tabel 2.93	Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Menggunakan Alat KB Modern menurut Tempat Memperoleh Alat KB Modern yang Terakhir Kali, 2022.....	162
Tabel 2.94	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Papua Selatan	164
Tabel 2.95	Jumlah Kendaraan di Kabupaten Provinsi Papua Selatan per Jenis Kendaraan 2017-2021....	164
Tabel 2.96	Rute Pelayaran di Provinsi Papua Selatan.....	166
Tabel 2.97	Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Transportasi Udara di Papua Selatan 2018-2020...	167
Tabel 2.98	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Menggunakan Telepon di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022	168
Tabel 2.99	Banyaknya Kampung/Kelurahan Berdasarkan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Tahun 2019-2021.....	169
Tabel 2.100	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022..	170
Tabel 2.101	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Yang Menggunakan Komputer Tahun 2018-2022.....	170
Tabel 2.102	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022.....	171
Tabel 2.103	Domain dan Indikator Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda	172
Tabel 2.104	Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2017-2022	173
Tabel 2.105	Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Papua Tahun 2021-2022	174
Tabel 2.106	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021	182
Tabel 2.107	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020.....	181
Tabel 2.108	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021.....	182
Tabel 2.109	Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Kegiatan di PPS 2021	184
Tabel 2.110	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021.....	184
Tabel 2.111	Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap Perekonomian (PDRB) di Papua Selatan 2016-2020 (%).....	186
Tabel 2.112	Destinasi Wisata di Provinsi Papua Selatan	188
Tabel 2.113	Banyaknya Sarana Akomodasi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2017-2021.....	193
Tabel 2.114	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Provinsi Papua Selatan (hari) Tahun 2021	194
Tabel 2.115	Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel di Papua Selatan Tahun 2021	194

Tabel 2.116	Tanaman Pangan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021 (ton).....	196
Tabel 2.117	Produksi Sayuran di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021 (kuintal).....	197
Tabel 2.118	Produksi Buah-buahan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (kuintal).....	198
Tabel 2.119	Produksi Perkebunan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (ton)	200
Tabel 2.120	Populasi Ternak dan Unggas (ekor) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022.....	201
Tabel 2.121	Produksi Daging Ternak dan Telur Unggas di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022.....	201
Tabel 2.122	Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Penerangan Utama 2020-2022	204
Tabel 2.123	Persentase Distribusi Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Papua Selatan 2022.....	204
Tabel 2.124	Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Papua.....	205
Tabel 2.125	Jumlah Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Sumber Modal Usaha di Papua Selatan, 2020.....	206
Tabel 2.126	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022.....	207
Tabel 2.127	Banyaknya Kelompok Pertokoan dan Sarana Perdagangan, 2021	208
Tabel 2.128	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah).....	209
Tabel 2.129	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2022	210
Tabel 2.130	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021.....	211
Tabel 2.131	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022	213
Tabel 2.132	Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020.....	214
Tabel 2.133	Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022.....	219
Tabel 2.134	Rencana dan Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Papua Selatan 2014-2016	221
Tabel 2.135	Rencana dan Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Papua Tahun 2011-2020	222
Tabel 2.136	Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Papua, 2020	223
Tabel 2.137	Rencana dan Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Papua, 2020.....	223
Tabel 2.138	Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2022	224
Tabel 2.139	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2022 (%).....	224
Tabel 2.140	Evaluasi Capaian Indikator Makro	225
Tabel 2.141	Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan	224
Tabel 2.142	Capaian Indikator Makro Pembangunan	226
Tabel 2.143	Capaian Evaluasi sasaran pokok RPJPD	227
Tabel 2.144	Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Kesejahteraan	229
Tabel 2.145	Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah	230
Tabel 2.146	Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Pelayanan Umum	230
Tabel 2.147	Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Wilayah / Infrastruktur.....	231
Tabel 2.148	Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Iklim	232
Tabel 2.149	Statistik Indikator Pembangunan Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan	233
Tabel 2.150	Statistik Indikator Pembangunan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan	234
Tabel 2.151	Statistik Indikator Pembangunan Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan	235
Tabel 2.152	Statistik Indikator Pembangunan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan	236
Tabel 2.153	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.....	237
Tabel 2.154	Proyeksi Kependudukan Provinsi Papua Selatan	239
Tabel 2.155	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	242

Tabel 2.156	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Papua Selatan.....	242
Tabel 2.157	Kebutuhan rumah/tempat tinggal dan permukiman.....	244
Tabel 2.158	Kebutuhan sarana dan prasarana air bersih.....	245
Tabel 2.159	Kebutuhan sarana dan prasarana energi	246
Tabel 2.160	Kebutuhan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.....	247
Tabel 2.161	Kebutuhan sarana dan prasarana persampahan.....	247
Tabel 2.162	Kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan.....	249
Tabel 2.163	Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan	249
Tabel 2.164	Arahan Pola Ruang Nasional Terhadap Provinsi Papua Selatan.....	254
Tabel 2.165	Arahan Kawasan Budi daya Yang Memiliki Nilai Strategis Pulau Papua Terhadap Provinsi Papua Selatan.....	254
Tabel 2.166	Arahan kebijakan struktur ruang pulau papua terhadap provinsi papua Selatan.....	258
Tabel 2.167	Distribusi Lokal Pusat Pertumbuhan dan Pelabuhan Perikanan.....	259
Tabel 2. 168	Arahan Kawasan Budi daya Yang Memiliki Nilai Strategis Pulau Papua TerhadapPPS.....	259
Tabel 3. 1	Permasalahan Pembangunan Makro di Provinsi Papua Selatan.....	280
Tabel 3. 2	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kependudukan di Provinsi Papua Selatan.....	287
Tabel 3. 3	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pendidikan di Provinsi Papua Selatan	289
Tabel 3. 4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kesehatan di Provinsi Papua Selatan	291
Tabel 3. 5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Papua Selatan.....	295
Tabel 3. 6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perhubungan di Provinsi Papua Selatan	300
Tabel 3. 7	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Selatan.....	305
Tabel 3. 8	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Papua Selatan.....	310
Tabel 3. 9	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Provinsi Papua Selatan.....	313
Tabel 3. 10	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah di Provinsi Papua Selatan.....	321
Tabel 3. 11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan di Provinsi Papua Selatan.....	325
Tabel 3. 12	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Ketersediaan Listrik di Provinsi Papua Selatan.....	326
Tabel 3. 13	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sarana Air Bersih di Provinsi Papua Selatan.....	327
Tabel 3. 14	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sanitasi di Provinsi Papua Selatan.....	329
Tabel 3. 15	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Selatan	330
Tabel 3. 16	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Penataan Ruang di Provinsi Papua Selatan	336
Tabel 3. 17	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan di Provinsi Papua Selatan	337
Tabel 3. 18	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Distrik dan Kampung di Provinsi Papua Selatan.....	340

Tabel 3. 19	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Provinsi Papua Selatan	345
Tabel 4. 1	sasaran visi Provinsi Papua Selatan yang telah diselaraskan dengan RPJPN	365
Tabel 4. 2	Penyelarasan Misi RPJP Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045	369
Tabel 5. 1	Penyelarasan 8 Misi Pembangunan RPJPN ke dalam 8 Misi Pembangunan RPJPD Provinsi Papua Selatan	373
Tabel 5. 2	keterkaitan implementasi antara Isu Strategis Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045.....	375
Tabel 5. 3	Rumusan Arah Kebijakan 1: Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP...	378
Tabel 5. 4	Rumusan Arah Kebijakan 2: Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.	384
Tabel 5. 5	Rumusan Arah Kebijakan 2: Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.	390
Tabel 5. 6	Rumusan Arah Kebijakan 2: Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.	392
Tabel 5. 7	Rumusan Arah Kebijakan 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemanfaatkan Sumber Daya Alam, Potensi Unggulan Daerah/Lokal.	394
Tabel 5. 8	Rumusan Arah Kebijakan 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemanfaatkan Sumber Daya Alam, Potensi Unggulan Daerah/Lokal.	400
Tabel 5. 9	Penyelarasan 17 Arah Pembangunan RPJPN ke dalam RPJPD.....	407
Tabel 5. 10	Tahapan Pembangunan Papua Selatan	410
Tabel 5. 11	Rincian Penyelarasan 17 Arah Pembangunan ke dalam 45 Indikator Pembangunan Provinsi Papua Selatan dan RPJPN 2025 – 2045	413
Tabel 5. 12	Indikator-indikator pada Arah Transformasi Sosial	433
Tabel 5. 13	Indikator pada Arah Transformasi Ekonomi.....	436
Tabel 5. 14	Indikator pada Arah Transformasi Tata Kelola	438
Tabel 5. 15	Indikator pada Arah Transformasi terkait Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia.....	438
Tabel 5. 16	Indikator pada Arah Transformasi terkait Sosial Budaya dan Ekologi.....	439

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Skenario Hubungan RPJPD dan Lap. Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	11
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Provinsi Papua Selatan	17
Gambar 2. 2	Peta Administrasi Provinsi Papua Selatan	18
Gambar 2. 3	Persentase Wilayah Darat Dan Laut PPS Tahun 2024	19
Gambar 2. 4	Peta Ketinggian Provinsi Papua Selatan	19
Gambar 2. 5	Peta Jenis Tanah Provinsi Papua Selatan	22
Gambar 2. 6	Peta Geologi Provinsi Papua Selatan	23
Gambar 2. 7	Peta Daerah Aliran Sungai	24
Gambar 2. 8	Sumber: KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023	25
Gambar 2. 9	Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Papua Selatan	29
Gambar 2. 10	Peta Sebaran Lahan Gambut Provinsi Papua Selatan	30
Gambar 2. 11	Peta Iklim Provinsi Papua Selatan	32
Gambar 2. 12	Peta penutupan lahan Tahun 2022 di Provinsi Papua Selatan	32
Gambar 2. 13	Peta sebaran vegetasi alami	34
Gambar 2. 14	Peta penutupan lahan Tahun 2022 di Provinsi Papua Selatan	36
Gambar 2. 15	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	42
Gambar 2. 16	Peta Sebaran Perkebunan di Provinsi Papua Selatan	43
Gambar 2. 17	Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Papua Selatan	48
Gambar 2. 18	Peta Potensi Air Tanah di Pulau Papua	53
Gambar 2. 19	Peta Kawasan Rawan Bencana	54
Gambar 2. 20	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kota Tahun 2024	54
Gambar 2. 21	Grafik sebaran Luas Kawasan Bencana	55
Gambar 2. 22	Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan di Provinsi Papua Selatan (%)	61
Gambar 2. 23	Persentase Penduduk menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 sd 2024	62
Gambar 2. 24	Struktur Perekonomian Provinsi Papua Selatan Tahun menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier 2018-2022 (persen)	64
Gambar 2. 25	Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia	66
Gambar 2. 26	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2018-2022	68
Gambar 2. 27	Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	69
Gambar 2. 28	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Papua Selatan, 2018-2022	70
Gambar 2. 29	Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan, 2021	71
Gambar 2. 30	Perkembangan UHH Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan (Rata-Rata Kabupaten), 2018-2022	72
Gambar 2. 31	Perkembangan UHH Menurut Jenis Kelamin pada Masing-Masing kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	73
Gambar 2. 32	Perbandingan Perkembangan UHH 4 Kabupaten di Papua Selatan dengan Nasional, 2018- 2022	74
Gambar 2. 33	Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022	74
Gambar 2. 34	Jenis dan Proporsi PAUD di Papua Selatan Tahun 2023 (%)	87

Gambar 2. 35	Perkembangan Jumlah TK Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan, 2021-2023	88
Gambar 2.36	Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik Sekolah pada Tingkat TK di Provinsi Papua Selatan, 2023	89
Gambar 2.37	Jumlah Rombel, Rasio Siswa per Rombel dan Rasio Rombel per Sekolah pada Tingkat TK di Provinsi Papua Selatan 2023	89
Gambar 2.38	Perkembangan Jumlah SD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan 2020- 2023	90
Gambar 2.39	Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik: Sekolah pada Tingkat SD di Provinsi Papua Selatan, 2023	91
Gambar 2.40	Jumlah Rombel, Rasio Peserta Didik per Rombel dan Rasio Rombel per Sekolah pada Tingkat SD di Provinsi Papua Selatan, 2023	89
Gambar 2.41	Perkembangan Jumlah SMP Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan, 2020- 2023	90
Gambar 2.42	Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik: Guru dan Rasio Peserta Didik Sekolah pada Tingkat SMP di Provinsi Papua Selatan, 2023	91
Gambar 2.43	Jumlah Rombel, Jumlah Peserta Didik per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMP di Provinsi Papua selatan 2023..	92
Gambar 2. 44	Perkembangan Jumlah SMA Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2020 - 2023	93
Gambar 2. 45	Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat SMA di Provinsi Papua Selatan, 2023	93
Gambar 2. 46	Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMA di Provinsi Papua Selatan 2023	94
Gambar 2. 47	Perkembangan Jumlah SMK di Provinsi Papua Selatan, 2020-2023	94
Gambar 2. 48	Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik: Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada SMK di Provinsi Papua Selatan, 2023.....	95
Gambar 2. 49	Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Selatan 2023.....	96
Gambar 2. 50	Jumlah Peserta Didik dan Proporsi Gender pada tiap jenjang Pendidikan	97
Gambar 2. 51	Angka Partisipasi Sekolah dari Rata-Rata Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2019-2022.....	98
Gambar 2. 52	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin.....	99
Gambar 2. 53	APK Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022.....	99
Gambar 2. 54	Rata-Rata APM dari 4 Kabupaten pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Selatan, 2020-2022	100
Gambar 2. 55	Rata-Rata APM dari 4 Kabupaten berdasarkan jenis Kelamin pada Tiap Jenjang Pendidikan, di Provinsi Papua Selatan, 2022	100
Gambar 2. 56	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022	101
Gambar 2. 57	Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019 - 2021	.103
Gambar 2. 58	Rasio puskesmas per Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022	.104
Gambar 2. 59	Rasio Tempat Tidur RS per 1000 Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021	.106
Gambar 2. 60	Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Masing-Masing Kabupaten di	

	Papua Selatan Provinsi Tahun 2021	.107
Gambar 2. 61	Jumlah Posyandu dan Rasio Posyandu terhadap Jumlah Balita di Masing- Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	107
Gambar 2. 62	Jumlah serta Rasio Dokter Umum Terhadap Jumlah Penduduk di Masing- Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	109
Gambar 2. 63	Jumlah serta Rasio Tenaga Perawat dan Bidan terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	110
Gambar 2. 64	Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022	112
Gambar 2. 65	Jumlah dan Proporsi Kematian Anak Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021	115
Gambar 2. 66	Jumlah Kematian Anak Menurut Kabupaten Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2021	116
Gambar 2. 67	Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	118
Gambar 2. 68	Persentase Sekolah dengan Pelayanan Kesehatan Sekolah Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021	120
Gambar 2. 69	Persentase Balita Stunting, Underweight dn Wasted di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022	121
Gambar 2. 70	Persentase Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk (underweight) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022	122
Gambar 2. 71	perbandingan antar kabupaten mengenai prevalensi balita kurus	123
Gambar 2. 72	Perkembangan kasus HIV-AIDS di Provinsi Papua Selatan sejak tahun 1992 hingga 2022	124
Gambar 2. 73	API per kabupaten di Papua Selatan tahun 2021	126
Gambar 2. 74	Peta Indeks Tiap Risiko Bencana Kabupaten dan Kota Tahun 2022	134
Gambar 2. 75	Perkembangan Cakupan Pendataan OAP dan non-OAP di Boven Digoel dan Asmat Dalam SIO Papua(update: 18 April 2023)	157
Gambar 2. 76	Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua	176
Gambar 2. 77	Kondisi Perikanan Tangkap di Provinsi Papua Selatan	180
Gambar 2. 78	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022	186
Gambar 2. 79	Beberapa Atraksi Wisata di Provinsi Papua Selatan	191
Gambar 2. 80	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022	195
Gambar 2. 81	Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua Selatan	203
Gambar 2. 82	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022	207
Gambar 2. 83	Masterplan SKPT Merauke	208
Gambar 2. 84	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2022	210
Gambar 2. 85	Peta Pusat Permukiman dan jaringan Transportasi Darat Provinsi Papua Selatan	216
Gambar 2. 86	Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet Provinsi Papua Selatan, 2021	218
Gambar 2. 87	Kemajuan Beberapa Indikator	226
Gambar 2.88	Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang Daerah.	227

Gambar 2. 89 Rekapitulasi Capaian kinerja RPJPD Provinsi Papua 2025-2025	228
Gambar 2. 90 Struktur usia dan rasio jenis kelamin	240
Gambar 2. 91 Stunting di Papua Selatan	241
Gambar 2. 92 Tema Pembangunan Papua Selatan	252
Gambar 2. 93 Potensi Pengembangan di Provinsi Papua Selatan	252
Gambar 2. 94 Taman Wasur	261
Gambar 2. 95 Wisata Pulau Habe	262
Gambar 2. 96 Pantai Payum Merauke	262
Gambar 2. 97 Danau Biru	263
Gambar 2. 98 Taman Sota	264
Gambar 2. 99 Karya Ukir khas Asmat	264
Gambar 2. 100 Festival Budaya Asmat atau Pesta Budaya Asmat di Distrik Agats.	264
Gambar 2. 101 Pesona Pantai	265
Gambar 2. 102 rumah suku Korowai	266
Gambar 2. 103 Wisata Sejarah Penjara Penjara Boven Digoel	268
Gambar 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Provinsi Papua Selatan	348
Gambar 3. 2 Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	350
Gambar 4. 1 Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas	353
Gambar 4. 2 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia 2045	354
Gambar 4. 3 Visi dan Misi Papua Selatan	356
Gambar 4. 4 Keselarasan Visi RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJPN 2025-2045	363
Gambar 4. 5 Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua selatan 2025-2045 dan Misi RPJPN 2025-2045	366
Gambar 5. 1 Arah Kebijakan Transformasi RPJPN 2025 - 2045	435

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan sebagai Provinsi Pemekaran merupakan peta jalan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Selatan. Pembentukan Daerah otonomi Baru (DOB) di tanah Papua merupakan agenda penting dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dimana Pemekaran wilayah di Provinsi Papua dilakukan atas aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Kondisi ini mengakibatkan adanya penyesuaian Peta Wilayah, dimana kondisi ini sangat penting dalam penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 mengingat dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai dokumen yang wajib di pedomani dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan periode 2025-2045 sebagai langkah awal bagi Provinsi Papua Selatan menjadi sangat penting dalam menentukan arah pembangunan 20 tahun ke depan, dimana sebagai Pemerintah Daerah Otonom Baru, Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 sesuai berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi seluruh bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) kurun waktu 20 Tahun; rencana pembangunan jangka menengah (RPJM kurun waktu 5 Tahun; dan rencana pembangunan tahunan (RKPD) kurun waktu 1 tahunan. Sesuai pasal 5 bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

yang mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, (RPJPD kurun waktu 20 Tahun) memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah, selain itu dalam hal penyelarasan dan sinkronisasi substansi RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045 penyusunan RPJPD Provinsi Papua Selatan memperhatikan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Provinsi Papua Selatan secara umum yaitu untuk menyusun skenario pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pelaksanaan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu menyejahterakan kehidupan rakyat Papua khususnya orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara Khusus dokumen RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 disusun guna penguatan penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dengan melakukan pendekatan Top Down dan partisipasi yang dilakukan melalui forum musyawarah rencana pembangunan daerah antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan seluruh kepentingan masyarakat dalam lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Selatan guna penguatan terhadap kondisi Provinsi Papua Selatan kurun waktu 20 tahun ke depan, dengan agenda : Penajaman Visi Misi, permasalahan dan isu strategis, arah kebijakan dan sasasaran pokok daerah, dimana kondisi ini akan dijadikan sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Undang-undang 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, memuat adanya 4 kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Papua Selatan, diantaranya; Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digoel, dan Merauke. Peran 4 Kabupaten ini sangat strategis dalam RPJPD Provinsi Papua Selatan di

dalam hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam pengintegrasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai DOB guna memenuhi aspek legal dan formal untuk pemetaan peran strategis masing-masing 4 kabupaten dalam penguatan RPJPD Provinsi Papua Selatan maupun 4 Kabupaten tersebut, dengan melakukan kesepakatan bersama yang tertuang dalam dokumen perencanaan kurun waktu 20 tahun kedepan.

RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- (1) Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (2) Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (3) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Muatan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu : Penguatan penentuan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok dan IUP pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Provinsi Papua Selatan dengan kondisi pengintegrasian

simultan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022- 2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025- 2045;
26. Surat Edaran Bersama Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hubungan antara dokumen dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1.3.1 RPJPN 2025-2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 berpedoman pada RPJPN 2025-2045. Hal ini dilakukan untuk penyelarasan visi- misi, arah kebijakan serta target indikator utama pembangunan dengan RPJPN 2025-2045 guna pencapaian tujuan, sasaran Pembangunan Jangka Panjang nasional dan Daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Provinsi Papua Selatan, yang di operasonalisasikan melalui Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Selatan dalam empat periodisasi.

1.3.2 Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022-2041

Undang-undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berimplikasi pada dirumuskannya langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Papua untuk 20 tahun mendatang. Langkah-langkah strategis tersebut termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, serta peraturan turunannya yaitu Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). RIPPP adalah dokumen induk

perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk tahun 2022-2041.

Percepatan pembangunan Papua Selatan ke depan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mendukung hal tersebut, terdapat visi percepatan pembangunan Papua 2022-2041 yaitu “Terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera”.

1.3.3 RTRW Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD bagi Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Dimana sesuai penyusunan RPJPD dilakukan dengan berpedoman terhadap RTRW. Kondisi Provinsi Papua Selatan merupakan DOB telah melakukan penyusunan RTRW samapi dengan Tahapan Laporan akhir penyusunan RTRW, sehingga hal ini dilakukan pengintegrasian, penyelarasan dalam proses simultan trhadap penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Provonsi Papua Selatan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan RTRW Kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Papua Selatan, yaitu : Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJPD pada proses penyusunan RPJPD Provinsi Papua Selatan yaitu difokuskan pada : pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan ruang kawasan strategis; dan penataan ruang wilayah dokumen di bawahnya.pemanfatan ruang, menjaga keseimbangan ekologi, penentuankawasan strategis dengan memperhatikan beberapa muatan substansi dalam RTRW, meliputi :

- a) Tujuan pembangunan;
- b) Strategi penataan wilayah;
- c) Daya tampung; d)Persentase kawasan hutan;
- d) Ruang terbuka hijau;
- e) Kawasan strategis; dan
- f) Arah pemanfaatan ruang.

Adapun skenario hubungan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Nasional digambarkan dalam gambar 1.1 berikut :

Gambar 1. 1 Skenario Hubungan RPJPD dan Lap. Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Selatan Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Dokumen Tim Penyusun, 2023

1.3.4 Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009, dimana secara detail diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dengan mengutamakan inklusifitas dan memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dan diselaraskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 – 2045.

1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJPD

A. Maksud

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan arah pembangunan Provinsi Papua Selatan serta pedoman penyusunan Visi-Misi Kepala Daerah kurun waktu 20 Tahun (2025-2045) pada 4 (empat) perodesasi;
2. Sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Selatan selama 4 (empat) perodesasi;

B. Tujuan:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar pemerintah Pusat dan Provinsi Papua selatan kurun waktu 20 Tahun kedepan;
2. Terwujudnya pencapaian Pembangunan Nasional melalui kontribusi skenario pembangunan jangka panjang Daerah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang telah dituangkan dalam dokumen Jangka Panjang Provinsi Papua selatan kurun waktu 20 Tahun.

1.5 Sistematika RPJPD

Sistematika Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Papua

Selatan, yaitu:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan RPJPD Provinsi Papua Selatan 2025 - 2045.

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 8 (delapan) sub bab yaitu penerapan kebijakan otonomi khusus di tanah Papua, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Bab ini juga memuat Trend demografi dan kebutuhan sapras Provinsi Papua Selatan sampai dengan Tahun 2045 serta hasil capaian pembangunan dan rekoendasi berdasar hasil evaluasi RPJPD periode 2005 – 2025 termasuk kinerja RTRW dan rencana sectoral dalam dokumen perencanaan daerah, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Diawali dengan permasalahan pembangunan daerah, kemudian isu strategis baik di level Internasional dan nasional.

Bab IV. Visi, Sasaran Visi dan Misi Provinsi Papua Selatan

Bab ini memuat menjabarkan visi, 5 (lima) sasaran visi, dan 8 (delapan) misi pembangunan daerah. Penjabaran hal-hal tersebut dilakukan dengan masing-masing merujuk pada muatan RPJP Nasional serta menunjukkan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi. Perumusan Visi, Sasaran Visi, dan Misi Provinsi Papua Selatan telah memperhatikan otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

Bab V. Arah Kebijakan dan sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang

Bab ini memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah Tahun 2025-2045. Arah kebijakan disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun mengacu pada tahap dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik Provinsi Papua Selatan daerah. Arah kebijakan meliputi: 1). Arah Kebijakan Periode 2025-2029: Perkuatan Fondasi

Transformasi; 2). Arah Kebijakan Periode 2030-2034: Akselerasi Transformasi; 3). Arah Kebijakan Periode 2035-2039: Ekspansi Global; 4). Arah Kebijakan Periode 2040-2045: Perwujudan Indonesia Emas.

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi Papua Selatan. Sasaran pokok terbagi menjadi dua sub yaitu memuat:

- 1) Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah. Arah Pembangunan Daerah telah disesuaikan berjumlah 17 (tujuh belas) sesuai dengan koridor RPJPN;
- 2) Arah Kebijakan Transformasi menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi Provinsi Papua Selatan; 3) memuat indikator utama pembangunan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab VI. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Letak Geografis dan Administrasi

Secara administratif Provinsi Papua Selatan dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, secara geografis terletak pada garis koordinat 6° 00' LU 9° 00' LS dan 137° 30' BT- 141° 00' BT. Wilayah administrasi Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten (Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi) Luas Provinsi Papua Selatan yaitu 11.685.885,30 Hektar. Secara geografis Provinsi Papua

Selatan memiliki posisi yang strategis, berbatasan administrasi dengan wilayah di sekitarnya sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Nduga, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang
Timur : Negara Papua New Guinea
Selatan : Laut Arafura
Barat : Kabupaten Mimika dan Laut Aru

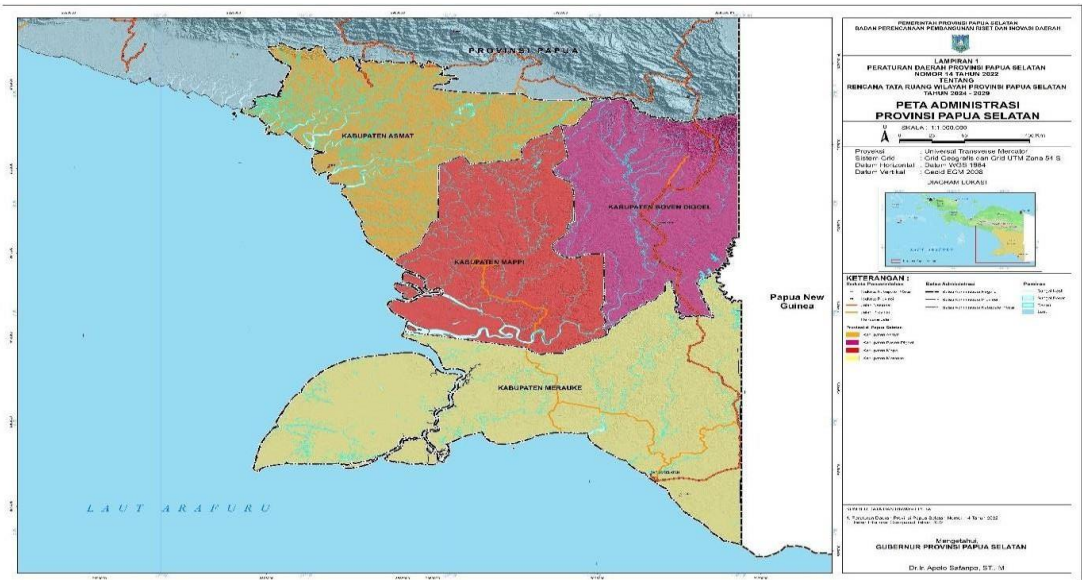
Secara administratif Provinsi Papua Selatan terdiri atas 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mappi, serta 78 Distrik, 24 Kelurahan dan 686 Kampung. Daerah yang memilih wilayah terluas adalah Kabupaten Merauke, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kabupaten Provinsi Papua Selatan Tahun

No	Kabupaten/Kota	Ibu kota	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Distrik
1	Kabupaten Asmat	Agats	2.503.984,06	113.524	25
2	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah	2.354.279,13	65.193	20
3	Kabupaten Mappi	Kepi	2.426.297,05	111.141	15
4	Kabupaten Merauke	Merauke	4.401.325,06	232.357	22

Sumber : Laporan akhir RTRW PPS Tahun 2023

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Papua Selatan



Sesuai dengan data dan informasi dalam dokumen RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, bahwa jika ditinjau dari lingkup wilayah perencanaan wilayah Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari wilayah laut dan darat dengan luar sebesar kurang lebih 14.042.039,71 hektar, dengan detail pada tabel dibawah ini

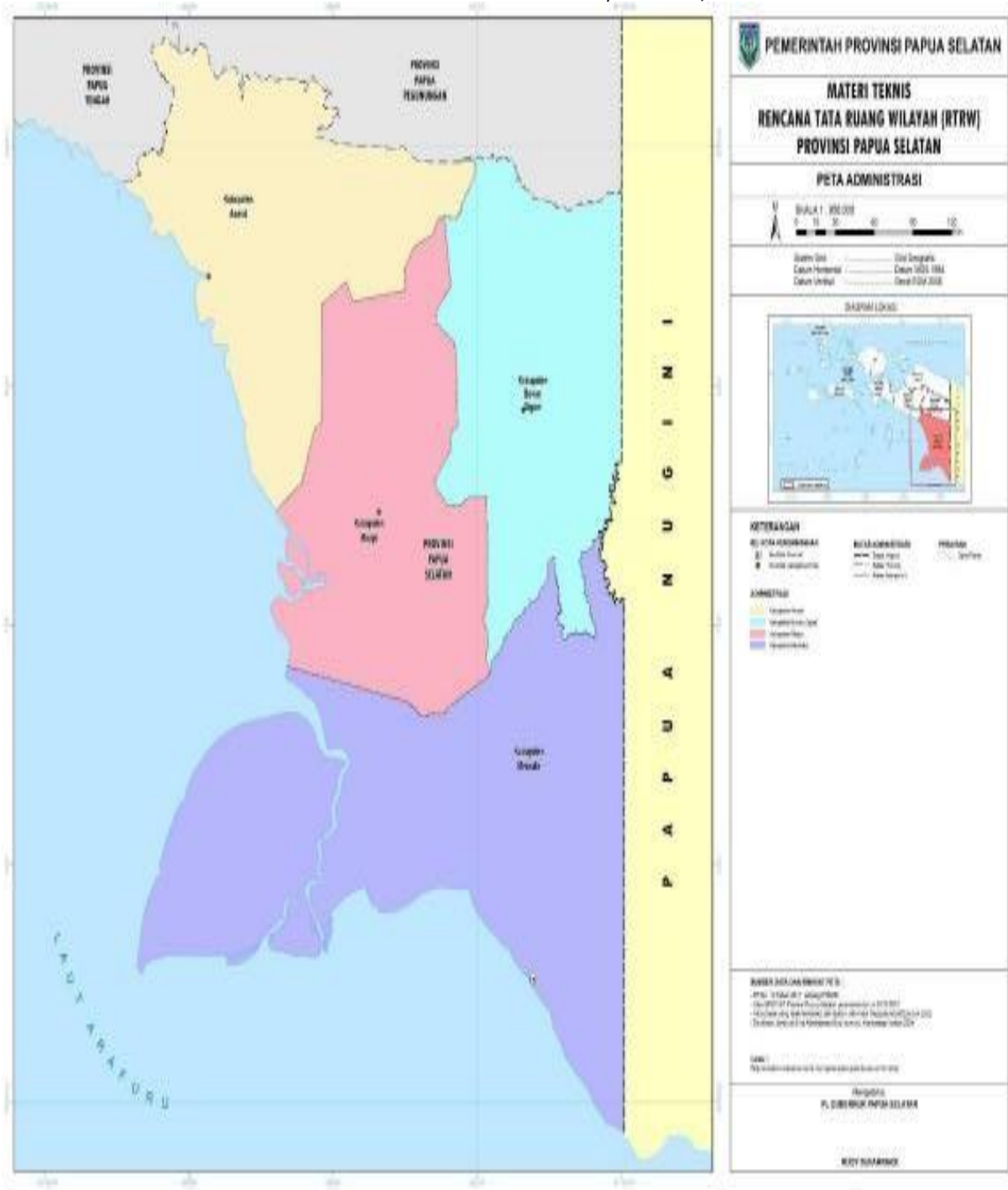
Tabel 2. 2 Luas Wilayah Kabupaten Provinsi Papua Selatan Tahun

No	Kabupaten/Kota	Ibu kota	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Distrik
1	Kabupaten Asmat	Agats	2.501.964	113.524	19
2	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah	2.355,827	65.193	20
3	Kabupaten Mappi	Kepi	2.426.050	111.141	19
4	Kabupaten Merauke	Merauke	4.502.579	232.357	20

Sumber : Laporan akhir RTRW PPS Tahun 2024

Gambar 2. 2 Peta Administrasi Provinsi Papua Selatan

Sumber : Peta dasar RTRW Provinsi Papua Selatan,2025



Kabupaten Merauke merupakan wilayah administrasi terluas di Provinsi Papua Selatan dengan proporsi 32% dan menjadi ibukota provinsi.

Ketiga kabupaten lainnya masing-masing memiliki luasan sekitar 20% dari luas wilayah provinsi. Selain daratan, Provinsi Papua Selatan memiliki wilayah lautan yang luas sebesar 2.255.620,53 Hektare atau jika dikalkulasi dalam bentuk satuan persentase memiliki besaran mencapai 16,1% (persen) serta memiliki banyak pulau-pulau kecil. Hanya kabupaten Boven

Gambar 2. 3 Persentase Wilayah Darat Dan Laut PPS Tahun 2024



Digoel yang tidak memiliki batas dengan laut.

2.1.1.2 Karakteristik Fisik Wilayah Provinsi Papua Selatan

2.1.1.2.1 Topografi dan Morfologi Wilayah

Topografi adalah gambaran tinggi dan rendahnya bentuk permukaan bumi menggunakan garis kontur elevasi. Topografi merupakan salah satu faktor fisik yang penting dalam perencanaan tata ruang wilayah pembangunan karena berpengaruh terhadap kesesuaian lahan, kemampuan lahan, bencana alam dan pembentukan tanah. Topografi Provinsi Papua Selatan didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 0-55 mdpl. Morfologi dataran rendahnya terdiri dari

dataran rendah pantai, rawa pantai dan muara Sungai yangberada di pesisir barat dan pesisir selatan. Dataran bergelombang hingga berbukit berada dibagian tengah hingga utara, dengan ketinggian mencapai 1.135 mdpl, dengan morfologi berupa kaki gunungdan lembah kecil teras dataran tinggi.

2.1.1.2.2 Kelerengan

Gambar 2. 4 Peta Ketinggian Provinsi Papua Selatan
Sumber: Laporan Akhir RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2023



Kelerengan menggambarkan perbandingan antara dimensi tinggi dengan jarak horisontal. Kelerenganmenunjukkan kemiringan lahan atau morfologi yang penting dalam mengidentifikasi arah aliran air permukaan. Secara umum, kelerengan morfologi di wilayah Provinsi Papua Selatan berarah utara ke selatan dengan besaran sudut lereng dominan kurang dari 10% di semua kabupaten. Kelerengan lebihdari 40% hanya dimiliki oleh kabupaten Asmat dan Boven Digoel, yaitu berada di sebelah utara yang merupakan batas dengan pegunungan Tengah Papua. Hasil perhitungan kelerengan di Provinsi PapuaSelatan, Lihat tabel berikut ini:

Tabel 2. 3 Kelerengan per kabupaten

Kelerengan	Kab. Asmat	Kab. BovenDigoel	Kab. Mappi	Kab. Merauke	Grand Total
>= 40%	33.151	239.988			273.139
15 - 40%	4.957	1.407.376	4.644	4.332	1.421.308
8 - 15%	542	285.720	786.559	211.662	1.284.483
0 - 8 %	2.465.335	421.195	1.635.094	4.285.331	8.806.955
Jumlah	2.503.984	2.354.279	2.426.297	4.501.325	11.785.885

Sumber: KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

2.1.1.2.3 Jenis Tanah

Tanah merupakan tubuh alam yang terbentuk sebagai hasil proses

pelapukan batuan yang berfungsi sebagai tempat hidup tumbuhan. Faktor pembentuk tanah yang dimaksud adalah bahan induk, iklim, topografi, organisme dan waktu. Faktor pembentuk tanah tersebut mempengaruhi perkembangan tanah. Jenis tanah bervariasi, demikian juga produktivitas dalam pemanfaatannya. Penentuan jenis tanah menggunakan Klasifikasi Tanah Nasional yang digolongkan berdasarkan pendekatan morfologi. Perkembangan morfologi tanah. Jenis tanah di wilayah Provinsi Papua Selatan teridentifikasi didominasi tanah mineral dan menyebar tanah gambut. Jenis tanah yang ditemui berupa Aluvial Tonik, Fluvisol Eutrik, Kambisol Distrik, Kambisol Humik, Oksisol Eutrik dan Podsolik Plintik (Tabel 2.4). Sebaran tanah terluas berupa Oksisol yaitu jenis tanah marginal yang sudah mengalami pelapukan lanjut (dengan perkembangan) dan berusia tua, serta memiliki faktor pembatas, seperti rendahnya tingkat kesuburan alami yang disebabkan karena kandungan bahan organik yang sedikit, kelarutan mineral besi dan aluminium yang tinggi, pH yang cukup masam, serta keadaan fiksasi fosfor dan rendahnya kapasitas pertukaran kation. Jenis tanah alluvial merupakan tanah mineral yang tidak menunjukkan perkembangan dan jenis tanah fluvial dipengaruhi oleh keadaan aliran air permukaan seperti Sungai. Sedangkan, tanah gambut ditunjukkan oleh jenis tanah organosol yang biasa ditemukan di sekitar rawa-rawa dan antara sungai-sungai besar. Karakter masing-masing jenis tanah ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Jenis Tanah mineral per kabupaten

Jenis Tanah	Kab. Asmat	Kab. Boven Digoel	Kab. Mappi	Kab. Merauke	Jumlah
Aluvial Tonik	18.670	1.582.647	316.594	303.754	2.421.664
Fluvisol Eutrik	333.947	656.308	1.203.838	523.191	2.717.284
Kambisol Distrik		33.454			33.454
Kambisol Humik	41.403	8.715			50.118
Oksisol Eutrik	1.909.964	73.155	729.735	2.576.429	5.289.283
Podsolik Plintik			176.131	1.097.951	1.274.082
Jumlah	2.503.984	2.354.279	2.426.297	4.501.325	11.785.885

Sumber: KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

Tabel 2. 5 Jenis dan karakteristik tanah di Provinsi Papua Selatan

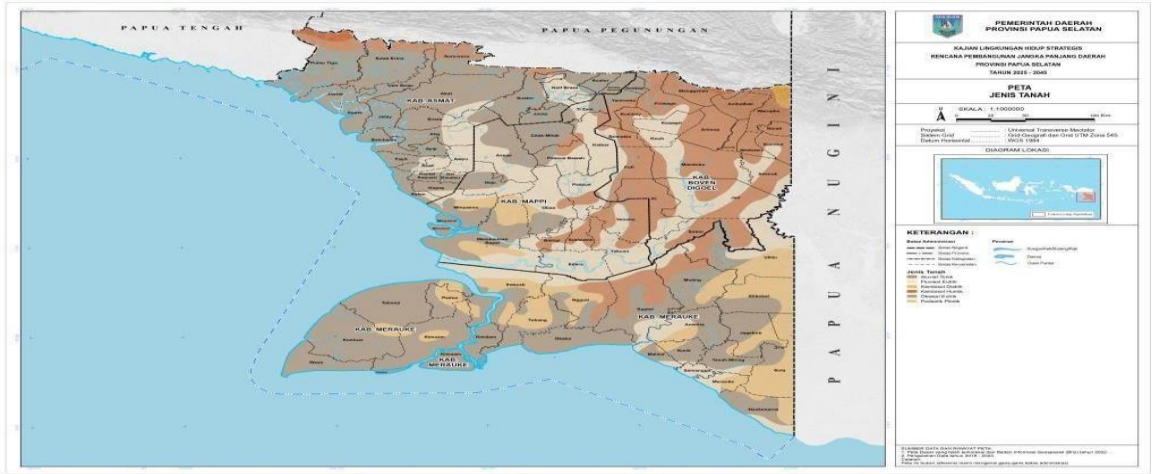
Jenis Tanah			
No	Jenis	Karakteristik	Lokasi

1	Orgonosol	- Sifat sangat peka terhadap erosi memiliki tekstur yang lembek karena tergenang air - Terbentuk dari proses pelapukan dan pembusukan organik - Biasa dijumpai di rawa-rawa	Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat
2	Alluvial	- Warna kelabu, coklat, hitam - Tersebar didataran rendah dan cekun - Baik jika digunakan untuk tanah pertanian Tidak pekaterhadap ero	Merauke, Mappi
3	Hidromorf (oksisol) kelabu	- Terbentuk akibat dari pelapukan batuan sedimen masamyan sering tergenang air vulkanik asam dan batu pasir. - Ditemui di wilayah dataran rendah dengan curah hujan lebih dari 2.00 milimeter per tahun - Memiliki produktivitas rendah sampai sedang.	Merauke, Mappi
4	Lithosol (Oksisol)	- Sangat peka terhadap eosi - Biasanya tanah pertanian kurang baik atau padang rumput - Terebar di daerah berombak	Mappi, Asmat
5	Padsolik	- Berwarna kuning sampai merah - Sifat masam dan peka terhadap erosi - Tersebar didarah bukit sampai gunung - Sebagiaian diupayakan untuk tanah pertanian, hutan dan perkebunan - Berupa ilalang	Mappi, Boven Digoel, Asmat
6	Gleisol	Terdapat di daerah dataran rendah atau cekungan, yang hamp selalu tergenang air, solum tanah sedang, warna kelabu hingg kekuningan, tekstur geluh hingga lempung, struktur berlumpur hingg masif, konsistensi lekat, bersifat	Boven Digoel

		asam pH 4.5 - 6.0, dan bahan organik.	
7	Regosol	Terdapat di daerah dataran rendah atau cekungan, yang hamp selalu tergenang air, solum tanah sedang, warna kelabu hingga kekuningan, tekstur geluh hingga lempung	Boven Digoel, Asmat

Sumber: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSLDP)

Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Provinsi Papua Selatan

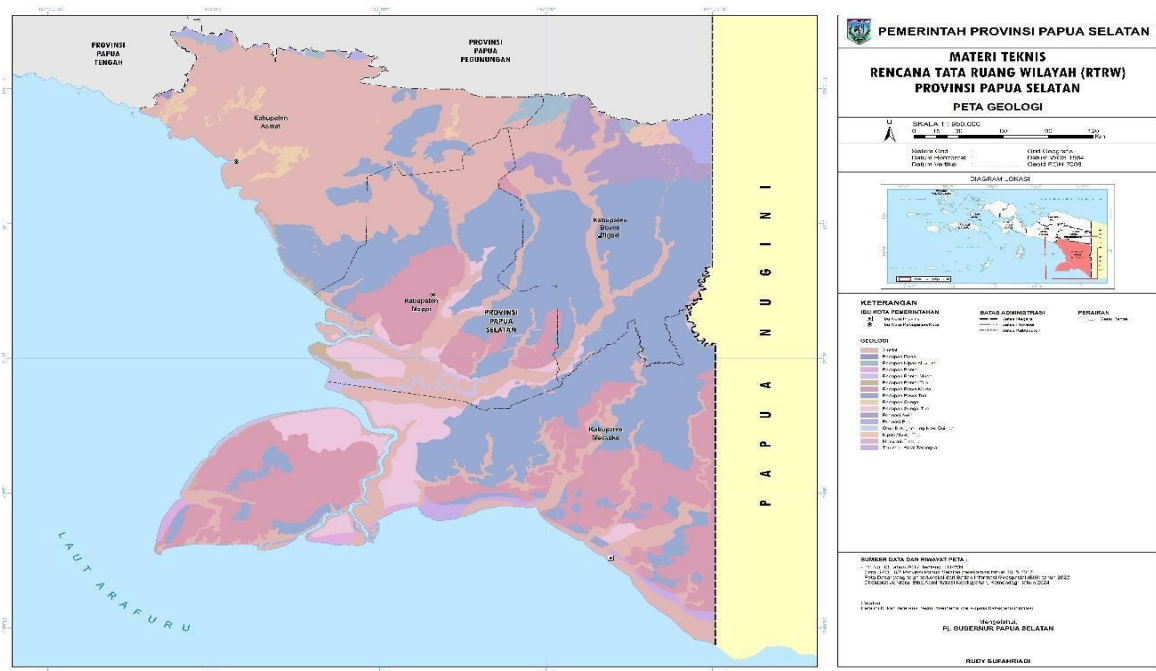


2.1.1.2.4 Geologi

Provinsi Papua Selatan dibentuk oleh hutan sedimen, tergolong endapan aluvium, di utara pasir Kwarsa dan batu apung. Berdasarkan data tingkat kesuburan tanah tergolong rendah sampai sedang. Bahan tambang/mineral yang diduga ada minyak dan emas. Struktur geologi yang berkembang di daerah Papua Selatan adalah sesar naik dan sesar geser. Formasi geologi di Papua Selatan terdiri dari alluvial, batuan sedimen tersier, batu gamping tersier, endapan teras Sungai, kipas non vulkanik (aliran debris), kipas sedimen vulkanik (aliran lahar), rawa gambut, rawa mangrove, dan terumbu karang yang terangkat. Terdapat 3 aspek terkait Karakteristik geologi, yaitu materi, proses, dan waktu. Aspek materi membahas komponen penyusun bumi, yaitu tanah, batuan, mineral, dan air. Aspek proses yaitu proses-proses dinamis yang terjadi di permukaan maupun di bawah permukaan bumi. Aspek waktu, membahas peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang, komponen geologi merupakan komponen lingkungan fisik yang dapat bersifat sebagai faktor pendukung (potensi) pengembangan wilayah, berupa sumber daya geologi yang terkandung di dalam tanah, serta sebagai faktor penghambat (kendala) pengembangan wilayah, berupa aspek kebencanaan. Seperti telah diketahui, bahwa setiap wilayah memiliki kondisi geologi yang berbeda, akibatnya potensi dan kendala yang dimiliki juga berbeda pula.

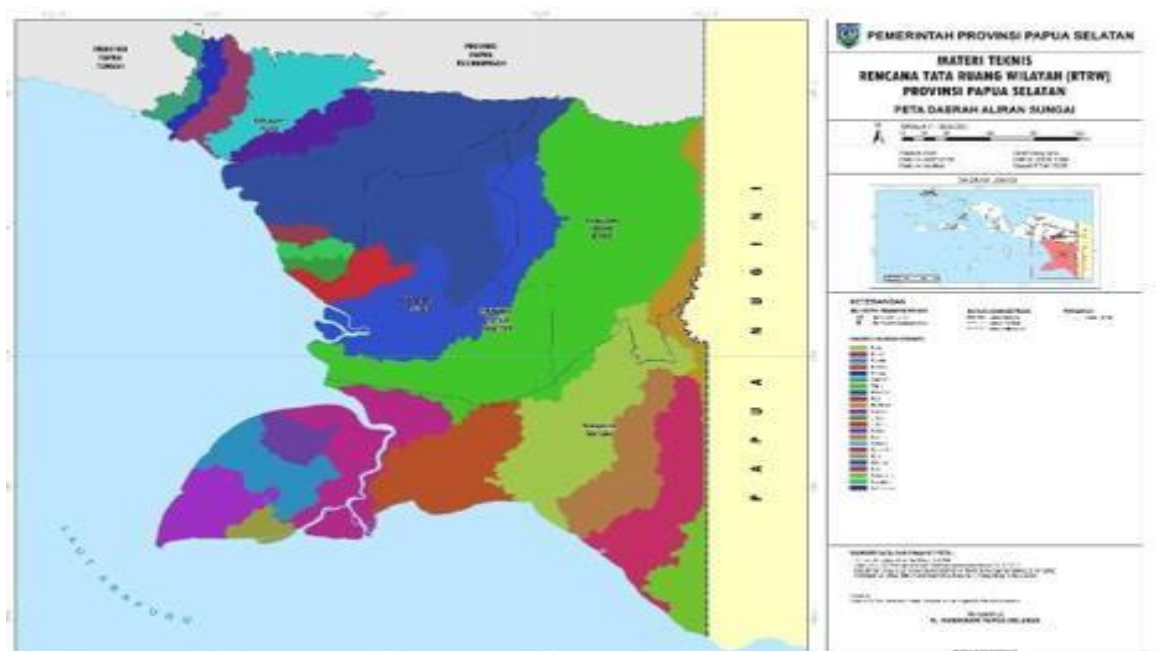
Secara umum geologi di Papua dikendalikan oleh interaksi lempeng benua dan samudera, akibatnya wilayah di Papua dapat dibedakan menjadi 3 mandala geologi, yaitu benua (di sebelah selatan), samudera (di sebelah utara) dan transisi (di bagian tengah). Setiap mandala geologi tersebut memiliki karakteristik masing-masing menurut stratigrafi, proses magmatic, dan sejarah tektoniknya. Mandala benua terdiri dari endapan yang merupakan bagian dari benua Australia. Mandala samudera terdiri dari batuan ofiolit dan busur kepulauan vulkanik kompleks yang merupakan bagian dari Samudera Pasifik. Mandala transisi adalah zona yang terdiri dari deformasi lanjut dari batuan metamorfik regional, sebagai produk interaksi antara 2 lempeng. Susunan batuan di wilayah Papua Selatan secara detail dan dideskripsikan secara baik oleh Dow dkk (1988) dalam laporan tertulis

Gambar 2. 6 Peta Geologi Provinsi Papua Selatan



Provinsi Papua Selatan memiliki banyak sungai besar maupun kecil yang merupakan potensi sumber air baku, baik untuk pengairan maupun sebagai prasarana angkutan antara kecamatan dan desa-desa. sungai besar antara lain Sungai Bian, Digul, Maro, Mapi, dan Wildeman. Sungai tersebut merupakan potensi sumber air tawar untuk pengairan dan digunakan sebagai prasarana angkutan antara kecamatan dan desa-desa.

Gambar 2. 7 Peta Daerah Aliran Sungai



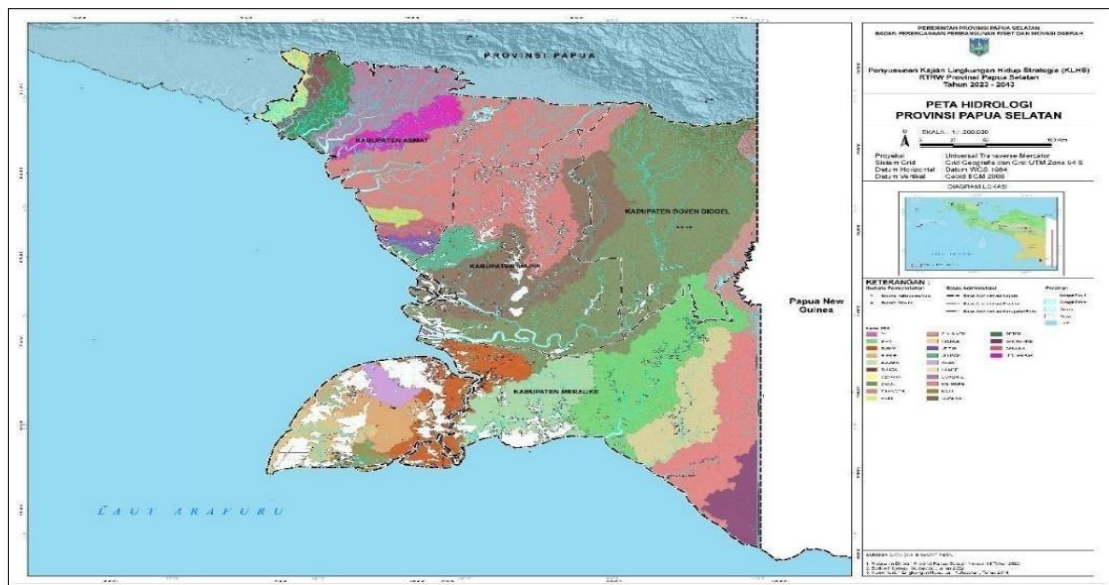
Adapun Sumber air tawar dari rawa – rawa, air permukaan dan air tanah cukup tersedia untuk dimanfaatkan. Dibeberapa tempat air tanah mengandung belerang panas. Sungai juga membentuk batas negara Indonesia dengan Papua Nugini. Perbatasan Indonesia dan Papua Nugini berbentuk garis lurus kecuali sebagian kecil Sungai Fly di Papua Nugini yang menjorok ke arah Indonesia. Sungai Bensbach juga mengalir di Papua Nugini namun wilayah muaranya atau disebut Muara Torasi di Kampung Kondo dikenal sebagai titik ujung timur Indonesia. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan (PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Berikut daerah aliran sungai di Papua Selatan.

Tabel 2. 6 Luas dan Persentase Daerah Aliran Sungai di Provinsi Papua Selatan

Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase %
Bulaka	0,58	0,0000
Biam	950027,41	8,1166
Buede	338692,30	2,8936
Bunga	102272,19	0,8738
Cemara	105130,34	0,8982
Digul	2529200,80	21,6084
Sakiramke	225704,78	1,9283
Sanuna	68652,32	0,5865
Eilanden	2065926,57	17,6504
Lorentz	478308,31	4,0865
Muli	85353,95	0,7292
Juliana	183770,60	1,5701
Imence	307571,87	2,6278
Jeitja	62220,60	0,5316
Kumba	466304,94	3,9839
Fly River	195346,30	1,6690
Fly River	48464,68	0,4141
Fly River	1280,50	0,0109
Fly River	512,75	0,0044
Utumbuwe	239205,60	2,0437
Merauke	604724,45	5,1665
Bulaka	608294,05	5,1970
Odamun	1015347,34	8,6747
Peter	193016,41	1,6490
Kaba	145710,19	1,2449
Buaya	622591,56	5,3191
Fajit	57759,89	0,4935
Fly River	379,19	0,0032
Total	11704727,09	100,0

Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG) 2022

Gambar 2. 8 Sumber: KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun



Sumber: KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

Danau adalah sebuah cekungan air alami yang terisi air dan terletak di permukaan bumi. Danau bisa berupa badan air tawar atau air asin, tergantung pada sumber air yang mengisi danau tersebut. Danau-danau di Papua Selatan, yang merupakan bagian dari Indonesia, terbentuk melalui berbagai proses geologis dan geomorfologis. Papua Selatan adalah wilayah yang beragam secara geografis dan memiliki topografi yang kompleks, dengan pegunungan, dataran rendah, dan hutan hujan tropis yang luas. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembentukan danau di Papua Selatan meliputi:

- Tektonik Lempeng
- Aktivitas Vulkanik
- Erosi dan Sedimentasi
- Hujan yang Melimpah
- Aktivitas Glasial

Danau memiliki peran penting dalam ekologi dan ekosistem, karena sering menjadi habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup, termasuk ikan, burung, tumbuhan air, dan makhluk lainnya. Selain itu, banyak danau juga digunakan untuk berbagai keperluan manusia, seperti pasokan air minum, pertanian, perikanan, pariwisata, dan kegiatan rekreasi. Beberapa danau yang terletak di Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut:

- Asmat: Atoerpura, Imyan, Sekampung, Langgara, Kasuari
- Merauke: Rombebai, Sota, Tigi, Dakwa, Tabar, Modo
- Mappi: Apo, Anggim, Hainam, Andey, Baho

2.1.1.2.6 Lahan Bergambut

Wilayah gambut memiliki karakteristik khas, terutama terkait dengan fungsi pelestarian sumberdaya air, peredam banjir, pencegah intrusi air laut, pendukung berbagai kehidupan keanekaragaman hayati, dan pengendali iklim (melalui kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon). Gambut mempunyai kemampuan sangat besar dalam menyerap dan mengikat air. Besarnya kemampuan ini secara langsung berhubungan dengan ukuran pori, jumlah ruang pori dan permeabilitas yang keseluruhan berkaitan dengan bobot isi (bulk density) dan kandungan serat yang pada umumnya dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi bahan organik. Kebanyakan tanah gambut akan menyusut (shrinkage) bila kering. Gambut dengan Tingkat kematangan saprik yang dikeringkan sampai pada suhu 105°C dapat menyusut sampai 75% atau lebih tergantung pada jumlah mineral liatnya. Penyusutan tidak balik ditentukan oleh dekomposisi dan komposisi bahan organik.

Gambut di Indonesia termasuk gambut di Papua sebagian besar adalah gambut ombrogen (miskin hara-oligotrofik), umumnya terdapat pada daerah cekungan, sehingga masukan hara hanya dari air hujan. Ketersediaan hara essential sangat rendah terutama N, P, K, Ca, Zn, Cu dan Si dan nilai pH dalam kisaran 3-4. Ketersediaan hara dan nilai pH tersebut semakin menurun dengan meningkatnya ketebalan gambut. Untuk tanah gambut di Papua, pembentuk tanah gambut sangat dipengaruhi oleh tumbuhan sagu, semak belukar dan glagah dan alang-alang, sehingga disinyalir berat jenis (Bulk Density-BD) tanahnya lebih rendah dari tanah gambut di daerah lainnya. Karena kandungan sulfida yang tinggi dan tergenang air, maka proses dekomposisi terhambat, sehingga terjadi penumpukan serasah, dan secara perlahan-lahan terjadilah akumulasi bahan organik yang akhirnya membentuk endapan gambut dengan ketebalan yang bervariasi tergantung keadaan topografi tanah mineral di bawah tanah gambut.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Gambut Nasional, Provinsi Papua Selatan memiliki 81 indikatif Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan luas 2.641.488,79 ha, yang dipetakan dengan skala 1 : 250.000 dan tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten

Boven Digoel,
Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. 81 KHG tersebut, telah ditetapkan sebanyak 24 KHG berdasarkan SK Nomor: SK.270/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2022 dengan skala 1 : 50.000 dengan luas sebesar 1.211.832,34 Ha. Berikut adalah luasan Kesatuan Hidrologis Gabut (KHG) di Provinsi Papua Selatan

Tabel 2. 7 Luas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Papua Selatan

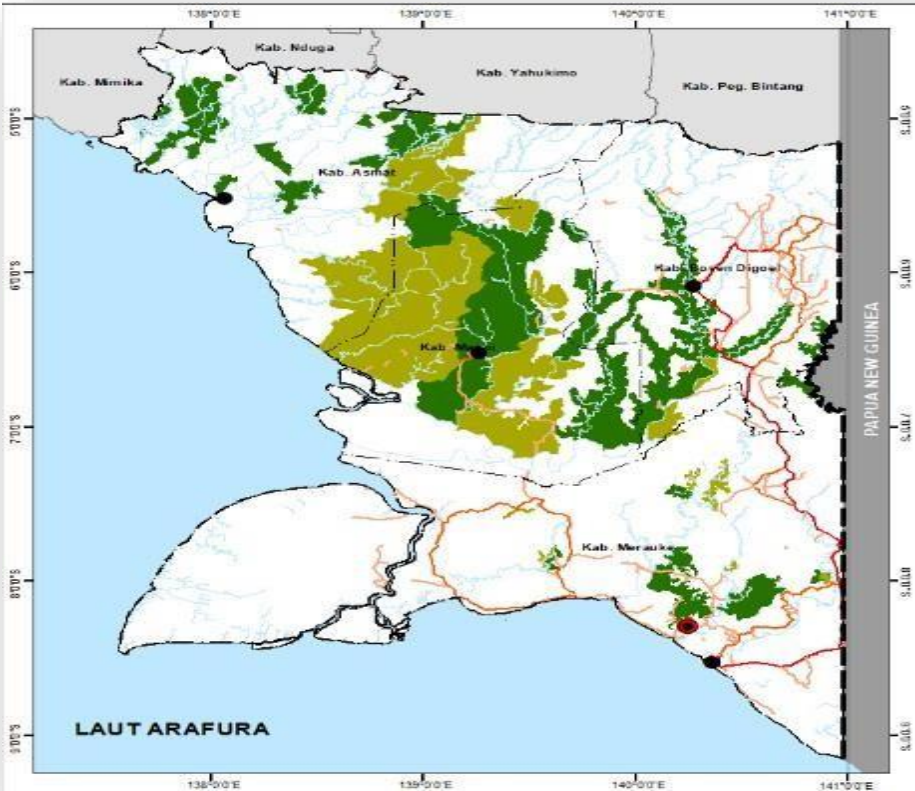
No	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	SK 130 Tahun 2017 (Skala 1 : 250.000)	SK 270 Tahun 2022 (Skala 1 : 50.000)
1	KHG Sungai Aleki Eli - Sungai Aleki Mafe	2.918,66	2.918,66
2	KHG Sungai Aleki Male - Sungai Ifuleki Bian	3.944,49	3.944,49
3	KHG Sungai Alekikos Bakian - Sungai Ifuleki Bian	2.095,76	2.095,76
4	KHG Sungai Alekikos Kauh - Sungai Ifuleki Mati	17.017,68	
5	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Udi Lebah	53.469,42	
6	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Aleki Seme	25.130,75	25.130,75
7	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Bagon	9.141,40	9.145,57
8	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Kauh	71.618,53	
9	KHG Sungai Alekikosi Kaswari - Sungai Alekikosi Digoel	2.472,67	2.472,67
10	KHG Sungai Alekikosi Sia - Sungai Alekikosi Digoel	19.597,91	
11	KHG Sungai Alekikosi Soap - Sungai Alekikosi Seghab	6.264,17	
12	KHG Sungai Alekikosi Yang - Sungai Alekikosi Digoel	49.899,81	
13	KHG Sungai Alekokosi Kaswari - Sungai Alekikosi Dawe	723,27	

14	KHG Sungai Alik Alo - Sungai Alik Mauwk Ere	2.469,48	2.469,48
15	KHG Sungai Bob Buraka - Sungai Aleki Buraka	2.671,70	2.671,70
16	KHG Sungai Bobburaka - Sungai Alik Anaw	5.197,91	
17	KHG Sungai Buru Bagaram	2.972,67	2.972,67
18	KHG Sungai Buru Bayeni - Sungai Buru Mappi	3.482,27	
19	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Buru Obaa	397.920,29	
20	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Mangguno	2.968,89	
21	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Siakha Homo	11.051,98	11.051,98
22	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Udi Afu	5.310,82	
23	KHG Sungai Buru Mappi I	14.329,74	14.329,74
24	KHG Sungai Buru Mappi II	184,45	
25	KHG Sungai Buru Miyaman - Sungai Buru Mappi	28.609,27	
26	KHG Sungai Buru Obaa - Sungai Buru Mappi	97.473,03	97.473,03
27	KHG Sungai Ifileki Bian - Sungai Lekiage Sentuf	6.830,57	6.830,57
28	KHG Sungai Ifuleki Berapto - Sungai Ifuleki Obat	1.806,35	1.806,36
29	KHG Sungai Ifuleki Bian - Sungai Dalik	1.396,24	1.396,24
30	KHG Sungai Ifuleki Kumbe - Sungai Lekiage Ser	2.413,93	2.412,32
31	KHG Sungai Ifuleki Kumbe - Sungai Lekiasi	51.620,82	
32	KHG Sungai Ifuleki Obathrow - Sungai Ifuleki Berapto	2.960,67	
33	KHG Sungai Ifuleki Onam - Sungai Fly	11.718,97	
34	KHG Sungai Ifuleki Onam - Sungai Lekiage Wagini	264,19	
35	KHG Sungai Ivo - Sungai Fly	5.758,85	
36	KHG Sungai Jaman Kawarga - Sungai Samaleki Digul	116.067,25	116.067,27
37	KHG Sungai Jo Dairam	39.385,06	39.385,08
38	KHG Sungai Jo Vriendschaps - Sungai Jo Siret	133.427,74	133.427,74
39	KHG Sungai Ju Siret- Sungai Wade Assue	37.624,80	37.624,81
40	KHG Sungai Juk Afe - Sungai Juk Aswet	6.611,63	
41	KHG Sungai Juk Asor - Juk Epas	1.803,39	
42	KHG Sungai Juk Bafut - Sungai Juk Yisun	1.678,47	
43	KHG Sungai Juk Binijau - Sungai Juk Ba	9.510,98	
44	KHG Sungai Juk Jats - Sungai Juk Bafut	22.580,04	
45	KHG Sungai Juk Jats - Sungai Juk Momats	8.828,53	
46	KHG Sungai Juk Katarina - Sungai Jo Vriendschaps	31.255,52	
47	KHG Sungai Juk Katarina - Sungai Juk Asor	6.200,76	
48	KHG Sungai Juk Mamats - Juk Jats	21.821,94	
49	KHG Sungai Juk Mawar - Sungai Juk Fai	6.014,36	
50	KHG Sungai Juk Pai - Sungai Juk Bininjai	7.530,90	
51	KHG Sungai Juk Pai - Sungai Juk Senajuh	15.193,59	
52	KHG Sungai Juk Patatmini	222,69	
53	KHG Sungai Juk Patatmini - Sungai Juk Orotok	807,64	
54	KHG Sungai Juk Pek - Sungai Juk Aswet	4.728,07	
55	KHG Sungai Juk Poet - Sungai Blumen	7.017,42	
56	KHG Sungai Juk Poet - Sungai Juk Jats	12.306,64	
57	KHG Sungai Juk Pomats - Sungai Juk Binijau	3.800,19	
58	KHG Sungai Juk Serep - Sungai Juk Semen	22.637,38	
59	KHG Sungai Juk Tere - Sungai Juk Katarina	6.308,56	
60	KHG Sungai Juk Tojoh - Sungai Jo Vriendschaps	6.099,79	
61	KHG Sungai Juk Unir - Sungai Juk Aswet	2.798,22	
62	KHG Sungai Juk Unir/Kali Wosak - Sungai	16.928,81	

	Utumbuwe		
63	KHG Sungai Juk Wab - Sungai Jub Orotok	4.254,52	
64	KHG Sungai Juk Wab - Sungai Juk Patatmini	394,04	
65	KHG Sungai Juk Yapi - Sungai Juk Katarina	6.624,51	
66	KHG Sungai Kanggu - Sungai Fly	5.805,20	
67	KHG Sungai Keeme - Sungai Bayeni	27.013,77	27.013,78
68	KHG Sungai Kuis - Sungai Bapai	608.655,55	608.655,58
69	KHG Sungai Kumbe - Sungai Bian	57.088,62	
70	KHG Sungai Mappi - Sungai Edera	11.804,97	
71	KHG Sungai Momatsi - Sungai Juk Fase	24.677,57	
72	KHG Sungai Muyu	420,5	
73	KHG Sungai Torpedoboot - Sungai Kasteel Timur	932,47	
74	KHG Sungai Udi Aifo - Sungai Buru Mappi	9.171,50	
75	KHG Sungai Udi Edera - Sungai Samaleki Digul	194.858,09	
76	KHG Sungai Utumbuwe - Sungai Dumas	3.686,14	
77	KHG Sungai Utumbuwe - Sungai Sor	28.605,58	
78	KHG Sungai Wade Kowo - Sungai Buru Bayeni	16.715,59	
79	KHG Sungai Wade Nanu - Sungai Wade Assue	57.620,17	57.620,16
80	KHG Sungai Wade Passue	2.915,93	2.915,93
81	KHG Sungai Wade Passue - Sungai Jo Dairam	107.346,09	
TOTAL		2.641.488,79	1.211.832,34

Sumber : Laporan Akhir RTRW PPS Tahun 2023 (SK 130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 dan SK.270/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2022).

Gambar 2. 9 Sebaran Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Papua Selatan



Sumber : Laporan Akhir RTRW PPS Tahun 2024

Fungsi yang sangat penting dalam menjaga kestabilan daya dukung lingkunganmenjadikan keberadaan lahan gambut sangat penting untuk dipertahankan. Dari total lahan bergambut di Provinsi Papua Selatan, luas terbesar berada di Kabupaten Mappi (47.46%) dan Kabupaten Asmat (29,29%). Berikut data Lahan gambut dan sebaran gambut berdasarkan kedalaman yang ada di setiap kabupaten di provinsi Papua Selatan.

Tabel 2. 8 Kedalaman gambut di Provinsi Papua Selatan Berdasarkan Kabupaten

No	Kabupaten	Kedalaman Gambut				Total
		(>200cm)	(51-75cm) (75-200)	(51-75cm)	(11-25cm)	
1	Merauke	-	21,582.40	152,773.82	-	152,773.82
2	Boven Digoel	-	12,779.37	12,883.12	-	12,883.12
3	Mappi	43,586.50	22,079.19	30,356.48	-	30,356.48
4	Asmat	1,003,021.71	-	294,219.30	-	294,219.30

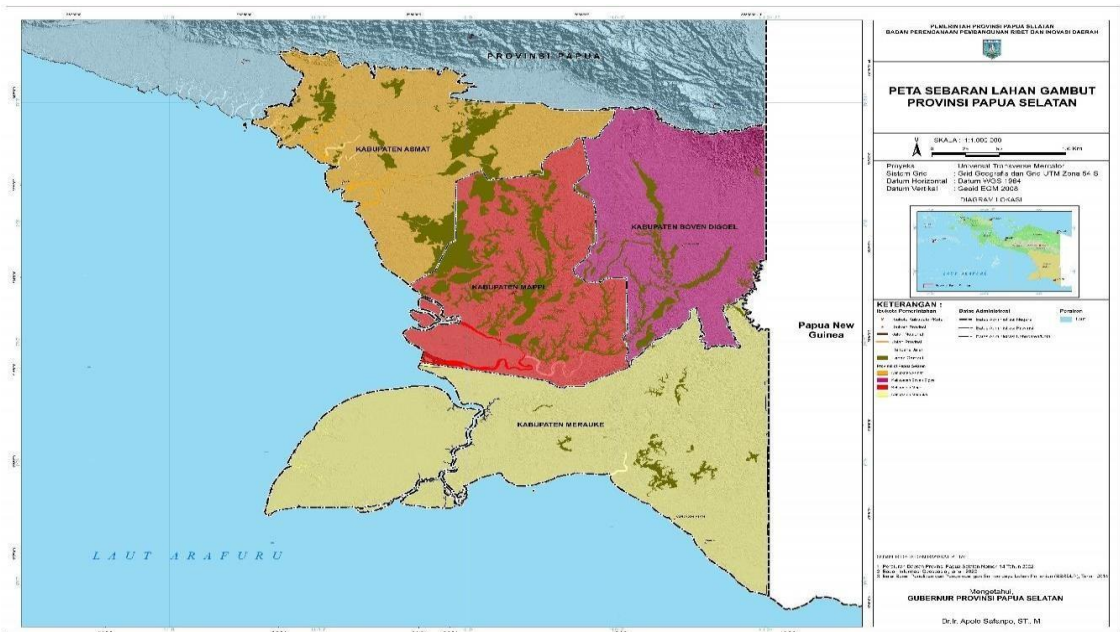
Sumber : **Sumber: Hasil perhitungan GIS 2023** (Laporan Akhir RTRW PPS tahun 2024)

Tabel 2. 9 Sebaran Gambut di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	Luas (ha)
Kabupaten Asmat	323.888,38
Kabupaten Boven Digoel	174.772,13
Kabupaten Mappi	524.850,98
Kabupaten Merauke	82.410,67
Provinsi Papua Selatan	1.105.913,16

Sumber : Laporan Akhir RTRW PPS 2024

Gambar 2. 10 Peta Sebaran Lahan Gambut Provinsi Papua Selatan



2.1.1.2.7 **Klimatologi**

Sebagian besar komposisi wilayah Provinsi Papua Selatan merupakan dataran rendah menyebabkan sering terjadinya bencana banjir maupun longsor. Tiga ancaman besar dari perubahan iklim terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil di papua antara lain dengan Tiga ancaman perubahan iklim khususnya di Papua Selatan adalah :

- a. Naiknya permukaan air laut,
- b. Perubahan temperature dan penguapan akibat pemanasan global,
- c. Perubahan pada kerusakan lainnya seperti gelombang dan pasang.

Hal ini menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah sebagai bentuk penanganan bencana. Berikut iklim yang terjadi di Papua Selatan yang dilakukan oleh Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua. Umumnya jumlah hari hujan dan curah hujan di Provisi Papua Selatan tinggi hingga sangat tinggi. Data curah hujan selama 5 tahun terakhir menunjukan nilai yang hampir seragam dan tersebar merata di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Dengan jenis tipe ketinggian yang juga hampir seragam, membuat tingkat suhu terendah dan tertinggi diwilayah administrasi Papua Selatan relatif seragam.

Tabel 2. 10 Pengamatan Unsur Iklim di stasiun Pengamatan Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Papua

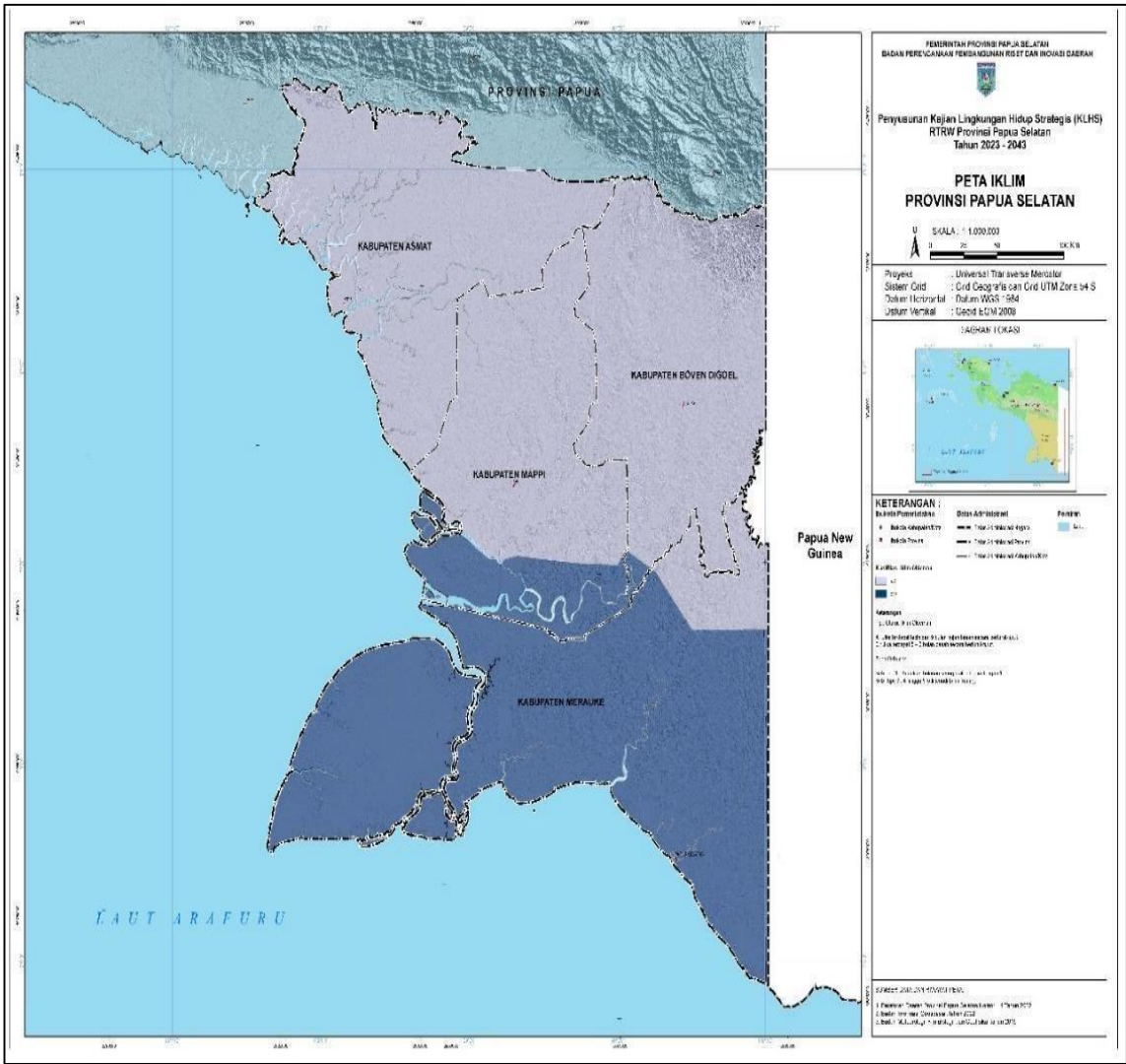
Jenis Suhu	Tahun		
	2020	2021	2022
Suhu/ Temperature (°C) Minimum Rata – rata Maksimum	21,20	21,30	22,60
	27,90	27,50	27,03
	36,70	36,60	35,00
Kelembapan Minimum Rata – rata Maksimum	38,00	38,00	45,00
	75,00	75,80	77,74
	98,00	96,00	93,00
Kecepatan Angin Minimum Rata – rata Maksimum	calm ²	calm ²	0,00
	2,06	3,50	4,06
	11,31	31,00	24,00
Tekanan Udara Minimum Rata – rata Maksimum	955,70	988,50	991,20
	999,00	998,70	997,04
	1022,40	1012,90	1002,60
Jumlah Curah Hujan	1501,00	2028,30	217,40
Jumlah Hari Hujan	217,00	221,00	25,00
Penyinaran Matahari	70,00	5,20	2,45

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023, BPS

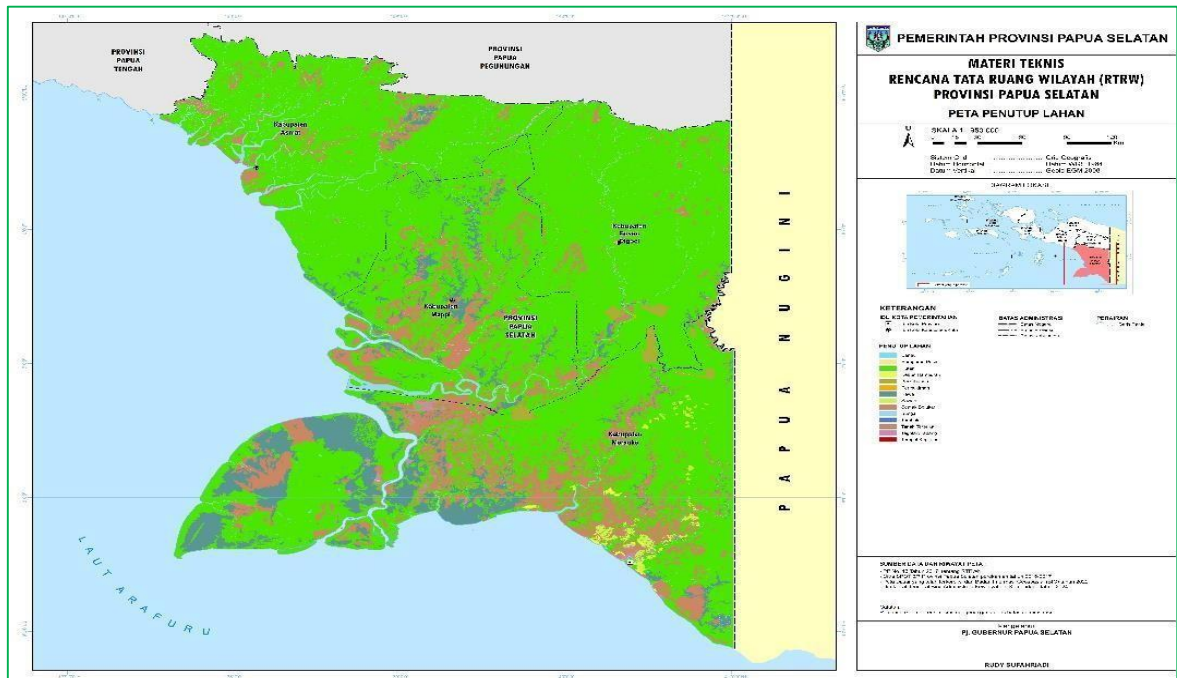
Provinsi Papua Selatan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, jumlah curah hujanselama setahun mencapai 1500 – 4500 mm. Jumlah curah hujan terbesar (3.500-4.500 mm/tahun) terdapat di Kabupaten Boven Digul dan Mappi, serta sedikit dibagian barat laut Kabupaten Asmat.

Berdasarkan data curah hujan tahun 2022, Kabupaten Boven Digul memiliki bulan basah (curah hujan bulanan >200mm) terbanyak hingga sebelas bulan. Sedangkanyang paling sedikit bulan basahnya adalah Kabupaten Merauke dengan 6 (enam) bulan basah. Banyaknya jumlah bulan basah berturut- turut digunakan untuk membuat klasifikasi iklim oldeman, untuk Provinsi Papua Selatan klasifikasi iklimnya dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 2. 11 Peta Iklim Provinsi Papua Selatan



Gambar 2. 12 Peta penutupan lahan di Provinsi Papua Selatan



Sumber: KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

2.1.1.2.8 Bentang Alam

Informasi bentang alam merupakan bagian dari ekoregion. Karakteristik bentang alam dipahami sebagai keadaan bentangan permukaan bumi yang di dalamnya terjadi hubungan saling terkait dan saling kebergantungan antar berbagai komponen lingkungan, seperti udara, air, batuan, tanah serta flora dan fauna yang saling mempengaruhi keberlangsungan kehidupan manusia yang tinggal di dalamnya. Fisiografi “badan burung” Papua terbagi atas 5 tipe bentang alam, yaitu a) Dataran Gambut yang melampar dari Kokonao hingga Digoel, b) Dataran Pantai Selatan, c) Pegunungan Struktural JalurJayawijaya (Pegunungan Tengah Papua), d) Perbukitan Karts Papua yang melampar secara tidak merata hamper di seluruh pulau Papua, dan e) Perbukitan Structural Jalur Jayawijaya merupakan bagian dari lereng pegunungan Tengah Papua.

Provinsi Papua Selatan berada pada bentang alam Dataran Pantai Selatan dan Dataran Gambut, terdiri atas morfologi dataran dengan kemiringan sebagian besar <10% dan ketinggian antara 0 –50m dpl, serta ditempati oleh Vegetasi hutan pamah. Bentang alam dataran Pantai dan rawa gambut mempengaruhi karakteristik suku dan budaya di Papua Selatan berkaitan dengan makanan pokok berupa sagu dan ikan air tawar dari Sungai, serta kehidupan sehari-hari memanfaatkan Sungai sebagai sarana transportasi.

Tabel 2. 11 Bentang alam dari fisiografi Papua

Bentang Alam	Kab. Asmat	Kab. Boven Digoel	Kab. Mappi	Kab. Merauke	Jumlah
Dataran Gambut Kokonao - Digul	315.473	150.222	546.467	72.675	1.084.837
Dataran Pantai Selatan Papua	2.140.097	1.960.623	1.879.830	4.428.650	10.409.200
Pegunungan Struktural Jalur Jayawijaya		129.102			129.102
Perbukitan Karst Papua		149			149
Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya	48.414	114.183			162.597
Jumlah	2.503.984	2.354.279	2.426.297	4.501.325	11.785.885

Sumber: KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

2.1.1.2.9 Vegetasi

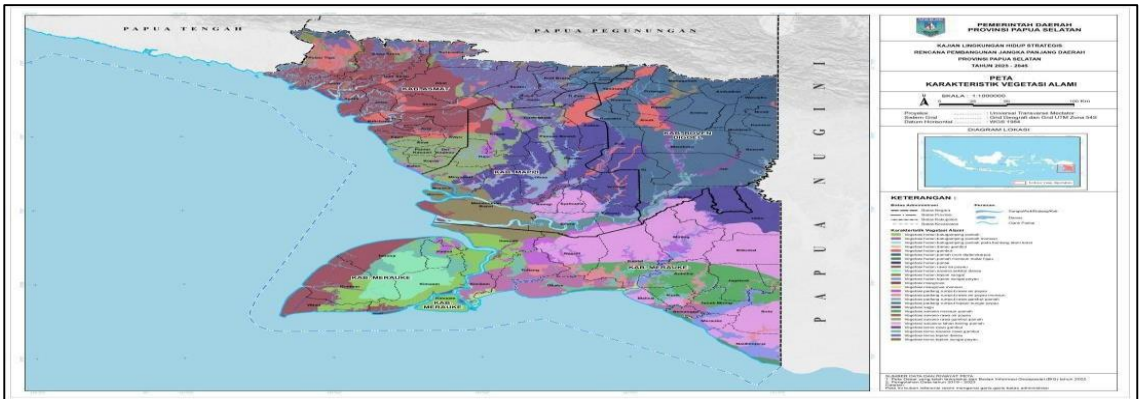
Hutan di pulau Papua masih dalam kondisi perawan dan terluas di Asia Tenggara. Tipe vegetasi alami Papua memiliki pengertian mosaik komunitas tumbuhan dalam bentang alam yang belum dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Vegetasi alami beradaptasi dengan lingkungan dan di dalamnya ada keharmonisan dengan unsur-unsur lain dari bentang alam. Spesies pohon utama yang ditemukan di dataran rendah (dominasi Merbau *Instia* sp dan Damar *Agathis* sp), di perbukitan (dominasi oleh *Araucaria* sp) dan semakin tinggi tempat keanekaragaman ekosistem yang melimpah.

Perbedaan ekosistem satu dengan ekosistem lainnya bahkan sangat kontras. Hutan musim di Papua terbatasi berada di wilayah bagian selatan dengan dominasi jenis *Eucalyptus* sp. dan rumput. Ekosistem hutan Papua Selatan terdiri atas ekosistem mangrove, rawa air tawar, dan rawa sagu yang luas. Di bibir pantai ditempati oleh tipe vegetasi terdepan hutan pantai yang berkarakter Indo-pasifik (Collins et al. 1991). Pohon sagu menjadi vegetasi paling banyak ditemukan di daerah rawa dan merupakan produksi sumber pangan utama.

Berdasarkan inventarisasi nilai keanekaragaman hayati, diketahui bahwa sebaran vegetasi alami didominasi oleh Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa), yaitu vegetasi dengan tegakan pohon-pohon tinggi 30-45m, berbatang lurus dan ramping, bertajuk lebat dan berdaun kecil, sedang sampai lebar. Tumbuh di atas tanah podsolik merah kuning dan gugus tanah yang kompleks, berada di ketinggian 0 – 1000m dpl. Disamping itu, vegetasi yang juga banyak ditemui adalah Vegetasi

mangrove berjenis *Avicennia* spp dan *Rhizophora* spp, serta Vegetasi hutan Pantai. Luasan masing-masing karakteristik vegetasi alami ditunjukkan oleh gambar berikut ini :

Gambar 2. 13 Peta sebaran vegetasi alami



Sumber: KLHS Provinsi Papua Selatan Tahun 2023

2.1.1.2.10 Penutupan Lahan

Penutupan Lahan adalah penutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati, merupakan hasil interpretasi dari citra penginderaan jauh, sehingga merupakan salah satu faktor fisik yang penting dalam kajian perencanaan tata ruang suatu wilayah. Walidata dari Peta Penutupan Lahan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Klasifikasi penutup lahan berdasarkan PERDIRJEN Planologi Kehutanan No P.1-VII-IPSDH-2015 tahun 2015 di bagi menjadi 23 klasifikasi. Selain kekayaan alam berupa DAS yang sangat luas, penutupan lahan di Provinsi Papua Selatan di dominasi oleh tutupan lahan Hutan. Penutupan lahan di Provinsi Papua Selatan secara garis besar terbagi menjadi Hutan dan Non hutan yang sebaran luasan pada tiap kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

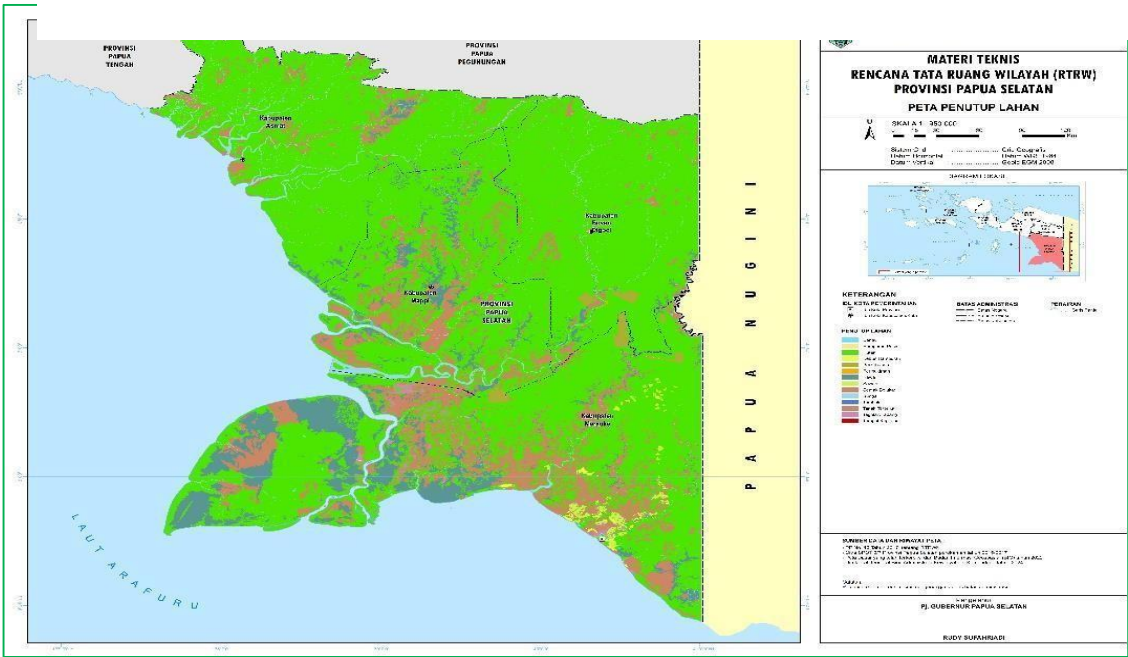
Tabel 2. 12 Luas dan Persentase Penutupan Lahan di Provinsi Papua Selatan

Jenis Penutup Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
Hutan Lahan Kering Primer	2.327.756,92	19,75
Hutan Lahan Kering Sekunder	1.908.135,64	16,19
Hutan Mangrove Primer	564.005,45	4,79
Hutan Mangrove Sekunder	45.786,36	0,39
Hutan Rawa Primer	2.076.725,72	17,62
Hutan Rawa Sekunder	1.128.499,87	9,58
Hutan Tanaman	10.122,61	0,09
Semak Belukar	321.558,58	2,73
Semak Belukar Rawa	1.425.717,42	12,10

Perkebunan/Kebun	131.280,66	1,11
Permukiman/Lahan Terbangun	21.981,51	0,19
Lahan Terbuka	119.337,77	1,01
Pertanian Lahan Kering	22.174,65	0,19
Pertanian Lahan Kering Campur Semak	130.142,11	1,10
Sawah	43.775,41	0,37
Tambak	77,87	0,00
Pelabuhan Udara/Laut	451,67	0,00
Transmigrasi	23.776,21	0,20
Savanna/Padang Rumput	516.551,38	4,38
Tubuh Air	239.132,71	2,03
Rawa	728.711,77	6,18
Total	11.785.702,30	100,00

Sumber: Laporan Akhir RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 (*Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Tahun 2022*)

Gambar 2. 14 Peta penutupan lahan Tahun 2022 di Provinsi Papua Selatan



Sumber: Laoran Akhir RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Berdasarkan data penutupan lahan tahun 2022, Provinsi Papua Selatan memili tutupan lahan hutan dengan luasan 8.061.032,57 Ha atau sekitar 68,40% dari total luas penutupan lahan di Provinsi Papua Selatan.

2.1.1.3 Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Papua Selatan

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, diperlukan pemanfaatan potensi-potensi sumber daya alam yang tersedia di Provinsi Papua Selatan. Pembangunan Provinsi Papua Selatan harus memanfaatkan berbagai sumber daya potensial secara optimal yang lebih menekankan pada **pengembangan sektor-sektor unggulan, potensi lokal**, dengan tetap **memperhatikan kaidah-kaidah**

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kondisi tersebut dapat dilihat pada analisis arahan rencana peruntukan kawasan lindung dan Kawasan budidaya di Provinsi Papua Selatan, proporsi Kawasan lindung sebesar 4.549.714,34 ha dengan persentase 37,44% sedangkan Kawasan budidaya sebesar 7.601.382,99 ha dengan persentase 62,56% dari total luas Rencana Pola Ruang Provinsi Papua Selatan. Rincian Rencana Pola Ruang Provinsi Papua Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Rencana Pola Ruang Provinsi Papua Selatan

Uraian	Luas (Ha)	Persentase %
Kawasan Lindung	4.549.714,34	37,44
Kawasan Bergambut	637.320,34	5,24
Kawasan Hutan Lindung	1.640.321,67	13,50
Kawasan Sempadan Sungai	203.940,79	1,68
Kawasan Sempadan Danau	0,04	0,00
Kawasan Sempadan Pantai	56,59	0,00
Kawasan Savana	101.088,54	0,83
Kawasan Bakau	2.630,92	0,02
Kawasan Lindung Geologi	284.044,23	2,34
KSA/KPA	1.680.247,15	13,83
KSA Air	64,07	0,00
Kawasan Budidaya	7.601.382,99	62,56
Kawasan Hutan Produksi Konversi	838.520,69	6,90
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	1.062.469,40	8,74
Kawasan Hutan Produksi Tetap	2.981.906,28	24,54
Kawasan Peruntukan Perkebunan	487.567,91	4,01
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah	518.424,75	4,27
Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering	349.082,08	2,87
Kawasan Rawa	1.197.135,11	9,85
Kawasan Peruntukan Permukiman	166.276,77	1,37
Total	12.151.097,33	100,00

Sumber : Laporan Akhir RTRW PPS Tahun 2023

Adapun potensi – potensi sumber daya alam tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1.1.3.1 Potensi Hutan

A. Kondisi Kawasan Hutan

Provinsi Papua Selatan memiliki wilayah dengan kondisi beragam dari dataran, berombak, hingga berbukit serta terdapat rawa dan daratan. Kondisi tersebut mempengaruhi terhadap penggunaan lahan di wilayah Papua Selatan. Kondisi wilayah di Kabupaten Mappi didominasi oleh daratan dan rawa. Kabupaten Boven Digoel cenderung datar dan berombak dengan kemiringan lereng 2-8%. Kabupaten Merauke merupakan wilayah dataran dengan ketinggian 0-60 mdpl yang berbatasan langsung dengan daratan dan lautan. Kabupaten Asmat juga memiliki kondisi yang tidak jauh berbeda dengan ketiga kabupaten

lainnya di Papua Selatan. Kabupaten Asmat memiliki wilayah dataran dengan ketinggian 0-100 mdpl. Kondisi Papua Selatan yang didominasi oleh wilayah dataran dan memiliki banyak sungai, menjadikan wilayah tersebut memiliki komoditas utama yaitu jagung dan sagu. Wilayah rawa bergambut difungsikan sebagai kawasan lindung. Penggunaan lahan untuk perkebunan dan pertanian hanya sebagian kecil dari luas wilayah yang ditanami tanaman jagung dan sagu sebagai makanan pokok masyarakat.

Berdasarkan kondisi tutupan lahan Provinsi Papua Selatan tahun 2022, Hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan tutupan lahan yang dominan yaitu masing-masing sekitar 2,3 juta ha dengan presentase 18,99% dan 2,1 juta ha dengan presentase 17,98%. Wilayah lain berupa non hutan yaitu permukiman, pelabuhan, perkebunan, dan lainnya hanya mencakup sekitar 30% dari luas wilayah. Sisanya berupa KSA/KPA, Hutan Sekunder, Hutan Lindung, dan Rawa

B. Lahan Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Lahan hutan merupakan lahan dengan unsur ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya sehingga tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan klasifikasi penutupan lahan Kementerian LHK yang termasuk lahan hutan adalah sebagai berikut:

- a) Hutan Lahan Kering Primer
- b) Hutan Lahan Kering Sekunder
- c) Hutan Mangrove Primer
- d) Hutan Mangrove Sekunder
- e) Hutan Rawa Primer
- f) Hutan Rawa Sekunder
- g) Hutan Tanaman

Berdasarkan data penutupan lahan tahun 2022, Provinsi Papua Selatan memiliki tutupan lahan hutan dengan luasan 8.061.032,57 Ha atau sekitar 68,40% dari total luas penutupan lahan di Provinsi Papua Selatan.

Luasan hutan lindung di Provinsi Papua Selatan yaitu seluas 1.687.302 Ha. Untuk Hutan Produksi, Provinsi Papua Selatan memiliki 3 jenis kawasan peruntukan hutan produksi, yaitu: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi tetap (HP), dan Hutan Produksi yang

dapat dikonversi (HPK). Hutan Produksi Terbatas memiliki kriteria: a) memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah dan intensitas hujan dengan jumlah skor 125-174, b) kawasan hutan yang digunakan untuk budi daya hutan alam. Sedangkan Hutan Produksi tetap (HP) memiliki kriteria: 10 memiliki faktor kemiringan lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124, b) kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) memiliki kriteria, sebagai berikut:

- a) memiliki faktor kemiringan, lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan dengan jumlah skor paling besar 124 dan/atau,
- b) merupakan kawasan yang jika dikonversi mampu mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
- c) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya.

Adapun kondisi luasan kawasan hutan di Provinsi Papua Selatan menurut Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14 Kondisi Kawasan Hutan Provinsi Papua Selatan Tahun 2023
(Ha Sumber: BPS Provinsi Papua Dalam Angka, 2024

Kabupaten	Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
Merauke	265.781.46	221.228.21	900.069.26	1.237.478.26	4.027.748,15
Boven Digoel	84.911.45	383.788.13	1.330.183	171.224.04	1.973.775,47
Mappi	228.723.54	852.294.95	634.778	489.703.75	2.205.499,79
Asmat	1.111.351.27	962.803.84	84.791	38.136.57	2.548.194,17
Papua Selatan	1.690.767.72	2.420.115.13	2.949.821.26	1.936.542.62	10.755.217,58

Luasan kawasan hutan di Provinsi Papua Selatan untuk Hutan Produksi Terbatas yaitu sebesar 2.420.115.13 Ha, dengan Kabupaten Asmat memiliki luasan terbesar yaitu 962.803.84 Ha. Hutan Produksi Tetap memiliki luasan sebesar 2.949.821.26 Ha, dengan Kabupaten Merauke memiliki luasan terbesar yaitu 900.069.26 Ha. Berikutnya Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Papua Selatan memiliki luasan sebesar 1.936.542.62 Ha dengan daerah yang memiliki luasan paling besar yaitu Kabupaten Merauke sebesar

1.237.478.26 Ha.

2.1.1.3.2 Potensi Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, pada umumnya berada di atas tanah milik atau tanah adat. Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar. Adapun kegiatan yang diijinkan yaitu : perkebunan rakyat yang terdapat di kawasan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi kawasan hutan rakyat dan izin untuk melakukan kegiatan. terdapat potensi pengembangan hutan rakyat yang tersebar di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Hutan rakyat memainkan peranan penting baik dalam upaya penanganan lahan kritis, dan juga perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun data tentang produksi hasil hutan rakyat yang valid belum tersedia secara lengkap, tetapi hutan rakyat yang berkembang secara tradisional di Papua Selatan telah berperan signifikan dalam produksi hasil hutan, maupun penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat. Selain itu, ikatan emosional yang terbangun dalam pengembangan hutan rakyat secara bersama-sama oleh petani secara berkelompok telah meningkatkan keeratn hubungan sosial di masyarakat Papua Selatan. Dalam hal ini, kearifan lokal dalam mengelola kekayaan alam, termasuk hutan rakyat, merupakan aspek yang perlu dicermati sebagai bagian dari pengelolaan kawasan hutan rakyat di Papua Selatan.

2.1.1.3.3 Potensi Pertambangan

Pulau Papua terbentuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia (Australia Plate) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (Pacific Crustal Plate) yang bergerak kearah Barat. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua. Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral logam maupun non logam yang besar. Potensi logam yang terdapat di

Papua Selatan hanya terdapat di Kabupaten Merauke lebih tepatnya di Jair. Jenis galian mineral yang terdapat pada lokasi tersebut yaitu emas dan perak. (Dinas ESDM Provinsi Papua, 2020).

Eksplorasi pertambangan di Pulau Papua sangat berisiko. Ditambah lagi cadangannya berada di lokasi-lokasi terpencil yang minim infrastruktur, tersembunyi di hutan dan pegunungan. Pada saat eksplorasi, membutuhkan penelitian khusus untuk menemukan cadangan mineral di Papua. Wilayah pertambangan secara topografi sangat sulit sehingga tak mudah merancang infrastruktur untuk tambang. Semua kondisi ini menjadi kendala bagi investor lain untuk menanamkan modalnya di daerah pertambangan mineral. Sehingga perusahaan besar pertambangan yang ada masih sangat sedikit. Investasi pertambangan di Papua perlu dalam skala besar dengan resiko bisnis tinggi yang membutuhkan stabilitas jangka panjang.

2.1.1.3.4 Potensi Pariwisata

Provinsi Papua Selatan memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan ialah:

Taman Nasional Lorentz di Asmat, dan Taman Nasional Wasur di Merauke. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Selatan dikelompokkan menjadi 4 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, dan obyek wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata lainnya di Provinsi Papua Selatan yaitu Tugu Kembar Sabang Merauke di Merauke, Pantai Lampu Satu di Merauke, dan Museum Kebudayaan dan Kerajinan di Asmat. Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

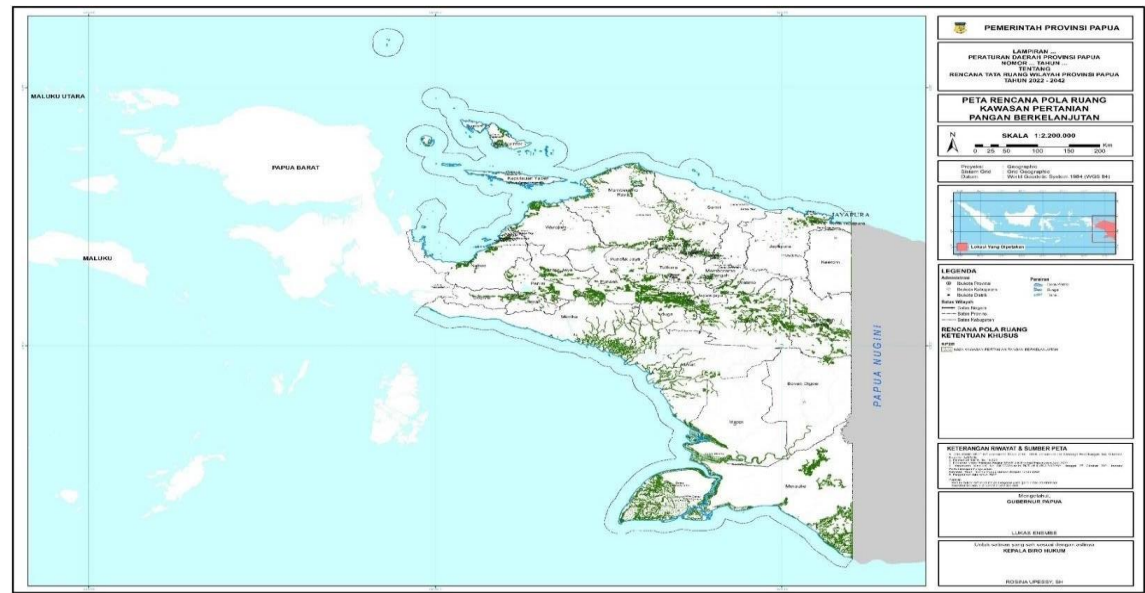
2.1.1.3.5 Potensi Pertanian

Berdasarkan Laporan Akhir RTRW Provinsi Papua Selatan 2025-2045, terdapat 4 kawasan untuk petanian, yaitu Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Tanaman Hortikultura, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Peternakan. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemanfaatan ruang Kawasan.

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan. Sedangkan kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialih fungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan daerah. Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

- a. Kawasan pertanian lahan basah dapat dikembangkan di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi
- b. Kawasan pertanian lahan kering dapat dikembangkan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel

A. Tanaman Pangan



Gambar 2. 15 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan usaha pertanian tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya dan infrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan tata ruang wilayah. Kawasan tanaman pangan yang diperuntukan di Provinsi Papua Selatan saat ini didorong pada pertanian lahan basah yang diarahkan

berdasarkan kondisi eksisting saat ini dan hasil analisa yang telah dilakukan Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Pertanian lahan basah dan lahan kering yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Papua meliputi kawasan seluas $\pm$ 876.506 ha di seluruh kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat.

B. Hortikultura

Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Berdasarkan dominasi komoditasnya, tipe kawasan agribisnis hortikultura dapat dibedakan atas :

1. Kawasan dengan dominasi komoditas hortikultura dengan sedikit atau tanpa tambahan/sisipan komoditas lainnya
2. Kawasan budidaya hortikultura yang seimbang atau hampir seimbang antara komoditas hortikultura dan komoditas lainnya.
3. Kawasan dengan dominasi komoditas non hortikultura dengan sedikit atau banyak tambahan/ sisipan komoditas hortikultura di dalamnya.

Kriteria yang menjadi dasar penetapan kawasan budidaya hortikultura adalah :

1. Mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budidaya, panen dan pasca panen.
2. Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura.
3. Mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

Hortikultura dapat dikembangkan sebagai bagian dari pekarangan ataupun dalam bentuk hamparan luas. Pertanian hortikultura saat ini

berpotensi dikembangkan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel. Komoditi yang diarahkan pada kawasan hortikultura di Provinsi Papua Selatan adalah untuk komoditi buah-buahan, kacang-kacangan dan sayuran.

2.1.1.3.6 Perkebunan

Kawasan perkebunan di Provinsi Papua Selatan diarahkan untuk pengembangannya di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke seluas 487.567,91 Ha. Kawasan perkebunan diarahkan untuk perkebunan sektor swasta dan perkebunan rakyat. Untuk perkebunan sektor swasta diarahkan untuk perkembangan kelapa sawit, sedangkan perkebunan rakyat diarahkan untuk komoditas lain yang potensial seperti karet, kelapa, pinang dan kopi. Berikut peta sebaran perkebunan di Provinsi Papua Selatan

Gambar 2. 16 Peta Sebaran Perkebunan di Provinsi Papua Selatan



Sumber : Laporan Akhir RTRW PPS Tahun 2023

2.1.1.3.7 Potensi Peternakan

Kawasan peternakan adalah kawasan untuk usaha pengembangan peternakan. Secara umum ternak dapat digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu: ternak besar (kerbau, sapi, kambing, domba dan kuda) dan ternak kecil (ayam, itik dan jenis unggas lainnya). Untuk peternakan hewan besar harus memiliki padang gembala atau jenis tanaman rumput-rumputan maupun pohon-pohon sebagai pakan ternak . Peternakan di Provinsi Papua Selatan terdiri dari ternak sapi, kambing, babi, itik, ayam buras dan ayam kampung. Untuk pengembangan peternakan dapat dikembangkan di lahan padang rumput savana, mengingat di wilayah Provinsi Papua Selatan banyak terdapat padang savana yang banyak menyediakan pakan ternak berupa rumput.

2.1.1.3.8 Potensi Perikanan

Berdasarkan Laporan Akhir RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 Sebaran perikanan budidaya laut dan pesisir yang terdata pada Provinsi Papua Selatan terdapat pada Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Rencana penetapan lokasi pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Papua Selatan memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan teknis, ekologis, sosial dan budaya;
2. Memperhatikan daya dukung perairan

A. Kawasan Perikanan Budi daya

Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan mengembangbiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Kawasan perikanan budidaya adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan usaha pemeliharaan dan pembesaran komoditas ikan. Sebaran perikanan budidaya laut dan pesisir yang terdata pada Provinsi Papua Selatan terdapat pada Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Rencana penetapan lokasi pengembangan perikanan budidaya di Provinsi Papua Selatan memiliki kriteria sebagai berikut; Memenuhi persyaratan teknis, ekologis, sosial dan budaya; dan Memperhatikan daya dukung perairan

B. Kawasan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap diarahkan pada kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Kawasan perikanan tangkap tersebar pada semua kabupaten yang terletak di pesisir Provinsi Papua Selatan. Tujuan dari kawasan perikanan tangkap adalah menyediakan ruang bagi keberlangsungan mata pencaharian nelayan, memanfaatkan sumber daya ikan di perairan pesisir dan menjadikan perikanan tangkap sebagai salah satu penggerak ekonomi di Provinsi Papua Selatan. Kawasan perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan terdapat pada Laut Arafura dengan hasil laut antara lain udang, ikan kakap dan ikan kembung yang pengelolaan dan pengembangannya didukung dengan

pengembangan sentra perikanan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/ Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu SKPT Merauke.

Sasaran dalam pengelolaan kawasan perikanan tangkap adalah dengan membangun usaha perikanan tangkap berbasis potensi wilayah, penguatan dan pengembangan teknologi perikanan tangkap, penguatan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengembangan industri pengolahan hasil dan usaha perikanan.

Potensi perikanan tangkap yang tinggi terdapat di Kabupaten Merauke, Mappi dan Asmat. Potensi perikanan budaya yang tinggi terdapat di seluruh kabupaten di Papua Selatan. Adapun potensi pengembangan industri perikanan hanya terdapat di Kabupaten Merauke. Dalam hal ini, Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai Kawasan minapolitan berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

2.1.1.3.9 Pertambangan dan Energi

Potensi sumber daya alam kawasan pertambangan dan energi di Provinsi Papua Selatan yaitu pertambangan galian C, dimana diperkirakan terdapat potensi di Kabupaten Mappi yaitu potensi minyak bumi yang tersebar di Distrik Citak Mitak dan bauksit di Distrik Obaa dan sekitarnya.

Untuk kawasan Pertambangan terdapat di Kabupaten Boven Digoel yaitu pertambangan bahan galian golongan C, yang terdiri atas tanah timbun dan pasir kerikil. Pajak yang dihasilkan dari pertambangan bahan galian golongan C di tahun 2015, hampir mencapai 1 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan geliat pembangunan khususnya di sektor pertambangan dan penggalian serta konstruksi di Kabupaten Boven Digoel masih cukup tinggi.

Selain itu Provinsi Papua Selatan juga memiliki potensi yang besar untuk pengembangan sumber energi terbarukan, seperti energi surya, energi angin, dan energi air, guna mendukung ketahanan energi dan mengurangi dampak lingkungan. Listrik merupakan suatu bentuk energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia yang hidup di jaman sekarang. Semakin banyak daerah yang dialiri listrik, akan semakin baik taraf

kehidupan masyarakatnya, karena dengan adanya energi listrik, setiap kegiatan manusia dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Energi listrik di Kabupaten Boven Digoel dibangkitkan oleh dua sumber utama, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). PLTD di Kabupaten Boven Digoel sebagian besar dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

2.1.1.3.10 Pertambangan dan Energi di wilayah Darat

Kabupaten Boven Digoel sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25–100 m di atas permukaan laut. Kemiringan tanah di Kabupaten Boven Digoel beragam, mulai dari tanah datar hingga bergunung, namun yang paling dominan yaitu kemiringan tanah yang agak datar hingga berombak. Sebagian besar wilayah Boven Digoel didominasi oleh dataran, selebihnya merupakan wilayah bergelombang dan hanya sebagian kecil wilayah merupakan daerah gambut/rawa, perbukitan dan pegunungan

Potensi pertambangan di Kabupaten Boven Digoel diperkirakan menyimpan potensi minyak bumi. Saat ini pemberdayaan tanah di kabupaten ini masih terkonsentrasi pada usaha perkebunan. Telah ada usaha perkebunan kelapa sawit di bagian Selatan, yaitu di Distrik Jair. Sawit yang diolah di tempat itu juga menjadi sawit mentah dengan kapasitas produksi sekitar 10 ton perhari dan kemudian dikirim keluar Papua melewati muara Sungai Digul di Kabupaten Mappi. Lahan yang berpotensi untuk ditanami kelapa sawit sebenarnya tidak hanya di Distrik Jair tapi juga di lima distrik lainnya.

Komoditas perkebunan lain yang potensial menjadi sumber penghidupan petani adalah cokelat yang dikembangkan di Distrik Mindiptana dan jambu mete di Distrik Mandobo, Mindiptana, dan Waropko. Kopi juga diusahakan oleh petani di Distrik Jair Mindiptana, Waropko, dan Kauh. Selain tanaman tersebut, masih ada pula usaha tanaman vanilli yang dikembangkan di Distrik Waropko

2.1.1.3.11 Pertambangan di wilayah Pesisir Pulau Papua

Pantai selatan Provinsi Papua Selatan dibentuk oleh hutan sedimen, tergolong endapan aluvium, di Utara pasir Kwarsa dan batu

apung. Berdasarkan data tingkat kesuburan tanah tergolong rendah sampai sedang. Bahan tambang/mineral yang diduga ada minyak dan emas. Salah satu kabupaten dikawasan pesisir Provinsi Papua Selatan yang memiliki potensi tambang adalah Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke memiliki potensi bahan mineral bukan logam dan batuan, salah satunya pasir pantai yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambang.

Pengelolaan penambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke dilakukan penambangan rakyat karena masyarakat lokal sendiri yang melakukan penambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti sekop, cangkul, linggis dan alat-alat lain yang diperlukan dalam kegiatan penambangan.

Pertambangan pasir pantai ini dilakukan sebagai mata pencaharian sehari-hari untuk dapat menghidupi keluarga. Penambangan rakyatpun harus mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dari pemerintah setempat. UU Minerba memberikan definisi Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Namun yang terjadi di Kabupaten Merauke IPR tidak dimiliki oleh semua pelaku penambangan, terutama yang melakukan pertambangan pasir pantai adalah pelaku yang tidak memiliki izin

Kegiatan penggalian pasir di Kabupaten Merauke seperti di Pantai Nasai telah dilakukan sejak Tahun 2000-an, dan menopang laju pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Merauke. Namun saat ini kegiatan tersebut menimbulkan eksternalitas yang sangat jelas. Eksternalitas merupakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pelaku ekonomi yang berdampak kepada pelaku ekonomi lainnya tanpa adanya kompensasi.

Eksternalitas yang timbul akibat penggalian pasir pantai di Nasai antara lain kerusakan jalan dan jembatan, banjir rob karena air pasang yang terlalu jauh masuk ke rumah pemukiman penduduk, kerusakan hutan mangrove di sekitar pesisir pantai dan berkurangnya jumlah tangkapan ikan dan kepiting karena rusaknya ekosistem di hutan mangrove. Semua eksternalitas yang ditimbulkan oleh akibat penggalian pasir tersebut dirasakan hampir seluruh masyarakat di kota Merauke.

Berbagai kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat penggalian pasir, ternyata di sisi lain kegiatan penambangan tersebut memberikan

keuntungan untuk masyarakat yang memiliki dusun pasir di pesisir pantai. Masyarakat lokal yang memiliki wilayah tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pasir pantai tersebut. Namun eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan pasir pantai ini lebih besar dibandingkan dampak positif yang diterima oleh masyarakat. Menurut penelitian Arisandi (2014), eksternalitas negatif yang ditimbulkan akibat penggalian pasir mencapai Rp128.109.000.000,00 per tahun. Angka ini diperoleh melalui perhitungan penurunan produktivitas tangkapan ikan oleh nelayan di sekitar pantai Payum dan kerusakan mangrove, sementara eksternalitas positifnya hanya Rp25.904.201.428,00. Data ini cukup memberikan gambaran buruknya kegiatan penambangan pasir pantai.

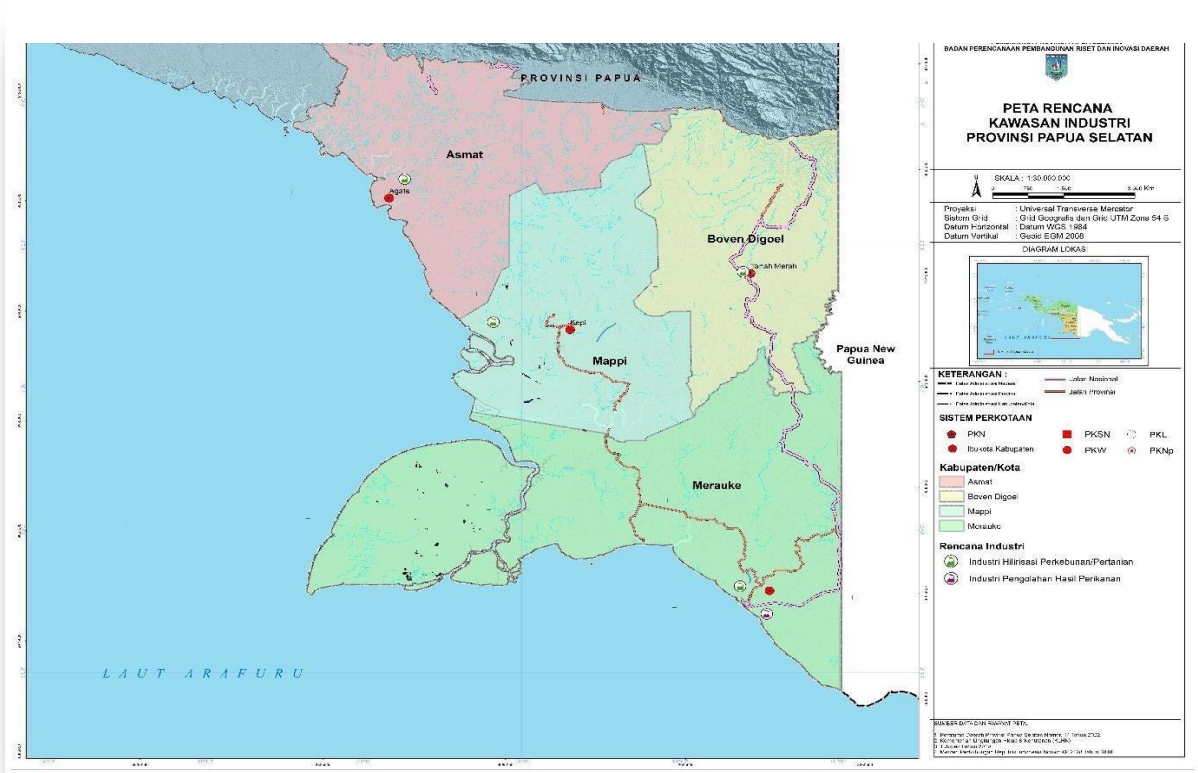
2.1.1.3.12 Potensi Kawasan Industri

Rencana pengembangan Kawasan peruntukan industri meliputi: Kawasan industri pengolahan hasil pertanian (hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan), kawasan industri pengolahan perikanan, serta kawasan industri kecil dan menengah.

Industri unggulan yang tersebar di Papua Selatan dapat dibagi pada skala berikut ini : a). Industri Unggulan Skala Provinsi, diantaanya : 1). Kelapa sawit di Kab Merauke 2). Sagu di Kab. Merauke dan Kab. Mappi dan 3). Industri perikanan di Kab. Merauke dan Kab Asmat b). Industri unggulan skala kabupaten, diantaranya

: 1). Industri kerajinan dari kayu di Kab Asmat dan 2). Industri eukaliptus di Kab Merauke

Gambar 2. 17 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri Provinsi Papua Selatan



2.1.1.3.13 Industri Kecil dan Menengah

Kawasan Industri kecil dan menengah meliputi: industri pangan yang tersebar di semua kabupaten di Provinsi Papua Selatan dan industri sagu di Kab Mappi dan Kab Asmat. Industri kecil dan menengah adalah yang paling minim risiko terhadap kerusakan lingkungan dan konflik sosial serta konflik adat. Kawasan industri kecil dan menengah tidak memerlukan suatu Kawasan khusus bagi pengembangannya. Industri pengolahan sagu dapat menjadi potensi besar untuk dikembangkan dalam industri kecil dan menengah skala permukiman, begitu pula pangan dari tanaman lainnya dan industri kerajinan tangan.

2.1.1.3.14 Cagar Budaya

Masyarakat Hukum Adat melalui sistem kekerabatan Suku-suku di pesisir terdapat di 13 kabupaten (dari 28 kabupaten dan 1 kota di provinsi Papua) yang berada di pesisir pantai dan pulau di Provinsi Papua meliputi 4 wilayah adat/budaya, yang menurut Enos Rumansara pengajar dan peneliti Antropologi Universitas Cenderawasih dalam jurnal Ekologi birokrasi tahun 2015 mengkategorikan MHA dalam 4 zona Ekologis, dimana masyarakat pesisir dan laut masuk dalam dua zona ekologis yaitu Zona rawa, pantai dan sepanjang aliran sungai (terdiri dari suku Asmat, suku Yaghai, suku Marind-Anim, suku Kamoro, suku sebyar, suku Simuri, suku Irarutu, suku Waropen dan suku Bauzi) serta zona dataran rendah, pesisir dan kepulauan (terdiri dari suku suku di Nabire, Waropen, Biak, Supiori dan Yapen, Kayu pulo, Enggros dan Tobati di jayapura) yang secara rinci antara lain : Mamta (Mamberamo-Tami) atau pesisir tanah Tabi di bagian timur berbatasan dengan PNG, terdiri dari kabupaten Jayapura (suku yang berada di pesisir meliputi bagian Dafonsoro Utara terdapat suku Tepra dan Ormu/Jouwari, Yokari, Yeuna, Kayu pulo dan suku Tbatu) berada pada wilayah sekitar Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya bagian timur-kali tami.

Wilayah budaya Saireri, mencakup pesisir sekitar bagian selatan ke timur teluk Cendrawasih (Geelvink baai) bagian selatan sampai pulau pulau besar dan kecil yang berada tepat di gugusan kepulauan. Adapun sejumlah kabupaten yang tergolong sebagai wilayah budaya Saireri, adalah Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Yapen, Waropen serta pesisir pantai kabupaten Nabire dan Mamberamo Raya. Umumnya, wilayah ini

memiliki tipe politik tradisional yang sama, yakni tipe politik mix atau campuran (Mansoben, 1995). Suku-suku yang mendiami wilayah adat ini terdiri dari suku biak, Serui, dan Waropen.

Wilayah Budaya Meepago berada di bagian leher dari pulau papua berbatasan langsung dengan wilayah adat Domberai Provinsi Papua, yang terdiri dari kabupaten Dogiyai, Deiyai, Nabire, Intan Jaya, Paniai dan Mimika, namun hanya 3 kabupaten yaitu Paniai, Mimika dan Nabire yang berada di pesisir pantai dimana berdiam suku-suku di bagian selatan ada suku Kamoro, di utara ada suku Mee, dan perantau dari serui dan biak yang mendiami pesisir Nabire seperti di kampung Sima dan seterusnya.

Wilayah budaya Ha-Anim atau Anim-ha yang berada pada pesisir pantai bagian selatan Papua meliputi kabupaten Asmat, Mappi, dan Merauke, diwilayah ini berdiam suku Asmat, Tamario, Yakhai, Malind/Marind anim dengan sub suku Khima-khima di pulau Kimmam/Yosударso/kolepom dan Marind Pantai tanah besar (di sepanjang pesisir dari selat wanam – sampai Kampung Kondo perbatasan dengan negara PNG)

Tabel 2. 15 Pembagian Zonasi Khusus Wilayah Kelola MHA dalam 12 Mil Laut

Wilayah adat/ Suku	Kabupaten/ Kota	Kesepakatan Zonasi Sampai 12 mil laut	Keterangan
-----------------------	--------------------	---	------------

Malind, Yaghai,	Merauke, Mappi, Asmat	4 Mil/7.41 km	• Kesepakatan 4 mil ditetapkan karena sesuai dengan ruang tangkap MHA baik secara konvensional maupun menggunakan peralatan modern. • Biasanya Kawasan perairan tersebut digunakan untuk jalur transportasi ke dan dari Mimika - Asmat – Mappi - Merauke baik kapal pelni maupun sejak dulu dalam sejarah orang Kamoro melakukan pengayauan sampai ke asmat begitu sebaliknya dan juga asmat sampai ke mappi dan Merauke, namun hal ini tidak sering dilakukan saat ini biasanya mereka memanfaatkan sungai sungai besar seperti Siret, Digoel dan lainnya • Terdapat sejumlah spot mangrove yang digunakan untuk areal penangkapan ikan oleh nelayan serta muara-muara sungai. Praratanya Masyarakat Hukum Adat bagian Selatan Papua bukan sepenuhnya berbudaya penangkap ikan di laut tetapi lebih ke jenis-jenis ikan di estuari, muara, rawa dan sungai-sungai. • Di Kawasan kimaam sampai ke pesisir Merauke perjalanan leluhur dan tempat sakral suku malind juga ditemukan di pulau pompo, kolepom yang berada di Selat Kimaam dan pulau Habe.
------------------------	--------------------------	---------------	--

Sumber : Laporan Akhir RTRW PPS tahun 2023

2.1.1.3.15 Pertambangan dan Mineral

Kawasan pertambangan mineral dan batubara tersebar di Kabupaten Asmat dan Wilayah Laut. Adapun ketentuan khusus yang dilakukan untuk Kawasan tersebut yaitu : pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan; pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan; pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan; pengelolaan

limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya; reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan; dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; diperlukan perencanaan yang terintegrasi antara sektor kehutanan dan sektor pertambangan; perlunya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk investor tentang peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan dan pertambangan serta wilayah yang terbuka untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan; dan Pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan melalui perbaikan kesuburan tanah dengan meningkatkan kualitas lahan pasca tambang melalui pelaksanaan reklamasi secara tepat sesuai dengan rencana reklamasi dan persyaratan yang telah ditetapkan dengan pengendalian dan pengawasan.

2.1.1.3.16 Migrasi Satwa

Migrasi Satwa berada di Kabupaten Merauke dan Wilayah Laut meliputi migrasi biota penyu hijau meliputi jalur Perairan Merauke dan migrasi burung di kabupaten Asmat.

2.1.1.3.17 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) dengan mempertimbangkan arahan pengembangan kawasan budidaya dalam RTRW Provinsi Papua 2013-2033 sebagai provinsi induk dapat dirangkum pada table dibawah ini:

Tabel 2. 16 Potensi Pengembangan Wilayah Provinsi Papua Selatan

No	Potensi Pengembangan Wilayah	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
1	Kawasan peruntukkan hutan produksi				
	a. Hutan produksi terbatas (HPT)	✓	✓	✓	✓
	b. Hutan produksi tetap (HP)	✓	✓	✓	✓
	c. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK)	✓	✓	✓	✓
2	Kawasan hutan rakyat	✓	✓	✓	✓

3	Kawasan peruntukkan pertanian			
	a. Pertanian lahan basah	✓	✓	✓
	b. Pertanian lahan kering	✓		
	c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	✓	✓	✓
	d. Hortikultura	✓	✓	
	e. Perkebunan	✓	✓	✓
	f. Peternakan	✓	✓	✓
4	Kawasan peruntukkan perikanan			
	a. Perikanan tangkap	✓		✓
	b. Perikanan budidaya	✓	✓	✓
	c. Pengembangan industri perikanan	✓		
5	Kawasan peruntukkan pertambangan			
	Pertambangan batubara		✓	
6	Kawasan peruntukkan industri			
		✓	✓	✓
7	Kawasan peruntukkan pariwisata			
	a. Wisata budaya			✓
	b. Wisata alam	✓	✓	✓
	c. Wisata minat khusus	✓	✓	✓
8	Kawasan peruntukkan permukiman			
	a. Permukiman perkotaan	✓	✓	✓
	b. Permukiman perkampungan	✓	✓	✓

Sumber: Laporan Akhir RTRW Provinsi PPS Tahun 2023

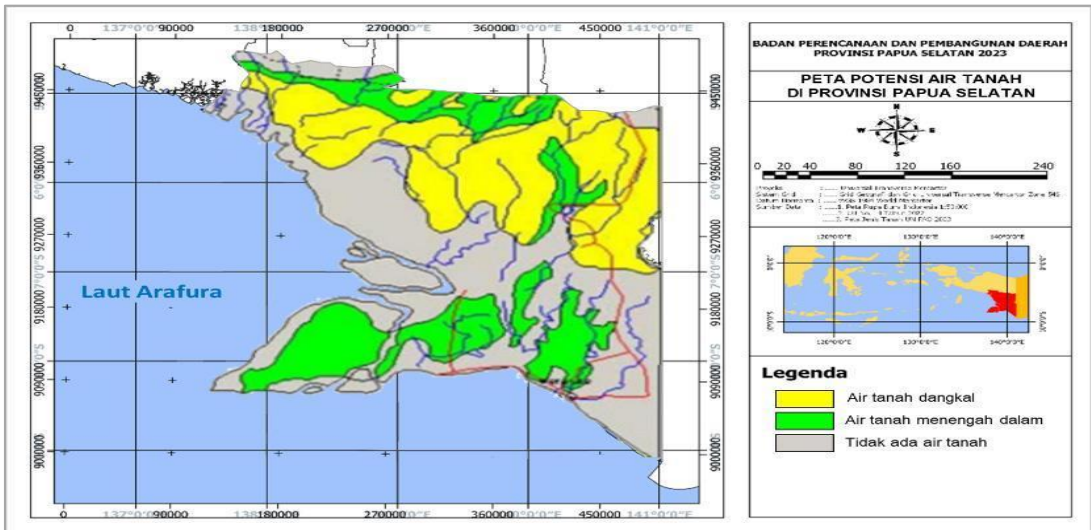
2.1.1.3.18 DAS dan Sumber Daya Energi Listrik di Provinsi Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan memiliki 7 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total luas tangkapan 119.450,13 km². Banyaknya jumlah Sumber Daya Air yang berasal dari sungai dan Danau menjadi sumber penghidupan dan sumber daya energi listrik terbarukan. Namun demikian menjaga keselarasan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan tetap diprioritaskan. Daerah Aliran Sungai

Digul merupakan DAS terluas dengan persentase luas wilayah sebesar 61% dari total DAS di Papua Selatan).

Selain sumber air permukaan terdapat sumber air yang berasal dari dalam tanah. menunjukkan potensi air tanah di bagian selatan Papua Selatan berupa potensi air tanah menengah dalam, sedangkan di bagian utara Papua Selatan sebagian besar berupa tanah potensi air tanah dangkal dan sebagian kecil potensi air tanah dalam.

Gambar 2. 18 Peta Potensi Air Tanah di Pulau Papua



Sumber: [website resmi Pemerintah Provinsi Papua](#), 2023

2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana Provinsi Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan secara garis besar memiliki indeks kerawanan bencana pada rentang risiko sedang hingga tinggi. Berdasarkan wilayah di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke memiliki indeks risiko bencana tinggi sementara Kabupaten Asmat, Boven Digoel, dan Mappi memiliki indeks risiko bencana sedang.

Tabel nilai indeks risiko Provinsi Papua Selatan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024

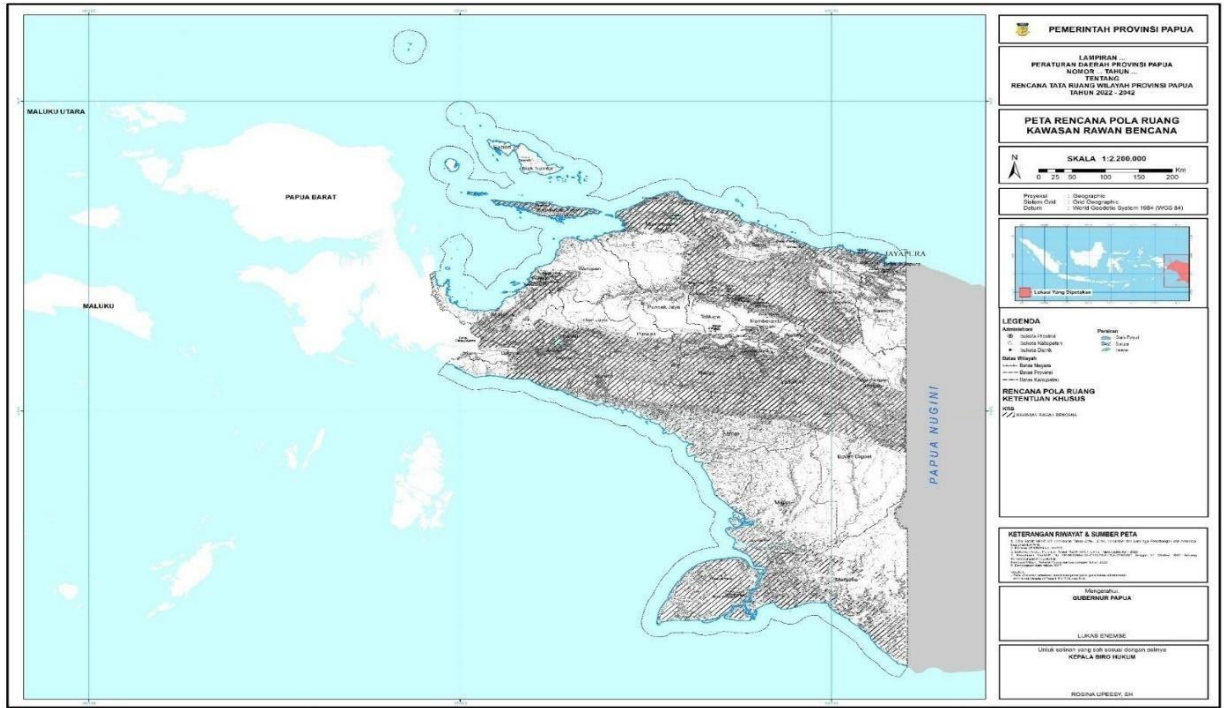
NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	KELAS RISIKO 2024
1	MERAUKE	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	TINGGI
2	BOVEN DIGOEL	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	133.20	SEDANG
3	MAPPI	126.40	126.40	126.40	126.40	126.40	126.40	126.40	126.40	126.40	126.40	SEDANG
4	ASMAT	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	123.20	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

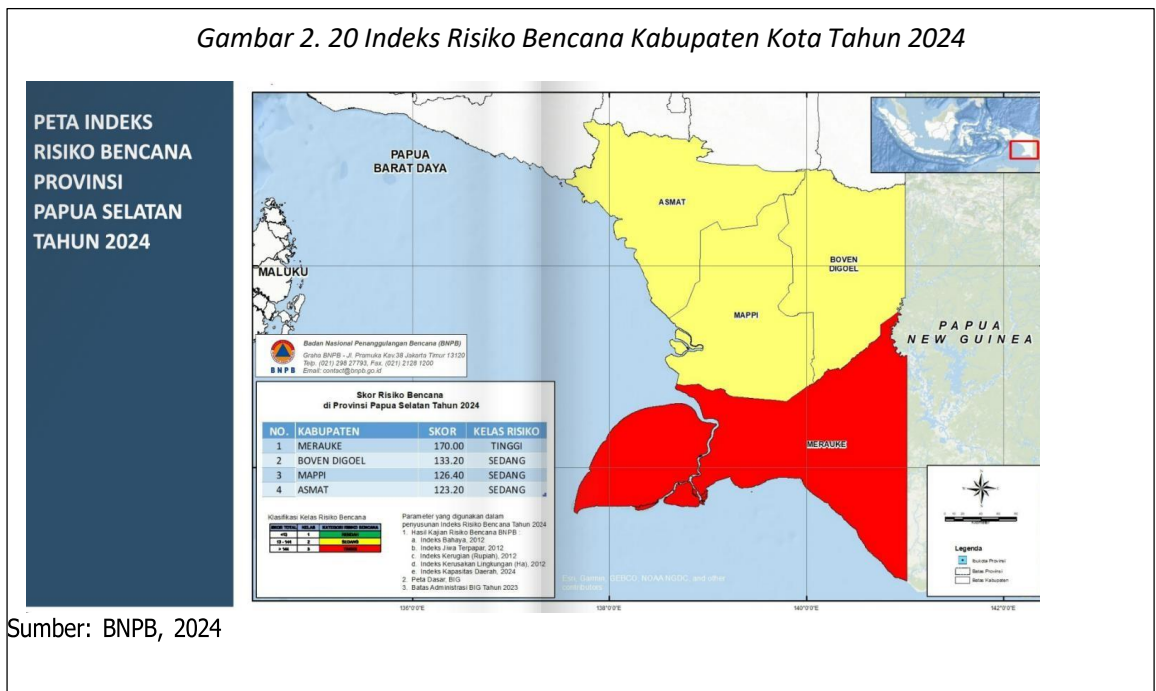
Tabel 2. 17 Nilai Indeks Risiko Provinsi Papua Selatan Tahun 2015-2024

Sumber:Laporan Akhir RTRW PPS Tahun 2024

Gambar 2. 19 Peta Kawasan Rawan Bencana



Gambar 2. 20 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kota Tahun 2024



Kabupaten di Provinsi Papua Selatan secara umum memiliki risiko yang tinggi untuk jenis bencana banjir dan kebakaran hutan, sedangkan risiko sedang untuk bencana tanah longsor. Kabupaten dengan wilayah pesisir yaitu Merauke, Mappi, dan Asmat memiliki risiko tinggi terhadap gelombang ekstrem dan abrasi, Sementara Kabupaten yang berdekatan dengan daerah pegunungan di sebelah utara memiliki risiko tinggi terhadap bencana gempa bumi.

Tabel 2. 18 Kelas Risiko Bencana di Provinsi Papua Selatan 2024

Jenis Bencana	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Tsunami	Sedang	-	Rendah	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Bencana Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi
Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah

Sumber: BNPB, 2024

2.1.1.4.1 Grafik Sebaran Luas Kawasan Bencana per Kabupaten/kota

Gambar 2. 21 Grafik Sebaran Luas Kawasan Bencana per Kabupaten/kota



Sumber: Laporan Akhir RTRW Provinsi Papua Selatan 2023

2.1.1.4.2 Rawan Banjir

Kawasan Rawan Bencana Banjir di Provinsi Papua Selatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, dimana bahaya banjir di Provinsi Papua Selatan tergolong rawan tinggi, akibat sunga-sungai mengalir secara intensif di dataran tengah yang menyebabkan daerah ini rawan mengalami banjir dan sedimentasi (pendangkalan sungai, dan pantai).

Kerawanan banjir setiap kabupaten, seperti Tabel berikut:

Tabel 2. 19 Ancaman dan kelas bahaya banjir setiap kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Kategori Ancaman (Bahaya)			Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Asmat	18.543,66	69.805,10	57.944,74	Sedang
Boven Digoel	8.122,40	85.415,92	70.777,80	Sedang
Mappi	56.417,36	283.627,32	389.485,46	Tinggi
Merauke	192.530,72	778.281,80	1.114.096,27	Tinggi
Jumlah	275.614,14	1.217.130,14	1.632.304,27	Tinggi

Sumber : Laporan Akhir RTRW PPS 2023 INARisk (2021)

A. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Kawasan rawan banjir bandang termasuk dalam kawasan dengan tingkat kerawanan Tinggi (Klas Tinggi). Faktor pengendali bahaya banjir bandang adalah topografi yang curam, curah hujan tinggi dan kerusakan hutan dan lahan intensif. Kerawanan banjir bandang di Provinsi Papua Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Ancaman dan kelas bahaya banjir bandang setiap kabupaten

Kabupaten/Kota	Kategori Ancaman (Bahaya)			Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Asmat	670,02	687,26	633,42	Sedang
Boven Digoel	249,00	301,52	304,16	Tinggi
Jumlah	919,02	988,78	937,58	Tinggi

Sumber : Laporan Akhir RTRW PPS 2023 INARisk (2021)

B. Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Daerah rawan longsor umumnya juga merupakan daerah pegunungan yang terjal. Kerawanan bahaya longsor di setiap kabupaten/kota, seperti tabel ini:

Tabel 2. 21 Ancaman dan kelas bahaya longsor setiap kabupaten

Sumber : RTRW PPS 2023 INARisk (2021)

Kabupaten/Kota	Kategori Ancaman (Bahaya)			Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Boven Digoel	4.241,58	3.959,64	281,44	Rendah
Mappi	84,80			Rendah
Merauke	18,15			Rendah
Grand Total	4.344,53	3.959,64	281,44	Rendah

C. Gelombang Ekstrim Dan Abrasi

Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.

Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi. Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi kelas rendah hingga sedang seluas 7.213,25 hektar. Kerawanan bahaya gelombang ekstrim dan abrasi, sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Ancaman dan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Kategori Ancaman (Bahaya)			Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Asmat	274,01	333,75		Sedang
Mappi	0,54	58,33		Sedang
Merauke	3.974,62	2.222,34	349,66	Rendah
Jumlah	4.249,17	2.614,42	349,66	Rendah

Sumber : RTRW PPS 2023 INARisk (2021)

D. Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten (Kelas Tinggi). Pengelolaan kawasan rawan kebakaran lahan, meliputi penghijakan, pelarangan penebangan hutan secara berlebihan dan sosialisasi kepada masyarakat. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan kelas tinggi seluas 5.323.513,35 hektar terdapat di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Kerawanan daerah bahaya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten, seperti berikut ini:

Tabel 2. 23 Ancaman dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan setiap kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Kategori Ancaman (Bahaya)			Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Asmat	27.741,63	94.396,43	38.928,73	Sedang
Boven Digoel	53.376,44	155.519,04	58.236,83	Sedang
Mappi	37.554,99	338.237,69	451.091,13	Tinggi
Merauke	20.176,02	293.612,91	1.900.025,95	Tinggi
Jumlah	138.849,08	881.766,07	2.448.282,64	Tinggi

Sumber : Laporan Akhir RTRW PPS 2023 INARisk (2021)

E. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan. Kawasan rawan bencana kekeringan kelas tinggi seluas 5.713.506,85 hektar terdapat di diseluruh wilayah Provinsi Papua Selatan. Klas kerawanan bahaya kekeringan tergolong rendah, sebaran disetiap kabupaten, sebagai berikut :

Tabel 2. 24 Ancaman dan kelas bahaya kekeringan setiap kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Kategori Ancaman (Bahaya)			Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Asmat	95.307,48	71.315,57	0	Rendah
Boven Digoel	192.256,63	93.913,08	0	Rendah
Mappi	423.799,36	423.052,66	0	Rendah
Merauke	597.075,41	1.735.733,09	0	Sedang
Jumlah	1.308.438,88	2.688.835,31	0,00	Rendah

Sumber : RTRW PPS 2023 INARisk (2021)

F. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhuan batuan. Gempa bumi yang terjadi lebih banyak berkekuatan (magnitude) <5 SR dan terbatas pada wilayah Pegunungan Tengah Papua, serta berkaitan dengan pergerakan sesar atau patahan secara mandatar. Adapun persebaran kawasan rawan gempa bumi di Provinsi Papua Selatan seluas 3.632.930,42 hektar dan tergolong tingkat kerawanan kelas rendah. Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten, seperti tabel berikut.

Tabel 2. 25 Ancaman dan kelas bahaya gempa bumi setiap kabupaten/kota

Kabupaten/Kota	Kategori Ancaman (Bahaya)			Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Asmat	84.883,40	75.532,28	6.225,57	Rendah
Boven Digoel	232.467,52	51.618,42	2.073,72	Rendah
Mappi	846.198,46	659,29	0	Rendah
Merauke	2.333.271,76	0	0	Rendah
Jumlah	3.496.821,14	127.809,99	8.299,29	Rendah

Sumber : RTRW PPS 2023 INARisk (2021)

G. Tsunami

Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Potensi tsunami dapat terjadi dari wilayah gempa yang aktif di sisi barat-daya Papua seperti pada daerah Seram dan Aru. Demikian pula sesar-sesar geser di daerah selatan Biak dapat menimbulkan potensi tsunami yang dapat mengenai daerah Teluk Cendrawasih. Potensi gempa besar pada zona Subduksi di utara Papua juga memiliki peluang untuk menimbulkan gempa di sekitar pantai utara Papua. Kawasan rawan bencana Tsunami seluas 23.022,95 hektar di bagian Utara dan Selatan Papua. Tsunami pernah terjadi hanya di pesisir Utara Papua, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat terjadi di bagian Selatan Papua yang berkaitan dengan getaran gempa bumi yang berasal dari wilayah Timor dan Maluku. Tabel berikut, sebaran kabupaten yang potensial terjadi tsunami.

Tabel 2. 26 Ancaman dan kelas bahaya tsunami setiap kabupaten

Kabupaten/Kota	Kategori Ancaman (Bahaya)			Kelas Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Asmat	688,82			Rendah
Mappi	76,69			Rendah
Merauke	4.112,82			Rendah
Jumlah	4.878,33	0,00	0,00	Rendah

Sumber : RTRW PPS 2023 INARisk (2021)

H. Likuifaksi

Peristiwa mencairnya tanah yang terjadi Ketika tanah jenuh atau agak jenuh air mengalami kehilangan kekuatan atau kekakuan akibat adanya tegangan atau perubahan tegangan yang disebabkan oleh getaran atau gempa bumi. Peristiwa ini terjadi pada tanah atau material pasir yang secara mendadak mengalami tekanan air pori naik hingga melebihi kekuatan gesek tanah. Kawasan rawan bencana likuifaksi terdapat di Provinsi Papua Selatan seluas 350.406,69 hektar, sebarannya pada kabupaten, sebagai berikut:

Tabel 2. 27 Ancaman dan kelas bahaya liquifaksi setiap kabupaten

Kabupaten/Kota	Kategori Ancaman (Bahaya)			Ke0las Bahaya
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Asmat	112.531,67	29.180,29		Rendah
Boven Digoel	68.247,76	26.139,48		Rendah
Mappi	113.769,84	537,65		Rendah
Jumlah	294.549,27	55.857,42	0,00	Rendah

Sumber : RTRW PPS 2023 INARisk (2021)

2.1.2. Aspek Demografi

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2021 mencatat jumlah penduduk di Provinsi PapuaSelatan berdasarkan kabupaten/kota pada bulan September 2021 sebanyak 517.623 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut 52,8% berjenis kelamin laki-laki sedangkan 47,2% nya berjenis kelamin perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Papua Selatan terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Papua Selatan mengalami penambahan dengan laju pertumbuhan penduduk 2,34%. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021.

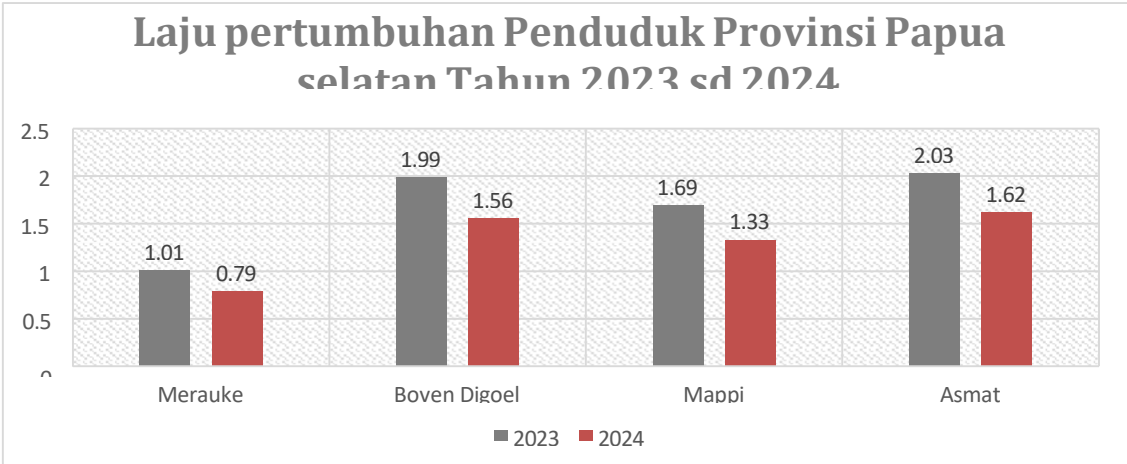
Tabel 2. 28 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua Selatan Tahun 2020- 2025

	Kabupaten/	Tahun					
No	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
1	Merauke	230.931	231.696	232.257	237,20	239,40	241.54
2	Boven Digoel	64.285	64.716	65.193	67,76	69,04	70.28
3	Mappi	108.295	109.579	111.141	113,26	115,10	116.95
4	Asmat	110.105	111.632	113.524	116,20	118,53	120.88
5	Papua Selatan	513.616	517.623	522.115	534,42	542,08	549,65

Sumber: BPS Provinsi Papua dan Kabupaten, 2025

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana

pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari data BPS (Provinsi Papua Dalam Angka 2022 dan masing Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan Dalam Angka 2022), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 0,78%, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kabupaten Merauke sebesar 0,33% dan tertinggi di Kabupaten Asmat sebesar 1,39% Pada Tahun 2023 sd 2024 Laju pertumbuhan terkecil di kabupaten Merauke sebesar 1,01% pada Tahun 2023 dan 0,79% pada tahun 2024 sedangkan terbesar di kabupaten asmat sebesar 2,03% ada tahun 2023 dan sebesar 1,62% pada tahun 2024.



Gambar 2. 22 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan di Provinsi Papua Selatan (%)

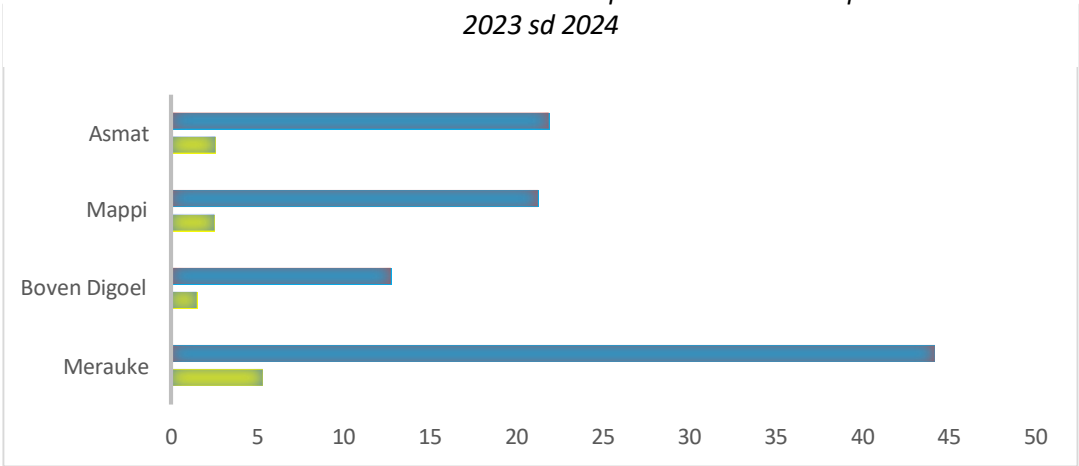
Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan, 2024

Tabel 2. 29 Laju Pertumbuhan penduduk Tahun 2020-2021

Kabupaten /Kota	Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2020	2021	2010-2021	2020-2021
Merauke	230.932	231.696	1,61	0,33
Boven Digoel	64.285	64.716	1,38	0,67
Mappi	108.295	109.579	2,77	1,19
Asmat	110.105	111.632	3,58	1,39
	513.617	517.623	2,34	0,78

Sumber: BPS Provinsi Papua dan Kabupaten, 2023

Gambar 2. 23 Persentase Penduduk menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2023 sd 2024



Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan, 2024

2.1.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor- faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB ditinjau dari dua sisi yaitu berdasarkan harga konstan (ADHK) dan harga berlaku (ADHB). PDRB ADHK digunakan untuk melihat proyeksi dari pertumbuhan ekonomi. dan PDRB ADHB digunakan untuk melihat proporsi lapangan usaha untuk mengidentifikasi sektor basis. Selama periode 2019-2023*, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten di Provinsi Papua Selatan berfluktuasi cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Kabupaten yang memiliki PDRB ADHK tertinggi adalah Kabupaten merauke dan Kabupaten Boven digoel. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 30 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

KABUPATEN	2019	2020	2021	2022	23**
Merauke	10.307.373,25	10.209.567,47	10.363.473,67	10.838.514,42	11.356,86
Boven Digoel	3.275.505,74	3.190.498,30	3.214.086,52	3.264.014,85	3.339,67
Mappi	1.884.399,21	1.860.729,26	1.902.235,50	1.997.291,58	2.044,98
Asmat	1.522.325,64	1.531.359,72	1.563.644,46	1.641.625,70	1.742,86
Papua Selatan	16.989.603,84	16.792.154,75	17.043.440,15	17.741.446,55	8.484,37

Sumber : BPS Provinsi Papua Selatan 2024

Tabel 2. 31 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Belaku (ADHB) menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

KABUPATEN	2019	2020	2021	2022	2023*
Merauke	16.023,135,34	16.026.177,57	16.348.481,81	17.326.133,19	18.950,54
Boven Digoel	4.818.163,77	4.820.544,40	4.952.108,10	5.073.332,27	5.341,06
Mappi	2.957.682,98	2.981.706,66	3.126.986,82	3.350.635,71	3.599,95
Asmat	2.470.834,23	2.569.099,86	2.694.794,31	2.881.876,31	3.145,30
Papua Selatan	26.269.816,32	26.407.528,49	27.122.371,04	28.631.977,48	1.145.000,30

Sumber : BPS Provinsi Papua Selatan 2024

Tabel 2. 32 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023 (persen)

KABUPATEN	2020	2021	2022	2023**
Merauke	7,55	-0,95	1,51	4,58
Boven Digoel	1,66	-2,60	0,74	1,55
Mappi	6,11	-1,26	2,23	5,00
Asmat	4,79	0,59	2,11	4,99
Papua Selatan	20,11	-4,22	6,59	16,12

Sumber : BPS Provinsi Papua Selatan 2024

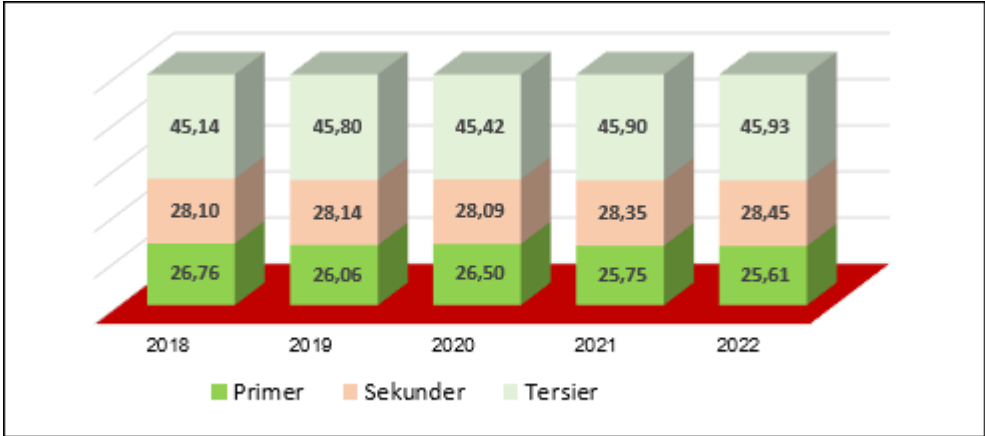
2.1.2.1.2 Struktur Ekonomi

Dalam rangka melihat dominasi dan ada tidaknya transformasi struktur ekonomi, 17 lapangan usaha di Provinsi Papua Selatan, maka dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Lapangan Usaha Primer : Lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian;
- b. Lapangan Usaha Sekunder : Lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industry pengolahan; lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta lapangan usaha konstruksi.
- c. Lapangan Usaha Tersier : Lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usah tersier terbagi menjadi 11 lapangan usaha. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estat; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial ; serta lapangan usaha jasa lainnya.

Gambar 2. 24 Struktur Perekonomian Provinsi Papua Selatan Tahun menurut Lapangan

Usaha Primer, Sekunder dan Tersier 2018-2022 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Papua 2023

2.1.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di suatu wilayah. Rata-rata tingkat ketimpangan kabupaten di Provinsi Papua Selatan termasuk kategori ketimpangan sedang pada posisi antara 0,3 hingga 0,4. Meskipun demikian, pada tahun 2017- 2021 tren rasio gini Provinsi Papua Selatan menunjukkan trend peningkatan yang mengindikasikan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Papua Selatan. Secara regional, wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan paling rendah pada tahun 2021 di Papua Selatan adalah Kabupaten Mappi (skor: 0,384) dan Kabupaten Merauke (skor: 0,385). Adapun wilayah yang memiliki tingkat ketimpangan tertinggi adalah Kabupaten Boven Digoel (skor: 0,407) dan Asmat (skor: 0,405).

Tabel 2. 33 Indeks Gini Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
1	Merauke	0,386	0,380	0,385	0,402	0,365
2	Boven Digoel	0,392	0,448	0,407	0,420	0,417
3	Mappi	0,416	0,427	0,384	0,403	0,420
4	Asmat	0,398	0,403	0,405	0,391	0,398
Rata-rata 4 Kabupaten		0,398	0,415	0,395	0,404	0,400

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.1.2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah

multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Secara umum terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di Papua Selatan dari 88,65 ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 90,52 ribu jiwa pada tahun 2022. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat di Kabupaten Mappi (2022: 26,76 ribu jiwa) dan Kabupaten Asmat (2022: 25,60 ribu jiwa). Meskipun mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, namun apabila meninjau persentase penduduk miskin di Papua Selatan terhadap total penduduk terdapat trend penurunan. Persentase penduduk miskin Papua Selatan tahun 2018 sebesar 18,25% dan mengalami penurunan menjadi 17,62% pada 2022. Kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Merauke yaitu 10,10% pada tahun 2022.

Tabel 2. 34 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Papua Selatan 2018-2022

Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)					Persentase Penduduk Miskin (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	23,72	23,49	22,89	23,83	23,96	10,54	10,35	10,03	10,16	10,10
Boven Digoel	13,70	13,54	13,86	13,88	14,20	20,35	19,66	19,41	19,90	20,04
Mappi	25,21	26,10	26,91	26,36	26,76	25,64	25,50	25,04	26,05	26,04
Asmat	26,02	25,80	25,12	25,04	25,60	27,41	26,60	25,49	24,83	24,87
Papua Selatan*	88,65	88,93	88,78	89,11	90,52	18,25	17,96	17,56	17,60	17,62

* Sumber : Data diolah Bapperda PPS dan BPS Provinsi Papua 2023

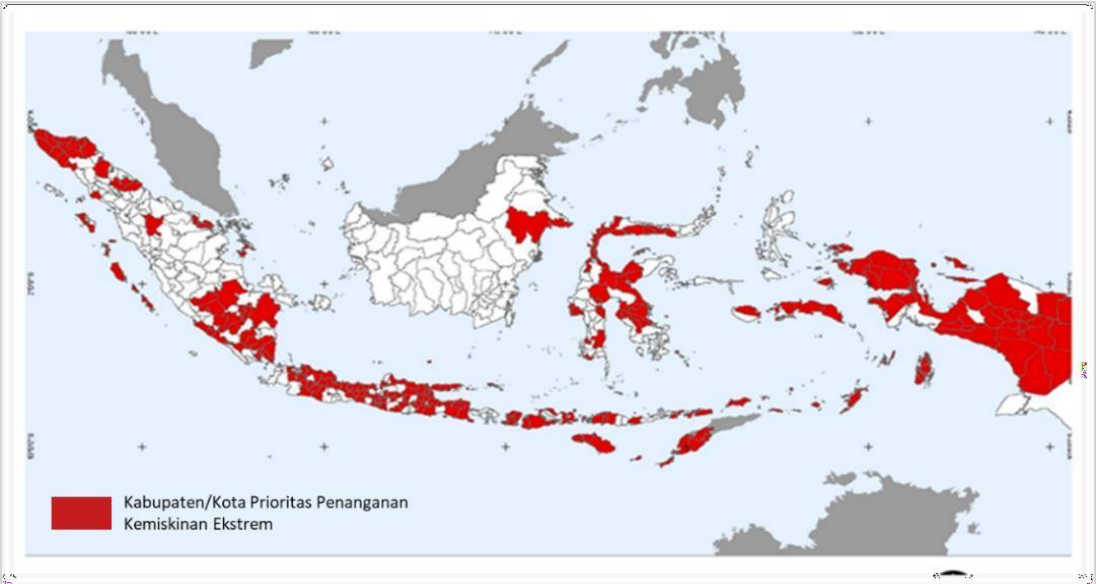
Arah kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Selatan akan dilaksanakan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten, dengan dasar pelaksanaan

program kemiskinan Ekstrim sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pencapaian target kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terpadu. Berdasarkan Gambar

diketahui bahwa 3 kabupaten di Provinsi Papua Selatan termasuk dalam wilayah prioritas penanganan kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

Gambar 2. 25 Sebaran 212 Kabupaten/Kota Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

Sumber: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2022



Tabel 2. 35 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua Selatan Tahun 2018 dan 2022

Kabupaten	Presentase Penduduk Miskin (%)		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
	2018	2022	2018	2022	2018	2022	2018	2022
Merauke	10,54	10,10	2,06	1,67	0,70	0,56	345.965	408.710
Boven Digoel	20,35	20,04	4,38	4,57	1,51	1,40	452.723	550.445
Mappi	25,64	26,04	5,07	3,90	1,41	0,81	301.237	402.212
Asmat	27,41	24,87	4,01	3,57	0,87	0,81	354.478	424.978
Rata-rata	18,25	17,62	3,88	3,43	1,12	0,90	363.601	446.586

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Berdasarkan tabel 2.35 dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin (P0), Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan selama 2018-2022.

Rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami penurunan dari 3,88 pada 2018 menjadi 3,43 pada 2022. Begitupula dengan rata- rata Indeks Keparahan Kemiskinan yang mengalami penurunan dari 1,12 pada tahun 2018 menjadi 0,90 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan pemenuhan kebutuhan dasar

penduduk di Papua Selatan pada 2018-2022 serta penurunan ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Papua Selatan.

2.1.2.1.5 Aspek Kesejahteraan Sosial dan Budaya

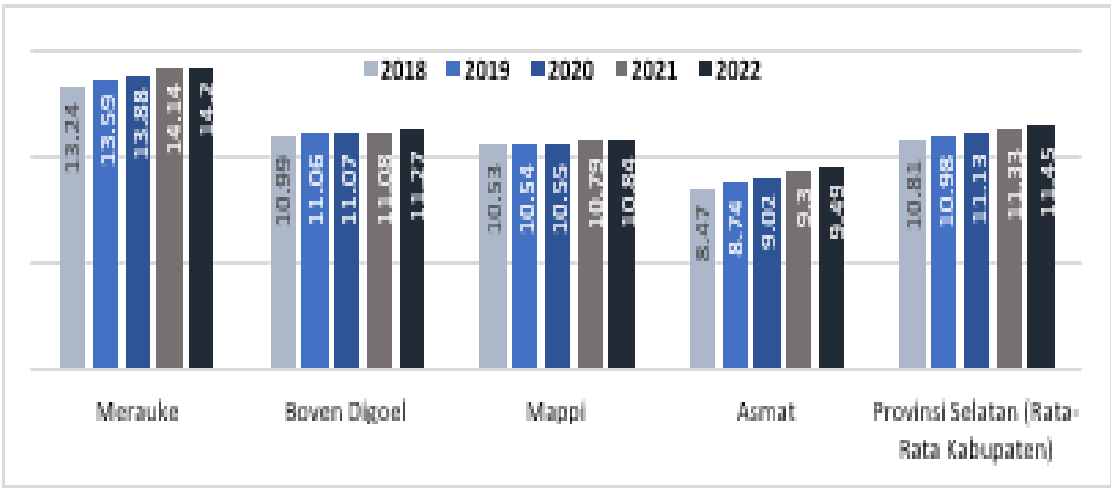
Secara umum provinsi Papua dan khususnya Provinsi Papua Selatan memiliki ketertinggalan yang disebabkan oleh: 1) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; 2) belum meratanya aksesibilitas menuju pelayanan dasar; 3) terbatasnya ketersediaan sarana prasarana secara merata; 4) belum optimalnya pengembangan perekonomian masyarakat; 5) masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah; serta 6) tingginya risiko bencana dan potensi konflik social

2.1.2.1.6 Pendidikan

A. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah yang menunjukkan peluang lamanya sekolah (dalam tahun) yang akan dijalani anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang.’

Gambar 2. 26 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Laki-laki dan Perempuan) Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2018-2022

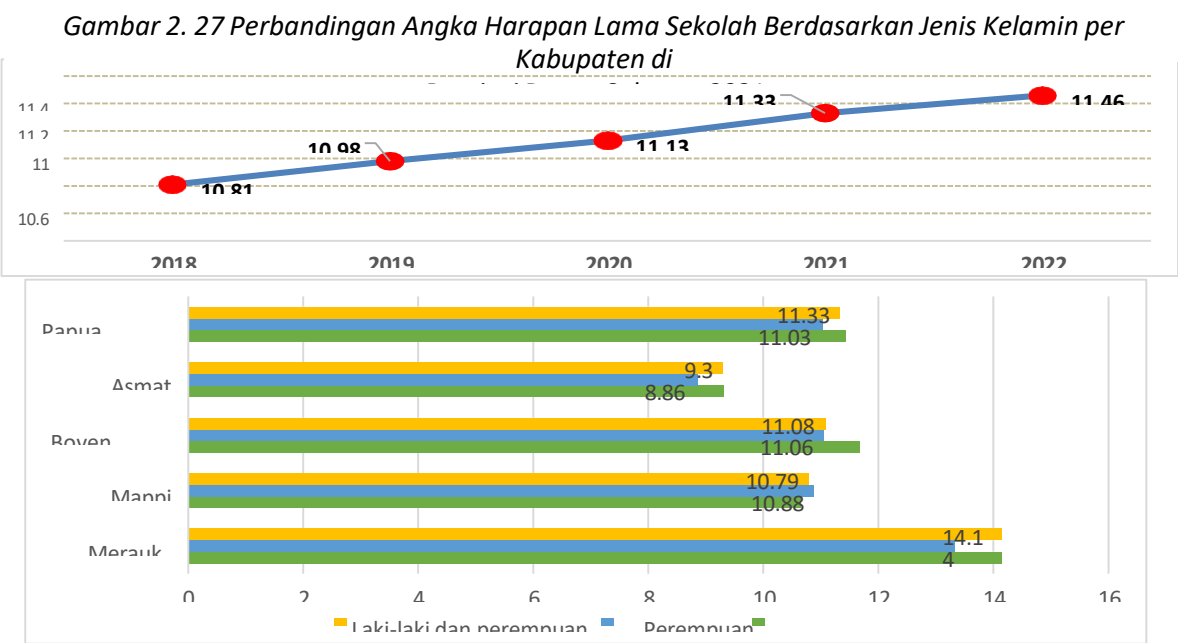


Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

HLS di Provinsi Papua Selatan hanya mengalami sedikit peningkatan

dalam 5 tahun terakhir (2018-2022), yang secara rata-rata dari 4 kabupaten masih berada pada kisaran angka 11, yakni 10,81 di tahun 2018 dan meningkat secara bertahap menjadi 11,45 di tahun 2022. Angka ini dapat diartikan bahwa anak 7 tahun (laki- laki dan perempuan) yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,5 tahun lamanya, atau sampai dengan kelas terakhir pada Pendidikan Menengah (SMA atau sederajat). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.26. Tinjauan per kabupaten menunjukkan HLS Kabupaten Merauke merupakan yang tertinggi, bahkan sejak tahun 2021 mencapai di atas 14 tahun, sementara HLS terendah terdapat di Kabupaten Asmat, yang masih berada di bawah 10 tahun hingga tahun 2022.

Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, terdapat sedikit perbedaan antara HLS laki- laki dan perempuan. Secara rata-rata kabupaten, HLS pada perempuan sedikit lebih rendah daripada laki-laki, namun keduanya sama-sama mencapai angka di atas 11 tahun. Terdapat pengecualian di Kabupaten Mappi, yang menunjukkan HLS pada perempuan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Berikut gambar yang menunjukkan capaian HLS menurut kabupaten pada tahun 2022 dan



Pada tahun 2023

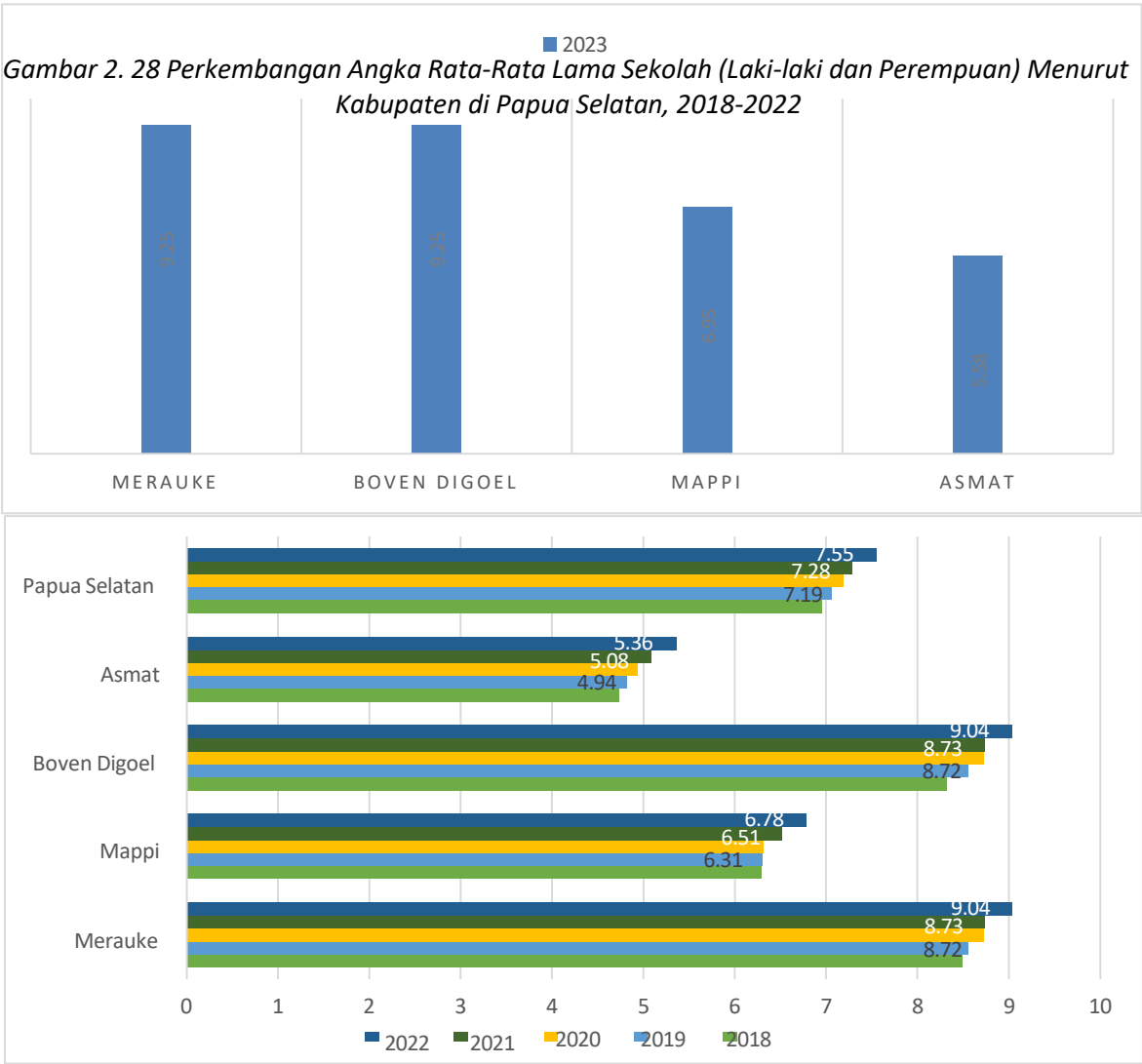
HarapanLama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua Selatan sebesar 11,15.

*Catatan: Angka Provinsi menggunakan angka rata-rata Kabupaten
Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

B. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, yang diukur pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sama halnya dengan HLS, angka rata-rata lama sekolah di Papua Selatan hanya mengalami sedikit peningkatan dalam 5 tahun terakhir, yang hingga tahun 2022 secara rata-rata baru mencapai angka 7 tahun plus. Artinya, rata-rata penduduk Provinsi Papua Selatan rata-rata mengenyampendidikan formal selama 7 tahun lebih atau setara dengan kelas 1 SMP. Angka ini masih di bawah angka rata-rata Nasional, yaitu dengan capaian 8,69 pada tahun 2022.

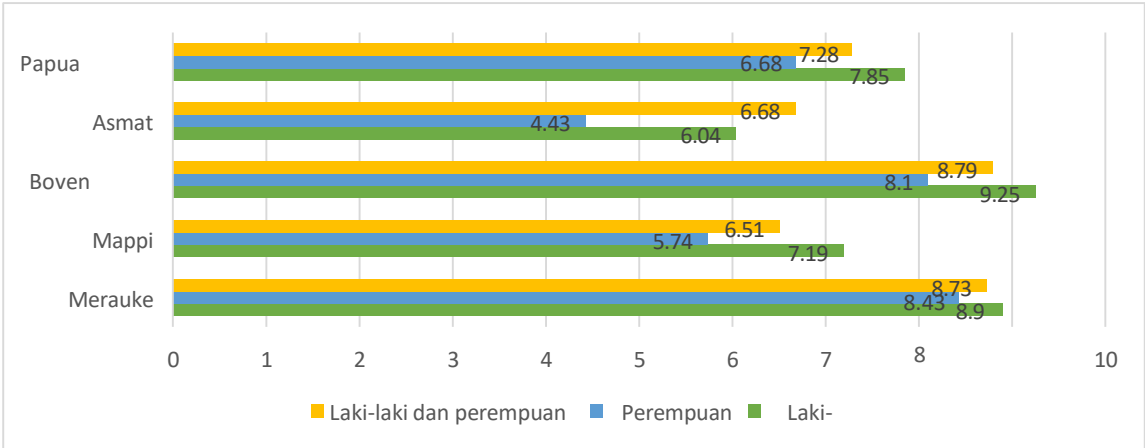
Berdasarkan kabupaten, terdapat 2 kabupaten dengan angka RLS di atas 8 (Merauke dan Boven Digoel), sedangkan 2 kabupaten lainnya masih berada di bawah angka 7. Gambar 2.28 menunjukkan perkembangan RLS di 4 Provinsi Papua Selatan dalam 5 tahun terakhir.



Catatan: Angka Provinsi menggunakan angka rata-rata Kabupaten Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Gambar 2.29 menampilkan angka RLS di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan 2 kabupaten lainnya, yakni mencapai di atas 9 tahun pada 2022. Sementara pada tahun yang sama Kabupaten Asmat hanya mencapai angka 5,36. Angka RLS pada perempuan di Provinsi Papua Selatan masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2021, RLS pada perempuan sebesar 6,68 tahun, atau tertinggal 1 tahun lebih dibandingkan RLS laki-laki yang mencapai 7,85 tahun.

Gambar 2. 29 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di



Provinsi Papua Selatan, 2021

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.1.2.1.7 Kesehatan

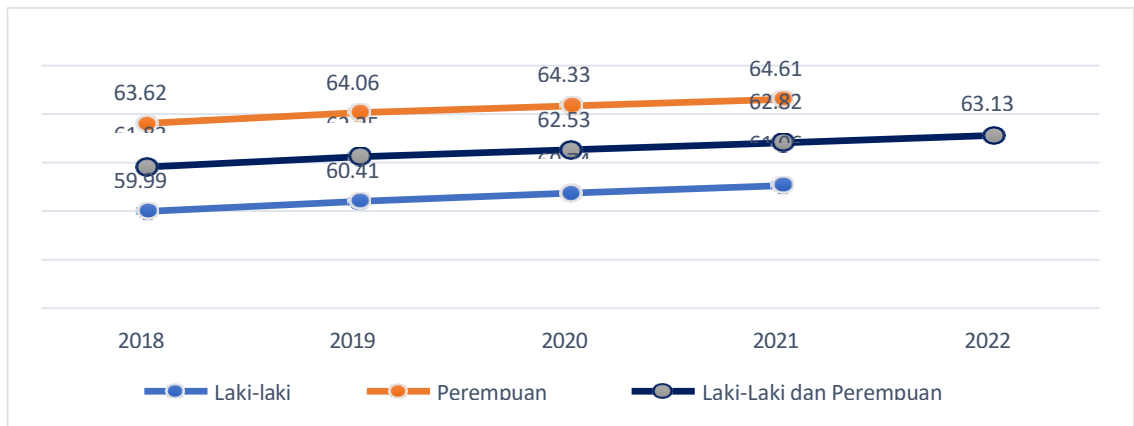
A. Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH menggambarkan usia kematian pada suatu populasi yang merupakan ringkasan pola usia kematian yang terjadi pada seluruh kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Angka ini merupakan gambaran kondisi kesehatan suatu wilayah secara garis besar. Tinggi rendahnyaUHH ditentukan oleh status kesehatan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor-faktor: angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit-penyakit tertentu, pelayanan kesehatan yang tersedia dan kondisi sosio-ekonomi (tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan serta gaya hidup dan kondisi psikososial).

Secara umum, UHH pada 4 Kabupaten di Papua Selatan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2022 rata-rata kabupaten mencapai angka 63,13 tahun. Pemilahan berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa UHH perempuan lebih tinggi daripada laki- laki, yang selaras dengan perbedaan pada angka nasional dan global. Di tahun 2021, UHH Peerempuan rata-rata kabupaten di Provinsi Papua Selatan mencapai angka 64,61 tahun, yanglebih tinggi sebanyak 3,5 tahun dibandingkan UHH laki-laki pada tahun yang sama (61,06 tahun). Berikut gambar yang menunjukkan perkembangan UHH berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Papua Selatan.

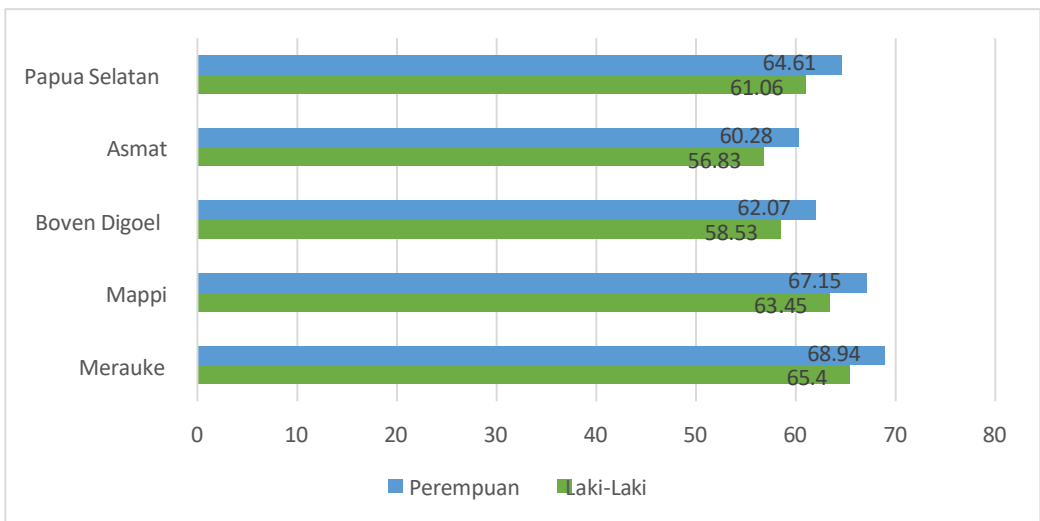
Gambar 2. 30 Perkembangan UHH Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan (Rata-Rata Kabupaten), 2018-2022

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023



UHH perempuan yang lebih tinggi daripada laki-laki itu terdapat di semua kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan. Pada tahun 2021, perbedaan angka berkisar pada angka 3,5 poin di semua kabupaten. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.31.

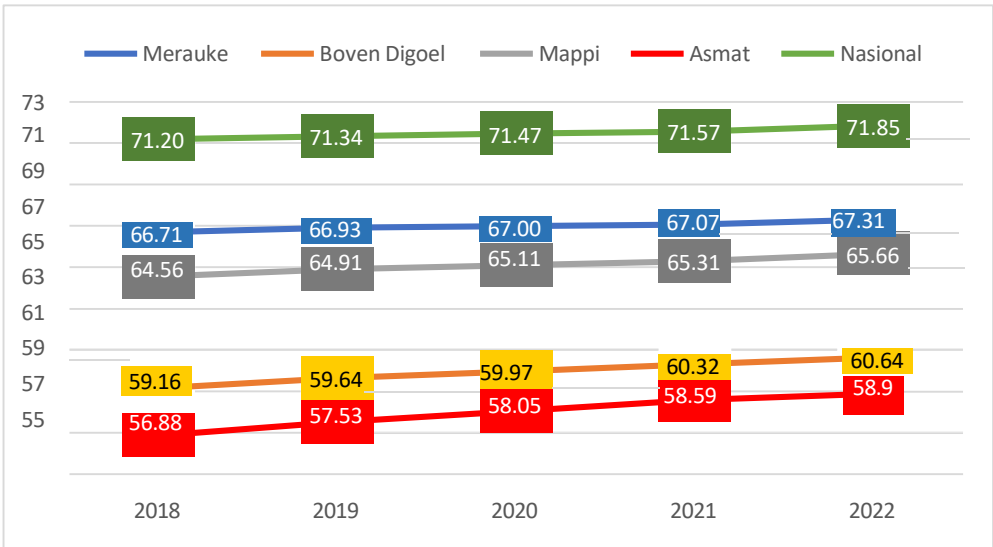
Gambar 2. 31 Perkembangan UHH Menurut Jenis Kelamin pada Masing-Masing kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Jika ditinjau perkembangannya per kabupaten, dari tahun ke tahun terdapat urutan yang tetap, yakni Kabupaten Merauke memiliki UHH tertinggi, diikuti oleh berturut-turut Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Selisih antara Kabupaten Merauke dan Asmat pada tahun 2018 mencapai hampir 10 tahun, yang secara bertahap mengalami sedikit perkembangan hingga pada tahun 2022 rentang perbedaannya menjadi 8,4 poin. UHH Kabupaten Merauke sendiri, sebagai yang tertinggi di Provinsi Papua Selatan, berada 4,5 poindi bawah angka nasional yakni 71,85 tahun di tahun 2022. Grafik berikut menunjukkan peningkatan UHH masing-masing Kabupaten sejak tahun 2018 hingga 2022 dibandingkan dengan UHH Nasional.

Gambar 2. 32 Perbandingan Perkembangan UHH 4 Kabupaten di Papua Selatan dengan Nasional, 2018- 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua dan BPS RI, 2023

B. Stunting

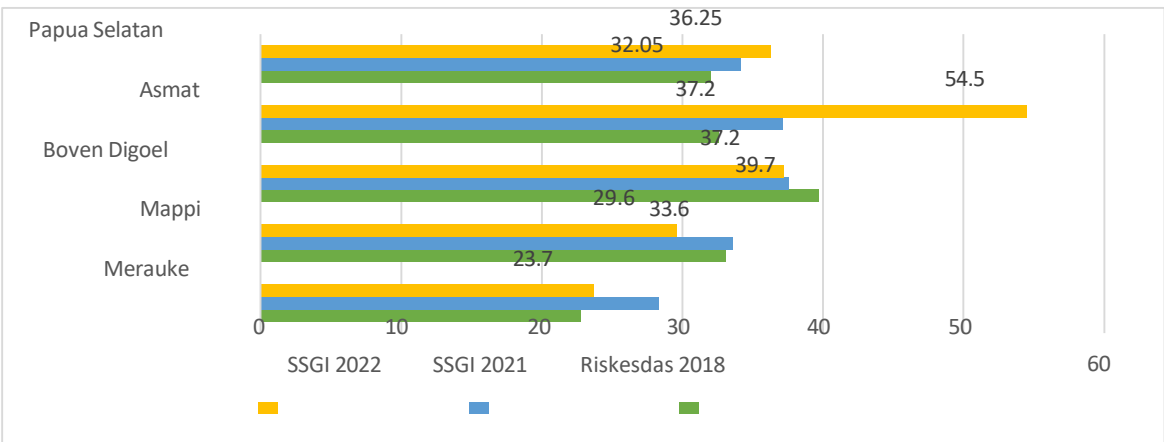
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Tingginya angka stunting merupakan hambatan dalam upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Program Percepatan penurunan stunting merupakan prioritas nasional yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan semua pemangku kepentingan;

Upaya penurunan angka stunting dijalankan melalui Intervensi Spesifik yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting dan. Intervensi Sensitif yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. Kelompok sasaran Percepatan Penurunan Stunting bukan saja anak balita, namun juga meliputi remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui. Pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 tahun, yakni berupa target antara yang harus dicapai sebesar 14% pada tahun 2024.

Berdasarkan pengukuran TB/U yang dapat menilai anak stunted (pendek), pada tahun 2022 berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) didapatkan angka rata- rata kabupaten untuk balita stunting sebesar 36,3%. Angka rata-rata kabupaten ini lebih tinggi daripada tahun- tahun sebelumnya, yakni 32,0% (Hasil Riskesdas 2018) dan 34,4% (SSGI 2021)

Tinjauan berdasarkan kabupaten menunjukkan bahwa Kabupaten Asmat memiliki prevalensistunting yang sangat tinggi (54,5%) pada tahun 2022, yang meningkat dibandingkan angka tahun 2018 dan 2021 yakni berturut-turut sebesar 32,6% dan 38,1%. Tiga kabupaten lainnyapun masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi, kecuali Kabupaten Merauke yang mendekati angka nasional pada tahun 2022 sebesar 23,7% (angka nasional 21,6%). Gambar berikut menunjukkan prevalensi stunting pada balita di 4 kabupaten wilayah Provinsi Papua Selatan berdasarkan hasil 3 survey yang dilaksanakan oleh Kemenkes RI.

Gambar 2. 33 Prevalensi Stunting pada Balita di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022



Sumber: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, SSGI 2022

2.1.2.1.8 Ketenagakerjaan

A. Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa di suatu wilayah. TPAK merupakan angka persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Tabel 2.36 menunjukkan perkembangan TPAK di Papua Selatan selama 5 tahun terakhir. Dapat diketahui bahwa rata-rata TPAK kabupaten di Papua Selatan mengalami trend penurunan pada tahun 2018-2022 dari 77,79 pada tahun 2018 menjadi 69,71 pada tahun 2022.

Tabel 2. 36 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten di Papua Selatan Tahun 2019-2023 (%)

Kabupaten	TPAK					TPT				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Merauke	68,05	70,12	70,69	62,43	68.72	2,61	3,43	2,19	2,64	3.61
Boven Digoel	74,90	75,48	79,72	75,62	71.84	3,08	8,09	6,73	5,56	3.07
Mappi	68,56	64,09	61,60	60,42	55.69	4,51	5,77	4,11	2,34	4.22
Asmat	82,84	83,35	81,78	81,16	59.71	0,49	1,06	2,38	n.a	n.a

Sumber: BPS Provinsi Papua 2023

Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Dengan kata lain, TPT merupakan persentase pengangguran terhadap total angkatan kerja. Rata-rata TPTKabupaten di Papua Selatan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 (Tabel 2.36). Meskipun tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja dapat dianggap sebagai indikator yang informatif dalam mencerminkan kinerja pasar tenaga kerja, namun perlu dipertimbangkan bahwa indikator ini belum cukup untuk menafsirkan ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan.

2.1.2.1.9 Pekerjaan Utama Penduduk

Tabel 2.37 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin menurut kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel 2.37 diketahui bahwa mayoritas (sebanyak 70.805 jiwa atau 27,92%) penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Selatan pada tahun 2021 bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, yang terdiri atas 50.647 jiwa laki-laki dan 20.158 jiwa perempuan. Berdasarkan gender, penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas mayoritas (32,94%) bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai, sedangkan penduduk usia perempuan usia 15 tahun ke atas mayoritas (40,79%) bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar.

Tabel 2. 37 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan di Provinsi Papua Selatan, 2023

Lapangan Pekerjaan Utama	Pendidikan tertinggi yang diTamatkan				
	< SD	SMP	SMA	PT	Jumlah Total
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	69.459	16.032	12.389	742	98.622
Pertambangan dan Penggalian	753	215	84	-	1.052
Industri Pengolahan	4.293	1.329	2.708	671	9.001
Pengadaan Listrik dan Gas	248	-	271	-	519
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	136	-	311	-	447
Konstruksi	1.447	2.234	2597	618	6.896
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.298	7.980	12.330	2448	34.047
Transportasi dan Pergudangan	1.701	1.598	2.590	830	6.719
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.464	920	2.149	430	4.963
Informasi dan Komunikasi	-	-	283	412	695
Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-	324	499	823
Real Estate	-	-	327	133	460
Jasa Perusahaan	501	531	3.128	1.291	5.451
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.060	796	7.437	5.107	15.400
Jasa Pendidikan	-	-	1.663	7.103	8.766
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	502	292	539	2.308	3.641
Jasa lainnya	2.012	651	1.237	472	4.372
Jumlah	95.865	32.578	50.367	23.064	21.874

Tabel 2. 38 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2021

Status PekerjaanUtama		Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh h dibayar	Buruh/ karyawan/ pegawai	Pekerja bebas	Pekerja keluarga /tidak dibayar	Total
Merauke	Laki-laki	10.345	26.604	2.802	25.931	2.461	8.125	76.268
	Perempuan	8.585	8.722	356	10.221	298	19.940	48.122
Boven Digoel	Laki-laki	3.825	4.228	335	11.015	707	1.709	21.819
	Perempuan	2.645	2.894	121	3.977	37	4.376	14.050
Mappi	Laki-laki	12.465	3.677	914	7.191	358	1.322	25.927
	Perempuan	5.333	1.483	0	2.804	0	4.282	13.902
Asmat	Laki-laki	7.169	12.214	113	6.510	736	2.992	29.734
	Perempuan	4.491	3.926	35	3.156	42	12.130	23.780
Papua Selatan	Laki-laki	33.804	46.723	4.164	50.647	4.262	14.148	153.748
		21,99	30,39	2,71	32,94	2,77	9,20	100,00
	Perempuan	21.054	17.025	512	20.158	377	40.728	99.854
		21,08	17,05	0,51	20,19	0,38	40,79	100,00
	Laki-laki + Perempuan	54.858	63.748	4.676	70.805	4.639	54.876	253.602
		21,63	25,14	1,84	27,92	1,83	21,64	100,00

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022

2.1.2.1.10 Budaya, Seni dan Olahraga

A. Festival Budaya dan Seni

Papua dikenal dengan 7 (tujuh) wilayah adat dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda, yaituwilayah adat Laa Pago, wilayah adat Mee Pago, wilayah adat Tabi, wilayah adat Saireri, wilayahadat Anim Ha, wilayah adat Domberay, dan wilayah adat Bomberay. wilayah adat Anim Ha meliputi wilayah Provinsi Papua Selatan yakni Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.

Wilayah Papua Selatan dengan pusat pemerintahan di Merauke berangkat dari terbukanya wilayah ini pada zaman Belanda saat

Pemerintah Belanda membuka suatu Pos Bestir dekat muara Sungai Maro pada tahun 1902 kemudian masuklah kapal besar di Sungai Maro, di satusisi karena rasa heran orang Marind maka mereka berteriak “kaya-kaya” yang artinya sahabat- sahabat sedangkan penumpang kapal menunjuk jari ke air sungai dan mereka menjawab “Maro-ke” yang artinya itulah Sungai Maro (Keuskupan Agung Merauke, 1999, p.11). Terbukanya pemerintahan di Merauke turut membuka akses ke wilayah lainnya di Papua Selatan seperti di Kepi dan Boven Digoel yang akhirnya kelak menjadi Kabupaten pemekaran sebagai bagian dari pemekaran wilayah pada tahun 2002 sehingga terbentuklah Kabupaten Mappi di Kepi, Kabupaten Boven Digoel di Tanah Merah dan Kabupaten Asmat di Agats sebagai cikal bakal berdirinya Provinsi Papua Selatan.

Peran Gereja Kristen Katolik injil dalam perkembangan peradaban di Papua Selatan tidak dapat dikesampingkan, pada tanggal 14 Agustus 1905 masuklah 4 (empat) misionaris Gereja Katolik yang turut membuka jalan bagi misionaris lainnya untuk menyebarkan agama tetapi juga membawa masyarakat yang masih dalam tataran hidup tradisional menjadi lebih modern. Gelombang berikutnya masuklah guru-guru perintis dari Kepulauan Kei untuk menyebarkan pendidikan bagi orang asli Papua Selatan, disusul kemudian dari Manado, Ambon dan sebagainya.

Dengan terbukanya pusat pemerintahan mulai dari zaman Belanda hingga saat ini secara langsung ikut mempengaruhi sistem sosial budaya di Papua Selatan. Sistem sosial budaya di Papua secara umum cenderung bersifat terbuka, keterbukaan itu ditunjukkan ditunjukkan dengan penerimaan terhadap berbagai proses perubahan dari luar yang masuk ke Papua Selatan dalam berbagai aktifitas yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, demografi, kebudayaan dan sebagainya. Akibat dari hal tersebut maka terjadi ketimpangan sosial dalam masyarakat di Papua Selatan yang dipengaruhi oleh pola hidup dimaksud sehingga terlihat adanya kesenjangan sosial antara orang asli Papua Selatan dan kelompok masyarakat lainnya. Penerimaan terhadap pengaruh sosial dari luar menyebabkan aktifitas kehidupan masyarakat di Papua Selatan cenderung mengikuti perubahan yang terjadi dan efeknya adalah terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat asli Papua Selatan dengan

kelompok masyarakatlainnya.

2.1.2.1.11 Sistem Mata Pencaharian

Provinsi Papua Selatan berada dalam Wilayah Adat Anim Ha yang terletak di dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea, Suku bangsa tersebut menyebar dan tinggal dalam zona ekologis rawa, pantai, sepanjang aliran sungai di wilayah Merauke, Mappi dan Asmat hingga zona kaki gunung dan lembah kecil di wilayah Boven Digoel. Di Papua Selatan terdapat sejumlah suku bangsa yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten yang dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2. 39 Nama dan Jumlah Suku Bangsa di Papua Selatan

Sumber: Data Primer Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023

No	Wilayah	Suku
1.	Kabupaten Merauke	1. Malind Muli Anim 2. Khima-Khima 3. Kanum/Kanume 4. Yeinan 5. Marori-Menggey 6. Maklew
2.	Kabupaten Mappi	1. Yaghai 2. Awyu 3. Wiyagar 3.1 Tamacharijo 3.2 Jocho 3.3 Utumi 3.4 Chaepkir 3.5 Kayagar 3.6 Bisme 3.7 Chomkir 4. Koroway Kombai 5. Asmat 6. Citak 7. Mitak
3.	Kabupaten Boven Digoel	1. Muyu 2. Mandobo 3. Auyu 4. Kombay 4.1 Sub Suku Wanggom 5. Suku Koroway 5.1 Sub Suku Wambon
4.	Kabupaten Asmat	1. Asmat 2. Banano 3. Kaigar 4. Sawi 5. Atohim 6. Auyu 7. Momuna 8. Korowai 6. Aanu

Pada wilayah ini memiliki hasil bumi seperti sagu dan ikan yang menghidupi suku- suku di wilayah tersebut, zona wilayah ini secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat di Papua Selatan dalam konteks sistem mata pencaharian umumnya sama yakni berburu, berkebun, meramu sagu, mencari ikan di sungai. Suku bangsa di Papua Selatan umumnya mempunyai mata pencaharian dengan berladang berpindah, beternak babi, dan berburu, serta menangkap ikan di sungai.

2.1.2.1.12 Sistem Teknologi

Sistem teknologi orang asli Papua terlihat dari sistem kehidupannya yang mengandalkan keahlian khusus yang diturunkan secara turun temurun seperti pada suku Asmat yang sangat mahir dalam membuat ukiran-ukiran kayu yang sudah sangat terkenal hingga ke mancanegara. Contoh lain dalam sistem teknologi yang digunakan dapat dilihat dari rumah tempat tinggal masyarakat misal Rumah Jew sebagai upacara kebudayaan suku Asmat atau rumah pohon suku Korowai di Boven Digoel.

2.1.2.1.13 Bahasa

Bahasa yang digunakan adalah bahasa penduduk asli Papua (bahasa non- Austronesia) yang tersebar pada kehidupan masyarakat di Papua.

Pada suku bangsa di Papua Selatan, keragaman bahasa terlihat dari penyebaran kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan letak kepemilikan hak ulayat, prinsip- prinsip bahasa suku Marind (Marind-Anim) dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok besar yaitu:

1. Jab-Anim : di pulau Kimaam, pesisir selat Mariana dan pesisir pantai Wamal
2. Maklew-Anim : menempati sepanjang pesisir pantai selatan dari Wambi sampai Kondo
3. Kanum-Anim : menempati kampung-kampung bagian darat (rawa/lapang) di Distrik Merauke sampai batas PNG
4. Jee-Anim(Yei) : menempati pinggiran kepala kali sungai Maro, tepatnya di sekitar Distrik Eligobel
5. Gab-Gab-Anim : menempati pinggiran kepala kali Bian

Selain pembagian tersebut terdapat sejumlah bahasa dikelompokkan dalam beberapa bagian yakni Bahasa Bian Marind Deg, Bahasa Engkalembu, Bahasa Imbuti (Marind), Bahasa Kanum Barkari, Bahasa Kanum Smerki,

Bahasa Kimaam, Bahasa Yelmek, Bahasa Riantana, Bahasa Kimagima, Bahasa Kiwai, Bahasa Moto, Bahasa Pijin, Bahasa Komolom (Mombun), Bahasa Konerau, Bahasa Makleu, Bahasa Marori (Morori), Bahasa Motu, Bahasa Kanum, Bahasa Smarki Kanum, Bahasa Ndom, Bahasa Ngguntar, Bahasa Ngkalembu,

Bahasa Tamer Tunai, Nelma Unauna, Bahasa Ngguntar, Bahasa Sota, Bahasa Smerki, Bahasa Yabega, Bahasa Ndom, Bahasa Yei, Bahasa Bian Marind, Bahasa Yei Bawah. Pada masyarakat di Boven Digoel setidaknya ada 16 bahasa suku yang tersebar di berbagai distrik, bahasa suku tersebut yakni:

1. Aghu : Jair
2. Citak : Yaniruma
3. Iwur : Ambatkwi
4. Kaibi : Arimop, Iniyandti, Waropko
5. Kombai : Bomakia, Kouh
6. Katogut Kapel : Manggelum
7. Korowai : Yaniruma
8. Momuna : Manggelum
9. Muyunoir : Ambatkwi, Waropko
10. Muyusour : Kombut, Mindiptana
11. Ninggerun : Firiwage
12. Siangha Yenimu : Subur
13. Wanbon : Arimop
14. Wanggom : Ambatkwi, Waropko
15. Jair : Fofi, Kouh, Mandobo, Jair
16. Yanggom : Mindiptana

Jenis bahasa lain di Boven Digoel yakni Bahasa Ale, Bahasa Are, Bahasa Awyu Anggai, Bahasa Awyu Meto (Awyu Metto), Bahasa Kawiyet, Bahasa Okpari, Bahasa Wambon, Bahasa Kitum, Bahasa Naray, Bahasa Kokenop, Bahasa Kenonden, Bahasa Kenemaf, Bahasa Kombai, Bahasa Jair, Bahasa Mandobo, Bahasa Kombai Kali (Tajan), Bahasa Korowai Lumpur, Bahasa Kombai Darat, Bahasa Citak Mitak, Bahasa Korowai Kali, Bahasa Korowai Batu, Bahasa Awyu, Bahasa Kombai Darat, Bahasa Komela, Bahasa Komyandaret, Bahasa Saukambo, Bahasa Korowai Karuwage (Korowage), Bahasa Korowai Selatan (Korowai Lumpur/Klufwo Auf Umbale), Bahasa Muyu, Bahasa Awyu, Bahasa Mandobo Bawah, Bahasa Mandobo Tengah (Kop Kambo), Bahasa Wambon, Bahasa Ketagut, Bahasa Okpade, Bahasa Muyu Selatan, Bahasa Nai, Bahasa

Nagi, Bahasa Senggaop, Bahasa Kitumdup, Bahasa Namak, Bahasa Ketum (Kitum), Bahasa Namas, Bahasa Kakaip, Bahasa Okbarin, Bahasa Jonggom, Bahasa Kamindip, Bahasa Ningrum, Bahasa Okpari, Bahasa Kasaut, Bahasa Tsaukwambo, Bahasa Kombai, Bahasa Wambo Tawe Tirop, Bahasa Kokenop, Bahasa Wambo Kenondit, Bahasa Kopwamup (Mandobo Tengah), Bahasa Wambon Kenondik (Wombon, Womsi), Bahasa Wanggom, Bahasa Wombon (Womsi), Bahasa Iwur, Bahasa Kataut, Bahasa Yonggom, Bahasa Ninggikum, Bahasa Kadi (Muyu Utara), Bahasa Kasaut, Bahasa Kapom. Kehidupan masyarakat di Kabupaten Asmat pun sama halnya dengan wilayah lainnya dimanabahasa menjadi pembeda antar satu suku dan suku lainnya maupun. Beberapa bahasa lokal di Kabupaten Asmat adalah Bahasa Amathamit (Athokhin), Bahasa Arakam, Bahasa Asmat Bets Mbup terdiri atas tiga dialek, yaitu Bahasa Asmat Dialek Bets Mbup, Bahasa Asmat Dialek Bismam, dan Bahasa Asmat Dialek Simay, Bahasa Asmat Safan (Asmat Pantai), Bahasa Attojin, Bahasa Asmat Sawa, Bahasa Asmat Tomor, Bahasa Asmat Yamas, Bahasa Asmat Buagani, Bahasa Asmat Sirat, Bahasa Asmat Unir Sirau, Bahasa Asmat Kenok, Bahasa Asmat Joirat, Bahasa Asmat Wajens, Bahasa Korowai, Bahasa Momuna, Bahasa Asmat, Bahasa Atam (Temma), Bahasa Asmat Kontre, Bahasa Nale, Bahasa Sambogo, Bahasa Bouram, Bahasa Buagani, Bahasa Manep, Bahasa Pupis, Bahasa Momogo, Bahasa Sawa, Bahasa Jinak, Bahasa Joerat, Bahasa Nakai, Bahasa Kapi, Bahasa Yakapis, Bahasa Kaigar, Bahasa Okor, Bahasa Kamur, Bahasa Amara, Bahasa Suagai, Bahasa Kapayap (Soko Benanu), Bahasa Kopkaga, Bahasa Momuna, Bahasa Citak, Bahasa Karufo Auf, Bahasa Korowai Kombai, Bahasa Korowai Baigun (Atigun), Bahasa Korowai Kopkaka, Bahasa Nalik Selatan, Bahasa Momona, Bahasa Pupis, Bahasa Eroko, Bahasa Kenyam, Bahasa Bogani, Bahasa Sagapu, Bahasa Asmat Sirau, Bahasa Menep, Bahasa Ujin, Bahasa Buek, BahasaSaman, Bahasa Sawi, Bahasa See, Bahasa Nare, Bahasa Tabahair (Bipim, Bipin), Bahasa Tomor, Bahasa Jifak, Bahasa Ami, Bahasa Ulakin (Ulakuno), Bahasa Vamin, Bahasa Waicen, Bahasa Atokhoim, Bahasa Yakapis, Bahasa Mumugu, Bahasa Joerat, Bahasa Pupis, Bahasa Yamas. Pada masyarakat di Kabupaten Mappi terdapat jenis bahasa yang terbagi kedalam beberapajenis yakni Bahasa Awyu Darat Kotiak, Bahasa Yaghai, Bahasa Awyu Darat Yagatsu-Kiki Terdiri Atas Dua Dialek, Yaitu (1) Bahasa AwyuDarat Dialek Yagatsu Dan (2) Bahasa Awyu Darat Dialek Kiki, Bahasa Wiyagar, Bahasa Tamario, Bahasa Awyu Laut, Bahasa Awyu Tokompatu (Awyu Tokhompatu), Bahasa Awyu, Bahasa Citak,, Bahasa Ro (Ru), Bahasa U, Bahasa Yaghai Mur

dan Bahasa Yaghai Wairu.

Kesulitan dalam pelestarian bahasa adalah tidak seragamnya bahasa dalam satu kelompok masyarakat, dimana setiap suku bangsa mempunyai bahasa yang berbeda-beda sehingga terdapat kesulitan jika bahasa diintegrasikan dalam konsep pendidikan. Potensi punahnya bahasa lokal dapat terjadi yang disebabkan oleh:

1. Adanya perkawinan campuran orang asli Papua dengan suku bangsa lain maupun sebaliknya;
2. belum masuknya bahasa daerah dalam kurikulum sekolah;
3. Tidak integrasinya bahasa dalam berbagai aspek;
4. Tingkat modernisasi yang tinggi menyebabkan generasi muda tidak tertarik terhadap bahasa lokal.

Dalam kaitannya dengan regulasi Pemerintah Provinsi Papua Selatan dapat mengembangkan alternative sehubungan dengan pelestarian Bahasa melalui Pendidikan balai Bahasa maupun aktivitas lainnya.

2.1.2.1.14 Sistem Kekerabatan

sistem sosial masyarakat di Papua Selatan, terbagi dalam tipe berikut:

1) Tipe Iroquois

Tipe ini dijumpai salah satunya pada orang Marind-Anim dimana tipe ini mengklasifikasikan anggota kerabat sepupu paralel dengan istilah yang sama dengan saudara kandung dengan ciri penggunaan istilah yang sama untuk menyebut ayah maupun untuk semua saudara laki-laki ayah dan semua saudara laki-laki ibu.

2) Tipe Hawaiian

Tipe ini dijumpai pada orang Asmat dan orang Kimaam yakni suatu sistem pengelompokan yang menggunakan istilah yang sama untuk menyebut saudara- saudara sekandung dan semua saudara-saudara sepupu silang dan paralel.

3) Tipe Omaha

Tipe ini dijumpai pada orang Awyu dan orang Muyu dimana tipe ini adalah suatu sistem yang mengklasifikasikan saudara-saudara sepupu silang matrilateral dan patrilateral dengan istilah-istilah yang berbeda dan istilah-istilah untuk saudara sepupu silang itu dipengaruhi oleh tingkatan generasi dan bersifat tidak simetris, sehingga istilah untuk anak laki-laki saudara laki-laki ibu (MBS) adalah sama dengan saudara laki-laki ibu (MB) dan istilah untuk anak laki-laki saudara perempuan ayah (FZS) adalah sama untuk anak laki-laki saudara perempuan (ZS).

2.1.2.1.15 Pembagian Wilayah Adat

Suku Marind (Marind-Anim), wilayah tanah adatnya mencakup seluruh wilayah bagian selatan Kabupaten Merauke dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah hak ulayat Suku Jakai, Suku Auyu, Suku Wambon dan Suku Muyu mulai dari bagian bawah kali Digoel, mengikuti Kali Dige, Kali Bian sampai batas negara PNG
- Sebelah timur berbatasan dengan batas Negara PNG sampai ke Desa Kondo.
- Sebelah barat berbatasan dengan pesisir pantai Laut Arafuru sampai ke Kali Digoel (Uwimbu).

Adapun wilayah adat Ha-Anim meliputi semua wilayah di Provinsi Papua Selatan yakni

- (1) Kabupaten Merauke,
- (2) Kabupaten Asmat,
- (3) Kabupaten Mappi, dan
- (4) Kabupaten Boven Digoel.

Suku Marind (Marind-Anim), wilayah tanah adatnya mencakup seluruh wilayah bagian selatan Kabupaten Merauke dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan wilayah hak ulayat Suku Jakai, Suku Auyu, Suku Wambon dan Suku Muyu mulai dari bagian bawah kali Digoel, mengikuti Kali Dige, Kali Bian sampai batas negara PNG
- Sebelah timur berbatasan dengan batas Negara PNG sampai ke Desa Kondo.
- Sebelah barat berbatasan dengan pesisir pantai Laut Arafuru sampai ke Kali Digoel (Uwimbu).

Suku-suku yang mendiami Kabupaten Asmat mempunyai batas wilayah batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan Kabupaten Yahukimo
- Sebelah selatan berbatasan dengan laut arafura dan Kabupaten Mappi
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digoel
- Sebelah barat berbatasan dengan laut arafura dan Kabupaten Mimika

- Suku-suku yang mendiami Kabupaten Mappi mempunya batas wilayah batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Asmat
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merauke
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven Digoel
- Sebelah barat berbatasan dengan laut arafura dan Kabupaten Asmat

Suku-suku yang mendiami Kabupaten Boven Digoel mempunya batas wilayah batas-batassebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merauke
 - Sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mappi

2.1.2.1.16 Olah Raga

Olah raga tidak dapat dipisahkan dari konteks kehidupan masyarakat di Papua Selatan, selayaknya kegemaran masyarakat Papua pada umumnya olah raga sepak bola menjadi kegemaran bagi anak-anak muda. Cabang sepak bola belum menunjukkan prestasi sampai level nasional walaupun ada pemain-pemain dari Papua Selatan yang tembus hingga tim nasional. Khusus di Papua Selatan dari zaman dahulu terkenal sebagai pemasok atlet untuk cabang olah raga atletik untuk nomor tolak peluru maupun lembar lembing yang sudah menghasilkan sejumlah sejumlah atlet yang berlaga mewakili Papua pada event nasional maupun mewakili Indonesia pada ajang internasional.

2.1.2.1.17 Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi politik masyarakat Papua Selatan khususnya jika diukur dari partisipasi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah cenderung masih kurang yang ditandai dengan jumlah perwakilan orang asli Papua yang menjadi legislator.

Tabel 2. 40 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2022

No	Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Merauke	28	2	30
2	Boven Digoel	19	1	20
3	Mappi	23	2	25
4	Asmat	17	8	25

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023.

Keterlibatan perempuan di parlemen menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keterwakilan dan pemberdayaan perempuan di sektor publik. Indikator ini memperlihatkan sejauh mana perempuan memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambilan keputusan dalam proses politik formal, khususnya di lembaga legislatif. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta keterkaitannya dengan pemberdayaannya. Meskipun proporsi perempuan di parlemen tingkat Kabupaten masih tergolong sangat rendah yaitu <10% (Tabel 2.41), namun kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Asmat dengan keterwakilan perempuan sebesar 47,06% pada tahun 2022.

Tabel 2. 41 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	20,69	20,69	6,67	6,67	6,67	6,67
Boven Digoel	0,00	10,00	5,00	5,56	5,00	5,00
Mappi	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Asmat	4,00	4,00	28,00	28,00	28,00	47,06

Sumber: BPS Nasional, 2023

Keterwakilan orang asli Papua untuk duduk dalam parlemen perlu menjadi perhatian, sebab secara kuantitas belum menunjukkan partisipasi yang signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan penguatan politik terhadap orang-orang Asli Papua antara lain melalui:

- a) Meningkatkan kesadaran politik dan peran aktif orang asli Papua sehingga dapat berperan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara lain dapat ditempuh dengan menghadirkan partai lokal atau kuota parlemen bagi orang asli Papua;
- b) Memaksimalkan peran lembaga-lembaga masyarakat adat dalam pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan dalam proses perumusan berbagai regulasi maupun secara implementasinya.

Guna mewujudkan itu maka diperlukan kemandirian politik orang asli

Papua yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik dan demokrasi, meningkatnya tata pemerintahan yang baik, meningkatnya keberpihakan kepada orang asli Papua, meningkatnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, meningkatnya peran serta lembaga masyarakat adat dalam pembangunan, meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang dasar serta taat hukum.

2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, baik pada urusan wajib maupun pilihan.

2.2.1 Urusan Layanan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

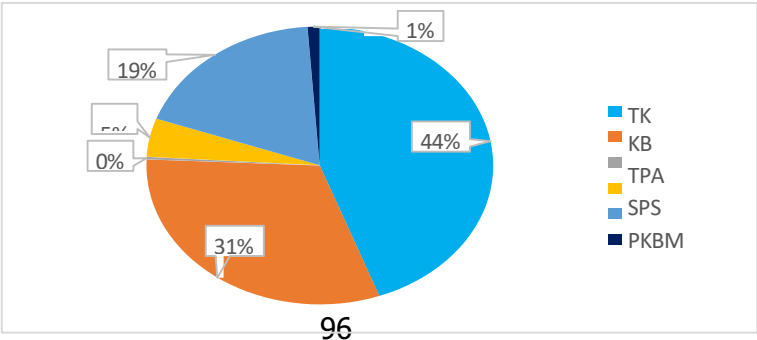
2.2.1.1 Pendidikan

Aspek Pelayanan Pendidikan yang dibahas dalam dokumen ini adalah pendidikan dalam jalur formal, yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta mencakup jenis pendidikan umum, vokasi, dan khusus.

2.2.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini memiliki berbagai bentuk, antara lain pada Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Dari berbagai jenis pendidikan itu, yang tergolong jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal. Proporsi masing-masing jenis PAUD di Papua Selatan ditunjukkan dalam gambar 2.34 di bawah ini, yang menunjukkan jenis TK dan Kelompok Bermain sebagai bentuk pendidikan terbanyak (masing-masing 44% dan 31%).

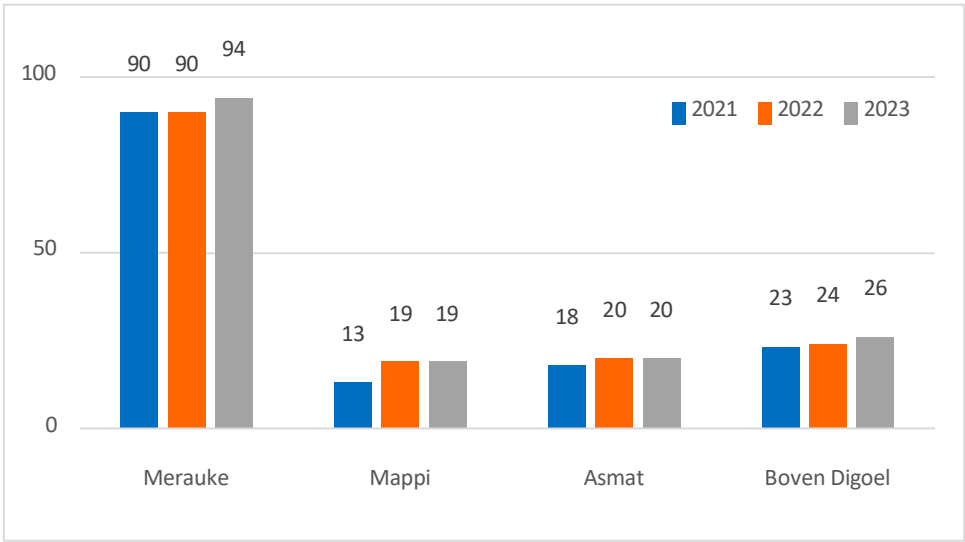
Gambar 2. 34 Jenis dan Proporsi PAUD di Papua Selatan Tahun 2023 (%)



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi -

Jumlah TK di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan menunjukkan penambahan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023, tercatat 159 TK di wilayah Provinsi Papua Selatan, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Metrauke (94 TK). Data dari Kemendikbud tersebut dirangkum pada Gambar berikut.

Gambar 2. 35 Perkembangan Jumlah TK Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan, 2021-2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi -

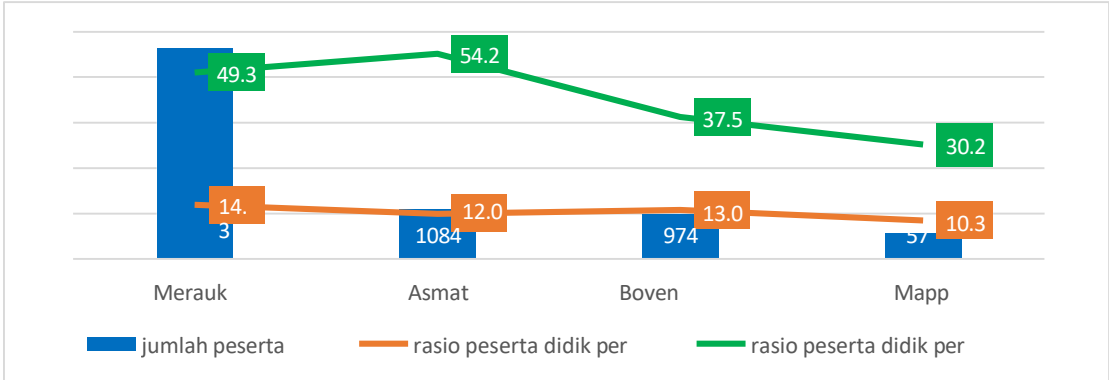
Jumlah peserta didik TK di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2023 tercatat 7.262 anak, sehingga rasio jumlah siswa per sekolah di tingkat provinsi adalah 46 anak. Angka ini paling padat di Kabupaten Asmat (54 siswa per sekolah), dan paling rendah di Mappi (30 siswa). Jumlah guru TK di Papua Selatan tahun 2023 tercatat berjumlah 544 orang, masing-masing 323 guru di Kabupaten Merauke, 90 guru di Asmat, 75 guru di Boven Digoel dan 56 guru di Mappi. Jika dihitung rasio guru per sekolah, secara keseluruhan tingkat provinsi diperoleh angka 3,4 guru per sekolah TK.

Adapun rasio guru terhadap peserta didik TK untuk tingkat provinsi terhitung 1 guru untuk 13,3 anak didik. Berdasarkan kabupaten, rasio itu berkisar antara 10 hingga 14, dengan rasio terbesar di Kabupaten Mappi (1:10). Rasio ini sudah memenuhi standar nasional, yaitu

minimal 1 guru untuk 15 anak didik pada PAUD usia 4-6 tahun. Gambar berikut menampilkan jumlah peserta didik serta rasio guru terhadap peserta didik dan rasio peserta didik per. sekolah di masing-masing Kabupaten tahun 2023.

Gambar 2. 36 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat TK di Provinsi Papua Selatan, 2023

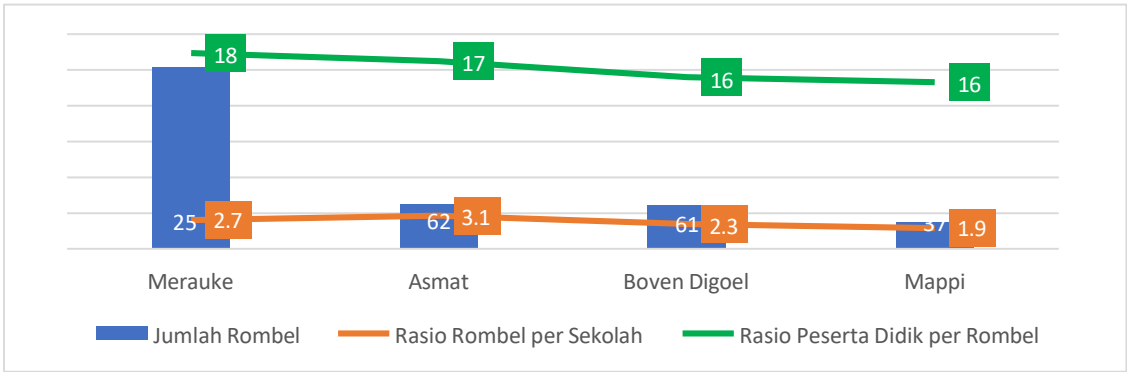
Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan



Teknologi

Sedangkan jika dihitung berdasarkan Rombongan Belajar (Rombel), pada tingkat TK di Provinsi Papua Selatan terdapat 377 Rombel (Dapodikdasmen, 2023), atau 2-3 rombongan belajar per sekolah. Pemilahan berdasarkan kabupaten menunjukkan pula angka terbanyak adalah 3 rombongan belajar per sekolah. Berikut gambar yang menampilkan jumlah rombongan belajar, jumlah siswa per Rombongan Belajar serta jumlah Rombongan Belajar per sekolah berdasarkan Kabupaten.

Gambar 2. 37 Jumlah Rombongan Belajar, Rasio Siswa per Rombongan Belajar dan Rasio Rombongan Belajar per Sekolah pada Tingkat TK di Provinsi Papua Selatan 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2.2.1.1.2 Pendidikan Dasar

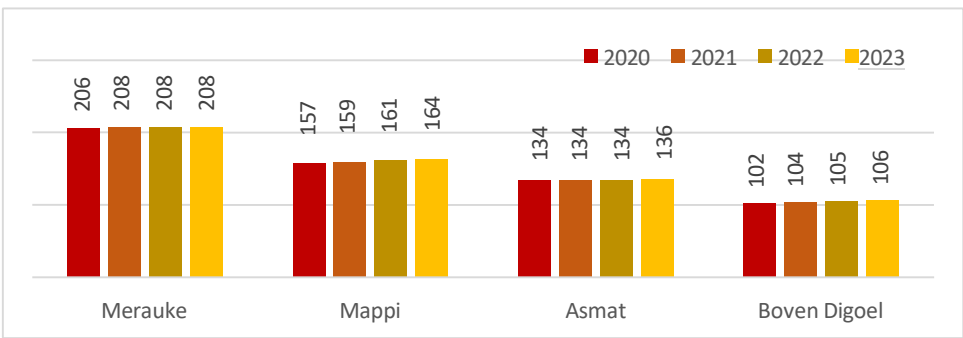
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi

jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar (SD) – termasuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Provinsi Papua Selatan tidak banyak mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir, dari sejumlah 599 SD pada tahun 2020 menjadi 614 SD di tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah SD berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir.

Gambar 2. 38 Perkembangan Jumlah SD Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2020 2023



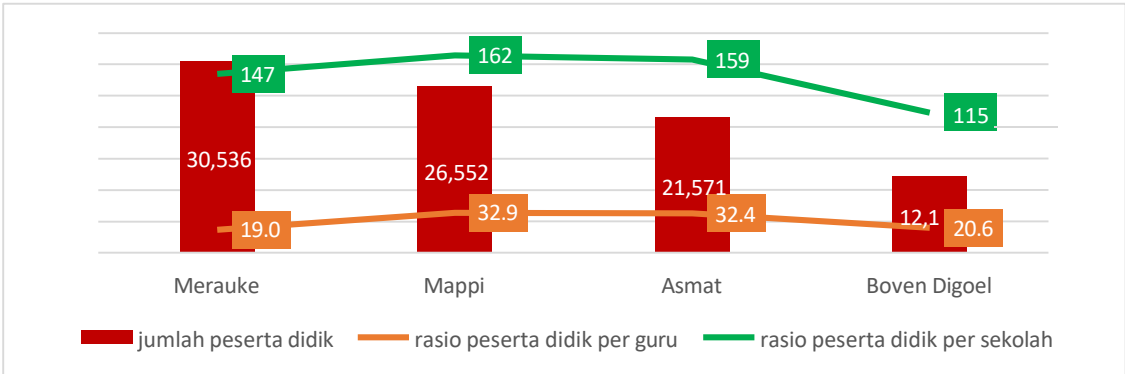
Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Pada tahun 2023, SD terbanyak terdapat di Kabupaten Merauke (208 sekolah) dan paling sedikit di Boven Digoel (106 sekolah). Rasio peserta didik per sekolah untuk tingkat provinsi terhitung 148 peserta didik per sekolah, dengan kisaran dari 115 peserta didik (Boven Digoel) hingga 162 peserta didik (Mappi).

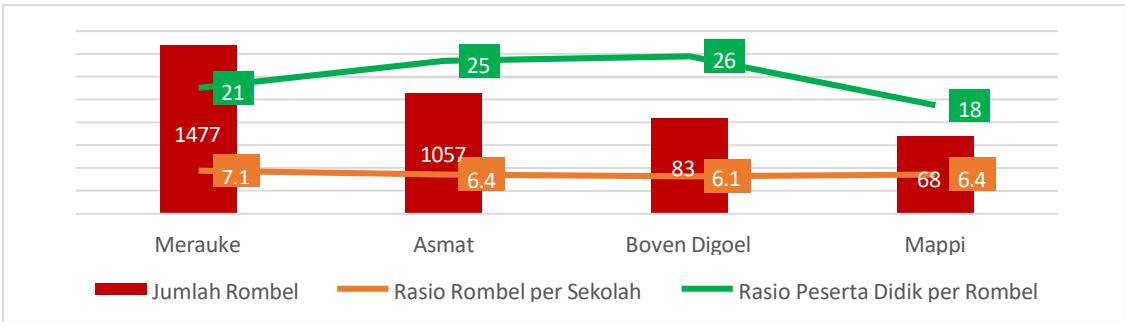
Sedangkan guru yang mengajar pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat sebanyak 3669 guru. Dengan jumlah ini, diketahui bahwa rasio guru terhadap sekolah dasar di Provinsi Papua Selatan adalah 6 guru per sekolah. Jika dipilah per kabupaten, maka kabupaten yang rasio guru per sekolah di tingkat SD tertinggi terdapat di Kabupaten Merauke, yakni 7,7 guru untuk 1 sekolah. Kabupaten Mappi dan Asmat memiliki rasio yang sama dengan 5 orang guru per sekolah. Sedangkan kecukupan guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru yang untuk tingkat provinsi diperoleh angka 24,8 siswa untuk 1 guru. Angka ini belum memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlahpeserta didik SD terhadap

gurunya adalah 20:1. Namun jika dipilah per kabupaten, nampak bahwa Kabupaten Merauke telah memenuhi standar ini. Berikut gambar yang merangkum informasi tentang peserta didik serta rasionya terhadap guru dan sekolah di Provinsi Papua Selatan.

Gambar 2. 39 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik: Sekolah pada Tingkat SD di Provinsi Papua Selatan, 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Gambar 2. 40 Jumlah Rombel, Rasio Peserta Didik per Rombel dan Rasio Rombel per Sekolah pada Tingkat SD di Provinsi Papua Selatan, 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

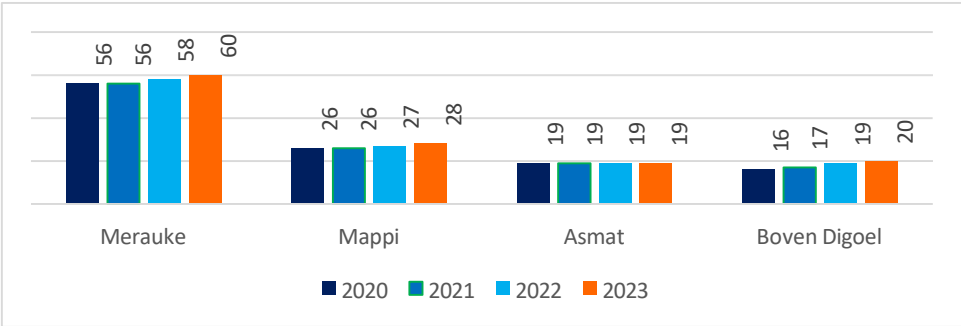
Untuk tingkat SD, jumlah Rombongan Belajar (Rombel) ideal berdasarkan Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan melalui Permendikbud adalah 6-24 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 28 anak. Untuk provinsi Papua Selatan, rata-rata rombongan di tiap sekolah untuk tingkat SD adalah 6,6 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan sebanyak 22 orang. Angka provinsi ini telah memenuhi standar nasional. Jika dipilah per kabupaten, Kabupaten Asmat dan Boven Digoel belum memenuhi standar jumlah peserta didik dalam 1 rombongan rombongan per sekolah (melebihi 24 siswa). Sedangkan mengenai jumlah rombongan telah terpenuhi oleh semua kabupaten, dengan jumlah rombongan di atas 6 (lihat Gambar 2.40).

Sekolah Menengah Pertama

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) - termasuk Madrasah

Tsanawiyah (MTs-) di Provinsi Papua Selatan juga mengalami penambahan dalam 4 tahun terakhir, dari sejumlah 117 SMP pada tahun 2020 menjadi 127 di tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah SMP di Provinsi Papua Selatan berdasarkan kabupaten dalam 5 tahun terakhir.

Gambar 2. 41 Perkembangan Jumlah SMP Berdasarkan Kabupaten di Papua Selatan, 2020- 2023

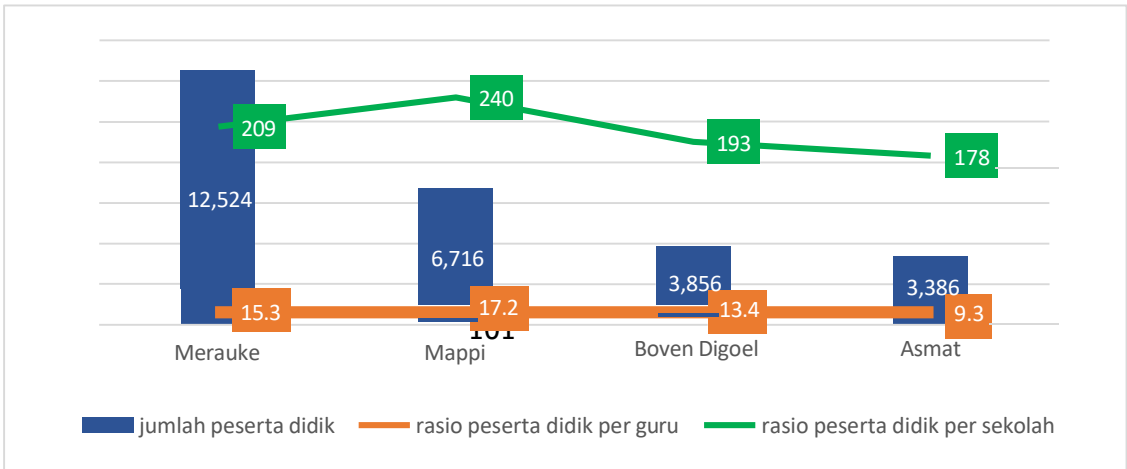


Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Rasio peserta didik per sekolah pada tingkat SMP di Papua Selatan pada tahun 2023 sebesar 209 peserta didik per sekolah, dengan kisaran antara 175 peserta didik (Kabupaten Asmat) hingga 240 peserta didik (Kabupaten Mappi).

Jumlah guru yang SMP mengajar pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat sebanyak 1861 guru. Dengan jumlah ini, terhitung rasio guru: sekolah pada jenjang ini di Provinsi Papua Selatan adalah 14,7 guru untuk 1 sekolah. Rasio terendah terdapat di Kabupaten Asmat (19,1 guru/sekolah) sedangkan tertinggi Kabupaten Merauke (13,7 guru/sekolah). Sedangkan ketersediaan guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru diperoleh angka 14,2 siswa untuk 1 guru. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMP terhadap gurunya adalah 20:1. Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, seluruh kabupaten telah memnuhi standar tersebut. Gambar 2.42 berikut ini menyajikan jumlah peserta didik serta rasionya per 1 guru dan per sekolah berdasarkan kabupaten di Papua Selatan.

Gambar 2. 42 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik: Guru dan Rasio Peserta Didik: Sekolah pada Tingkat SMP di Provinsi Papua Selatan, 2023

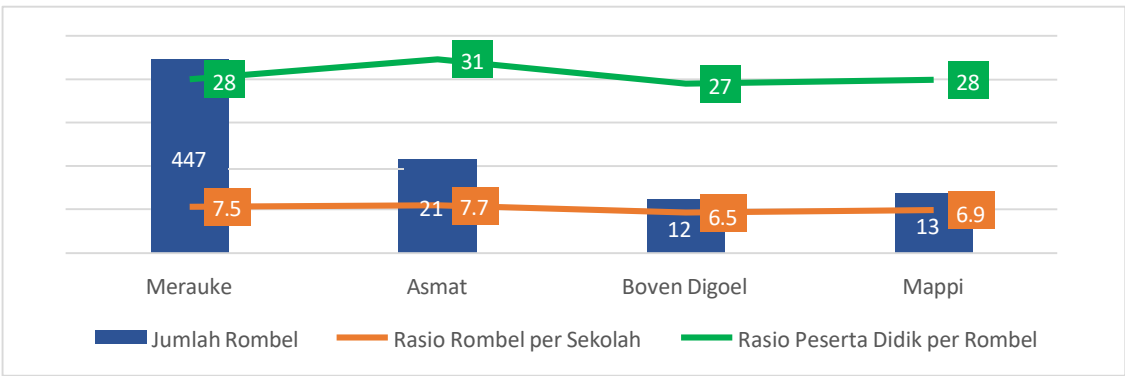


Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Jumlah rombongan ideal untuk tingkat SMP/MTs berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-33 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 32 anak. Untuk provinsi Papua Selatan, rata-rata rombongan di tiap sekolah pada tingkat SMP Tahun 2022 adalah 7,3 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan sebanyak 29 orang. Angka provinsi ini telah memenuhi standar nasional.

Tinjauan berdasarkan kabupaten menunjukkan bahwa semua kabupaten di Provinsi Papua Seltan memenuhi standar jumlah rombongan per sekolah dan jumlah siswa dalam 1 rombongan padatingkat SMP. Kabupaten dengan jumlah rombongan terbanyak terbanyak adalah Asmat dengan 7,7 rombongan per sekolah, demikian pula peserta didik terbanyak dalam 1 rombongan (31 siswa).

Gambar 2. 43 Jumlah Rombongan, Jumlah Peserta Didik per Rombongan dan Jumlah Rombongan per Sekolah pada Tingkat SMP di Provinsi Papua Selatan, 2023



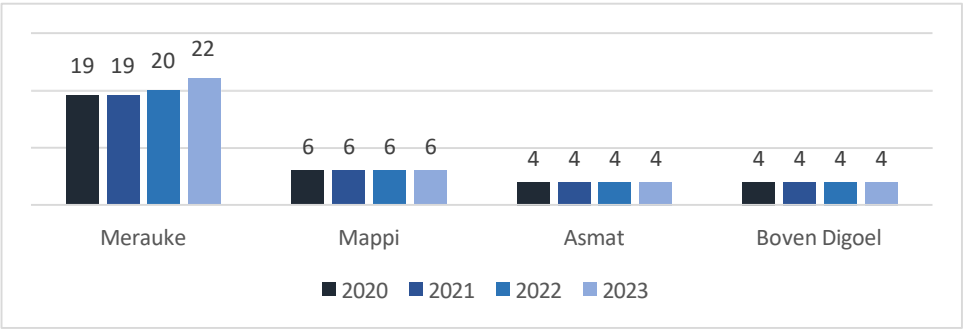
Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2.2.1.1.3 Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Menengah Atas Seperti pada jenjang pendidikan di bawahnya, jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) - termasuk Madrasah Aliyah (MA) - di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir juga bertambah, dari 33 SMA pada tahun 2020 menjadi 36 SMA tahun 2023. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah SMA di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir.

Gambar 2. 44 Perkembangan Jumlah SMA Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2020 - 2023



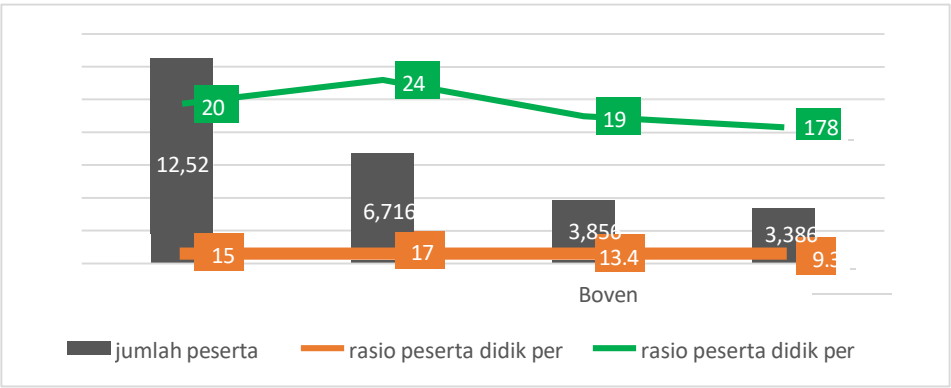
Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Jumlah SMA terbanyak di tahun 2023 terdapat di Kabupaten Merauke (22 sekolah), yang merupakan dua pertiga dari jumlah seluruh SMA di Papua Selatan. Pada Tahun Ajaran 2022- 2023 tercatat jumlah guru SMA/MA sebanyak 855 guru. Jumlah ini menghasilkan rasio guru terhadap sekolah pada jenjang ini di Provinsi Papua Selatan adalah 23,8 orang guru per sekolah. Kabupaten dengan rasio guru per sekolah di tingkat SMA/MA tertinggi terdapat di Kabupaten Asmat, sebesar 27,8 guru per sekolah. Sedangkan Kabupaten Merauke dan Boven Digoel memiliki rasio masing-masing 23,8 dan 23,0 guru per sekolah. Kabupaten Mappi memiliki rasio terendah dengan 21,3 orang guru per sekolah.

Rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru atau rasio antara jumlah guru per 10.000 siswa untuk tingkat provinsi diperoleh angka 14,4 siswa untuk 1 guru. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlahpeserta didik SMA terhadap gurunya adalah 20:1.

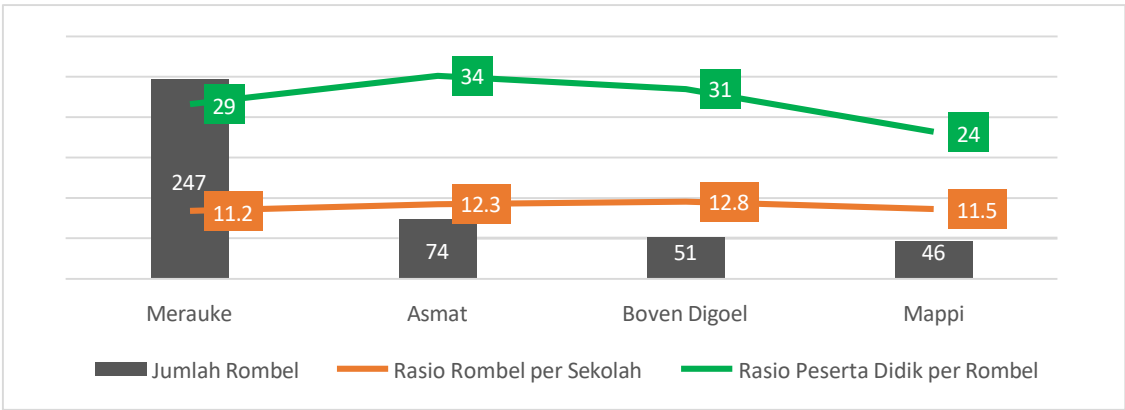
Kabupaten yang memiliki rasio guru: peserta didik yang tertinggi tercatat Kabupaten Asmat yakni 9,3 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Mappi, yakni 17,2 peserta didik untuk 1 guru. Sebaran jumlah serta rasio peserta didik berdasarkan kabupaten di Papua Selatan ditunjukkan pada Gambar 2.45.

Gambar 2. 45 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik : Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolah pada Tingkat SMA di Provinsi Papua Selatan, 2023



Standar jumlah rombel untuk tingkat SMA berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-36 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombel maksimal 36 peserta didik. Provinsi Papua Selatan pada tahun 2023 telah memenuhi standar nasional, dengan rata-rata rombel di tiap sekolah pada tingkat SMA/MA adalah 11,6 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombel sebanyak 29 orang. Berdasarkan kabupaten, semua kabupaten di Provinsi Papua Selatan memenuhi standar jumlah rombel per sekolah maupun jumlah siswa dalam 1 rombel. Gambar berikut menunjukkan informasi selengkapnya.

Gambar 2. 46 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMA di Provinsi Papua Selatan 2023

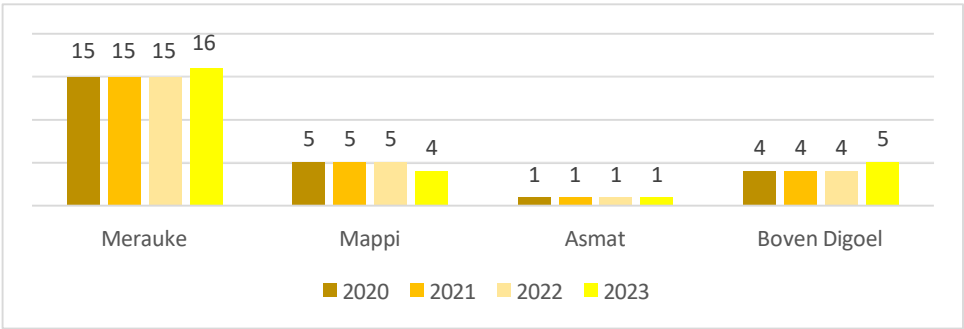


Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2.2.1.1.4 Sekolah Menengah Kejuruan

Berbeda dengan jenjang dan jenis sekolah lainnya, jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir relatif tetap, hanya terdapat penambahan 1 sekolah. Dalam wilayah Provinsi Papua Selatan pada tahun 2020 terdapat 25 SMK, dan pada tahun 2023 menjadi 26 SMK. Gambar berikut menunjukkan perkembangan jumlah SMK di Provinsi Papua Selatan dalam 4 tahun terakhir.

Gambar 2. 47 Perkembangan Jumlah SMK di Provinsi Papua Selatan, 2020-2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

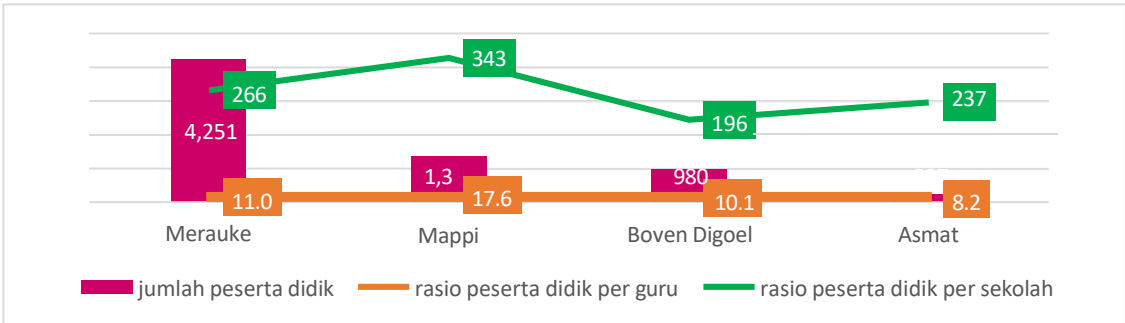
Lebih dari setengah SMK terdapat di Kabupaten Merauke (16 sekolah), sementara di Kabupaten lain hanya terdapat 1- 5 SMK; paling sedikit di Asmat (1 sekolah). Pada Tahun Ajaran 2022-2023 tercatat jumlah guru SMK sebanyak 589 orang. Dengan jumlah ini, rasio guru SMK di Provinsi Papua Selatan adalah 22,7 guru per sekolah. Kabupaten dengan rasio guru per SMK tertinggi terdapat di Kabupaten Asmat, yakni 29 guru per sekolah.

Kecukupan jumlah guru yang dinyatakan dengan rasio antara jumlah peserta didik terhadap guru yang untuk tingkat provinsi diperoleh angka 11,6 siswa untuk 1 guru. Angka ini telah memenuhi standar nasional yang ditetapkan Kemendikbud, yakni rasio minimal jumlah peserta didik SMK terhadap gurunya adalah 15:1.

Jika ditinjau berdasarkan kabupaten, tercatat Kabupaten Mappi memiliki rasio guru

: pesertadidik yang terendah yakni 1377 guru untuk 10.000 siswa atau dengan rasio 17,6 peserta didik per 1 guru. Sedangkan rasio terendah terdapat di Kabupaten Asmat, yakni 8,2 peserta didik untuk 1 guru. Gambar menyajikan jumlah peserta didik beserta rasionya terhadap jumlah sekolah dan jumlah guru di Papua Selatan.

Gambar 2. 48 Jumlah Peserta Didik, Rasio Peserta Didik: Guru dan Rasio Peserta Didik : Sekolahpada SMK di Provinsi Papua Selatan, 2023



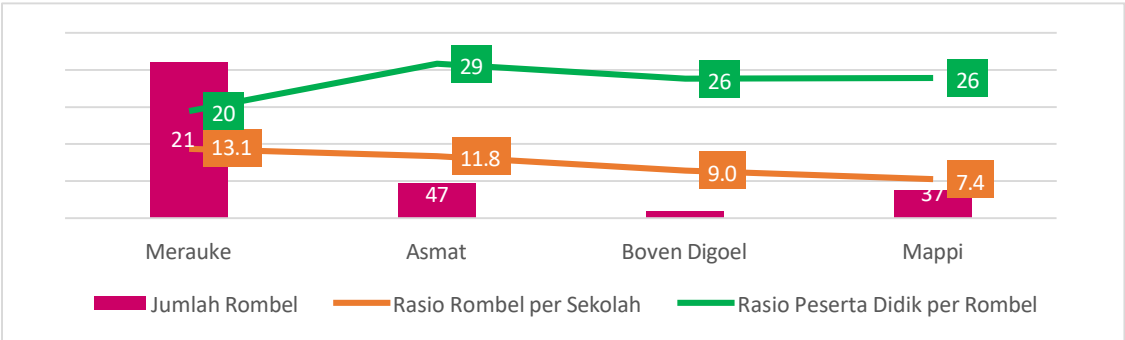
Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Standar jumlah rombongan untuk tingkat SMK berdasarkan Permendikbud tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah adalah 3-72 rombongan, sedangkan jumlah peserta didik per rombongan maksimal 36 peserta didik. Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 telah memenuhi standar nasional, dengan jumlah rombongan di tiap sekolah pada tingkat SMK adalah 11,7 rombongan, dan jumlah peserta didik per rombongan

sebanyak 23 orang. Berdasarkan kabupaten, semua kabupaten di Provinsi Papua

Selatan memenuhi standar jumlah rombel persekolah dan jumlah siswa dalam 1 rombel. Gambar berikut menunjukkan jumlah rombel serta rasionya terhadap siswa dan sekolah per kabupaten.

Gambar 2. 49 Jumlah Rombel, Jumlah Siswa per Rombel dan Jumlah Rombel per Sekolah pada Tingkat SMK di Provinsi Papua Selatan 2023



Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi -

2.2.1.1.5 Pendidikan Khusus

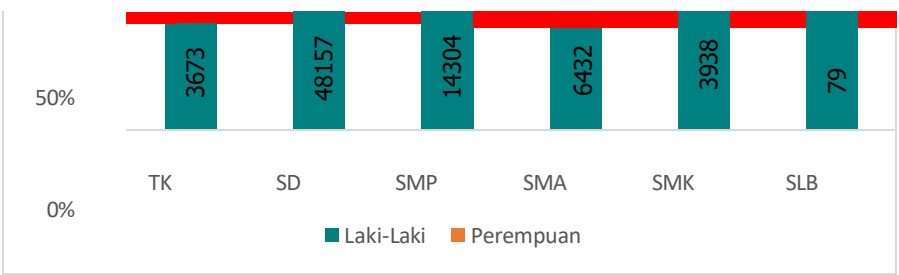
Pendidikan Khusus yang terdapat di Provinsi Papua Selatan berupa Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya ada 1 sekolah, bertempat di Kabupaten Merauke. Jumlah peserta didik di sekolah ini 131 orang, terdiri dari 79 laki-laki dan 52 perempuan (Dapodikdasmen 2023), dengan jumlah guru sebanyak 27 orang, Dengan demikian di sekolah ini rasio 1 guru untuk 5 peserta didik. Jumlah rombongan belajar adalah 33 rombel (Dapodik Kemendikbudristek 2023), sehingga jumlah peserta didik per rombel adalah 4 orang. SLB ini tercatat terakreditasi tahun 2022 dengan peringkat B dalam data akreditasi BANSM Kemendikbud.

2.2.1.1.6 Partisipasi Sekolah

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), diketahui bahwa jumlah peserta didik mengalami penurunan dengan makin tingginya jenjang pendidikan. Jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, proporsi peserta didik laki-laki sedikit lebih tinggi daripada perempuan pada semua jenjang pendidikan di tahun ajaran 2022-2023. Berikut gambar yang menunjukkan jumlah peserta didik di Provinsi Papua Selatan berdasarkan jenjang/ jenis pendidikan serta proporsinya berdasarkan jenis kelamin.

Gambar 2. 50 Jumlah Peserta Didik dan Proporsi Gender pada Tiap Jenjang Pendidikan

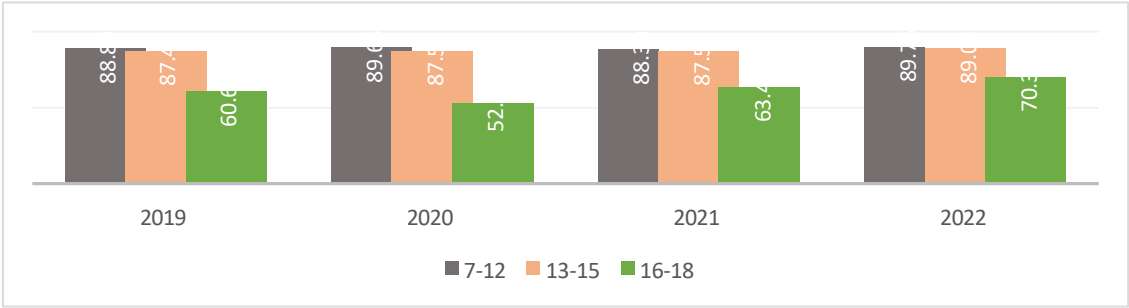




Sumber: Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perkembangan APS dalam 4 tahun terakhir di Provinsi Papua Selatan ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2. 51 Angka Partisipasi Sekolah dari Rata-Rata Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2019-2022

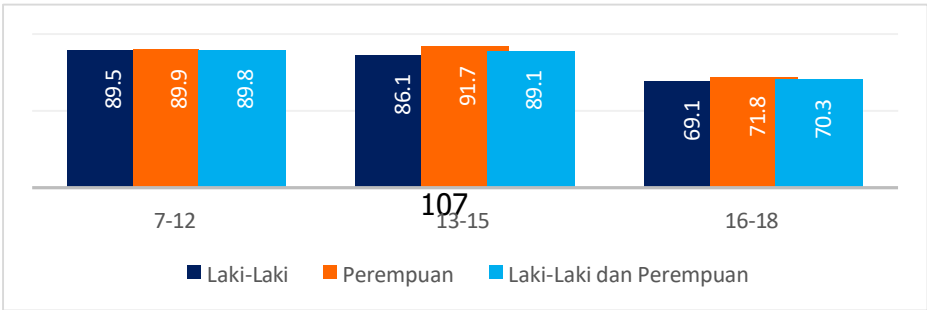


Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Dari tabel di atas nampak bahwa APS makin menurun dengan bertambah tingginya usia jenjang pendidikan. Pada tahun 2022, dari APS anak usia 7-12 tahun yang setara dengan pendidikan sekolah dasar sebesar 89,75% sedikit menurun di kelompok usia 13-15 tahun (setara usia SMP), kemudian menurun cukup banyak di usia 16-18 tahun (usia SMA) yang hanya 70,31%.

Sedangkan data APS berdasarkan kabupaten terpilah jender tahun 2022 menunjukkan bahwa perbedaan APS antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh, namun APS perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada semua kelompok umur. APS berdasarkan jenis kelamin dan rata-rata di 4 kabupaten ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2. 52 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Pemilahan APS terpilah jender berdasarkan kabupaten ditampilkan pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa APS pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di beberapa kabupaten, terutama pada kelompok umur 13-15 tahun.

Tabel 2. 42 Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan, 2022

Kabupaten	APS per Kelompok Umur Berdasarkan Gender								
	7-2			13-15			16-18		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
Merauke	95.6	94.6	95.1	96.0	98.4	97.0	87.3	90.8	89.0
Manni	94.2	92.6	93.5	80.7	93.2	88.0	60.8	60.2	60.5
Asmat	77.7	78.5	78.1	76.5	77.8	77.2	58.3	54.1	56.0
Boven Digoel	90.7	94.1	92.4	91.1	97.2	94.0	70.1	82.1	75.8
Rata-Rata Kabupaten	89.5	89.9	89.8	86.1	91.7	89.1	69.1	71.8	70.3

Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

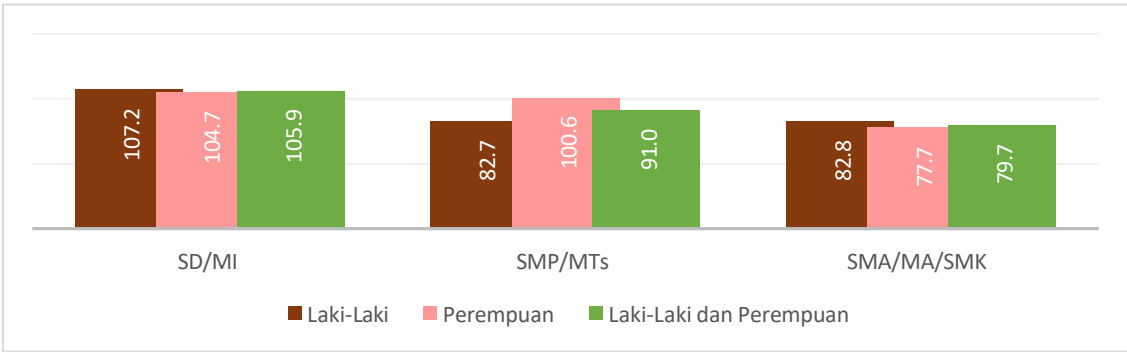
2.2.1.1.7 Angka Partisipasi Kasar

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Papua Selatan

pada jenjang Pendidikan SD/ sederajat hingga SMA pada tahun 2022 ditunjukkan pada gambar 2.53 di bawah ini. Sedangkan rincian per kabupaten dapat dilihat pada gambar 2.53 berikut. Dari gambar 2.53 dan tabel 2.44 tersebut, nampak bahwa APK pada jenjang SD makin menurun

hingga ke jenjang SMA, namun jika dipilah per kabupaten, tidak selalu terjadi penurunan itu pada beberapa jenjang. Angka di atas 100% pada APK menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peserta didik pada jenjang tersebut yang usianya di luar usia sekolah pada jenjang ini.

Gambar 2. 53 APK Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Tabel 2. 43 APK Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022

Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
Merauke	0	106.17	113.14	92.82	122.1	105.37	124.29	108.27	116.58
Mappi	110.74	114.28	112.29	97.6	86.07	90.86	60.24	75.57	66.81
Asmat	97.63	98.66	98.1	49.04	72.68	62.33	79.51	55.43	66.18
Boven Digoel	99.98	99.88	99.93	91.15	121.35	105.6	67.14	71.37	69.17
Rata-Rata	107.21	104.75	105.87	82.65	100.55	91.04	82.795	77.66	79.685

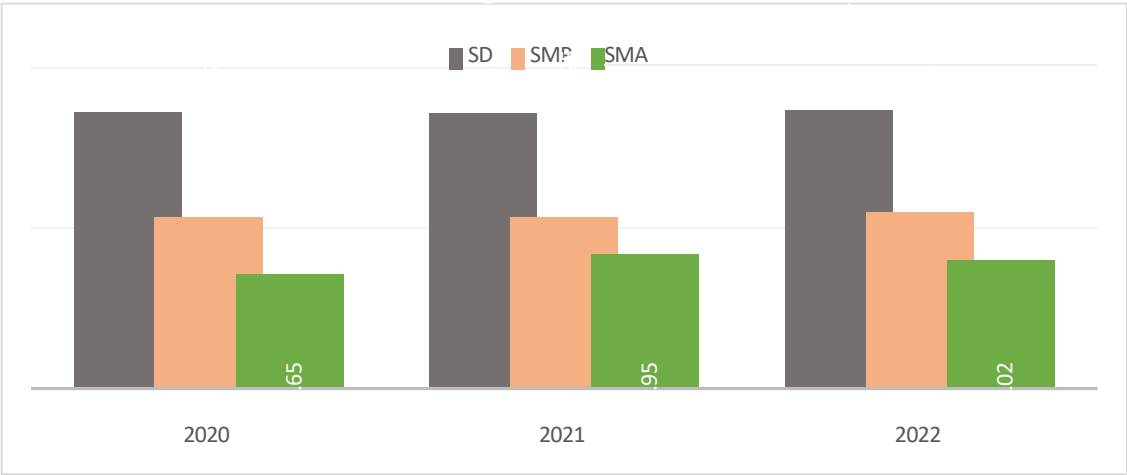
Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

2.2.1.1.8 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa yang bersekolah

pada satu jenjang pendidikan dengan usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan itu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada usia yang sama. Indikator ini bermanfaat untuk menilai proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Perbandingan APM rata-rata dari 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan perkembangan yang baik dengan meningkatnya APM pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Gambar berikut menunjukkan perkembangan APM pada masing- masing jenjang pendidikan dalam kurun waktu 2020-2022.

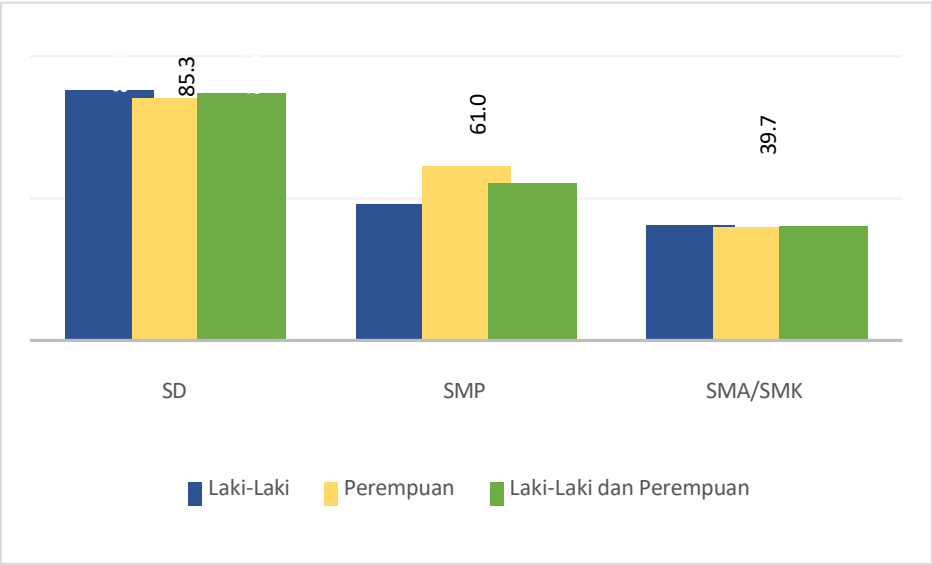
Gambar 2. 54 Rata-Rata APM dari 4 Kabupaten pada Tiap Jenjang Pendidikan, Provinsi Papua Selatan, 2020-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Sedangkan jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, APM pada perempuan, tahun 2022 lebih tinggi pada jenjang SMP dibandingkan APM laki-laki. Gambar berikut menunjukkan perbedaan tersebut.

Gambar 2. 55 Rata-Rata APM dari 4 Kabupaten berdasarkan jenis Kelamin pada Tiap Jenjang Pendidikan, di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat, BPS Kabupaten Mappi, 2023

Perbandingan APM antar kabupaten tahun 2022 menunjukkan pola yang sama yakni APM yang makin rendah dengan makin tingginya jenjang pendidikan. Terjadi penurunan yang cukup tajam yang sama di semua kabupaten yakni dari jenjang SD ke SMP dan dari SMA ke Perguruan Tinggi. Gambar berikut menunjukkan perbandingan APM antar kabupaten pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2021.

Tabel 2. 44 APM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022

Kabupaten	SD			SMP			SMA/SMK		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
Merauke	94.14	87.54	90.75	66.42	68.92	67.49	74.18	55.6	65.24
Mappi	92.31	90.92	91.7	42.76	56.44	50.75	27.73	33.63	30.64
Asmat	77.57	76.20	76.95	19.04	48.02	35.33	30.27	26.93	28.42
Boven Digoel	87.58	86.63	87.11	62.75	70.62	66.51	29.31	42.82	35.77
Rata-Rata Kabupaten	87.90	85.32	86.63	47.74	61.00	55.02	40.37	39.75	40.02

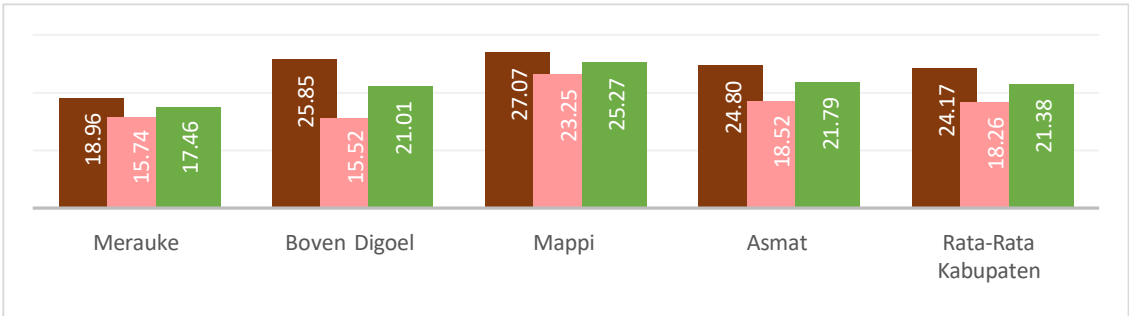
Sumber: BPS Provinsi Papua, BPS Kabupaten Merauke, BPS Kabupaten Boven Digoel, BPS Kabupaten Asmat,BPS Kabupaten Mappi, 2023

2.2.1.1.9 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen.

Dengan tidak adanya data terpilah kabupaten mengenai Angka Putus Sekolah, digunakan persentase penduduk usia sekolah (7-24 tahun) yang tidak bersekolah lagi. Kelemahannya persentase ini tidak bisa memilah keputussekolahan pada masing-masing jenjang pendidikan. Gambar di bawah menunjukkan Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi. Dari Gambar diketahui bahwa persentase penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah lagi lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Pola itu serupa di semua kabupaten dan paling tinggi angkanya di Kabupaten Mappi.

Gambar 2. 56 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun yang Tidak Bersekolah Lagi menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

2.2.1.1.10 Akreditasi Sekolah

Mengenai sekolah terakreditasi, Data Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah menunjukkan jumlah sekolah yang telah terakreditasi pada penilaian hingga tahun 2022 di wilayah Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Proporsi Sekolah Terakreditasi menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Papua Selatan, 2023

Kabupaten	SD			SMP			SMA			SMK		
	Jumlah sekolah	Jumlah	%ase	Jumlah sekolah	Jumlah	%ase	sekolah	Jumlah	%ase	sekolah	jumlah	%ase
Merauke	208	203	98%	60	59	98%	22	22	100%	16	16	100%
Mappi	164	121	74%	28	26	93%	6	6	100%	4	3	75%
Asmat	136	88	65%	4	2	50%	4	4	100%	1	1	100%
Boven Digoel	106	83	78%	20	18	90%	4	3	75%	5	2	40%
Papua Selatan	614	495	81%	112	105	94%	36	35	97%	26	22	85%

Sumber: Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah 2022 – BANSM kemdikbud.go.id

Data BANSM Kemendikbud di atas menunjukkan bahwa persentase sekolah terakreditasi cukup baik untuk tingkat SMP dan SMA (di atas 90%). Jika dipilah per kabupaten, nampak bahwa proporsi sekolah terakreditasi relatif rendah di Kabupaten Asmat dan Boven Digoel.

2.2.1.2 Kesehatan

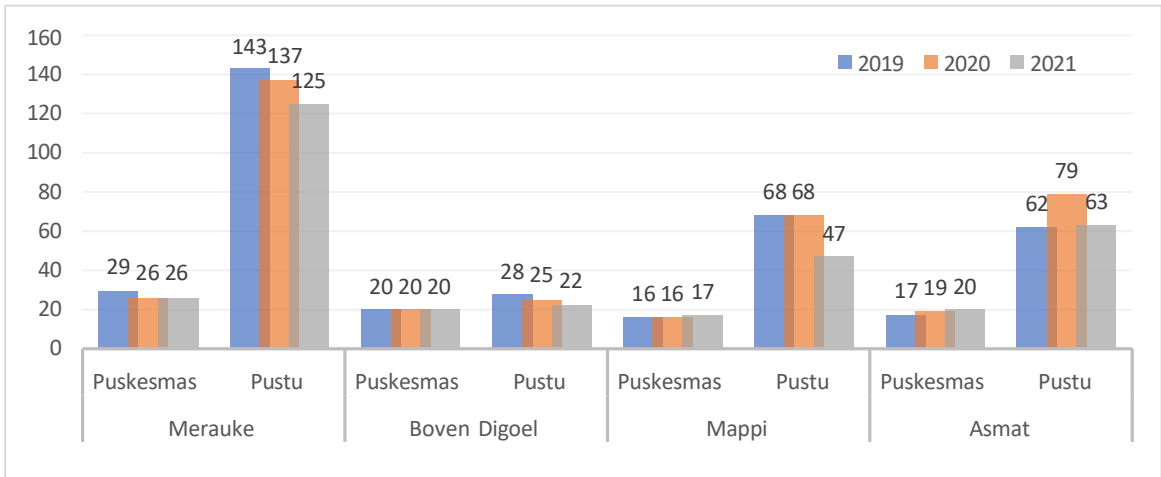
2.2.1.2.1 Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Yang dimaksud dengan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat

dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pelayanan ini mencakup pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas yang dimaksud antara lain Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Praktik Perseorangan, Unit Transfusi Darah dan Laboratorium,

Rumah Sakit, Upaya Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Dalam uraian berikut, fasilitas yang dibahas adalah puskesmas, rumah sakit, dan Ketersediaan Obat dan Vaksin (sebagai bagian dari Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan), serta UKBM. Puskesmas dan Jaringannya Jumlah Puskesmas di Papua Selatan sampai dengan tahun 2021 tercatat 83 Puskesmas dan 257 puskesmas pembantu (pustu). Jika dipilah per kabupaten, di 4 kabupaten wilayah Provinsi Papua Selatan, terdapat fluktuasi jumlah puskesmas. Perubahan ini disebabkan karena perbaikan data dengan mengeluarkan sejumlah puskesmas yang belum teregistrasi di Kementerian Kesehatan RI. Gambar 2.57 menunjukkan perkembangan jumlah puskesmas dan pustu di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan sejak 2019 hingga 2021. Dari data jumlah puskesmas dan pustu pada tahun 2021, dapat diketahui bahwa rasio puskesmas : pustu adalah 1:3. Jika dipilah per kabupaten, maka rasio terendah terdapat di kabupaten Boven Dogoel (1 : 1,1), diikuti oleh Mappi (1:2,8). Asmat (1:3,2) dan Merauke (1:4,8).

Gambar 2. 57 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Provinsi Papua Selatan Tahun 2019 - 2021

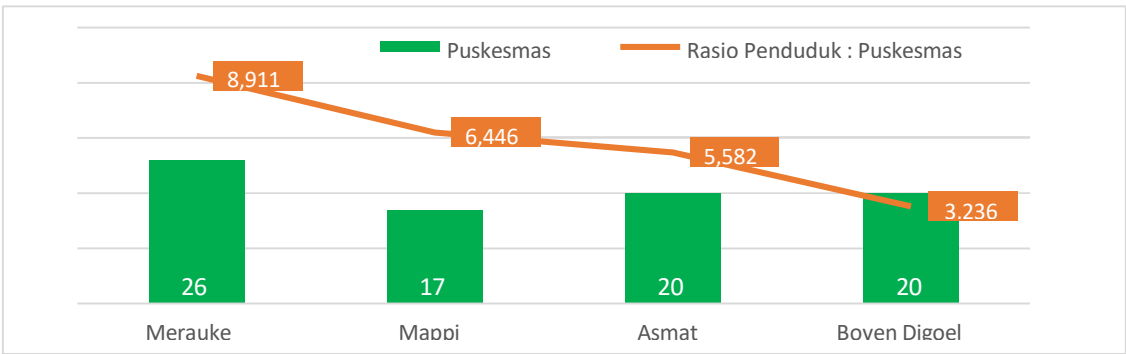


Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2021

Dengan mengacu pada data BPS, rasio puskesmas per penduduk yang dilayani di Provinsi Papua Selatan adalah 1: 5.457 penduduk. Rasio ini tergolong sangat baik dibandingkan standar nasional yakni minimal 1 puskesmas untuk 16.000 penduduk. Jika dilihat per kabupaten, semua kabupen telah memenuhi standar nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Namun rasio yang baik ini tidak serta merta mewakili tingkat aksesibilitas penduduk, namun diketahui kondisi

geografis dan keterbatasan sarana transportasi di Papua Selatan masih merupakan hambatan terhadap aksesibilitas penduduk untuk memperoleh layanan kesehatan puskesmas.

Gambar 2. 58 Rasio puskesmas per Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022



Sumber: Provinsi Papua dalam Angka, BPS 2023 (diolah)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022 menyebutkan bahwa baru 42,6% puskesmas di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu dokter, perawat, bidan, dan 2 tenaga kesehatan lainnya di antara dokter gigi, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan masyarakat.

Sedangkan mengenai puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial. secara provinsi mencapai 84,6%. Angka ini disebabkan persentase puskesmas di kabupaten Asmat yang masih rendah (38,5%), sementara 3 kabupaten lainnya telah mencapai 100%. Berikut tabel yang menunjukkan kabupaten dengan ketersediaan nakes serta obat dan vaksin yang dimaksud.

Tabel 2. 46 Persentase Puskesmas di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan dengan Ketersediaan Tenaga Kesehatan serta Obat dan Vaksin Esensial

Kabupaten	% puskesmas dengan 5 jenis nakes	% puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial
Merauke	60,0	100,0
Boven Digoel	15,0	100,0
Mappi	64,7	100,0
Asmat	30,8	38,5
Rata-Rata	42,6	84,6

Sumber: Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022

Puskesmas yang Menjalankan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah raga

Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pemerintah mengamanatkan penyelenggaraan Kesehatan Kerja ditujukan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, dan dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberikerja di semua tempat kerja.

Kesehatan Kerja termasuk dalam indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020, yakni dengan mengukur persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Satu kabupaten/ kota dinyatakan melaksanakan kedua upaya kesehatan ini jika puskesmas melaksanakan kesehatan kerja dan olahraga, masing-masing minimal 30%.Capaian nasional pada tahun 2020 (Profil Kesehatan Indonesia 2021), 64% kabupaten/kota di Indonesia sudah melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja, dan 37,5% melaksanakan kesehatan olahraga. Hingga tahun 2021, belum ada kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang memenuhi kriteria melaksanakan kesehatan kerja maupun kesehatan olahraga.

Rumah Sakit

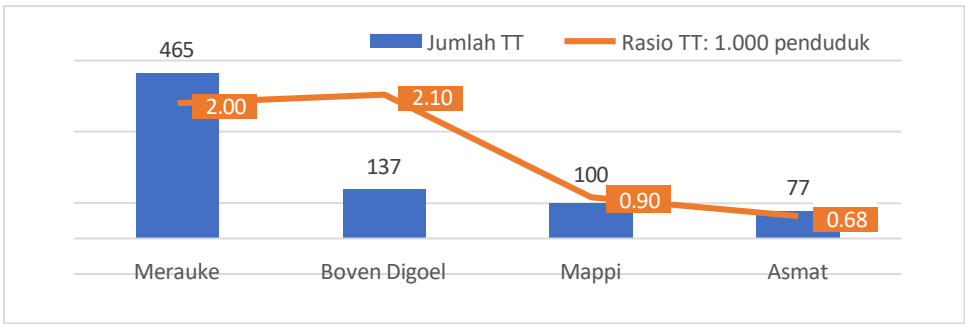
Terdapat 7 rumah sakit di Provinsi Papua Selatan, yang 6 di antaranya merupakan RS Kelas D, sedangkan 1 lainnya belum ditentukan kelasnya. Berikut tabel yang menampilkan daftar rumah sakit yang dimaksud.

Tabel 2. 47 Nama, Kelas dan Akreditasi Rumah Sakit di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	No .	Nama Rumah Sakit	Kelas	Jumlah Tempat Tidur	Akreditasi
Merauke	1	RS Umum Daerah Merauke	D	312	Paripurna
	2	RS Umum Bunda Pengharapan	D	96	Paripurna
	3	RS TNI Angkatan Laut	D	57	Paripurna
Boven Digoel	4	RS Bergerak Boven Digoel	Belum Ditetapkan	22	
	5	RS Umum Daerah Boven Digoel	D	115	
Mappi	6	RS Umum Daerah Mappi	D	Tidak ada data	
Asmat	7	RS Umum Daerah Asmat	D	77	

Sumber: Profil Kesehatan Dinkes Provinsi Papua, 2021
<https://sirs.kemkes.go.id/>(Ditjen Yankes Kemenkes RI) <https://kars.or.id> (komisi akreditasi rumah sakit)

Gambar 2. 59 Rasio Tempat Tidur RS per 1000 Penduduk per Kabupaten di Provinsi Papua



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021 (diolah)

Indikator terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Menurut Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021, seluruh tempat tidur RS di Papua Selatan berjumlah 779 Tempat Tidur, atau 1,5 Tempat Tidur per 1000 penduduk. Rasio ini melebihi standar WHO, yakni 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Namun jika dipilah per kabupaten, terdapat 2 kabupaten yang belum memenuhi standar, yakni rasio TT per 1000 penduduknya di bawah 1 yakni Kabupaten Mappi dan Asmat. Berikut gambar yang menunjukkan perbandingan antar kabupaten tersebut.

Telemedicine

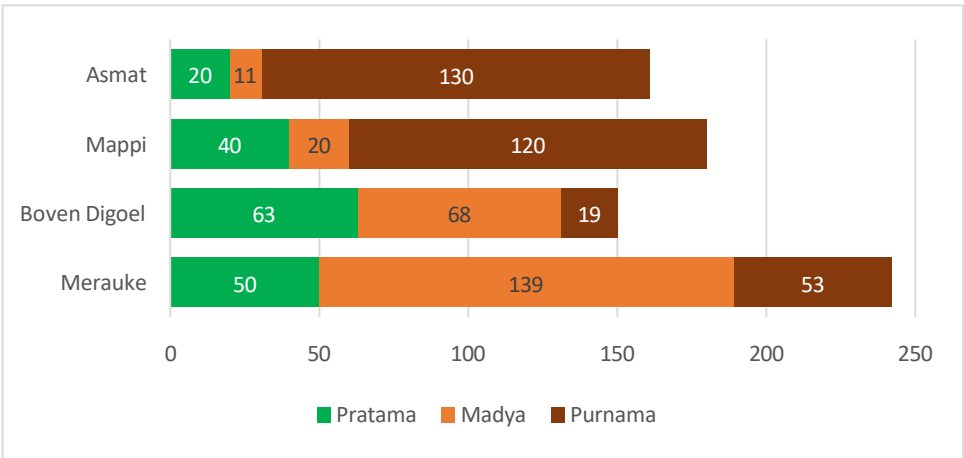
Dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 di antara strategi pembangunan kesehatan disebutkan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan salah satu fokusnya pada inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Inovasi ini meliputi perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine. Provinsi Papua Selatan belum mencatat capaian terkait jenis layanan ini.

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang diuraikan dalam dokumen ini yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

Pos Pelayanan Terpadu

Posyandu di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021 berjumlah 733 posyandu, yang meliputi 242 posyandu di Kabupaten Merauke, 150 posyandu di Kabupaten Boven Digoel, 180 posyandu di Kabupaten Mappi dan 161 lainnya di Kabupaten Asmat. Berdasarkan stratanya, posyandu di Provinsi Papua Selatan terbanyak merupakan Posyandu Purnama (322 unit atau 43,9%), dan selebihnya merupakan Posyandu Madya (238 unit atau 32,5%), dan Posyandu Pratama (173 unit atau 23,6%) Berikut grafik yang menjabarkan jumlah serta strata posyandu di masing-masing kabupaten:

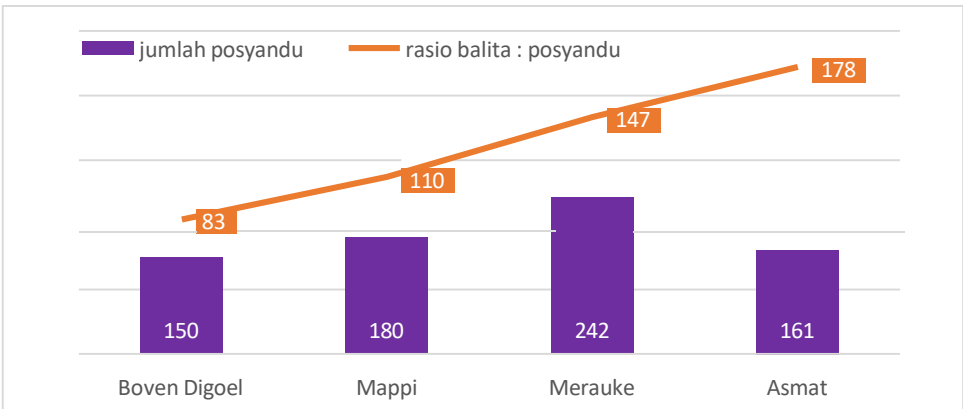
Gambar 2. 60 Jumlah Posyandu Berdasarkan Stratanya di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Untuk mengetahui jangkauan pelayanan posyandu terhadap balita, digunakan rasio jumlah balita yang dilayani oleh 1 posyandu. Pada tingkat provinsi, rasio tersebut sebesar 131 balita per posyandu. Berdasarkan kabupaten, rasio tertinggi terdapat di Boven Digoel dengan rasio posyandu per balita sebesar 1: 83. Sedangkan rasio terendah adalah Kabupaten Asmat dengan rasio 1:178. Selengkapnya mengenai jumlah posyandu dan rasionya per balita di masing- masing kabupaten di tunjukkan oleh Gambar berikut.

Gambar 2. 61 Jumlah Posyandu dan Rasio Posyandu terhadap Jumlah Balita di Masing- Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021

Posbindu PTM

Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular) adalah bentuk peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Informasi mengenai jumlah Posbindu PTM hingga tahun 2021 di wilayah Provinsi Papua Selatan tidak tersedia secara

lengkap. Data Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2022 hanya menampilkan jumlah Posbindu PTM di 2 kabupaten, yakni Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, masing-masing sebanyak 123 dan 22 unit.

2.2.1.2.2 SDM Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan berperan sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional disebut bahwa sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan yang terlibat dan

bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Pembahasan mengenai SDMK pada dokumen ini mencakup jumlah dan cakupan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, tanpa pemilahan antara puskesmas dan rumah sakit. Tabel berikut menunjukkan jumlah keseluruhan dan rasio tenaga medis dan tenaga kesehatan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Rincian mengenai masing-masing tenaga diuraikan pada bahasan setelah ini.

Tabel 2. 48 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah dan Rasio Nakes	
	Tenaga medis	Tenaga kesehatan
Merauke	703	90
Boven Digoel	559	48
Mappi	675	34
Asmat	325	36
Jumlah	2,262	208
rasio penduduk: nakes	229	2489
rasio nakes: 1000 penduduk	4.37	0.40

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2022

Tenaga Medis

Tenaga medis di sini adalah dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Distribusi tenaga medis per kabupaten dapat dilihat pada Tabel 2.50 berikut.

Tabel 2. 49 Distribusi Tenaga Medis di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

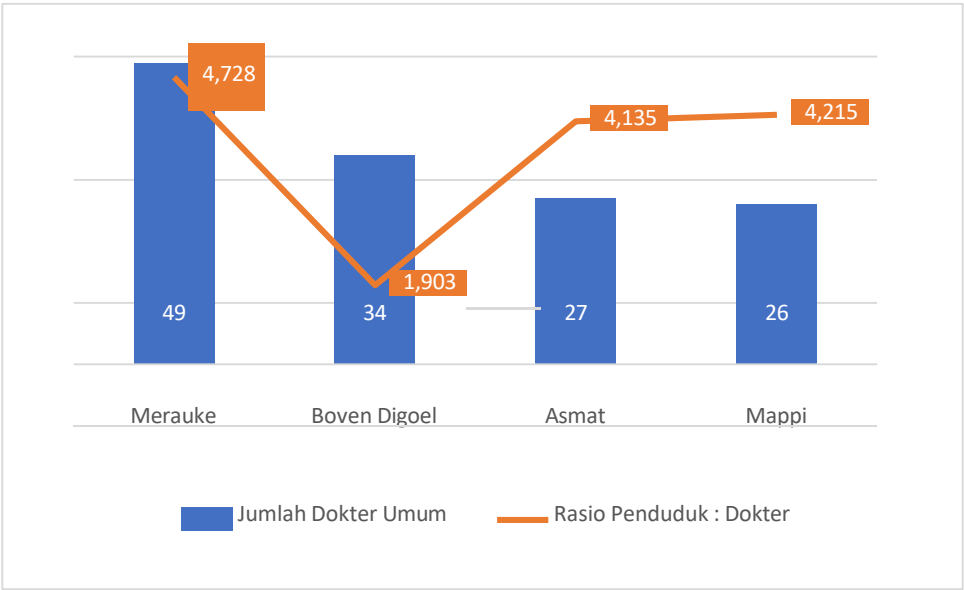
Kabupaten	Dokter Spesialis			Dokter Umum			Dokter Gigi			Dokter Gigi Spesialis		
	L	P	L+ P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Merauke	13	21	34	21	28	49	4	3	7	-	-	-
Boven Digoel	3	4	7	15	19	34	1	3	4	-	-	-
Mappi	1	-	1	14	12	26	2	2	4	-	-	-
Asmat	2	-	2	12	15	27	-	1	1	-	-	-
Jumlah	19	25	44	62	74	136	7	9	16	0	0	0

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2022

Kecukupan tenaga dokter umum diketahui melalui rasio dokter umum terhadap penduduk yang dilayani. Pada tingkat provinsi, rasionya sebesar 1: 3806, atau 1 dokter umum melayani 3.806 penduduk.

Sedangkan jika dipilah menurut kabupaten, rasio tertinggi terdapat di Kabupaten Boven Digoel dengan rasio 1 dokter untuk 1.903 penduduk. Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara Provinsi rasio dokter terhadap penduduk masih di bawah standar nasional sebesar 1: 2500, demikian pula secara kabupaten, hanya kabupaten Boven Digoel yang telah melampaui standar nasional. Berikut grafik yang menggambarkan jumlah serta rasio dokter umum terhadap penduduk pada tahun 2021.

Gambar 2. 62 Jumlah serta Rasio Dokter Umum Terhadap Jumlah Penduduk di Masing- Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

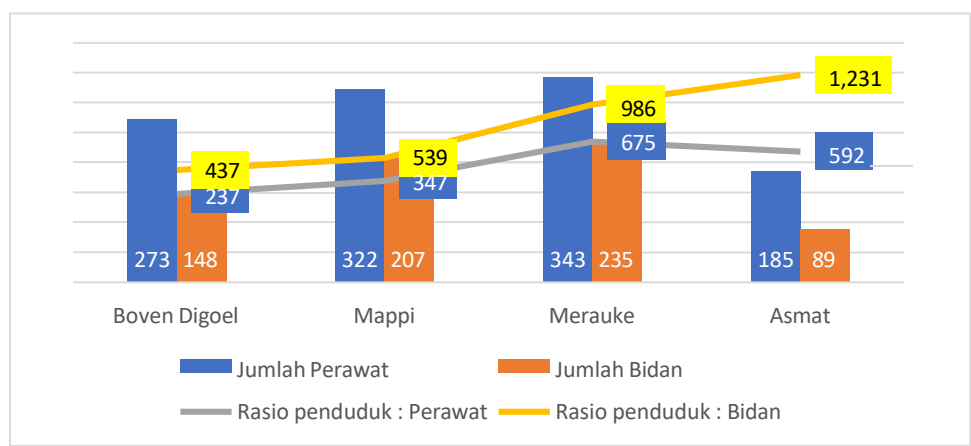


Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2023

Tenaga Keperawatan dan Kebidanan

Di tahun 2021, berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Papua, jumlah perawat di 4 kabupatendi Provinsi Papua Selatan berjumlah 1.123 orang, atau memiliki rasio 1 perawat untuk 461 penduduk. Angka ini telah melampaui standar nasional jumlah perawat terhadap jumlah penduduk, yakni 1:855. Sedangkan jumlah bidan di wilayah Provinsi Papua Selatan sebanyak 679 orang. Angka ini sama dengan 1 bidan untuk 762 penduduk. Rasio ini juga telah melebihi standar jumlah minimal tenaga bidan terhadap jumlah penduduk yang ditetapkan secara nasional, yakni 1: 1000. Dari grafik di bawah dapat dilihat bahwa jumlah tenaga keperawatan bukan saja telah memenuhi standar pada tingkat provinsi, namun juga pada ke-4 kabupaten di Papua Selatan. Sedangkan rasio bidan telah memenuhi standar minimal di tingkat provinsi, namun jika dipilah per kabupaten, maka nampak bahwa Kabupaten Asmat memiliki rasio bidan: penduduk di bawah standar, yakni 1: 1231. Distribusi tenaga perawat dan bidan di masing-masing kabupaten dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 63 Jumlah serta Rasio Tenaga Perawat dan Bidan terhadap Jumlah Penduduk di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2023

Tenaga Kesehatan Lainnya

Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas promotif dan preventif untuk mendukung tugas pelayanan kesehatan masyarakat antara lain tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik dan tenaga gizi. Selain tenaga medis dan paramedis, ketenagaan puskesmas dinyatakan sesuai standar jika tersedia setidaknya 1 orang dari masing-masing jenis tenaga kesehatan ini di tiap puskesmas. Distribusi tenaga kesehatan preventif dan promotif ini cukup terdistribusi ke hampir semua kabupaten, namun kecukupan jumlahnya belum memenuhi kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan yang ada. Data dari Profil Kesehatan Provinsi Papua yang dipublikasikan tahun 2023 menampilkan distribusi tenaga kesehatan di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021.

Distribusi tenaga kesehatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50 Distribusi Tenaga Kesehatan Promotif dan Preventif berdasarkan Jenisnya di Masing- Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Laboratorium	Tenaga Teknik Biomedika	Keterampilan Fisik	Keteknisian Medis	Tenaga Teknis Kefarmasian	Apoteker
Merauke	36	12	18	16	16	1	-	18	8
Boven Digoel	18	12	17	26	28	-	4	21	12
Mappi	36	6	12	26	27	2	7	22	8
Asmat	6	6	8	6	7	1	2	8	7
Jumlah	96	36	55	74	78	4	13	69	35

Sumber: Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2023

2.2.1.2.3 Kesehatan Keluarga Angka Kematian Ibu (AKI)

Definisi kematian ibu dalam indikator AKI ini adalah semua kematian selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam lingkup tersebut dengan denominator 1.000 atau 100.000 kelahiran hidup. Selain mewakili kondisi pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga menunjukkan derajat kesehatan masyarakat. Penghitungan AKI seringkali mengalami hambatan, karena selain jumlah kematian, diperlukan data yang valid mengenai jumlah kelahiran hidup dalam satu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ketersediaan data ini masih terbatas, karena sistem pencatatan dan pelaporan yang tidak memadai.

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021, tercatat 24 kematian ibu dari 8.507 kelahiran hidup, sehingga diperoleh AKI Provinsi Papua Selatan tahun 2021 sebesar 282 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih tinggi dari angka nasional saat ini sebesar 189 (Sensus Penduduk 2020 – BPS RI), dan sangat mungkin angka sesungguhnya lebih tinggi karena terdapat kasus-kasus kematian yang tidak dilaporkan. Sedangkan jika dilihat distribusinya perkabupaten, terdapat rentang AKI yang cukup lebar, yakni dari 164 per 100.000 KH di

Kabupaten Asmat hingga 491 per 100000 KH di Boven Digoel. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2. 51 Jumlah dan Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup(KH)	AKI Per 100.000 KH
Merauke	10	3698	270
Boven Digoel	7	1427	491
Mappi	4	1548	258
Asmat	3	1834	164
Jumlah	24	8507	282

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Mengenai penyebab Kematian Ibu, dari 24 kasus tersebut 6 di antaranya adalah perdarahan(25%). Sebab lainnya antara lain Infeksi (4 kasus atau 17%), sementara separuhnya (58%) tidak diketahui atau digolongkan sebagai sebab lainnya.

Pemeriksaan Kehamilan

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan menilai cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan kehamilan pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan K4 adalah pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali, dengan kriteria masing-masing 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama dan ke 2 serta 2 kali pemeriksaan pada trimester ke 3. Data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua 2021 menunjukkan cakupan 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan untuk K1 sebesar 93,6% dan K4 sebesar 29,8%. Cakupan K4 Provinsi Papua Selatan ini jauh di bawah cakupan nasional pada tahun 2019 sebesar 88,5%.Jika dilihat per kabupaten, Kabupaten Merauke memiliki jumlah ibu hamil paling banyak, dan juga cakupan K1 dan K4 tertinggi di antara 4 Kabupaten di Papua Selatan. Cakupan K1 dan K4 yang cukup rendah terdapat do Kabupaten Asmt. Terdapatnya angka cakupan di atas 100% menunjukkan adanya ketidaktepatan perkiraan jumlah ibu hamil sebagai target pelayanan ini. Tabel berikut

menunjukkan informasi selengkapnya mengenai cakupan K1 dan K4.

Tabel 2. 52 Cakupan K1 dan K4 di Masing-Masing Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Ibu Hamil	K1		K4	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4,924	5,041	102.4 %	2,058	41.8%
Boven Digoel	2,180	2,091	95.9%	768	35.2%
Mappi	3,033	3,393	111.9 %	583	19.2%
Asmat	3,367	2,121	63.0%	620	18.4%
Jumlah	13,504	12,646	93.6%	4,029	29.8%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

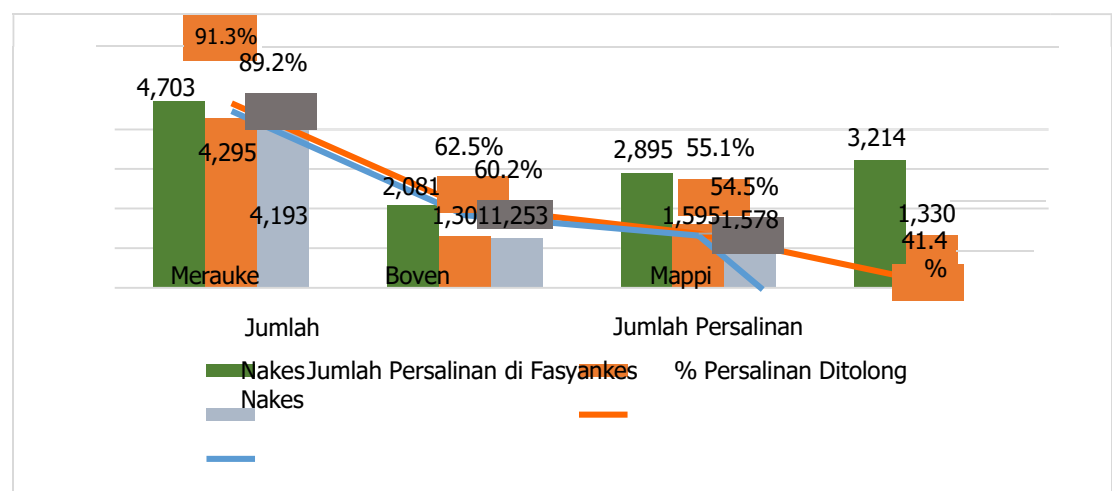
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Upaya lainnya dalam penurunan angka kematian ibu dan kematian bayi adalah mendorong setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dankandungan, dokter umum, dan bidan, serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Secara umum cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Papua Selatan tahun 2021 cukup baik, yakni sebesar 66,1%, meskipun masih jauh di bawah target nasional sebesar87%. Angka pertolongan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih rendah, yakni 54,5%.

Berdasarkan kabupaten, terdapat ketidaklengkapan data, namun informasi yang tersedia cukup menggambarkan kondisi pertolongan persalinan di 4 kabupaten di Papua Selatan. Terdapat perbedaan yang cukup tajam antara kabupaten Merauke dengan 3 kabupaten lainnya.

Merauke memiliki cakupan pertolongan persalinan oleh nakes sebesar 91,3% dan dilakukan di fasilitas kesehatan sebesar 89,2%, sementara 3 kabupaten lainnya hanya mencapai paling tinggi 62,5% di antara kedua indikator tersebut. Gambar berikut menunjukkan perbedaan tersebut.

Gambar 2. 64 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan dan Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022



Catatan: Data pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan untuk Kabupaten Asmat tidak valid sehingga tidak diperhitungkan

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Standar Pelayanan kesehatan ibu nifas dilakukan minimal tiga kali dengan jadwal yangdianjurkan, yakni pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan

pada hari ke- 29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan. Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak 3 kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF3). Pada tingkat provinsi, cakupan KF1, KF2 dan KF3 di 4 kabupaten se-Papua Selatan tahun 2021 berturut-turut 67,2%, 61.2% dan 54,5%. Data Profil Kesehatan Indonesia menyebutkan pada tahun 2020 cakupan kunjungan nifas lengkap secara nasional 88,3%.

Capaian kunjungan nifas menurut kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 2.53. Berdasarkan data dari Dinkes tersebut nampak bahwa Kabupaten Merauke memiliki cakupan Kunjungan Nifas Lengkap di atas 76,1%, sedangkan 3 kabupaten lainnya memiliki cakupan antara 31% hingga 54%.

Tabel 2. 53 Cakupan Kunjungan Nifas Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupat en	Jumlah Bulin	KF1		KF2		KF3		Ibu Nivas dapat Vitamin A	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4,703	4,300	91.4%	3,939	83.8%	3,580	76.1%	4,303	91.5%
Boven Digoel	2,081	1,358	65.3%	1,021	49.1%	657	31.6%	1,329	63.9%
Mappi	2,895	1,669	57.7%	1,149	39.7%	1,047	36.2%	872	30.1%
Asmat	3,214	1,337	41.6%	1,786	55.6%	1,748	54.4%	243	7.6%
Jumlah	12,893	8,664	67.2%	7,895	61.2%	7,032	54.5%	6,747	52.3%

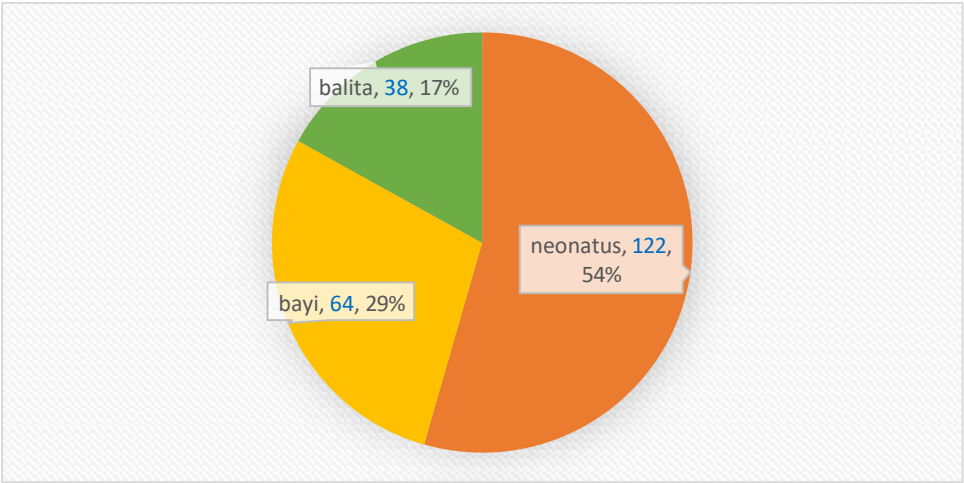
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Angka Kematian Anak

Dari Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 diketahui bahwa jumlah seluruh kematian anak di 4 Kabupaten berjumlah 224 kasus, terdiri dari 122 neonatus (0-28 hari), 64 bayi (29 hari – 11 bulan) dan 38 balita (12 – 59 bulan). Dengan angka- angka ini maka angka kematian

anak di Provinsi Papua Selatan adalah 26,3 per 1000 persalinan. Angka ini jauh lebih tinggi dari pada angka nasional yang sudah mencapai 2,98 per 1000 persalinan. Proporsi kematian pada 3 kelompok umur anak ini digambarkan dalam Gambar .

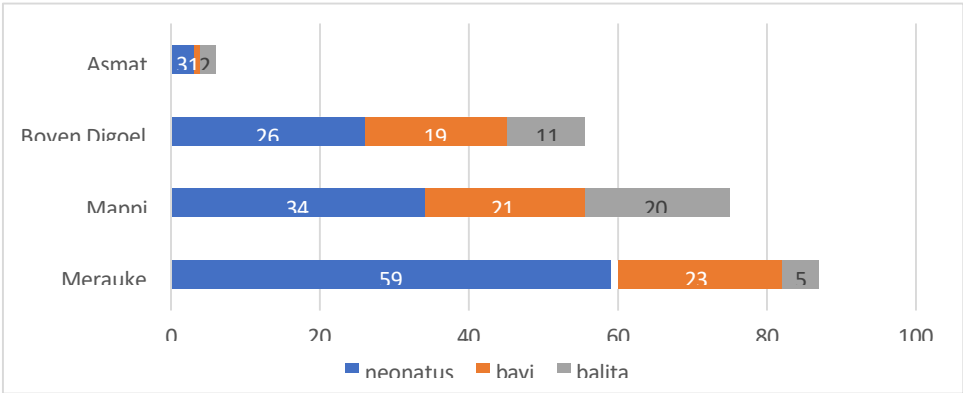
Gambar 2. 65 Jumlah dan Proporsi Kematian Anak Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Jika dipilah berdasarkan kabupaten, kematian anak terbanyak pada tahun 2021 dilaporkan di Kabupaten Merauke dengan 87 kasus. Sedangkan Kabupaten Asmat melaporkan sangat sedikit kasus kematian anak. Kemungkinan di daerah-daerah sulit ini pelaporan kasus kematian dari kampung ke tingkat administrasi pemerintahan yang lebih atas belum berjalan dengan baik. Berikut grafik yang menunjukkan hal tersebut.

Gambar 2. 66 Jumlah Kematian Anak Menurut Kabupaten Menurut Kelompok Umur di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Penyebab kematian neonatal pada tahun 2021 terbanyak adalah kondisi berat badan lahir rendah (BBLR). Penyebab kematian lainnya di

antara asfiksia, sepsis, dan lainnya. Pada kelompok anak usia 29 hari - 11 bulan, penyebab kematian terbanyak adalah diare, dan sebagian lainnya digolongkan sebagai “lain- lain”. Demikian juga pada kelompok anak balita (12 – 59 balita) penyebab kematian terbanyak adalah diare dan sebab lain-lain.

Kunjungan Neonatal

Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada masa neonatal (0-28 hari) antara lain dengan mengupayakan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah

lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1. Cakupan KN1 di 4 Kabupaten Provinsi Papua Selatan pada tahun2021 tergolong baik, yakni mencapai 84,6%, sedangkan cakupan KN3 sebsar 73,6%. Sebaran cakupan Kunjungan Neonatal berdasarkan kabupaten ditampilkan dalam Tabel 2.54.

Tabel 2. 54 Cakupan Kunjungan Neonatal Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali(KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4,349	3,983	91.6%	3,959	91.0%
Boven Digoel	1,605	1,452	90.5%	743	46.3%
Mappi	1,587	1,870	117.8 %	999	62.9%
Asmat	1,877	662	35.3%	1,231	65.6%
Jumlah	9,418	7,967	84.6%	6,932	73.6%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

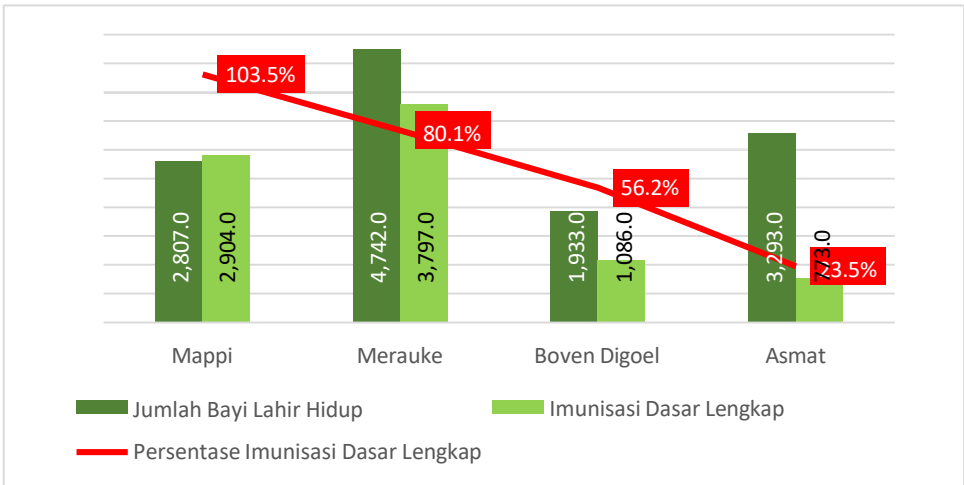
Tabel 2.54 menunjukkan bahwa cakupan KN1 dan KN3 yang tinggi mencapai di atas 90% terdapat di Kabupaten Merauke, serta K1 yang tinggi juga terdapat di Boven Digoel dan Mappi. Cakupan di Kabupaten Asmat tidak dapat dibandingkan karena ada ketidaksesuaian data yakni cakupan KN3 yang melebihi KN1. Adanya cakupan di atas 100% di Kabupaten Mappi menunjukkan adanya ketidaksesuaian jumlah pembilang (jumlah lahir hidup).

Desa/Kelurahan UCI (Universal Child Immunization)

Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain Hepatitis B, TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio dan Campak. Program imunisasi mewajibkan setiap bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap (IDL) yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes (OPV), 1 dosis polio suntik (IPV) dan 1 dosis campak.

Berdasarkan data pada Profil Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan sebesar 56,7%. Angka ini masih jauh dari target nasional sebesar 92,2%. Gambar berikut menunjukkan cakupan IDL yng dimaksud. Grafik tersebut menunjukkan 2 kabupaten di Papua Selatan memiliki cakupan IDL di atas 80%, meskipun adakemungkinan kesalahan jumlah bayi lahir hidup di Kabupaten Mappi, sehingga memiliki cakupan di atas 100%.

Gambar 2. 67 Jumlah Kelahiran Hidup dan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Mengenai Universal Child Immunization (UCI), menurut Profil Kesehatan Papua 2022, di Provinsi Papua Selatan telah terdapat 32,52% kampung/kelurahan yang mencapai UCI. Yangdimaksud dengan kampung/kelurahan UCI adalah kampung dengan cakupan minimal 85% bayinya memperoleh imunisasi dasar lengkap. Secara nasional, capaian desa/kelurahan UCI adalah 59,2%. Pilahan per kabupaten menunjukkan rentang persentase Kampung/ kelurahan UCI antara 21,33% (Kabupaten Asmat) dan 44,51% (Kabupaten Mappi). Tabel berikut menunjukkan informasi selengkapnya.

Tabel 2. 55 Jumlah dan Persentase Kampung/ Kelurahan UCI Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

No.	Kabupaten	Jumlah Kampung/ Kelurahan	Kampung/ Kelurahan UCI	% Kampung / Kelurahan UCI
1	Merauke	192	78	40.63%
2	Boven Digoel	117	28	23.93%
3	Mappi	164	73	44.51%
4	Asmat	225	48	21.33%
Papua Selatan		698	227	32.52%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan balita meliputi antara lain pemantauan pertumbuhan (penimbangan berat badan dan pengukuran panjang/ tinggi badan), Pemberian Makanan Tambahan dan pemberian kapsul vitamin A. Berdasarkan data LPPD Provinsi Papua 2021, pelayanan

Kesehatan Balita di 4 Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan baru mencapai 23,4% di tahun 2021. Angka yang sangat rendah bahkan belum melebihi 10%, yakni di Kabupaten Boven Digoel, sementara capaian tertinggi di Kabupaten Merauke baru mencapai 30,9%. Berikut tabel yang menunjukkan capaian tersebut per Kabupaten.

Tabel 2. 56 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Tahun 2021

No.	Kabupate n	Jumlah Balita			Pelayanan Kesehatan Balita					
					Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Peremp uan	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perem puan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Merauke	10,640	10,711	21,351	3,330	31.3%	3,266	15.3%	6,596	30.9%
2	Bov en Dig oel	3,264	3,498	6,762	306	9.4%	267	3.9%	573	8.5%
3	Mappi	6,476	6,726	13,202	902	13.9%	1,102	8.3%	2,004	15.2%
4	Asmat	7,164	7,496	14,660	1,767	24.7%	2,159	14.7%	3,926	26.8%
Papua Selatan		27,544	28,431	55,975	6,305	22.9%	6,794	12.1%	13,099	23.4%

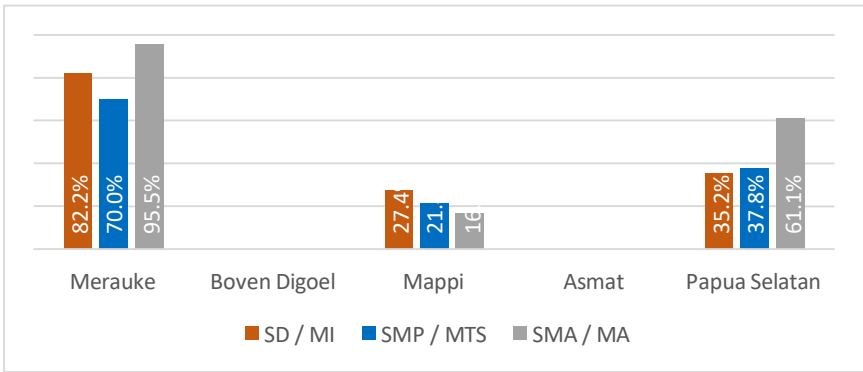
Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun

Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan UKS merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Tidak terdapat laporan yang lengkap mengenai cakupan sekolah di Provinsi Papua Selatan yang mendapat pelayanan kesehatan peserta didik dalam periode tahun 2018-2022. Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 menampilkan data dari 2 kabupaten saja, yakni Kabupaten Merauke dan Mappi. Data tersebut menunjukkan perbedaan yang lebar antara cakupan Kabupaten Merauke dan Mappi dalam ke-3 jenjang sekolah. Dari 2 kabupaten yang tersedia datanya, wilayah Provinsi Papua Selatan masih memiliki cakupan yang rendah, yakni mencakup 35,2% untuk tingkat SD/MI, 37,8% tingkat SMP/MTs dan 61,1% tingkat SMA/ MA. Gambar berikut menampilkan cakupan pelayanan kesehatan sekolah di masing-masing kabupaten pada tahun 2021.

Gambar 2. 68 Persentase Sekolah dengan Pelayanan Kesehatan Sekolah Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022

2.2.1.2.4 Gizi

Status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang atau Tinggi Badan (BB/PB atau TB). Pengukuran status gizi ini didasarkan atas standar World Health Organization tahun 2005. Indeks yang biasa digunakan di fasilitas

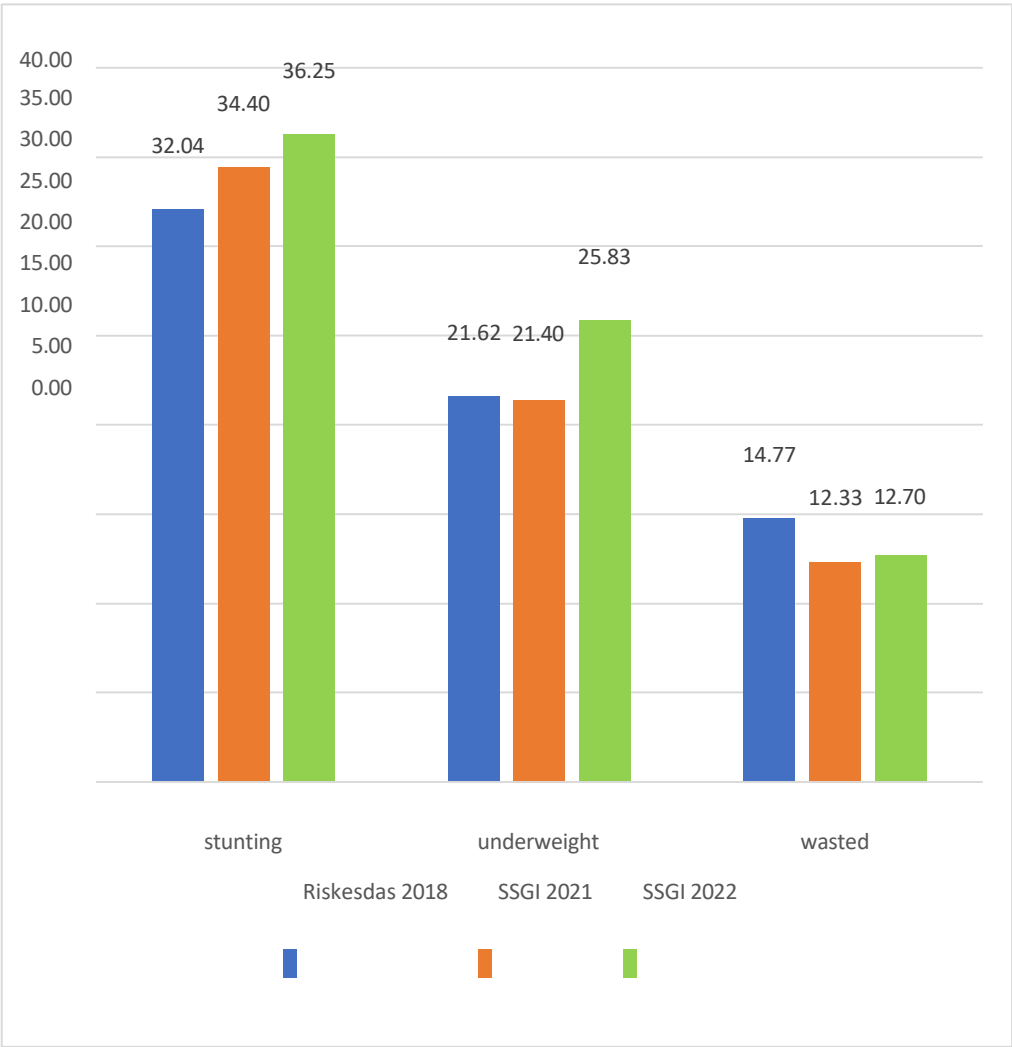
kesehatan saat ini adalah BB/U untuk menilai gizi buruk atau gizi kurang dan indeks TB/U untuk menilai kondisi anak stunting.

Data mengenai kondisi gizi anak di 4 kabupaten Provinsi Papua Selatan yang dijadikan acuan dalam pembahasan ini adalah hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, dan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diselenggarakan oleh Kemenkes RI tahun 2021 dan 2022. Perbandingan kondisi gizi dari tahun ke tahun berdasarkan ke-3 survey ini menunjukkan bahwa kondisi gizi balita di Provinsi Papua Selatan tidak membaik dalam 4 tahun terakhir. Terjadi peningkatan angka rata-rata kabupaten baik untuk balita dengan berat badan kurang (underweight) maupun tinggi badan kurang (stunting).

Gambar 2.69 di bawah ini menunjukkan prevalensi balita pendek berdasarkan TB/U, balita kurang berat badan berdasarkan BB/U dan balita kurus berdasarkan BB/TB tahun 2018, 2021 dan 2022. Secara rata-rata kabupaten, nampak bahwa persentase balita dengan masalah gizi cenderung meningkat menggunakan ke-3 indeks pengukuran status gizi.

Gambar 2. 69 Persentase Balita Stunting, Underweight dn Wasted di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022

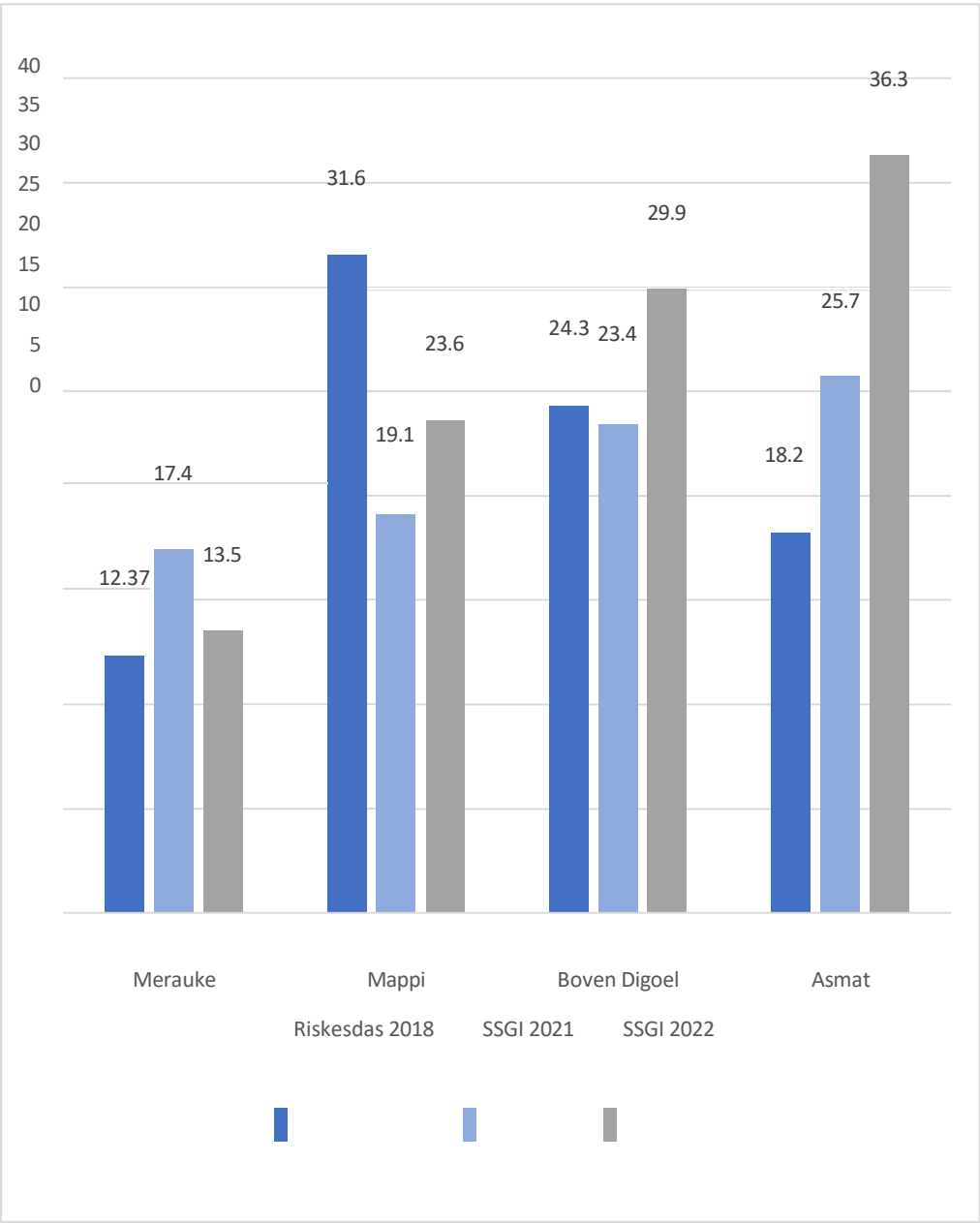
Sumber: Riskesdas 2018, SSGI 2021 dan 2022



Mengenai stunting, berdasarkan SSGI 2022 didapatkan angka rata-rata kabupaten untuk balita stunting sebesar 36,3%. Angka rata-rata kabupaten ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 32,0% (Hasil Riskesdas 2018) dan 34,4% (SSGI 2021). Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Asmat memiliki prevalensi stunting yang sangat tinggi (54,5%) di tahun 2022.

Kondisi yang serupa juga terjadi pada hasil pengukuran status gizi berdasarkan BB/U, untuk menentukan gizi kurang dan gizi buruk pada balita (underweight). Secara rata-rata kabupaten,prevalensi balita underweight pada tahun 2018, 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, yakni berturut-turut 21.62%, 21.40% dan 25.83%. Gambar berikut menampilkan prevalensi balita underweight berdasarkan kabupaten.

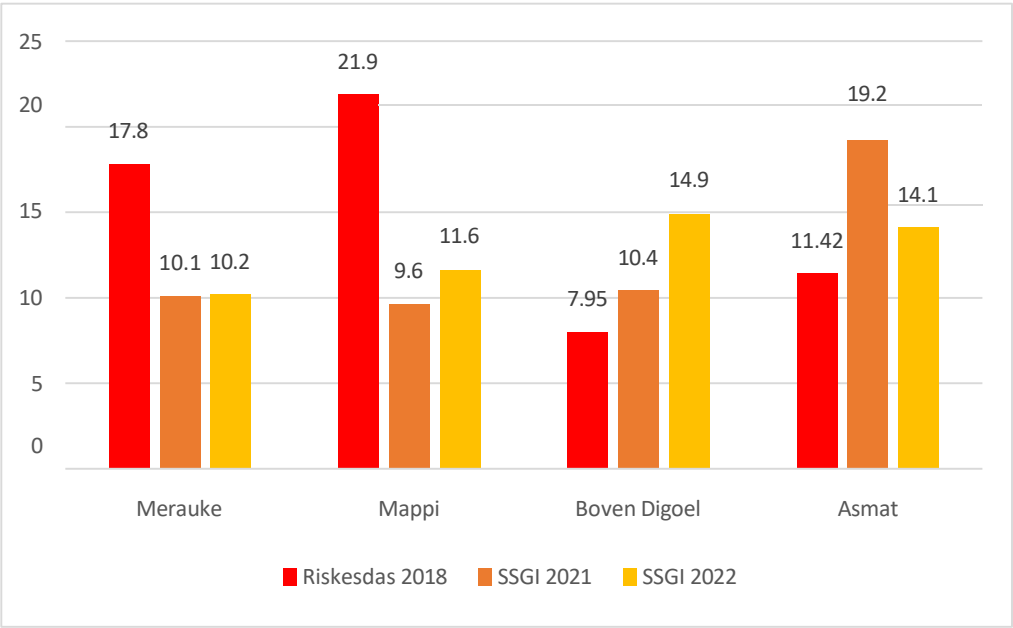
Gambar 2. 70 Persentase Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk (underweight) Menurut



Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018, 2021 dan 2022
Sumber: Riskesdas 2018, SSGI 2021 dan 2022

Pengukuran status gizi berdasarkan indeks BB/TB atau balita kurus (wasted) menunjukkan persentase yang lebih rendah dibandingkan 2 indeks pengukuran lainnya. Berturut-turut pada tahun 2018, 2021 dan 2022 prevalensi balita kurus di rata-rata kabupaten di Provinsi Papua selatan adalah 14.77%, 12.33% dan 12.70%. Dengan indeks pengukuran ini, Kabupaten Mappi pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi tertinggi. Berikut gambar yang menunjukkan perbandingan antar kabupaten mengenai prevalensi balita kurus tersebut.

Gambar 2. 71 perbandingan antar kabupaten mengenai prevalensi balita kurus



Sumber: Riskesdas 2018, SSGI 2021 dan 2022

2.2.1.2.5 Pengendalian Penyakit Menular Tuberkulosis

merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Secara global, diperkirakan 10 juta orang menderita TB pada tahun 2019 dan Indonesia berada pada peringkat ke-2 dengan penderita TB tertinggi di dunia setelah India. Keberhasilan penanganan tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan Cakupan Penemuan dan Pengobatan TB (Treatment Coverage, TC). Pada tahun 2020 belum ada provinsi di Indonesia yang mencapai angka TC $\geq 80\%$, dengan rata-rata nasional baru mencapai 41,7%. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (Treatment Success Rate, TSR) secara nasional baru mencapai 82,7%, masih di bawah target yang ditetapkan renstra Kementerian Kesehatan untuk indikator ini pada tahun 2020 yaitu sebesar 90%.

Upaya penanggulangan Tb di Papua Selatan masih menghadapi banyak tantangan. Pada tahun 2021, dalam lingkup provinsi TC baru mencapai 39%. Sedangkan TSR cukup baik, yang mencapai 81,5%. Berdasarkan kabupaten, TC yang masih rendah terdapat di Kabupaten Boven Digoel dan Asmat, sedangkan TSR umumnya menunjukkan capaian yang baik, kecuali di kabupaten Asma yang baru mencapai 55,0%. Tabel berikut menunjukkan capaian TC dan TSR berdasarkan kabupaten di Papua Selatan.

Tabel 2. 57 TC dan TSR Tuberkulosis Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

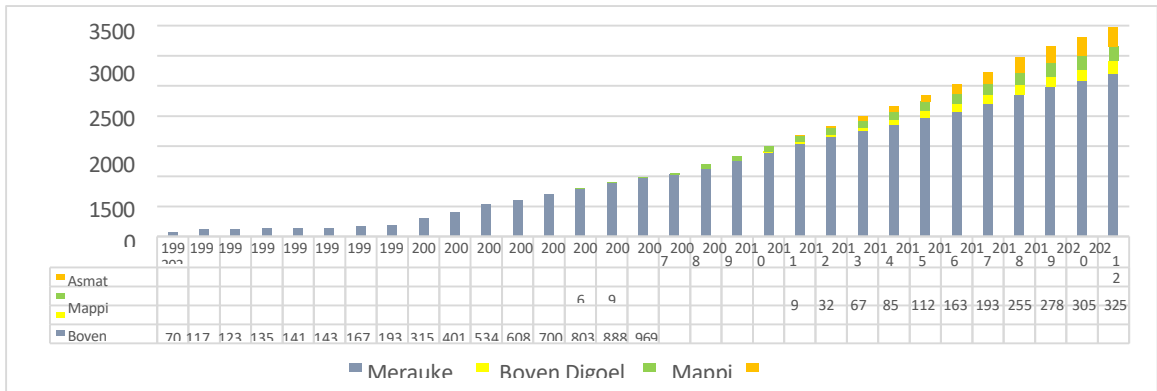
Kabupaten	Jumlah Kasus TerdugaTb	Treatment Coverage		Treatment Success Rate	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	2,175	995	46%	840	84.4%
Boven Digoel	1,422	363	26%	321	88.4%
Mappi	2,249	1,103	49%	953	86.4%
Asmat	1,510	404	27%	222	55.0%
Papua Selatan	7,356	2,865	39%	2,336	81.5%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua, 2022

HIV-AIDS

Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua menunjukkan hingga akhir tahun 2022 di wilayah Provinsi Papua Selatan secara kumulatif telah tercatat 2703 kasus HIV- AIDS. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten pertama di Papua yang melaporkan kasus AIDS di tahun 1992. Sementara kabupaten lain baru melaporkan kasus-kasus pertama pada tahun 2005 (Mappi), 2009 (Boven Digoel) dan 2012 (Asmat). Perkembangan kasus HIV-AIDS di Provinsi Papua Selatan sejak tahun 1992 hingga 2022 ditampilkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2. 72 Perkembangan kasus HIV-AIDS di Provinsi Papua Selatan sejak tahun 1992 hingga 2022



Sumber: Unit Pelaksana Teknis AIDS Tuberkulosis MalariaDinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan 2023

Pada tahun 2021, ODHA yang sedang dalam pengobatan ARV di Papua Selatan mencakup 58,0%, dengan angka tertinggi di Kabupaten Merauke; 81,4%. Kabupaten Asmat menduduki urutan terbawah dengan cakupan ODHA dengan pengobatan ARV hanya 11,6%. Sedangkan Kabupaten Boven Digoel dan Mappi masing-masing mencapai angka 28,4% dan 21,9%.

Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh virus, jamur dan bakteri. Program pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita, yang ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit iniyaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Cakupan penemuan pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 34,8% dari angka perkiraan kasus (3,55% dari jumlah balita). Tidak tersedia data yang lengkap untuk Provinsi Papua Selatan. Data LPPD Provinsi Papua 2021 menampilkan data 2 kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel dengan cakupan penemuan kasus masing-masing sebesar 34% dan 5%.

Diare

Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita. Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Secara nasional, pada tahun 2020 cakupan pelayanan penderita diare pada balita sebesar 28,9% dari sasaran yang ditetapkan. Sedangkan capaian provinsi Papua Selatan untuk balita cukup baik yakni sebesar 39,8%. Sementara untuk pelayanan pada semua umur, papua Selatan mencapai 15,1%. Berikut tabel yang menunjukkan cakupan pelayanan diare berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021.

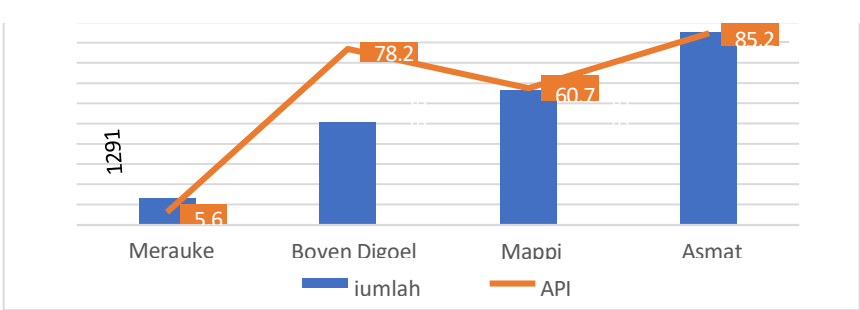
Tabel 2. 58 Cakupan Pelayanan Kasus Diare Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Target Penemuan Kasus		Pelayanan Balita		Pelayanan Semua Umur	
	Balita	Semua Umur	Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	3,600	23,520	791	22.0%	1,823	7.8%
Boven Digoel	1,140	7,002	834	73.2%	1,699	24.3%
Mappi	2,226	10,161	981	44.1%	2,185	21.5%
Asmat	2,472	10,135	1,149	46.5%	1,958	19.3%
Papua Selatan	9,438	50,818	3,755	39.8%	7,665	15.1%
Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2022						

Malaria

Angka Kesakitan Malaria digambarkan dengan indikator Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, yaitu proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk di wilayah tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir API nasional di bawah 1 per 1.000 penduduk, termasuk pada tahun 2020 yang sebesar 0,94%. Di Provinsi Papua Selatan, API masih tergolong sangat tinggi, dengan rata-rata dari 4 kabupaten pada tahun 2021 sebesar 43,5 per 1.000 penduduk. Sedangkan jika dipilah per Kabupaten, hanya kabupaten Merauke yang memiliki API cukup rendah (5,6 per 1000 penduduk), sementara 3 kabupaten lainnya memiliki API di atas 50 per 1000 penduduk). Berikut gambar yang menunjukkan API per kabupaten di Papua Selatan tahun 2021.

Gambar 2. 73 API per kabupaten di Papua Selatan



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua, 2022

Mengenai penanganan kasus, pada tingkat Provinsi, angka Slide Positivity Rate (SPR) atau persentase kasus positif dari semua sediaan darah yang diperiksa laboratorium pada tahun 2021 sebesar 31,7%. Angka SPR yang sangat tinggi terdapat di Kabupaten Boven Digoel, Sementara kasus positif malaria yang ditangani sesuai standar pada tingkat provinsi mencapai 88,5%. Kabupaten Mappi mencapai 100% untuk capaian pengobatan kasus sesuai standar, sedangkan Kabupaten Asmat hanya 76,0%. Berikut tabel mengenai penanganan kasus malaria di Provinsi Papua Selatan.

Tabel 2. 59 Cakupan Penanganan Kasus Malaria Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2021

Kabupaten	Jumlah Kasus Diperiksa Laboratorium	Jumlah Kasus Positif	% Kasus Positif	Jumlah Kasus Diobati Sesuai Standar	% PengobatanStandar
Merauke	14,856	1,291	8.7%	1,158	89.7%
Boven Digoel	6,070	5,063	83.4%	4,892	96.6%
Mappi	27,770	6,656	24.0%	6,656	100.0%
Asmat	22,371	9,516	42.5%	7,228	76.0%
Papua Selatan	71,067	22,526	31.7%	19,934	88.5%

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Papua, 2022

Penyakit Tidak Menular (PTM)

Data mengenai PTM di Provinsi Papua Selatan tidak tersedia secara lengkap. LPPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 menampilkan data mengenai cakupan pelayanan penderita Hipertensi, Diabetes Mellitus dan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat hanya pada 2 kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel. Berikut data yang dapat menjadi gambaran tentang situasi pelayanan PTM di Provinsi Papua Selatan:

Penderita Hipertensi yang mendapat pengobatan dari estimasi jumlah kasus Hipertensi Berusia ≥ 15 Tahun: Kabupaten Merauke: 84,66% Kabupaten Boven Digoel: 81,39% Penderita Diabetes Melitus yang mendapat pengobatan dari estimasi jumlah kasus: Kabupaten Merauke: 44,58% Kabupaten Boven Digoel: 41,88% Penderita ODGJ Berat yang mendapat pengobatan dari estimasi jumlah kasus: Kabupaten Merauke: 87,55% Kabupaten Boven Digoel: 48,98%.

2.2.1.2.6 Kesehatan Lingkungan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. Upaya yang dilakukan adalah mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Pada tahun 2020 terdapat sebanyak 285 dari 324 kabupaten/kota yang ditargetkan dapat menerapkan KTR, atau baru 54,3% dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Di Provinsi Papua Selatan sendiri penerapan KTR ini belum berjalan dengan baik.

Tempat Tempat Umum (TTU)

Yang dimaksud dengan TTU adalah tempat-tempat umum yang mencakup Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan, Tempat Ibadah, Pasar dan sebagainya. Upaya Kesehatan yang dijalankan adalah dengan pembinaan TTU agar memenuhi syarat-syarat kesehatan. Di wilayah provinsi Papua Selatan, Profil Kesehatan Provinsi Papua 2022 hanya menampilkan data tentang persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan dari 3 kabupaten, antara lain: Merauke 79,9%, Boven Digoel 57,3% dan Mappi 5,2%. Angka-angka ini menunjukkan upaya kesehatan lingkungan ini belum menunjukkan capaian yang tinggi.

Kabupaten/Kota Sehat

Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 111 kabupaten/kota (21,6%). Jumlah ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2020 yaitu 110 KKS. Sedangkan sebanyak 22 Provinsi hingga tahun 2020 belum menyelenggarakan KKS, termasuk kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

2.2.1.2.7 Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, yang membagi kepesertaan JKN menjadi 2 kelompok, yaitu (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayari oleh pemerintah. (2) Bukan PBI jaminan kesehatan, yang terdiri dari Pekerja maupun Non Pekerjabeserta keluarganya.

Data mengenai kepesertaan JKN ini tidak tersedia secara lengkap untuk wilayah Provinsi Papua Selatan. Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2021 hanya menampilkan data dari 2 kabupaten, yakni Merauke dan Boven Digoel, dengan masing-masing cakupan JKN sebesar 109,6% dan 114,5%. Dari keseluruhan peserta itu, sebagian besar merupakan peserta PBI, yakni 85,5% di Kabupaten Merauke dan 86,4% di Kabupaten Boven Digoel.

2.2.1.2.8 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.2.1.2.8.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Tabel 2.60 menunjukkan proporsi Panjang jaringan jalan di Provinsi Papua tahun 2017-2021. Data menunjukkan terdapat peningkatan panjang jalan dari kualitas rusak berat menjadi kualitas sedang dan rusak ringan. Pada tahun 2021, panjang jalan dengan kualitas sedang dan rusak ringan meningkat sebesar 270% dan 170%. Jumlah jalan

dengan kualitas rusak berat mengalami penurunan jumlah sebesar 60%. Sementara proporsi kualitas jalan dari dominasi kualitas jalan rusak berat sebesar lebih dari 50% mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 21% diiringi dengan peningkatan proporsi jalan kualitas rusak ringan dan sedang dari 12% dan 18% menjadi 32,4% dan 30,2%.

Tabel 2. 60 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Menurut Kondisi Jaringan Jalan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

	Kondisi Jalan	2017	2018	2019	2020	2021
Panjang Jalan (km)	Baik	950,835	878,639	865,841	797,419	831,496
	Sedang	616,761	626,761	569,686	1711,784	1668,254
	Rusak	915,856	1050,685	884,337	1576,214	1555,086
	Rusak Berat	2482,53	2409,878	2653,439	1069,991	1100,572
Persentase	Baik	19,1%	17,7%	17,4%	15,5%	16,1%
	Sedang	12,4%	12,6%	11,5%	33,2%	32,4%
	Rusak	18,4%	21,2%	17,8%	30,6%	30,2%
	Rusak Berat	50,0%	48,5%	53,4%	20,8%	21,3%
Total		4965,982	4965,963	4973,303	5155,408	5155,408

Sumber: diolah dari BPS Kabupaten, 2022 (dalam dokumen Kabupaten dalam Angka 2022)

Tabel 2.61 menunjukkan kondisi jaringan jalan kabupaten/ kota Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel 2.62 diketahui bahwa Kabupaten Asmat memiliki jalan dengan kualitas rusak berat terpanjang dan proporsi terbanyak (32%). Sementara Kabupaten Boven Digoel memiliki jalan dengan kualitas rusak (ringan) terpanjang dan proporsi terbanyak. Perbaikan jalan pada kedua kabupaten ini menjadi salah satu pilihan prioritas dalam percepatan peningkatan akses jalan dan serta memudahkan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 2. 61 Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan 2022

No	Kabupaten	Panjang jalan tiap Kondisi Jaringan Jalan (Km)			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak berat
1	Merauke	367,35	642,00	155,57	148,95
2	Boven Digoel	138,74	180,72	945,20	3,28
3	Mappi	69,1	845,6	109	61,86
4	Asmat	256,31	-	345,32	284,85

Sumber: BPS Kabupaten, 2022 (dalam dokumen Kabupaten dalam Angka 2022)

2.2.1.2.8.2 Sanitasi Layak

Sistem sanitasi mencakup sistem pengolahan air limbah dan irigiasi merupakan sistem yang harus disediakan secara optimal baik dalam lingkup publik maupun rumah tangga. Utamanya dalam lingkup rumah

tangga, penyediaan sanitasi yang layak merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan tempat tinggal yang sehat. Terkelolanya sistem pengolahan air limbah menghindarkan wabah dan penyakit terutama terkait kesehatan pencernaan dan kulit dari lingkungan masyarakat. Tabel 2.62 menunjukkan sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat memerlukan peningkatan sistem sanitasi yang layak. Data 2017-2020 menunjukkan kurang dari 50% rumah tangga di Kabupaten Mappi dan Asmat yang memiliki sanitasi yang layak.

Tabel 2. 62 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak 2017-2021

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	56,45	56,45	80,34	74,02	78,24
Boven Digoel	43,47	43,47	63,25	66,37	56,78
Mappi	21,68	21,68	25,06	26,19	38,11
Asmat	10,57	10,57	6,84	23,28	30,36
Rata-rata 4 kabupaten	32,91	32,91	43,87	47,47	50,87

Sumber: Statistik Provinsi Papua Dalam Angka 2023

Prioritas peningkatan pelayanan sanitasi layak didukung oleh data yang ditunjukkan pada Tabel 2.63. Di Kabupaten Mappi dan Asmat terdapat 33,61% dan 36,58% rumah tangga yang tidak terdapat fasilitas sanitasi layak. Sementara penggunaan fasilitas tempat buang air besarmayoritas menggunakan fasilitas pribadi, data sebelumnya menunjukkan kurangnya kelayakan fasilitas sanitasi pada lingkungan rumah tangga.

Tabel 2. 63 Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar 2022

Kabupaten	Sendiri	Bersama	MCK Umum	Tidak Menggunakan	Tidak Ada
Merauke	79,02	5,94	4,67	0,04	10,32
Boven Digoel	69,57	3,24	1,00	1,04	25,14
Mappi	53,79	4,98	6,65	1,06	33,61
Asmat	47,87	10,55	4,62	0,39	36,58

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

2.2.1.2.8.3 Sumber Air Minum Layak

Ketersediaan sumber air minum yang layak menjadi syarat pengembangan suatu wilayah. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Air Minum, air minum merupakan air yang layak dapat diminum dengan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan. Tabel 2.64 menunjukkan penurunan rata-rata ketersediaan sumber air minum layak dari 77% pada tahun 2018 menjadi 72% pada tahun 2022. Penurunan ketersediaan air minum layak terjadi di seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Kecuali Kabupaten Asmat.

Tabel 2. 64 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak 2018-2023

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	84,45	24,79	29,67	71,35	77,32
Boven Digoel	72,05	17,08	36,22	64,50	61,98
Mappi	56,28	29,79	23,58	48,66	49,69
Asmat	94,79	87,78	91,81	98,67	97,97
Papua Selatan	76,89	39,86	45,32	70,80	71,74

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

Sumber Air minum rumah tangga di Provinsi Sumatera Selatan adalah air kemasan bermerek terutama di Kabupaten Merauke (68%) dan Boven Digoel (37,36%). Sementara sumber air minum utama di Kabupaten Mappi adalah sumur tak terlindung (29,2%) dan Kabupaten Asmat adalah Air hujan (86,9%).

Tabel 2. 65 Persentase Sumber Air Minum Rumah Tangga berdasarkan Sumber Air Utama, 2022

Kategori	Kabupaten			
	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat
Air Kemasan Bermerk/ Isi Ulang	68	37,36	11,51	11,93
Leding	0,32	0,78	0	0
Sumur Bor/ Pompa	2,85	13,18	0,27	0
Sumur Terlindung	6,42	4,01	18,8	0
Sumur Tak Terlindung	8,6	20,55	29,2	0
Mata Air Terlindung/Tak Terlindung	1,32	12,97	12,91	0
Air Permukaan	1,38	0,76	5,7	1,98
Air Hujan	11,1	10,38	21,62	86,09
Lainnya	0	0	0	0

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

2.2.1.2.9 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan papan dasar. Capaian kesejahteraan dan kelayakan hunian di daerah menggunakan tolak ukur kuantitas dan kualitas tempat hunian. Tinjauan kelayakan hunian melihat tiga komponen dalam bangunan hunian yaitu persentase hunian berdasarkan jenis atap, tembok, dan lantai terluas.

Tabel 2.66 menunjukkan persentase hunian untuk tiap jenis atap terluas hunian. Mayoritas atap hunian di Papua Selatan menggunakan atap seng untuk huniannya dengan persentase rata-rata sekitar 83% hunian di Papua Selatan. Jenis atap lainnya dengan jumlah penggunaan yang signifikan adalah atap berjenis jerami. Jenis ini secara signifikan digunakan pada hunian di Kabupaten Mappi (20,66%) dan Asmat (13,93%).

Tabel 2. 66 Persentase Rumah Tangga Kabupaten/ Kota dan Jenis Atap Terluas 2022

Kabupaten	Beton	Genteng	Asbes	Seng	Bambu	Kayu	Jerami	Lainnya
Merauke	0,09	3,11	2,07	92,18	0,08	0,00	2,24	0,23
Boven Digoel	0,00	1,10	0,19	81,46	0,00	0,06	11,00	0,28
Mappi	0,00	1,38	0,00	77,52	1,00	0,19	20,66	0,25
Asmat	0,00	0,50	0,00	81,46	1,48	2,56	13,93	0,06
Rata-rata	0,00	1,50	0,60	83,20	0,60	0,70	12,00	0,20

Kabupaten	Marmer / Granit	Keramik	Parket/Vinil/Karpet / Ubin/Tegel/Teraso	Kayu / papan	Semen / Bata	Bambu	Tanah
-----------	-----------------	---------	---	--------------	--------------	-------	-------

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

Merauke	1,07	28,15	11,06	22,14	32,76	0,25	4,37

Tabel 2.67 menunjukkan persentase hunian untuk tiap jenis tembok hunian. Mayoritas tembok hunian di Papua Selatan menggunakan jenis

tembok kayu atau papan dengan rata- rata proporsi sebesar 60,45%. Penggunaan tembok papan terbanyak dengan proporsi 90% terdapat di Kabupaten Asmat. Sementara penggunaan tembok berjenis Tembok dengan rata- rata proporsi sebesar 36% menempati urutan kedua jenis tembok di Papua Selatan.

Tabel 2. 67
 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Dinding Terluas, 2022

Kabupaten	Tembok	Plaster an Anyam an Bambu	Kayu/ Papan	Anyaman Bambu	Batang Kayu	Bam bu	Lainny a
Merauke	63,34	0,01	33,81	0,82	0	0,41	1,61
Boven Digoel	41,32	0,27	57,02	0,49	0,16	0	0,73
Mappi	42,75	0	50,08	1,36	0	0,75	5,06
Asmat	0	0	90,90	0,25	0,78	0,14	7,93
Rata-rata	36,85	0,07	57,95	0,73	0,24	0,33	3,83

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

Table 2.68 menunjukkan persentase hunian untuk tiap jenis lantai hunian. Hunian di Papua Selatan menggunakan beragam jenis bahan dengan proporsi yang cukup signifikan untuk tiap jenis bahannya. Mayoritas jenis lantai yang digunakan pada hunian di Papua Selatan adalah jenis kayu/ papan (45,53%). Di Kabupaten Asmat hampir seluruh huniannya menggunakan lantai berjenis kayu (99%). Sementara jenis lantai dengan penggunaan yang signifikan lainnya di Papua Selatan adalah lantai dengan bahan semen/ bata merah (29%) dan berjenis keramik (15,66%).

Tabel 2. 68 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Terluas, 2022

Boven Digoel	0,26	25,43	2,56	26,73	40,1	0,33	0,23	4,36
--------------	------	-------	------	-------	------	------	------	------

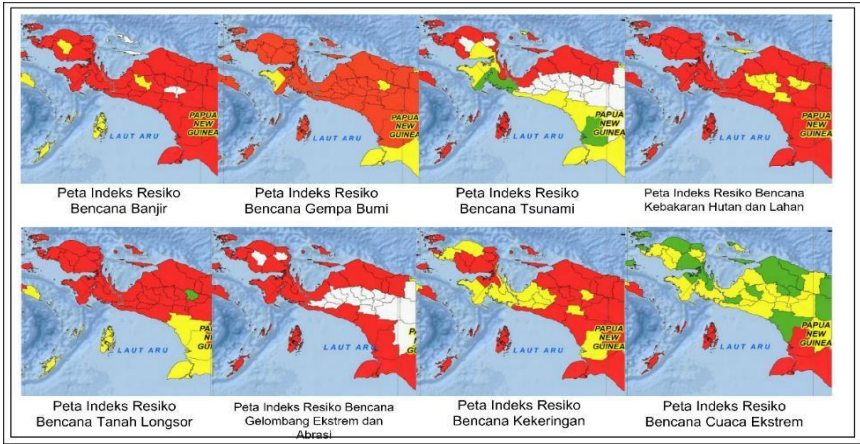
Mappi	2,55	9,07	3,49	34,22	45,67	1,09	2,19	1,71
Asmat	0,08	0	0,33	99,04	0	0,27	0,27	0
Rata-rata	0,99	15,66	4,36	45,53	29,63	0,49	1,77	1,57

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2022 (dalam dokumen Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022)

2.2.1.2.10 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang terjadi pada suatu daerah yang mengakibatkan adanya kondisi yang kurang kondusif baik ini disebabkan bencanaalam maupun konflik social, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan aktifitas dalam mengantisipasi, menekan dan menyelesaikan kondisi tersebut. Adapun Kondisi keamanan dan ketertiban di Provinsi Papua Selatan dapat dilihat pada gambar Peta Indeks Resiko Bencana dibawah ini:

Gambar 2. 74 Peta Indeks Tiap Risiko Bencana Kabupaten dan Kota Tahun 2022



Sumber: BNPB, 2023

Adapun Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penanganan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Konflik adalah proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ektrim akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Berdasarkan table 2.69 diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 42 kampung/kelurahan atau 6,12% dari total kampung/kelurahan di Papua Selatan telah menjadi lokasi perkelahian massal. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, terdapat variasi jumlah kejadian perkelahian massal pada tahun 2021. Kabupaten Merauke merupakan daerah dengan lokasi perkelahian paling banyak yaitu 20 kampung/kelurahan atau 10,53% dari jumlah kampung/kelurahan di Kabupaten Merauke. Wilayah dengan lokasi perkelahian massal terendah adalah Kabupaten Mappi yaitu 4 kampung/kelurahan.

Tabel 2. 69 Jumlah dan Persentase Kampung/Kelurahan Berdasarkan Jenis Perkelahian Massal di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kategori		Merauke	Boven Digoei	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Kampung/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal	Jumlah	20	4	4	14	42
	%	10,53	3,60	2,44	6,33	6,12
Jumlah kampung/kelurahan menurut Jenis kejadian perkelahian massal	Perkelahian antar kelompok masyarakat	16	4	3	14	37
	Perkelahian Kelompok Masyarakat Antar Kampung/Kelurahan	3	0	0	0	3
	Perkelahian Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan	2	0	0	0	2
	Perkelahian Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah	1	0	0	1	2
	Perkelahian Pelajar/Mahasiswa	0	0	0	0	0

	Perkelahian Antar Suku	1	0	0	0	1
	Perkelahian lainnya	1	0	1	0	2

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Papua 2021

Dalam upaya menanggulangi isu konflik Pemerintah Daerah Kabupaten maupun Provinsi berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang

mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional (sebagaimana Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial). Selain itu, terdapat strategi yang dinilai lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; (2) dengan mediasi (perantara). Jika konflik menemui jalan buntu, masing- masing bisa menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Tabel 2. 70 Banyaknya Kampung/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Tahun 2021

Inisiator	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan	
					Jumlah	%
Aparat keamanan	10	1	3	3	17	28,33
Aparat pemerintah	5	4	1	6	16	26,67
Tokoh Masyarakat	7	4	2	11	24	40,00
Tokoh agama	0	0	0	0	0	0,00
Lainnya	2	0	0	0	2	3,33
Tidak ada inisiator	0	0	0	1	1	1,67

Table 2.70 menunjukkan inisiator yang aktif dalam menyelesaikan perkelahian massal di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat merupakan inisiator yang penting dalam penyelesaian konflik di Provinsi Papua Selatan dengan cakupan penyelesaian konflik di 24 kampung/kelurahan atau 40% dari lokasi kejadian perkelahian massal. Aparat keamanan menempati urutan ke-2 sebagai inisiator penyelesaian konflik, sedangkan aparat pemerintah menempati urutan ke-3.

2.2.1.3 Sosial

2.2.1.3.1 Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Undang-Undang No 40 Tahun 2004). Jaminan sosial (social security) merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial (social welfare system) dan diberikan kepada masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko ketuaan, kematian, ketidakmampuan dan pengangguran.

Berdasarkan tabel 2.71 diketahui bahwa cakupan seluruh program jaminan sosial di Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan peninjauan terhadap kabupaten pada tahun 2022, diketahui bahwa kabupaten yang memiliki cakupan jaminan sosial paling tinggi adalah Kabupaten Boven Digoel, baik untuk jaminan pensiun/veteran (11,93%), jaminan hari tua (12,24%), jaminan asuransi kecelakaan kerja (12,47%), jaminan/asuransi kematian (11,80%), maupun pesangon pemutusan hubungan kerja (6,97%).

Tabel 2. 71 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kategori	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Jaminan Pensiun/ Veteran	Merauke	12,42	7,06	10,41	11,65	9,80
	Boven Digoel	13,59	12,66	11,91	10,23	11,93
	Mappi	1,12	0,44	1,07	0,02	5,14
	Asmat	1,84	2,17	3,40	5,24	0,41
	Rata-rata Kabupaten	7,24	5,58	6,70	6,79	6,82
Jaminan Hari Tua	Merauke	7,63	4,01	4,67	4,95	5,41
	Boven Digoel	19,91	11,73	10,63	27,54	12,24

	Mappi	0,27	0,02	0,64	0,02	5,23
	Asmat	1,81	1,82	2,36	5,16	0,24
	Rata-rata Kabupaten	7,41	4,40	4,58	9,42	5,78
Jaminan Asuransi Kecelakaan Kerja	Merauke	6,17	5,22	3,46	6,15	5,48
	Boven Digoel	19,38	17,17	15,80	28,17	12,47
	Mappi	0,27	0,00	0,60	0,00	5,48
Kategori	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
	Asmat	1,33	2,25	2,11	4,73	0,00
	Rata-rata 4 Kabupaten	6,79	6,16	5,49	9,76	5,86
Jaminan / Asuransi /Kematian	Merauke	5,89	3,09	3,03	5,26	6,02
	Boven Digoel	16,60	16,89	9,89	27,94	11,80
	Mappi	0,27	0,00	0,39	0,00	5,14
	Asmat	0,83	1,65	2,07	4,83	0,24
	Rata-rata Kabupaten	5,90	5,41	3,85	9,51	5,80
Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Merauke	2,93	2,28	2,61	2,84	2,44
	Boven Digoel	16,77	13,78	7,02	7,54	6,97
	Mappi	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
	Asmat	0,18	1,50	0,75	1,07	0,00
	Rata-rata 4 Kabupaten	4,97	4,39	2,63	2,86	2,35

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2022 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua”)

2.2.1.3.2 Bantuan Sosial

Penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran, yaitu mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan pendapatan. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui bantuan sosial yang merupakan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Undang-Undang No 40 Tahun 2004). Bentuk bantuan sosial yang dibahas dalam subbab ini antara lain berupaprogram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 2. 72 Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menjadi Penerima Program KKS, BPNT dan

PKH di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kategori	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
	Merauke	9,82	9,69	3,74	5,10	2,12
Kategori	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	Boven Digoel	13,31	2,13	1,92	1,54	0,97
	Mappi	7,06	11,74	1,44	3,96	4,60
	Asmat	28,14	10,09	3,37	3,14	13,36
	Rata-rata Kabupaten	14,58	8,41	2,62	3,44	5,26
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako	Merauke	n.a	n.a	0,00	10,53	4,38
	Boven Digoel	n.a	n.a	0,00	5,02	0,16
	Mappi	n.a	n.a	1,97	2,36	4,14
	Asmat	n.a	n.a	5,54	0,36	0,10
	Rata-rata Kabupaten	n.a	n.a	1,88	4,57	2,20
Program Keluarga Harapan (PKH)	Merauke	0,57	2,54	1,05	3,58	3,86
	Boven Digoel	0,00	0,51	0,28	0,57	3,73
	Mappi	0,20	0,00	0,53	8,35	4,21
	Asmat	0,00	0,09	5,75	3,73	9,16
	Rata-rata Kabupaten	0,19	0,79	1,90	4,06	5,24

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2022 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat Papua

Table 2.72 menunjukkan persentase rumah tangga yang pernah menjadi penerima program KKS, BPNT, dan PKH di Provinsi Papua Selatan tahun 2018-2022. Berdasarkan tabel 2.72 diketahui bahwa rata-rata cakupan penerima seluruh program bantuan sosial tersebut masih sangat kecil (<10%), dan pada pelaksanaan bantuan KKS terdapat penurunan cakupan penerima dari 14,58% pada tahun 2018 menjadi 5,26% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, dapat diketahui bahwa Kabupaten Asmat memiliki cakupan PKH dan KKS yang paling tinggi dibandingkan kabupaten lainnya pada tahun 2022 yaitu mencapai 9,16% dan 13,36%.

Cakupan penerima bantuan sosial terendah di Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Boven Digoel yaitu 0,97% untuk KKS, 0,16% untuk BPNT dan 3,73% untuk PKH. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan masyarakat Papua Selatan dalam jaminan dan bantuan sosial belum sepenuhnya terpenuhi melalui program bantuan sosial yang sebelumnya diimplementasikan (PKH, BPNT, KKS, dll), sehingga diperlukan peran

aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan Bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten dalam mengisi gap akses jaminan dan bantuan sosial tersebut, khususnya afirmasi jaminan dan bantuan sosial untuk OAP.

2.2.2 Urusan Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintah wajib non-pelayanan dasar yang dibahas dalam subbab ini terdiri atas 18 urusan, yaitu:

- (1) tenaga kerja;
 - (2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - (3) pangan;
 - (4) pertanahan;
 - (5) lingkungan hidup;
 - (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - (7) pemberdayaan masyarakat dan kampung;
 - (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - (9) perhubungan;
 - (10) komunikasi dan informatika;
-
- (11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - (12) kepemudaan dan olahraga;
 - (13) statistik; dan
 - (14) kebudayaan.

2.2.2.1 Tenaga Kerja

2.2.2.1.1 Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja berhubungan erat dengan profil kependudukan, utamanya yang berusia produktif. Ukuran besar-kecilnya angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Definisi Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

Tabel 2.74 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Selatan menurut jenis kegiatan pada tahun 2021. Berdasarkan tabel 2.73 diketahui bahwa 97,19% angkatan kerja di Papua Selatan telah bekerja. Persentase angkatan kerja yang telah bekerja tertinggi terdapat di Kabupaten Asmat (99,55%) dan Merauke (97,81%). Meskipun demikian, jumlah angkatan pengangguran yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Merauke yaitu sebesar 2.786 jiwa dan Kabupaten Boven Digoel sebesar 2.590 jiwa.

Tabel 2. 73 penduduk berumur 15 tahun ke atas di Papua Selatan menurut jenis kegiatan pada tahun 2021

Kabupaten	L+P	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja				Presentase angkatan kerja	Presentase bekerja
		Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Total	Total	Total
Mappi		35.869	2.590	1.794	6.839	1.148	48.240	79,72	93.27
	L	25.927	1.298	1.738	3.183	2.449	34.595	78,70	95.23
	P	13.902	409	1.968	15.554	1.005	32.838	43,58	97,14
	L+P	39.829	1.707	3.706	18.737	3.454	67.433	61,60	95,89

	L	76.269	1.593	3.863	2.691	9.487	93.903	82,92	97,95
Merauke	L+P	29.734	240	1.673	348	1.533	33.528	89,40	99,20
		48.122	1.193	4.873	28.293	3.514	85.995	57,35	97,58
Asmat	P	23.780	02.786	1.992	6.025	906	32.703	72,72	100,00
	L+P	124.391	02.786	8.736	30.984	13.001	179.898	70,69	97,81
Boven	L+P	53.514	240	3.665	6.373	2.439	66.231	81,16	99,55
	L	21.819	2.086	838	1.055	800	26.598	89,88	91,27
Papua Selatan	L	153.749	5.217	8.112	7.277	14.269	188.624	84,28	96,72
	P	14.050	504	956	5.784	348	21.642	67,25	96,54
		99.854	2.106	9.789	55.656	5.773	173.178	58,88	97,93
	L+P	253.603	7.323	17.901	62.933	20.042	361.802	72,12	97,19

Catatan: L = laki-laki; P = perempuan
 Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

Apabila ditinjau berdasarkan gender, meskipun jumlah angkatan kerja laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, namun persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja lebih besar dibandingkan dengan angkatan kerja laki- laki yang bekerja. Persentase angkatan kerja perempuan yang bekerja di Provinsi Papua Selatan mencapai 97,93%, sedangkan persentase angkatan kerja laki-laki yang bekerja di Provinsi Papua Selatan sebesar 96,72%. Hal ini mengindikasikan tingkat pengangguran angkatan kerja laki-laki di Provinsi Papua Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran angkatan kerja perempuan.

2.2.2.1.2Lapangan Pekerjaan Utama

Tabel 2.74 menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Papua Selatan tahun 2020. Berdasarkan tabel 2.74 diketahui bahwa mayoritas penduduk Papua Selatan bekerja di sektor pertanian (55,48%) serta sektor jasa (38,64%). Penduduk yang bekerja di sektor industri relatif kecil yaitu hanya sebesar 5,88% atau 14.374 jiwa. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, wilayah dengan mayoritas pekerjaan penduduk di sektor pertanian adalah Kabupaten Asmat (70,12% atau 35.875 jiwa), sedangkan penyerapan tenaga kerja tertinggi di sektor pertanian terdapat di Kabupaten Merauke (54.777 jiwa).

Tabel 2. 74 yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten dan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020

Kabupaten		Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
		Pertanian	Industri Pengolahan	Jasa	
Merauke	jiwa	54.777	10.722	54.409	119.908
	persen	45,68	8,94	45,38	100,00

Boven Digoel	jiwa	18.509	1.614	12.860	32.983
	persen	56,12	4,89	38,99	100,00
Mappi	jiwa	26.534	1.133	12.853	40.520
	persen	65,48	2,80	31,72	100,00
Asmat	jiwa	35.875	905	14.385	51.165
	persen	70,12	1,77	28,11	100,00
Papua Selatan	jiwa	135.695	14.374	94.507	244.576
	persen	55,48	5,88	38,64	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

Selain lapangan pekerjaan utama, aspek yang perlu ditinjau dalam menganalisis kondisi tenaga kerja di Provinsi Papua Selatan adalah upah/gaji pekerja baik pekerja formal maupun informal. Berdasarkan tabel 2.75 dapat diketahui bahwa pekerja formal (buruh/karyawan/pegawai) memiliki upah atau gaji bersih bulanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pekerja informal (pekerja yang berusaha sendiri/pekerja bebas). Rata-rata upah/gaji bersih pekerja formal di Papua Selatan tahun 2020 sebesar Rp.3.618.203, sedangkan rata-rata upah/gaji bersih pekerja informal tahun 2020 sebesar Rp.2.187.413. Selain itu, dalam tabel 2.75 ditunjukkan bahwa pekerja informal dengan tingkat pendidikan SMA ke atas memiliki rata-rata upah/gaji yang lebih besar dibandingkan pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan pekerja yang lebih tinggi dapat mendorong pendapatan pekerja yang lebih tinggi karena tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat keterampilan, inovasi dan produktifitas kerja.

Tabel 2. 75 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal dan Informal Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (rupiah) di Papua Selatan Tahun 2020

Kabupaten	Kategori	Lapangan Pekerjaan Utama			Total
		Pertanian	Industri/ Manufaktur	Jasa	
Merauke	formal	3.021.789	2.866.934	3.318.016	3.264.222
Kabupaten	Kategori	Lapangan Pekerjaan Utama			Total
		Pertanian	Industri/ Manufaktur	Jasa	
	informal	2.224.880	1.942.036	3.621.054	2.695.139
	formal	4.171.717	4.059.653	2.471.841	3.053.268

Boven Digoel	informal	875.990	3.036.864	3.599.723	1.888.849
Mappi	formal	1.800.000	1.096.875	3.091.553	3.017.944
	informal	1.409.609	n.a	n.a	1.465.551
Asmat	formal	1.408.382	1.855.394	5.348.544	5.137.378
	informal	1.872.995	4.205.386	3.868.034	2.700.111
Rata-rata	formal	2.600.472	2.469.714	3.557.489	3.618.203
4Kabupaten	informal	1.595.869	3.061.429	3.696.270	2.187.413

* Pekerja Formal: Buruh/Karyawan/Pegawai

** Pekerja Informal: Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

Tabel 2. 76 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Informal Menurut Pendidikan Tertinggi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Kabupaten	Pendidikan Tertinggi				Total
	Tidak pernah sekolah/ belum tamat SD	SD/MI	SMP/MTs	SMA ke atas	
Merauke	2.058.514	2.172.280	2.334.260	3.651.327	2.695.139
Boven Digoel	568.045	2.026.536	1.909.760	2.501.627	1.888.849
Mappi	1.308.758	1.341.597	1.353.026	2.574.802	1.465.551
Asmat	2.350.233	2.216.208	2.261.471	4.546.383	2.700.111
Rata-rata 4 kabupaten	1.571.388	1.939.155	1.964.629	3.318.535	2.187.413

* Pekerja Informal: Pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2023)

2.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.2.2.1 Pembangunan Gender

Keberhasilan capaian pembangunan dalam mengakomodasi persoalan gender dapat diukur salah satunya dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang menekankan status perempuan dan ukuran kemampuan dasar perempuan di suatu daerah. IPG merupakan komposit dari 4 indikator, yaitu: harapan hidup,

harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Kesetaraan gender ditunjukkan dengan angka IPG yang mendekati 100, sehingga semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin besar ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah. Tabel 2.77 menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Selatan. Angka Provinsi Papua Selatan yang digunakan adalah rata-rata dari 4 kabupaten, karena belum tersedia data terpilah provinsi baru pasca pembentukan DOB. Berdasarkan tabel 2.78 diketahui terdapat peningkatan rata-rata IPG Kabupaten di Provinsi Papua Selatan dari 75,17 pada tahun 2017 menjadi 77,36 pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan, namun rata-rata IPG ini masih di bawah capaian IPG Nasional yang telah mencapai 91,63 pada tahun 2022, sehingga diperlukan akselerasi peningkatan IPG di Provinsi Papua Selatan.

Tabel 2. 77 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	87,45	87,69	87,70	87,84	88,04	89,30
Boven Digoel	78,83	79,17	79,25	79,18	79,06	79,90
Mappi	83,77	83,65	83,63	83,48	83,78	84,88
Asmat	50,61	52,23	53,71	53,59	53,72	55,34
Papua Selatan*	75,17	75,69	76,07	76,02	76,15	77,36
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IPG seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

Sumber: BPS Nasional, 2023
 Berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki IPG paling tinggi di Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke (tahun 2022: 89,30) dan Kabupaten Mappi (tahun 2022: 84,88). Adapun IPG yang paling rendah terdapat di Kabupaten Asmat yaitu 55,34 pada tahun 2022, sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel 2.78.

2.2.2.2.2 Pemberdayaan Perempuan

Pembangunan gender, sebagaimana yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan pembangunan gender di Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari berbagai upaya pemberdayaan gender. Dalam meninjau sejauh mana pemberdayaan gender di daerah digunakan komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan di dunia politik (keterwakilan di parlemen), pengambilan keputusan, dan

ekonomi. IDG Papua Selatan dihitung dari rata-rata IDG 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan tabel 2.78 diketahui terdapat peningkatan IDG Papua Selatan dari 50,61 pada tahun 2017 menjadi 61,63 pada tahun 2022. Capaian IDG Papua Selatan masih lebih rendah dibandingkan capaian IDG nasional yang mencapai 76,59 pada tahun 2022.

Tabel 2. 78 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	71,65	72,18	57,35	55,59	58,12	59,71
Boven Digoel	44,55	60,19	54,07	53,87	52,17	55,83
Mappi	57,51	61,61	55,56	55,98	58,91	52,82
Asmat	28,71	29,22	74,86	77,13	78,37	78,16
Rata-rata 4 Kabupaten	50,61	55,80	60,46	60,64	61,89	61,63
Nasional	71,74	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59

(*) Angka Provinsi Papua Selatan merupakan hasil proxy yang diperoleh berdasarkan rata-rata dari capaian IDG seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan.

Sumber: BPS Nasional, 2023

Selain menggunakan indikator IDG, pemberdayaan perempuan juga dapat ditinjau berdasarkan peran perempuan sebagai tenaga profesional. Berdasarkan tabel 2.79 dapat diketahui terdapat peningkatan rata-rata persentase perempuan sebagai tenaga profesionaldi Provinsi Papua Selatan dari 27,40% pada tahun 2017 menjadi 35,22% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah dengan persentase perempuan sebagai tenaga profesional yang tinggi adalah Kabupaten Merauke (tahun 2022: 47,69%) dan Boven Digoel (tahun 2022: 44,50%).

Tabel 2. 79 Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	40,70	42,09	37,14	34,62	40,42	47,69
Boven Digoel	30,90	36,93	35,28	33,06	33,14	44,50
Mappi	33,43	32,56	28,54	27,98	35,07	23,05
Asmat	4,57	4,44	33,33	43,16	44,22	25,64
Rata-rata 4 Kabupaten	27,40	29,01	33,57	34,71	38,21	35,22

Sumber: BPS Nasional, 2023

Keterlibatan perempuan di parlemen menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keterwakilan dan pemberdayaan perempuan di sektor publik. Indikator ini memperlihatkan sejauh mana perempuan

memiliki akses yang sama terhadap posisi penting pengambilan keputusan dalam proses politik formal, khususnya di lembaga legislatif. Partisipasi di jabatan terpilih merupakan aspek kunci peluang perempuan dalam kehidupan politik dan publik, serta keterkaitannya dengan pemberdayaannya. Meskipun proporsi perempuan di parlemen tingkat Kabupaten masih tergolong sangat rendah yaitu <10% (Tabel 2.80), namun kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Asmat dengan keterwakilan perempuan sebesar 47,06% pada tahun 2022.

Tabel 2. 80 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	20,69	20,69	6,67	6,67	6,67	6,67
Boven Digoel	0,00	10,00	5,00	5,56	5,00	5,00
Mappi	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Asmat	4,00	4,00	28,00	28,00	28,00	47,06

Sumber: BPS Nasional, 2023

Tabel 2.81 menunjukkan sumbangan pendapatan perempuan terhadap pendapatan keluarga di Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan tabel 2.81 diketahui terdapat peningkatan rata-rata sumbangan pendapatan perempuan dari 37,45% pada tahun 2017 menjadi 39,04% pada tahun 2021, namun mengalami penurunan menjadi 38,74% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah dengan sumbangan pendapatan perempuan tertinggi terdapat di Kabupaten Asmat (tahun 2022: 40,89%) dan Kabupaten Mappi (tahun 2022: 40,85%). Hal ini mengindikasikan bahwa peran perempuan terhadap ekonomi keluarga di Kabupaten Asmat dan Mappi relative lebih tinggi dibandingkan dengan di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel.

Tabel 2. 81 Sumbangan Pendapatan Perempuan (%) di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	36,73	36,63	37,10	36,88	37,32	37,31
Boven Digoel	33,29	34,59	35,44	35,10	35,54	35,89
Mappi	41,56	41,65	41,84	41,93	42,36	40,85
Asmat	38,21	39,68	40,87	40,35	40,92	40,89
Rata-rata Kabupaten ⁴	37,45	38,14	38,81	38,57	39,04	38,74

Sumber: BPS Nasional, 2023

2.2.2.3 Pangan

Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi suatu daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan melibatkan serangkaian indikator yang mencerminkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Salah satu indikator yang dapat menjadi tolak ukur ketahanan pangan suatu daerah adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Berdasarkan IKP tahun 2018-2021 diketahui bahwa terdapat penurunan rata-rata IKP kabupaten di Provinsi Papua Selatan dari 46,37 pada tahun 2018 menjadi 42,90 pada tahun 2021 (lihat Tabel 2.82). Berdasarkan kategori IKP yang ditampilkan dalam tabel 2.83 rata-rata IKP kabupaten tersebut termasuk dalam kategori wilayah rentan pangan prioritas 2 yang sangat bergantung pada supply pangan dari wilayah lain atau sentra produksi pangan.

Tabel 2. 82 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Papua Selatan

Wilayah		Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Merauke	IKP (indeks)	78,53	78,25	77,60	77,75
		Kategori	Prioritas 6	Prioritas 6	Prioritas 6	Prioritas 6
Wilayah		Indikator	2018	2019	2020	2021
		Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	94,40	97,39	96,43
		Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	84,00	82,54	83,82
		Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	61,82	59,06	59,18
2	Boven Digoel	IKP (indeks)	50,69	44,13	38,58	41,18
		Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 1	Prioritas 1
		Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	17,44	0,00	0,00
		Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	66,71	67,98	69,66
		Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	47,22	45,46	50,71
		IKP (indeks)	28,34	28,03	28,59	31,51

3	Mappi	Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
		Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	0,00	0,00	0,00
		Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	42,47	43,61	52,05
		Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	38,23	38,77	39,74
4	Asmat	IKP (indeks)	27,91	22,85	19,90	21,16
		Kategori	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1	Prioritas 1
		Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	0,00	0,00	0,00
		Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	54,38	46,80	48,18
		Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	16,33	14,66	16,77

Rata-rata 4Kabupaten	IKP (indeks)	46,37	43,32	41,17	42,90
	Kategori	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2	Prioritas 2
	Indeks Ketersediaan (IK)	n.a	27,96	24,35	24,11
	Indeks Keterjangkauan (IA)	n.a	61,89	60,23	63,43

Wilayah	Indikator	2018	2019	2020	2021
	Indeks Pemanfaatan (IP)	n.a	40,90	39,49	41,60

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Dalam Dokumen “Indeks Ketahanan Pangan 2018-2021”

Berdasarkan kabupaten, 3 dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan termasuk wilayah rentan pangan prioritas 1 yaitu Kabupaten Boven Digoel (skor 2021 = 41,18), Kabupaten Mappi (skor 2021: 31,51), dan Kabupaten Asmat (skor 2021 = 21,16). Adapun Kabupaten Merauke memiliki ketahanan pangan yang sangat tinggi dengan indeks ketersediaan dan keterjangkauan yang sangat baik. Apabila meninjau komponen pembentuk IKP, dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya ketahanan pangan di Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat adalah lemahnya ketersediaan pangan dan pemanfaatan pangan. Hal ini mengindikasikan besarnya kebutuhan untuk meningkatkan

ketersediaan dan kualitas pangan bergizi di Provinsi Papua Selatan melalui, peningkatan ketersediaan dan kualitas pangan bergizi,

penguatan lumbung pangan di kampung-kampung, diversifikasi jenis makanan pokok lokal, serta peningkatan kapasitas petani dalam meningkatkan produktivitas komoditas pertanian di Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat.

2.2.2.4 Pertanahan

Ketersediaan tanah pada dasarnya tidak dilepaskan dengan status atau penguasaan tanah karena sangat menentukan mudah atau dapat/tidaknya suatu bidang tanah dikuasai atau dialihkan penguasaannya oleh pihak ketiga untuk kegiatan tertentu. Dalam hal ini, di wilayah Provinsi Papua Selatan perlu diperhatikan adanya berbagai jenis status penguasaan tanah sebagai berikut:

Tanah negara bebas

Tanah negara yang dibebani, di dalamnya termasuk: Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan HPHH Hutan Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Hutan Suaka Alam (HSA) Hutan Lindung Hutan Produksi Kontrak Karya Kuasa Pertambangan Tanah negara yang telah diperuntukkan Tanah negara yang dikuasai penduduk Tanah negara yang dikuasai instansi Hak Milik Adat Hak Guna Usaha Hak Pakai Hak Pengelolaan Hak Guna Bangunan Hak Milik Permasalahan yang mencolok adalah ketidaksesuaian antara arahan rencana tata ruang pada suatu lokasi dengan status atau penguasaan tanahnya sekarang terutama untuk tanah negara yang dibebani, yang pada umumnya mencakup areal yang sangat luas seperti HPH, konsesi, kuasa pertambangan kontrak karya. Misalnya pada kasus TGHK yang tumpang tindih dengan kuasa pertambangan atau Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hal ini dapat menjadi masalah jika dikaitkan dengan fungsi kawasan yang ingin dipertahankan (misalnya fungsi hidro-orologis). Pola kepemilikan lahan di Tanah Papua

terdiri atas tanah negara dan tanah ulayat. Tanah hak ulayat merupakan status tanah secara adat dan dikuasai oleh kepala adat atau

Ondoafi. Padadasarnya status tanah dalam hukum adat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Tanah Milik, yaitu tanah yang dimiliki oleh perseorangan atau keluarga secara hukum adat sah karena mendapat warisan dari orang tua, tanah yang diberikan sebagai ganti rugi, dan atau merupakan hasil rampasan perang yang diperoleh pada zaman dahulu. Tanah Milik dengan Hak Pakai, yaitu tanah milik masyarakat yang diberikan kepada orang luar dengan seizin kepala adat untuk digarap sesuai dengan perjanjian dan dalam batas waktu tertentu.

Pada umumnya Tanah Milik dan Tanah Milik dengan Hak Pakai tidak dapat diperjualbelikan dan dipindah tangankan dengan bebas pada masyarakat luar. Setiap keluarga akan selalu mempertahankan tanah dan kampung mereka masing-masing karena tanah dan kampung merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat mereka. Hal tersebut dikarenakan cara hidup masyarakat yang masih berharap dan menggantungkan diri pada persediaan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Disamping itu juga mengingat besarnya pengorbanan nenek moyang atau leluhur mereka saat memperoleh tanah tersebut pada jaman dahulu. Oleh sebab itu, tanah ulayat ini tidak mudah dengan begitu saja untuk dilepas tanpa seizin kepala adat.

2.2.2.5 Lingkungan Hidup

Peningkatan aktivitas manusia sering kali berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan. Aktivitas sosial-ekonomi yang dilakukan seperti pembukaan lahan, penebangan vegetasi alami, pembuangan limbah, pengubahan bentang alam dan sebagainya memberikan tekanan dan perubahan terhadap ekologi bukan hanya pada lingkungan sekitar namun ekosistem yang lebih luas. Aktivitas manusia ini secara langsung dan tidak langsung sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Penyelarasan aktivitas manusia dan lingkungan hidup untuk menciptakan peningkatan kualitas hidup yang optimal perlu didukung

berbagai sektor mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup, hingga proses monitoring lingkungan dan evaluasi kegiatan.

Sementara data lingkungan hidup Provinsi Papua Selatan belum tersedia, pendekatan menggunakan data Provinsi Papua tetap digunakan karena Papua Selatan masih berada pada lingkup wilayah tersebut dan karakteristik ekosistem lingkungan yang bergantung pada komponen-komponen lingkungan lintas/ di luar batas administrasi. Tabel 2.83 menyajikan nilai kualitas lingkungan air, udara dan lingkungan hidup untuk Provinsi Papua pada Tahun 2015 hingga tahun 2022. Terjadi pengurangan kualitas air, udara, dan lingkungan hidup pada tahun 2018, terutama pada lingkungan air yang berkurang sekitar 20 poin yakni dari 62,5 menjadi 45 dari skala 100. Indeks kualitas lingkungan ini berangsur pulih pada tahun 2019- 2022.

Tabel 2. 83 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air	61,11	50	62,5	45	47,29	55	n.a	55,07
Indeks Kualitas Udara	n.a.	89,6	90,01	89,89	92,56	94,57	n.a	95,32
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	73.30	79.17	78.18	95.94	99.58	n.a	n.a	100
Indeks Kualitas Air Laut	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	87,29
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,01	81,35	81,47	78,84	81,79	79,75	n.a	81,46

Sumber: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2022

2.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan menyatakan seluruh masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Dalam hal ini, tujuan penyelenggaraan

administrasi kependudukan antara lain memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk. Indikator kinerja pembangunan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

yang dijelaskan dalam subbab ini mencakup persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran, serta persentase penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

tabel 2.85 menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua Selatan tahun 2019-2022. Berdasarkan Tabel 2.85 diketahui bahwa terdapat peningkatan persentase penduduk yang mempunyai NIK, baik pendudk usia 0-4 tahun, usia 5 tahun ke atas, maupun 17 tahun ke atas. Pada tahun 2019, rata-rata penduduk usia 0-4 tahun yang memiliki NIK sebanyak 51,43% dan meningkat menjadi 65,46% pada tahun 2022. Penduduk usia 5 tahun ke atas yang memiliki NIK pada tahun 2019 sebesar 73,49% dan meningkat menjadi 91,80% pada tahun 2022. Adapun penduduk usia 17 tahun ke atas yang memiliki NIK pada tahun 2019 sebesar 75,72% dan meningkat menjadi 94,46% pada tahun 2022.

Tabel 2. 84 Penduduk yang Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Kategori	Wilayah	2019	2020	2021	2022
Umur 0-4 Tahun	Merauke	58,72	43,13	55,79	62,93
	Boven Digoel	47,00	59,37	55,20	69,81
	Mappi	66,23	60,21	54,40	63,86
	Asmat	33,77	60,40	67,65	65,23
	Rata-rata 4 Kabupaten	51,43	55,78	58,26	65,46
Umur 5 Tahun ke Atas	Merauke	88,60	88,94	91,97	93,71
	Boven Digoel	81,08	94,64	96,00	96,40
	Mappi	80,62	88,56	92,94	94,21
	Asmat	43,66	76,54	84,51	82,87
	Rata-rata 4 Kabupaten	73,49	87,17	91,36	91,80
Umur 17 Tahun ke Atas	Merauke	90,49	91,20	93,75	96,18
	Boven Digoel	81,92	96,10	97,23	97,21
	Mappi	82,31	91,15	94,99	97,20
	Asmat	48,16	78,69	85,78	87,26
	Rata-rata 4 Kabupaten	75,72	89,29	92,94	94,46

Sumber: BPS Provinsi Papua 2019-2022 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

Tabel 2.85 menunjukkan persentase penduduk berdasarkan kepemilikan akta kelahiran di Provinsi Papua Selatan tahun 2019-2022. Berdasarkan table 2.86 diketahui bahwa sangat tinggi proporsi penduduk usia 0-4 tahun dan 0-17 tahun tidak memiliki akta kelahiran dan terdapat trend penurunan kepemilikan akta kelahiran selama tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 rata-rata kepemilikan akta kelahiran

penduduk 0-4 tahun sebesar 44,39% dan mengalami penurunan menjadi 42,96% pada tahun 2022. Adapun penduduk usia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran rata-rata sebesar 52,93% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan menjadi 52,55% pada tahun 2022. Tingginya persentase penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran mengindikasikan rendahnya pemahaman penduduk Papua Selatan tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran.

Tabel 2. 85 Penduduk yang Mempunyai Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Tahun 2022

Kategori	Wilayah	2019	2020	2021	2022
Umur 0-4 Tahun	Merauke	60,96	52,20	59,27	68,20
	Boven Digoel	47,04	44,74	47,31	57,78
	Mappi	32,64	44,75	21,27	29,25
	Asmat	36,91	35,01	45,73	16,61
	Rata-rata 4 Kabupaten	44,39	44,18	43,40	42,96
Kategori	Wilayah	2019	2020	2021	2022
Umur 0-17 Tahun	Merauke	71,93	70,07	75,38	76,69
	Boven Digoel	68,00	70,05	65,30	71,07
	Mappi	33,67	59,50	39,62	41,65
	Asmat	38,12	46,34	44,25	20,78
	Rata-rata 4 Kabupaten	52,93	61,49	56,14	52,55

Sumber: BPS Provinsi Papua 2019-2022 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

Kondisi Penduduk OAP dan non-OAP

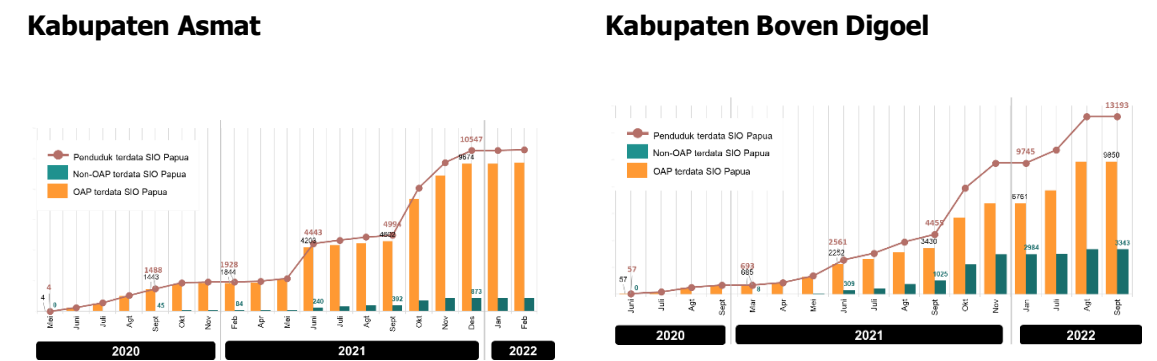
Berbagai upaya untuk mengetahui kondisi penduduk OAP dan non-OAP telah dilakukan pendataan berbasis kampung melalui Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua) di wilayah Papua. Berdasarkan Tabel 2.86 dapat diketahui cakupan pendataan yang dilakukan sampai dengan 21 Maret 2023 di 4 kabupaten di wilayah Papua Selatan sebesar 23.873 jiwa atau 4,69% dari total jumlah penduduk dalam sensus penduduk 2020 (jumlah penduduk dalam SP2020: 513.617 jiwa). Dari total penduduk yang terdata SIO Papua, sebanyak 19.651 jiwa adalah OAP sedangkan 4.222 jiwa lainnya adalah non-OAP. Cakupan pendataan ini masih dinamis dan akan terus bertambah seiring dengan pendataan yang dilakukan di tingkat kampung dengan target cakupan 100%.

Tabel 2. 86 Cakupan Penduduk OAP dan non-OAP yang Terdata SIO Papua (update: 21 Maret 2023)

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk SP2020 (jiwa)	Kemajuan Pendataan SIO Papua(jiwa)			Cakupan SIO Papua Terhadap SP2020 (%)
			OAP	Non-OAP	Total	
Provinsi Papua Selatan		513.617	19.651	4.222	23.873	4,69
1	Merauke	230.932	76	6	82	0,04
2	Boven Digoel	64.285	9.850	3.343	13.193	20,52
3	Mappi	108.295	0	0	0	0,00
4	Asmat	110.105	9.725	873	10.598	9,63

Sumber: SIO Papua (Sistem Informasi Orang Papua)
<https://www.siopapua.com/>

Gambar 2. 75 Perkembangan Cakupan Pendataan OAP dan non-OAP di Boven Digoel dan Asmat Dalam SIO Papua (update: 18 April 2023)



Sumber: SIO Papua (Sistem Informasi Orang Papua)
<https://www.siopapua.com/>

2.2.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pemberdayaan masyarakat kampung merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata sosialnya. Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa/kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kampung di Papua Selatan dapat tercermin salah satunya melalui peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/ lingkungan, yang memotret perkembangan kemandirian kampung (penguatan otonomi kampung) di Papua Selatan berdasarkan implementasi UU Desa, dengan dukungan Dana Desa dan pendamping desa. IDM mengklasifikasi desa/kampung dalam lima status sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.87 Klasifikasi tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya fasilitasi pemajuan kampung di Papua Selatan menuju kampung berkembang, maju dan mandiri yang berketahanan sosial, ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan.

Tabel 2. 87 Klasifikasi Wilayah Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Klasifikasi	Rentang Nilai IDM
1	sangat tertinggal	0,270 ≤ IDM ≤ 0,491
2	Tertinggal	0,491 < IDM ≤ 0,599
No	Klasifikasi	Rentang Nilai IDM
3	Berkembang	0,599 < IDM ≤ 0,707
4	Maju	0,707 < IDM ≤ 0,815
5	Mandiri	0,815 < IDM ≤ 0,920

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan 2.88 diketahui bahwa meskipun mengalami peningkatan selama periode 2019- 2021, status rata-rata IDM Kabupaten di Provinsi Papua Selatan masih berada dalam kategori “tertinggal” dengan skor 0,4806 pada tahun 2021. Berdasarkan kabupaten di Papua Selatan, Kabupaten Merauke mengalami perkembangan IDM yang relatif signifikan dari skor 0,4826 pada tahun 2019 menjadi 0,5383 pada tahun 2021. Telah terjadi peningkatan status IDM Kabupaten Merauke dari “sangat tertinggal” pada tahun 2019 menjadi “tertinggal” pada tahun 2020-2021. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi kampung di Kabupaten Merauke.

Berbeda dengan kondisi Kabupaten Merauke, nilai IDM 3 (tiga) wilayah lainnya di Provinsi Papua Selatan termasuk dalam kategori “sangat tertinggal” dan mengalami penurunan IDM pada tahun 2019-2021. Penurunan signifikan terjadi di Kabupaten Asmat dari 0,5211 pada tahun 2019 menjadi 0,4512 pada tahun 2021.

Penurunan signifikan IDM Kabupaten Asmat ini bahkan berimplikasi pada penurunan status IDM kabupaten Asmat dari kategori “tertinggal” menjadi “sangat tertinggal”.

Tabel 2. 88 Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten di Provinsi Papua Selatan

Indikator		2019	2020	2021
Rata-rata IDM Kabupaten		0,4848	0,4971	0,4806
Status Rata-rata IDM Kabupaten		Tertinggal	tertinggal	tertinggal
1	Merauke	0,4826	0,5315	0,5383
		sangat tertinggal	tertinggal	tertinggal
2	Boven Digoel	0,4764	0,4764	0,4745
		sangat tertinggal	sangat tertinggal	sangat tertinggal
3	Mappi	0,4592	0,4592	0,4585
		sangat tertinggal	sangat tertinggal	sangat tertinggal
4	Asmat	0,5211	0,5211	0,4512

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Dokumen “Peringkat Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa 2016-2021”

2.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan dari 0,78% pada tahun 2020-2021 menjadi 0,89% pada tahun 2021-2022, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.89 Kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan paling tinggi di Provinsi Papua Selatan adalah Kabupaten Asmat yaitu 1,69% pada tahun 2021-2022 yang meningkat dari 1,39% pada 2020-2021. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini salah satunya disebabkan karena faktor penggunaan alat KB oleh Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menunda atau mencegah kehamilan yang masih relatif sedikit. Adapun PUS adalah pasangan suami istri yang usia perempuannya adalah 15-49 tahun.

Tabel 2. 89 Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Selatan

Kabupaten	2020-2021	2021-2022
Merauke	0,33	0,29
Boven Digoel	0,67	0,74
Mappi	1,19	1,43
Asmat	1,39	1,69
Papua Selatan	0,78	0,89

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka”)

Tabel 2.90 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin berdasarkan status penggunaan alat KB atau cara tradisional untuk menunda atau mencegah kehamilan di Provinsi Papua Selatan tahun 2018-2022. Berdasarkan Tabel 2.90 diketahui bahwa terdapat penurunan rata-rata persentase penggunaan alat KB dari 43,58% pada tahun 2018 menjadi 38,21% pada tahun 2020, dan lalu kembali menurun menjadi 36,07% pada tahun 2022. Kabupaten yang memiliki persentase perempuan (umur 15-49 tahun) yang paling kecil dalam penggunaan KB pada tahun 2022 adalah Kabupaten Asmat yaitu hanya mencapai 13,99%.

Tabel 2. 90 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Berdasarkan Status Penggunaan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan

Wilayah	2018			2020			2022		
	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan	Pernah	Sedang	Tidak Menggunakan
Merauke	19,32	54,48	26,2	11,86	43,01	45,13	12,84	37,97	49,2
Boven Digoel	16,53	39,75	43,72	16,92	33,16	49,92	14,94	29,43	55,64
Mappi	12,79	13,25	73,97	5,72	32,59	61,69	12,86	22,25	64,89
Asmat	8,02	10,18	81,8	1,95	7,63	90,42	5,87	8,12	86,01
Rata-rata 4Kabupaten	14,17	29,42	56,42	9,11	29,10	61,79	11,63	24,44	63,94

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

Tabel 2.91 menunjukkan perempuan berumur 15-49 tahun pernah kawin yang tidak menggunakan alat KB berdasarkan alasan utama tidak menggunakan alat KB tahun 2022. Berdasarkan Tabel 2.91 diketahui bahwa alasan utama tidak menggunakan KB di Provinsi Papua Selatan adalah alasan fertilitas (26,25%), takut efek samping (17,74%) dan alasan lainnya (32,41%). Hal ini mengindikasikan masih lemahnya pemahaman keluarga/pasangan usia subur (PUS) tentang fungsi dan penggunaan alat KB sehingga penyuluhan secara efektif menjadi penting dilakukan di Provinsi Papua Selatan.

Tabel 2. 91 Perempuan Berumur 15-49 Tahun Pernah Kawin yang Tidak Menggunakan Alat KB Berdasarkan Alasan Utama Tidak Menggunakan Alat KB Tahun 2022

Alasan Tidak Menggunakan KB	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Rata-rata 4 Kabupaten
Alasan Fertilitas	23,00	36,85	24,52	20,64	26,25
Tidak Setuju KB	5,43	16,44	5,12	10,58	9,39
Tidak Tahu Alat atau Cara KB	1,68	1,68	2,24	5,26	2,72
Takut Efe kSamping	18,70	14,16	28,15	9,95	17,74
Lainnya	46,72	22,86	18,43	41,61	32,41
Tidak Tahu	4,46	8,01	21,54	11,96	11,49
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat")

Tabel 2.92 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin menurut alat KB atau cara tradisional yang sedang digunakan di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel 2.92 diketahui bahwa alat KB yang paling sering digunakan PUS di Papua Selatan adalah suntikan (rata-rata: 44,23%) dan kondom pria (rata-rata: 25%)

Tabel 2. 92 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2022 Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen "Statistik Kesejahteraan Rakyat")

Alat KB/Cara Tradisional yang Digunakan	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Rata-rata 4 Kabupaten
Sterilisasi Wanita / Tubektomi	1,22	4,81	9,61	3,02	4,67
Sterilisasi Pria / Vasektomi	0,60	0,00	0,00	0,00	0,15
IUD/AKDR	1,10	0,96	3,94	0,00	1,50
Suntikan	70,85	62,43	43,63	0,00	44,23
Susuk KB	9,65	14,31	4,24	0,00	7,05
Pil	14,68	14,06	21,00	0,00	12,44
Kondom Pria	0,92	0,00	0,00	100,00	25,23
Intravag/Kondom wanita/diafragma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metode menyusui alami	0,56	1,37	0,00	0,00	0,48
Pantang berkala/kalender	0,27	2,06	0,00	0,00	0,58
Lainnya	0,14	0,00	17,58	0,00	4,43
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.93 menunjukkan persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah kawin yang menggunakan alat KB modern menurut tempat memperoleh alat KB di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel 2.93 diketahui bahwa mayoritas masyarakat memperoleh alat KB pada tahun 2022 di puskesmas/pustu/klinik (rata-rata: 64,69%), dan praktik bidan/bidan di desa/perawat (rata-rata: 10,82%).

Tabel 2. 93 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Menggunakan Alat KB Modern menurut Tempat Memperoleh Alat KB Modern yang Terakhir Kali, 2022

Tempat Memperoleh AlatKB	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Rata-rata 4 Kabupaten
Rumah Sakit	1,78	8,41	15,10	3,02	7,08
Puskesmas/Pustu/Klinik	59,82	63,06	46,50	89,36	64,69
TKBK/ TMK/ MUYAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polindes/Poskesdes	0,93	0,00	12,04	0,68	3,41
Posyandu / Pos KB / PPKBD	9,45	2,56	8,93	0,00	5,24
Rumah Bersalin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Praktik Dokter Umum/kandungan	3,65	4,75	3,69	1,53	3,41
Praktik Bidan/Bidan di Desa / Perawat	18,03	15,89	4,86	4,49	10,82
Apotek/Toko Obat	6,34	5,33	8,88	0,93	5,37
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018 dan 2023 (dalam dokumen “Statistik Kesejahteraan Rakyat”)

2.2.2.9 Perhubungan

Sarana Transportasi merupakan bagian krusial untuk mencapai tujuan pembangunan. Transportasi berfungsi menghubungkan aktivitas antar wilayah baik melalui perpindahan barang, jasa, maupun informasi pendukung pembangunan.

2.2.2.9.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan sarana transportasi jalan merupakan hal yang harus

diperhatikan seiring dengan meningkatkan jumlah kendaraan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Papua Selatan jumlah jalan yang tersedia untuk mendukung pergerakan kendaraan tersebut juga sebaiknya dapat ditingkatkan. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan di Provinsi Papua Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2020, begitu pula dengan jalan yang tersedia. Namun peningkatan jumlah kendaraan terjadi lebih pesat dibandingkan pertumbuhan jumlah jalan dimana terjadi penurunan rasio antara panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan. Semakin kecil nilai rasio maka semakin sedikit alokasi jalan yang tersedia untuk tiap kendaraan.

Tabel 2. 94 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Provinsi Papua Selatan

Indikator	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan	4965,98	4965,96	4973,30	5155,41
Jumlah Kendaraan	105528	126618	n.a.	134958
Rasio	4,71%	3,92%	n.a.	3,82%

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2018-2022

2.2.2.9.2 Transportasi Darat

Berkembangnya aktivitas dan sarana transportasi jalan mengindikasikan penggunaan transportasi darat juga akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan berbagai jenis transportasi darat di Provinsi Papua Selatan. Tabel 2.95 menampilkan jumlah tiap jenis transportasi darat di tiap kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Terjadi peningkatan moda transportasi mobil penumpang, barang, serta sepeda motor yang mengindikasikan peningkatan aktivitas dan pergerakan orang dan barang di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020.

Tabel 2. 95 Jumlah Kendaraan di Kabupaten Provinsi Papua Selatan per Jenis Kendaraan 2017-2021

Kabupaten	Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	Mobil penumpang	435	5430	629	673	3963
	Mobil bis	2040	103	4219	4712	5205
	Mobil barang	2647	6083	5061	5420	5779
	Sepeda Motor	44215	99200	60461	64436	68411
	Kendaraan bermotor	49337	110816	70370	75241	83358

Boven Digoel	Mobil penumpang	n.a.	1077	n.a.	734	n.a.
	Mobil bis	n.a.	33	n.a.	33	n.a.
	Mobil barang	n.a.	1406	n.a.	1240	n.a.
	Sepeda Motor	n.a.	8504	n.a.	7130	n.a.
	Kendaraan bermotor	n.a.	11020	n.a.	9137	n.a.

Kabupaten	Jenis Kendaraan	2017	2018	2019	2020	2021
Mappi	Mobil penumpang	n.a.	178	n.a.	734	n.a.
	Mobil bis	n.a.	12	n.a.	33	n.a.
	Mobil barang	n.a.	364	n.a.	1240	n.a.
	Sepeda Motor	n.a.	4318	n.a.	7130	n.a.
	Kendaraan bermotor	n.a.	4872	n.a.	9137	n.a.
Asmat	Mobil penumpang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Mobil bis	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Mobil barang	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Sepeda Motor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Kendaraan bermotor	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2018-2022 (dalam dokumen Provinsi Papua Dalam Angka 2018-2022)

2.2.2.9.3 Transportasi Laut dan Kunjungan Kapal

Dokumen Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Papua 2013-2033 menyebutkan bahwa pelabuhan utama di Provinsi Papua Selatan terletak di Kabupaten Merauke yang ditetapkan sebagai pelabuhan penyeberangan antar

provinsi. Terdapat tiga rute utama pelayaran dari pelabuhan Merauke yaitu dengan tujuan akhir 1) Manokwari melalui Ambon, 2) Bitung-

Sulawesi, dan 3) Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya. Data Statistik Transportasi Papua 2021 memuat data jumlah penumpang dan barang melalui pelabuhan

Merauke. Data menunjukkan kunjungan kapal pada tahun 2021 sebanyak 277-unit dari dalam negeri dan 2-unit dari luar negeri. Muatan barang seluruhnya berasal dari dalam negeri dengan total muatan 337.213-ton muatan masuk (bongkar) dan 65.324-ton muatan keluar. Pada tahun 2021 Pelabuhan di Merauke telah dilalui oleh 12.868 penumpang datngan 14.292 penumpang berangkat.

Tabel 2. 96 Rute Pelayaran di Provinsi Papua Selatan

No.	Nama Kapal	Rute Pelayaran
1	KM Sirimau	Manokwari-Sorong-Ambon-Wanci-Bau bau-Maumere-Lewoleba-Kupang-Kalabahi-Saumlaki-Tual-Dobo-Timika-Agats-Merauke (PP)

No.	Nama Kapal	Rute Pelayaran
2	KM Tatamailau	Bitung-Tidore-Sorong-Fak Fak-Kaimana-Tual-Timika-Agats-Merauke(PP)
3	KM Leuser	Tanjung Perak Surabaya-Benoa-Bima-Labuanbajo-Makassar-Bau bau-Wanci-Namrole-Ambon-Saumlaki-Tual-Agatas-Merauke (PP)

Sumber: Jadwal Kapal Pelni, 2023

2.2.2.9.4 Transportasi Udara

Transportasi udara merupakan salah satu pilihan yang paling utama untuk digunakan di Papua dikarenakan karakteristik medan yang cukup bergunung, curam, dan diliputi hutan sehingga perjalanan transportasi darat menjadi cukup sulit untuk dilakukan di beberapa tempat. Secara umum terjadi penurunan jumlah pergerakan penumpang melalui jalur udara dari tahun 2018 ke tahun 2020. Salah satu penyebabnya adalah pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan moda transportasi umum untuk mengurangi penyebaran wabah. Terjadi pengurangan

jumlah keberangkatan sebesar 35% dan 60% jumlah penumpang berangkat di tahun 2020 dari tahun 2018. Sementara terjadi

pengurangan jumlah kedatangan sebesar 28% dengan jumlah penumpang sebesar 64%.

Tabel 2. 97 Jumlah Keberangkatan dan Kedatangan Transportasi Udara di Papua Selatan 2018- 2020

		Merauke	Boven Digoel			Mappi	Asmat	Total
		Bandara Moppah	Bandara Mindiptanah	Bandara Tanah Merah	Bandara Bomakia	Kepi	Bandara Ewer	
2018	Jumlah Keberangkatan	4.182	87	5.487	228	958	458	11.400
	Penumpang	224.503	742	21.657	1.795	9.648	3.901	262.246
	Jumlah Kedatangan	4.177	87	5.464	226	958	458	11.370
	Penumpang	218.084	705	18.441	1.671	10.590	3.665	253.156
2019	Jumlah Keberangkatan	3.304	34	5.750	193	742	726	10.749
	Penumpang	166.943	185	27.801	1.528	8.137	8.201	212.795
	Jumlah Kedatangan	3.300	34	5.756	193	738	695	10.716
	Penumpang	166.882	213	25.926	1.556	8.014	7.369	209.960
2020	Jumlah Keberangkatan	1.971	15	5.071	29	445	86	7.617
	Penumpang	78.346	60	13.539	1.329	4.173	9.500	106.947
	Jumlah Kedatangan	1.984	15	5.666	29	444	86	8.224
	Penumpang	78.345	49	12.752	12.752	3.932	8.134	115.964

Sumber: Statistik Transportasi Papua Tahun 2021

2.2.2.10 Komunikasi dan Informatika

Teknologi Komunikasi dan Informatika merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah. Teknologi komunikasi dan informatika

meningkatkan akses terhadap pelayanan pemerintah, membantu proses pengawasan dan pengaduan layanan masyarakat. Hal ini mendorong proses transparansi kegiatan yang dilakukan pemerintah sehingga pembangunandapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Dalam level individu dan komunitas, ketersediaan akses teknologi informasi dan komunikasi mempermudah pertukaran informasi antar individu maupun kelompok dan memicu pertumbuhan aktivitas dan kolaborasi. Kemudahan akses kepada informasi juga membuka informasi serta peluang terhadap pasar yang lebih luas. Namun demikian dibutuhkan kesiapan masyarakat dalam hal pengoperasian peralatan komunikasi serta pengetahuan terhadap substansi aktivitas yang berkaitan. Untukhal ini komunikasi dan informasi berperan mempercepat proses pendidikan dan penyebarluasan pengetahuan yang mendukung kesiapan masyarakat dalam mengakses teknologi. Peningkatan akses teknologi komunikasi dan informatika perlu dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan akses pada layanan masyarakat, mendukung transparansi, mendorong aktivitas dan meningkatkan kesiapan masyarakat yang diharapkan dapat menumbuhkan mendorong roda perputaran ekonomi dan pembangunan.

Tabel 2.98 menyajikan persentase pengguna Telepon nirkabel di tiap Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Secara umum proporsi pengguna telepon nirkabel selalu meningkat di seluruh kabupaten. Kabupaten Merauke merupakan kabupaten dengan proporsi pengguna telepon tertinggi di tahun 2022 (74,07%) sementara Provinsi Asmat merupakan kabupaten dengan proporsi pengguna telepon nirkabel terendah di tahun 2022 (19,10%).

Tabel 2. 98 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Menggunakan Telepon di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	72,18	70,73	72,21	63,87	74,07
Boven Digoel	52,68	59,55	59,29	51,04	62,12
Mappi	15,90	20,57	28,77	24,17	44,70
Asmat	19,17	19,11	15,62	20,99	19,10
Rata-rata	39,98	42,49	43,97	40,02	50,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Papua 2018-2022

Tabel 2.100 menunjukkan jumlah dan persentase kampung/ kelurahan berdasarkan jenis sinyal internet yang diterima. Pertumbuhan jenis sinyal internet dengan kualitas 4G/LTE meningkatsebesar lebih dari 40% di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Namun demikian ketimpangan ketersediaan jaringan internet masih cukup terasa di mana 10-50% desa di tiap kabupaten belum terlayani jaringan internet.

Tabel 2. 99 Banyaknya Kampung/Kelurahan Berdasarkan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler Tahun 2019-2021

Kabupaten	Kualitas jaringan	2019		2020		2021	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Merauke	4G/LTE	50	41%	88	69%	115	85%
	3G/H+/H/EVDO	31	25%	8	6%	7	5%
	2.5G/E/GPRS	3	2%	6	5%	1	1%
	Tidak ada	39	32%	25	20%	12	9%
Boven Digoel	4G/LTE	2	3%	30	41%	39	51%
	3G/H+/H/EVDO	4	6%	1	1%	3	4%
	2.5G/E/GPRS	11	16%	3	4%	4	5%
	Tidak ada	52	75%	39	53%	31	40%
Mappi	4G/LTE	-	0%	30	29%	54	50%
	3G/H+/H/EVDO	-	0%	2	2%	4	5%
	2.5G/E/GPRS	7	10%	8	9%	7	9%
	Tidak ada	62	62%	62	57%	43	50%
Asmat	4G/LTE	-	0%	12	17%	25	43%
	3G/H+/H/EVDO	2	3%	3	4%	1	2%
	2.5G/E/GPRS	36	55%	32	45%	17	29%
	Tidak ada	27	42%	24	34%	15	26%

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2021-2023

Tabel 2.100 menunjukkan persentase penduduk yang mengakses internet di Provinsi Papua Selatan. Secara umum proporsi penduduk yang mengakses internet di Provinsi Papua Selatan meningkat sebesar 15% dari 17,54% di tahun 2018 menjadi 32,10% pada tahun 2022. Penduduk di Kabupaten Mappi dan Asmat merupakan kabupaten dengan penduduk yang paling banyak belum mengakses internet di tahun 2022. Kurang dari 20% penduduk di kabupaten tersebut yang sudah mengakses internet. Peningkatan akses kepada internet perlu ditingkatkan dalam rangka penyebarluasan informasi melalui media

online.

Tabel 2. 100 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	35,62	40,95	46,32	54,46	55,94
Boven Digoel	25,47	26,42	27,38	33,63	41,46
Mappi	4,23	7,91	10,58	13,61	17,25
Asmat	4,87	8,54	6,74	16,97	13,78
Rata-rata	17,54	20,00	22,76	29,67	32,10

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Papua 2018-2022

Tabel 2.101 menyajikan persentase penduduk diatas 5 tahun yang menggunakan komputer. Secara umum terjadi sedikit penurunan pengguna komputer dari tahun 2022 (8,4%) dibandingkan tahun 2018 (9,03%). Kabupaten Asmat memiliki proporsi pengguna komputer paling rendah dibandingkan kabupaten lainnya (4,82%). Proporsi pengguna komputer di Papua Selatan secara umum masih rendah (<10%) mengindikasikan keperluan masyarakat terhadap alat komputasi masih relatif rendah.

Tabel 2. 101 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer Tahun 2018-2022

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	17,72	14,94	15,16	13,3	13,11
Boven Digoel	12,24	9,17	8,12	7,23	8,97
Mappi	3,33	2,84	2,78	5,15	6,73
Asmat	2,82	3,74	3,58	5,72	4,82
Rata-rata	9,03	7,67	7,41	7,85	8,40

Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Papua 2018-2022

2.2.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Tabel 2.102 menunjukkan jumlah koperasi menurut jenis koperasi di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel 2.102 diketahui terdapat 258-unit koperasi di Papua Selatan. Meskipun

demikian perlu dikaji lebih lanjut karena jumlah ini belum memisahkan antara koperasi aktif dan koperasi yang tidak aktif.

Tabel 2. 102 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Kategori	Merauke		Boven Digoel		Mappi		Asmat		Papua Selatan	
	unit	%	unit	%	unit	%	unit	%	Unit	%
Koperasi Unit Desa(KUD)	10	6,54	2	3,70	2	16,67	0	0,00	14	5,43
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)	12	7,84	0	0,00	1	8,33	0	0,00	13	5,04
Koperasi Karyawan (KOPKAR)	7	4,58	0	0,00		0,00	0	0,00	7	2,71
Koperasi Wanita (KOPWAN)	4	2,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	1,55
Koperasi Serba Usaha (KSU)	48	31,37	0	0,00	1	8,33	0	0,00	49	18,99
Koperasi Peranserta Masyarakat Adat (KOPERMAS)	0	0,00	0	0,00	7	58,33	0	0,00	7	2,71
Kategori	Merauke		Boven Digoel		Mappi		Asmat		Papua Selatan	
	unit	%	unit	%	unit	%	unit	%	Unit	%
Lainnya	72	47,06	52	96,30	1	8,33	39	100,00	164	63,57
JUMLAH	153	100,00	54	100,00	12	100,00	39	100,00	258	100,00

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen “Kabupaten Dalam Angka”)

Dalam Tabel 2.103 juga dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis usahanya, koperasi dengan distribusi merata di setiap kabupaten adalah Koperasi Unit Desa (KUD) meskipun jumlah agregatnya masih sedikit dibandingkan koperasi jenis usaha lainnya. Apabila meninjau berdasarkan wilayah, Kabupaten Merauke memiliki jumlah koperasi terbanyak yaitu 153 koperasi, sedangkan wilayah dengan jumlah koperasi terkecil adalah Boven Digoel yaitu hanya12 koperasi.

2.2.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

2.2.2.12.1 Pembangunan Pemuda

Untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di

Indonesia, dilakukan perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

Dengan adanya IPP diharapkan terdapat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. IPP merupakan komposit dari domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan distriminasi, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.103.

Tabel 2. 103 Domain dan Indikator Perhitungan Indeks Pembangunan Pemuda

Domain	Indikator
Pendidikan	Rata-rata lama sekolah
	APK Sekolah Menengah
	APK Perguruan Tinggi
Kesehatan dan Kesejahteraan	Angka kesakitan pemuda
	Persentase korban kejahatan
	Persentase pemuda yang merokok
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil
	Persentase pemuda wirausaha kerah putih
Lapangan dan Kesempatan Kerja	Tingkat pengangguran terbuka
Partisipasi dan Kepemimpinan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan
	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi
	Persentase pemuda yang memberikan saran / pendapatdalam rapat
Gender dan Diskriminasi	Angka perkawinan usia anak
	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke Atas
	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektorformal

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2022
(<https://ipp.sarikata.com/?t=2021>)

Sehubungan dengan belum tersedianya data agregat untuk Provinsi

Papua Selatan sebagai DOB, maka dalam meninjau kinerja pembangunan

pemuda Provinsi Papua Selatan menggunakan data kinerja IPP Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Berdasarkan Tabel 2.104 diketahui terdapat peningkatan IPP Provinsi Papua dari skor 48,00 pada tahun 2017 menjadi 52,00 pada tahun 2021. Meskipun nilai IPP Provinsi Papua masih berada di bawah nasional, namun skor IPP Papua mengalami peningkatan signifikan dan hampir menyamai skor nasional.

Tabel 2. 104 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Papua dan Nasional Tahun 2017-2022

Domain	Tahun	Papua	Indones ia
Pendidikan	2017	56,67	63,33
	2018	50,00	66,67
	2019	56,67	70,00
	2020	56,67	70,00
	2021	56,67	70,00
Kesehatan da n Kesejahteraan	2017	55,00	55,00
	2018	62,50	57,50
	2019	67,50	55,00
	2020	67,50	55,00
	2021	75,00	60,00
Domain	Tahun	Papua	Indones ia
Lapangan dan Kesempatan Kerja	2017	45,00	35,00
	2018	45,00	40,00
	2019	45,00	45,00
	2020	50,00	40,00
	2021	45,00	40,00
Partisipasi da n Kepemimpinan	2017	50,00	46,67
	2018	46,67	46,67
	2019	46,67	46,67
	2020	46,67	46,67
	2021	53,33	43,33

Gender da n Diskriminasi	2017	33,33	46,67
	2018	33,33	46,67

	2019	33,33	46,67
	2020	30,00	43,33
	2021	30,00	53,33
IPP	2017	48,00	49,33
	2018	47,50	51,50
	2019	49,83	52,67
	2020	50,17	51,00
	2021	52,00	53,33

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2022
 (https://ipp.sarikata.com/?t=2021)

Apabila meninjau berdasarkan domain komponen IPP, dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) domain IPP yang telah melebihi angka nasional yaitu: (1) kesehatan dan kesejahteraan; (2) lapangan dan kesempatan kerja; serta (3) partisipasi dan kepemimpinan. Adapun domain IPP yang termasuk dalam kategori rendah dan masih di bawah angka nasional adalah domain gender dan diskriminasi, serta domain pendidikan.

2.2.2.12.2 Pembangunan Olahraga

Penyusunan kebijakan dan program pembinaan olahraga dalam konteks daya saing daerah tidak hanya terbatas pada capaian olahraga prestasi, tetapi juga olahraga pendidikan yang menekankan pada penanaman nilai moral dan etos kerja serta olahraga masyarakat yang menekankan pada kesehatan dan modal sosial. Olahraga merupakan “driving forces” bagi meningkatnya sejumlah komponen pembentuk daya saing karena kebugaran jasmani dan kesehatan fisik menjadi faktor krusial guna mendukung produktivitas dan ketahanan masyarakat suatu daerah. Salah satu indikator yang dapat mengukur pembangunan olahraga adalah Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index) yang merupakan indeks komposit dari berbagai dimensi yaitu, SDM, ruang terbuka, kebugaran, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa (lihat Tabel 2.105).

Tabel 2. 105 Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Papua Tahun 2021-2022

Dimensi	Definisi	2021	2022
SDM	rasio antara jumlah ketenagaan olahraga (guru, pelatih, instruktur, dan relawan) dengan jumlah penduduk berusia 5 tahun ke atas pada suatu daerah	0,071	0,054
Ruang terbuka	tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik indoor maupun outdoor	0,246	0,336
Partisipasi	Keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir	0,279	0,282
Kebugaran	Kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti.	0,228	0,218
Literasi Fisik	pengetahuan, sikap, dan kompetensi fisik dari individu untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat	0,563	0,575
Kesehatan	Sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif.	0,448	0,430
Perkembangan Personal	Nilai-nilai kehidupan seperti persahabatan, kepemimpinan, respek pada aturan, menghormati lawan, dan keberanian mengambil risiko sebagai dampak perkembangan personal olahraga	0,537	0,576
Ekonomi	Eksternalitas di bidang ekonomi yang tumbuh sebagai dampak aktivitas olahraga	0,725	0,712
Performa	Dalam konteks olahraga prestasi, perolehan medal menjadi ukuran yang absolut	0,479	0,877
Indeks Pembangunan Olahraga		0,397	0,451

Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2021-2022 (dalam “Laporan Nasional Sport Development Indeks”)

Sehubungan dengan belum tersedianya data agregat untuk Provinsi Papua Selatan sebagai DOB, maka dalam meninjau kinerja pembangunan olahraga Provinsi Papua Selatan menggunakan data kinerja Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Berdasarkan Tabel 2.105 diketahui terdapat peningkatan Indeks Pembangunan Olahraga Provinsi Papua dari skor 0,397 pada tahun 2021 menjadi 0,451 pada tahun 2022. Apabila meninjau berdasarkan domain komponen Indeks Pembangunan Olahraga, dapat diketahui bahwa terdapat 3

(tiga) dimensi dengan capaian yang paling baik, yaitu: (1) ekonomi; (2) perkembangan sosial; serta (3) literasi fisik. Adapun dimensi yang termasuk rendah adalah SDM, kebugaran dan partisipasi.

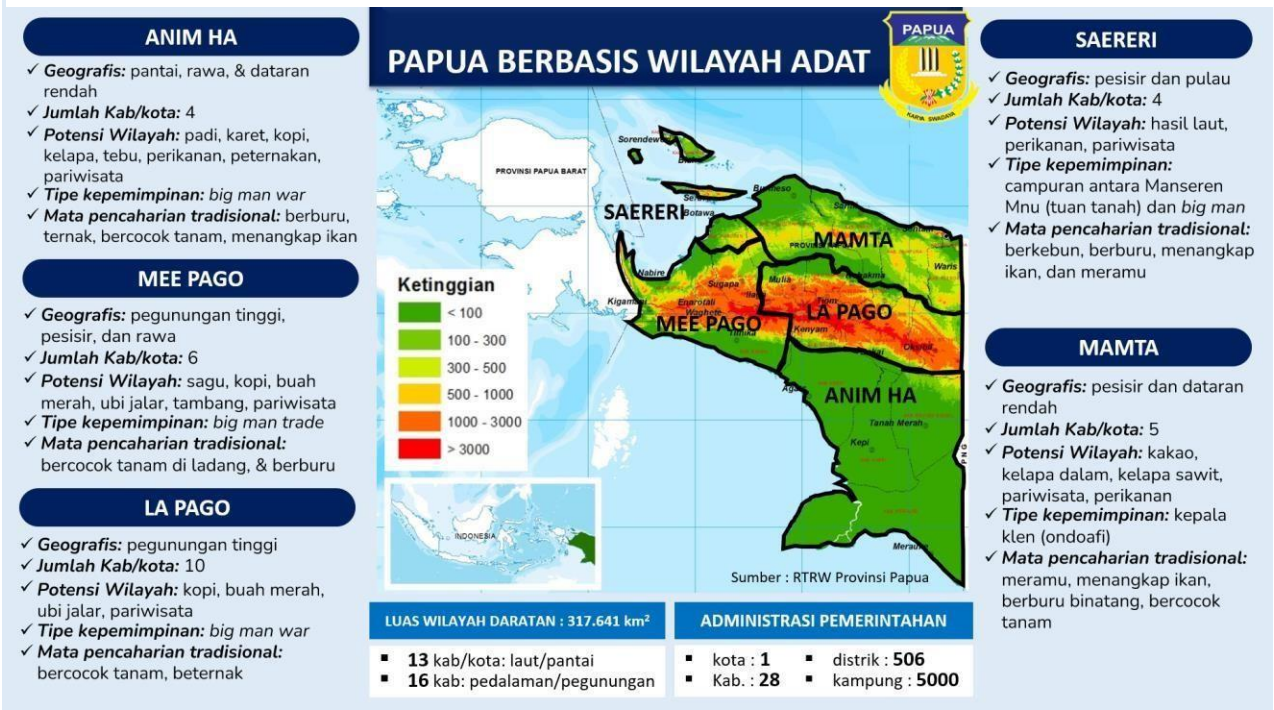
2.2.2.13 Statistik

Pencatatan Statistik yang dilakukan oleh Provinsi Papua Selatan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk melakukan urusan statistik Provinsi Papua Selatan. Kelengkapan yang digunakan sebagai indikator kelengkapan urusan statistik merujuk lampiran Permendagri No. 45 Tahun 2020 yaitu ketersediaan dokumen data sebagai bahan kegiatan perencanaan daerah sebagai berikut: Buku Provinsi Daerah Buku Statistik Daerah Buku PDRB Provinsi Semenjak ditetapkan sebagai provinsi Papua Selatan pada Juli 2022 hingga dokumen perencanaan ini dibuat, urusan statistik provinsi masih dalam tahap peralihan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Selatan. Sehingga dokumen statistik pada level Provinsi belum terpublikasi. Sumber data perencanaan selama masa peralihan masih menggunakan sebagai data Provinsi Papua sebagai provinsi induk sebelum Provinsi Papua Selatan terbentuk. Data Kabupaten yang terdapat di buku statistik provinsi maupun statistik Kabupaten dan Kota juga digunakan untuk kemudian diagregatkan atau dicari nilai tengah sebagai pendekatan data Provinsi Papua Selatan.

2.2.2.14 Kebudayaan

Provinsi Papua Selatan merupakan bagian dari wilayah adat Anim Ha dengan karakteristik geografis pesisir dan dataran rendah, tipe kepemimpinan “kepala klen” (ondoafi), serta mata pencaharian tradisional meramu, menangkap ikan, berburu binatang dan bercocok tanam (lihat Gambar 2.76). Pembagian wilayah adat ini dilakukan berdasarkan indikator kesamaan dalam aspek hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik, geografis, dan lainnya.

Gambar 2. 76 Lima Wilayah Adat di Provinsi Papua



Sumber: RPJMD Provinsi Papua 2018-2023

Mengutip dari website DPMKOAP Provinsi Papua, Marind Anim adalah suku yang menjadi tuan rumah di tanah datar ini. Suku Marind Anim menghuni empat penjuru mata angin dengan tujuh marga besar, yaitu Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Balagaize, dan Basik-basik. Seperti dituliskan J. Van Baal dalam karyanya, 'Dema" Description and Analysis of Marind Anim Culture', dahulu Suku Marind atau Malind punya kepercayaan terhadap dema, yakni roh yang dipercaya bisa menjelma sebagai apa pun di alam ini, baik manusia, binatang, tumbuhan, atau batu. Semua alam semesta berasal dari dema. Dema ini berupa kekuatan gaib dalam alam, atau berupa roh-roh orang mati. Semua itu terkait pula dengan konsep mereka tentang totemisme. Karena itu ada dema-dema alam yang dipuja selain dema-dema totemnya sendiri. Ada dema yang memunculkan diri di hadapan manusia berbentuk manusiapula atau berbentuk hewan. Ada yang disebut yorma (dema laut), wonatai (totem buaya), yawi (dema kelapa) dan lain-lain. Hari berganti bulan, tahun berganti abad, keharmonisan masyarakat Malin dengan alam terus terjaga. Perilaku berburu, meramu dan bercocok tanam masih dipertahankan hingga saat ini. Satu hal lagi, sagu merupakan sumber makanan pokok penduduk Malind Anim. Sagu juga digunakan dalam ritual peradilan adat, musyawarah dan adat perkawinan. Orang Marind sangat terkenal dengan makanan khas yang berasal dari olahan sagu, bercitarasa sedap dan lezat. Pohon sagu juga bisa digunakan untuk perahu dan bahan bangunan rumah. Sagu sangat menunjang kehidupan orang marind, itulah sebabnya mereka menganggap sagu sebagai 'raja', yang harus dihormati dan dipelihara. Suku Marind Anim mendiami dataran luas di bagian selatan, mulai dari Selat Muli (Selat Marianne) sampai ke daerah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Sebagian dari mereka tersebar pula di sekitar daerah aliran sungai Buraka, Bian, Eli, Kumbe dan Maro. Daerah tersebut berada dalam wilayah Kecamatan Okaba, Merauke, sebagian Kecamatan Kimam dan Muting di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Daerah ini merupakan dataran rendah bersavana dengan floranya yang mirip flora benua Australia dan dataran berawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu di sungai-sungai. Jumlah populasinya sekitar 5.000-7.000 jiwa. Suku lainnya yang berada di wilayah Anim Ha adalah Suku Asmat. Suku asmat dikenal dengan hasil

ukiran kayunya yang unik. populasi suku asmat terbagi dua yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Kedua populasi ini saling berbeda satu sama lain dalam hal cara hidup, struktur sosial dan ritual. Populasi pesisir pantai selanjutnya terbagi ke dalam dua bagian yaitu suku bisman yang berada di antara sungai sinesty dan sungai nin serta Suku Simai. Suku Asmat meyakini bahwa mereka berasal dari keturunan Dewa Fumeripitsy yang turun dari dunia gaib yang berada di seberang laut di belakang ufuk, tempat matahari terbenam tiap hari. Menurut keyakinan mereka, dewa nenek-moyang itu dulu mendarat di bumi di suatu tempat yang jauh di pegunungan. Dalam perjalanannya turun ke hilir sampai ia tiba di tempat yang kini didiami oleh orang Asmat hilir, ia mengalami banyak petualangan.

Suku Asmat ada yang tinggal di daerah pesisir pantai, jarak mereka antara satu lokasi dengan lokasi pemukiman lainnya berkisar 100 km hingga 300 km. Bahkan yang berada di daerah pedalaman, dikelilingi oleh hutan heterogen yang berisi tanaman rotan dan kayu (gaharu) waktu tempuhnya mencapai 1 hari 2 malam untuk mencapai daerah pemukiman satu dengan yang lainnya. Sedangkan jarak antara perkampungan dengan kecamatan sekitar 70 km. Dengan kondisi geografis demikian, maka berjalan kaki merupakan satu-satunya cara untuk mencapai daerah perkampungan satu dengan lainnya. Orang-orang Asmat pandai membuat hiasan ukiran tanpa membuat sketsa terlebih dahulu. Ukiran-ukiran yang mereka buat memiliki makna, yaitu persembahan dan ucapan terima kasih kepada nenek moyang. Bagi Suku Asmat, mengukir bukan pekerjaan biasa, melainkan jalan bagi mereka untuk berhubungan dengan para leluhur.

2.2.3 Urusan Layanan Pilihan

Pembahasan urusan pemerintahan pilihan dalam subbab ini terdiri atas pembahasan tentang:

- (1) urusan kelautan dan perikanan;
- (2) urusan pariwisata;
- (3) urusan pertanian;
- (4) urusan kehutanan;
- (5) urusan energi dan sumber daya mineral;
- (6) urusan perindustrian; serta

(7) urusan perdagangan.

2.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

2.2.3.1.1 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Terdapat Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Provinsi Papua Selatan yang berlokasi di Kabupaten Merauke dengan letak geografis antara 137°-141° BT dan 5°-9° LS. Dengan lokasinya yang strategis, Kabupaten Merauke merupakan salah satu kabupaten yang wilayahnya menghadap Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.54/MEN/2014, estimasi potensi sumber daya ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 terdiri dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, udang, ikan karang konsumsi, lobster dan cumi-cumi. Di antara potensi tersebut, ikan pelagis kecil merupakan potensi yang terbesar, sedangkan produksi terkecil adalah lobster. Dari potensi perikanan tersebut, Kabupaten Merauke baru memanfaatkan sebesar 15% dari potensi lestari (potensi berkelanjutan) di WPP 718, sehingga terdapat peluang dan prospek untuk memanfaatkan potensi sebesar 85% sebagai penggerak ekonomi maritim untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah hingga saat ini adalah: (1) kondisi sarana dan prasarana yang belum mendukung; (2) keterbatasan pendidikan dan kemampuan SDM setempat; (3) jenis alat tangkap dan perahu yang digunakan masih tradisional; (4) belum tersedia prasarana perikanan berupa pelabuhan perikanan; serta (5) adanya kapal asing yang melakukan illegal fishing dengan jumlah yang besar.

Berkaitan dengan rencana pembangunan SKPT, terdapat strategi pengembangan perikanan di Kabupaten Merauke untuk dua peruntukan, yaitu kawasan pendukung SKPT dan kawasan pusat SKPT. Kawasan pendukung SKPT berada di wilayah pesisir berada di Distrik Tabonji, Ilwayab, Kimaam, Waan, Okaba, Tubang, Malind, Naukenjerai, dan Semangga. Adapun kawasan pusat SKPT berada di Distrik Merauke. Dalam rangka pengembangan kelautan dan perikanan, lokasi sentra-sentra produksi perikanan tangkap yang potensial untuk dikembangkan di kawasan pendukung berada di Distrik Tabonji, Ilwayab, Kimaam, dan Waan. Kemudian sebagai pusat kawasan berada di Merauke yang berfungsi sebagai kawasan industri pengolahan; pemasaran dan distribusi kelautan

dan perikanan terintegrasi yang dirancang dengan pendekatan konektivitas antar kawasan.

Berdasarkan pembahasan di atas, konsep pengembangan perikanan di SKPT Merauke berbasis inti dan plasma yang dinamis. Kawasan sentra-sentra produksi perikanan tangkap sebagai “plasma” artinya kawasan tersebut sebagai sumber produksi perikanan tangkap bagi

pengembangan perikanan, meliputi wilayah Distrik Merauke, Tabonji, Ilwayab, Kimaam, dan Waan. Untuk mendukung kinerja kawasan plasma ini dibangun pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana (dermaga, cold storage, pabrik es, suplai air, energi listrik). Sedangkan untuk mendukung kegiatan nelayan dibantu dengan sarana penangkapan ikan (perahu dan alat penangkapan ikan). Secara faktual, masyarakat Pulau Kolepon yang perlu dibantu dalam penyediaan armada kapal adalah sebesar 10.358 nelayan. Untuk memanfaatkan potensi hasil tangkapan perikanan sebesar 69.750 ton, maka diperkirakan membutuhkan motor tempel 5 GT dengan kapasitas 2 ton/motor tempel sebanyak 34.875 unit motor tempel. Oleh sebab itu, masing-masing lokasi pelabuhan perikanan membutuhkan 159 unit motor tempel/lokasi/tahun. Selain itu, alat tangkap yang digunakan antara lain pukot udang, tramell net, gill net, jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring insang angkat, pancing, bubu dan jala. Selain itu, dengan adanya peluang ekspor berupa ikan dan udang hingga Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Thailand,

Eropa dan Australia, maka perlu dilakukan pengembangan armada kapal 10-30 GT, sedangkan untuk kapal insulated) untuk melakukan kegiatan collecting (mengumpulkan) produksi dari masing-masing sentral produksi.

Distrik Merauke yang berada di kawasan pelabuhan perikanan Merauke dan sekitarnya, ditetapkan sebagai “inti” atau pusat kawasan industri pengolahan hasil perikanan, pengembangan produk perikanan, pendaratan ikan, pintu gerbang pasar luar daerah termasuk ekspor beserta pelayanannya. Sebagai kawasan inti, Distrik Merauke perlu dilengkapi dengan sarana industri pengolahan (cold storage, pabrik es, suplai air, energi listrik, pasar ikan) dan prasarana pelabuhan perikanan (dermaga, kawasan industri, jalan komplek). Dalam operasionalisasinya, produksi hasil penangkapan para nelayan ditampung di pelabuhan perikanan pada masing-masing sentra produksi. Pada periode tertentu, kapal pengangkut mengumpulkan produksi di masing-masing pelabuhan perikanan dan

dibawa ke Kimaam (alternatif pertama) dan/atau ke Wanam (alternatif kedua). Selanjutnya, semua produksi yang sudah terkumpul diangkut melalui laut dan udara menuju Merauke.

2.2.3.1.2 Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan terjadi di Kabupaten Merauke, Mappi dan Asmat. Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan sebesar 60.296-ton dengan nilai produksi Rp. 1,93 triliun .Produksi perikanan tangkap terbesar terdapat di Kabupaten Merauke sebesar 46.286-ton dengan nilai Rp.1,50 triliun, atau 76,76% dari total produksi perikanan tangkap di Provinsi Papua Selatan

Gambar 2. 77 Kondisi Perikanan Tangkap di Provinsi Papua Selatan



Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Asmat

Berdasarkan lokasinya, perikanan tangkap dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu perikanan tangkap di laut dan perikanan perairan umum daratan (sungai, danau, dsb). Dimana diketahui bahwa produksi perikanan tangkap laut di Provinsi Papua Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan produksi perikanan perairan umum daratan. Pada tahun 2021, produksi perikanan tangkap di laut sebesar 58.226 ton dengan nilaiRp.1,91 triliun, sedangkan produksi perikanan perairan umum daratan sebesar 2.070 ton dengan nilai Rp.19,18 miliar. Dalam hal ini, kabupaten Merauke merupakan wilayah penghasil perikanan tangkap terbesar, baik perikanan tangkap di laut maupun perikanan perairan umumdaratan.

Tabel 2. 106 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenis Penangkapan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Perikanan Tangkap di Laut		Perikanan PerairanUmum Daratan		Total	
	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)	Volume (ton)	Nilai (Rp.000)
Merauke	44.786	1.483.533.626	1.500	13.907.421	46.286	1.497.441.047
Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
Mappi	12.002	400.501.089	486	4.490.954	12.488	404.992.043
Asmat	1.438	23.751.885	84	785.426	1.522	24.537.311
Papua Selatan	58.226	1.907.786.600	2.070	19.183.801	60.296	1.926.970.401

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

Tabel 2.108 menunjukkan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di laut menurut komoditas utama di Provinsi Papua Selatan tahun 2020. Dalam Tabel 2.108 diketahui bahwa komoditas utama dengan produksi terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah ikan cakalang (1.915 ton) dan ikan tuna (1.779 ton). Adapun nilai produksi perikanan tertinggi adalah ikan tuna yaitu sebesar Rp.149,17 miliar. Berdasarkan kabupaten, wilayah yang secara konstan berkontribusi dalam produksi ikan tangkap cakalang, tongkol dan tuna adalah Kabupaten Merauke. Meskipun demikian, Kabupaten Mappi unggul dalam produksi udang sebanyak 751 ton dengan nilai produksi Rp. 30,06 miliar.

Tabel 2. 107 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020

Kabupaten	Cakalang	Tongkol	Tuna	Udang	Lainnya	Total
Volume (Ton)						

Merauke	1.915	397	1.779	123	40.572	44.786
Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
Mappi	0	0	0	751	11.251	12.002
Asmat	0	0	0	0	1.438	1.438
Papua Selatan	1.915	397	1.779	874	53.261	58.226
Nilai (Rp.000)						

Merauke	57.629.559	12.526.014	149.172.077	6.373.224	1.257.832.752	1.483.533.626
Kabupaten	Cakalang	Tongkol	Tuna	Udang	Lainnya	Total
Boven Digoel	0	0	0	0	0	0
Mappi	0	0	0	30.056.000	370.445.089	400.501.089
Asmat	0	0	0	0	23.751.885	23.751.885
Papua Selatan	57.629.559	12.526.014	149.172.077	36.429.224	1.652.029.726	1.907.786.600

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka”)

2.2.3.1.3 Perikanan Budidaya

Selain dari perikanan tangkap, produksi perikanan Provinsi Papua Selatan juga berasal dari perikanan budidaya. Pada tahun 2021, produksi perikanan budidaya terbesar di Provinsi Papua Selatan terdapat di Kabupaten Merauke (1.500 ton dengan nilai produksi Rp.13,91 milyar) dan Kabupaten Mappi (486 ton dengan nilai produksi Rp.4,49 milyar), sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.109. Berdasarkan produksi dan nilai produksi yang teridentifikasi, dapat diketahui pada tahun 2021 total produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Selatan sebesar 2.070 ton dengan nilai produksi Rp.19,18 milyar rupiah.

Tabel 2. 108 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Komoditas Utama			Total
	Udang	Ikan	Lainnya	
Volume (Ton)				
Merauke	0	1.500	0	1.500
Boven Digoel	0	0	0	0
Mappi	0	486	0	486
Asmat	0	84	0	84
Papua Selatan	0	2.070	0	2.070
Nilai (Rp.000)				
Merauke	0	13.907.421	0	13.907.421
Boven Digoel	0	0	0	0
Mappi	0	4.490.954	0	4.490.954
Asmat	0	785.426	0	785.426
Papua Selatan	0	19.183.801	0	19.183.801

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka”) Produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Selatan dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatannya, sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel

2.109. Berdasarkan Tabel 2.109 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat 986-ton produksi pembesaran, 10,53 juta ekor produksi pembenihan, serta 12 ribu ekor produksi ikan hias.

Tabel 2. 109 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Pembesaran (ton)	Pembenihan (1000 ekor)	Ikan Hias (1000 ekor)
Merauke	394	10.470	11
Boven Digoel	3	60	1
Mappi	498	0	0
Asmat	91	0	0
Papua Selatan	986	10.530	12

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka”)

Tabel 2.110 menunjukkan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya menurut jenis ikan komoditas utama di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel 2.110 diketahui bahwa berdasarkan jenis ikan komoditas utama, budidaya ikan terbesar di Merauke tahun 2021 adalah budidaya ikan nila (943 ton dengan nilai produksi Rp.51,49 milyar), ikan mas (456 ton dengan nilai produksi Rp.23,63 milyar) dan ikan lele (151 ton dengan nilai produksi Rp.6,10 milyar). Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, produksi budidaya ikan nila terbesar terdapat di Kabupaten Mappi (408 ton), produksi budidaya ikan mas terbesar terdapat di Kabupaten Asmat (195 ton), sedangkan produksi budidaya ikan lele hanya terdapat di Kabupaten Mappi (78 ton) dan Merauke (73 ton).

Tabel 2. 110 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan Komoditas Utama di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Jenis Ikan					
	Gurame	Patin	Lele	Nila	Ikan Mas	Udang
Volume (Ton)						
Merauke	0	0	73	236	85	0
Boven Digoel	0	0	0	166	86	0
Mappi	0	0	78	408	90	0

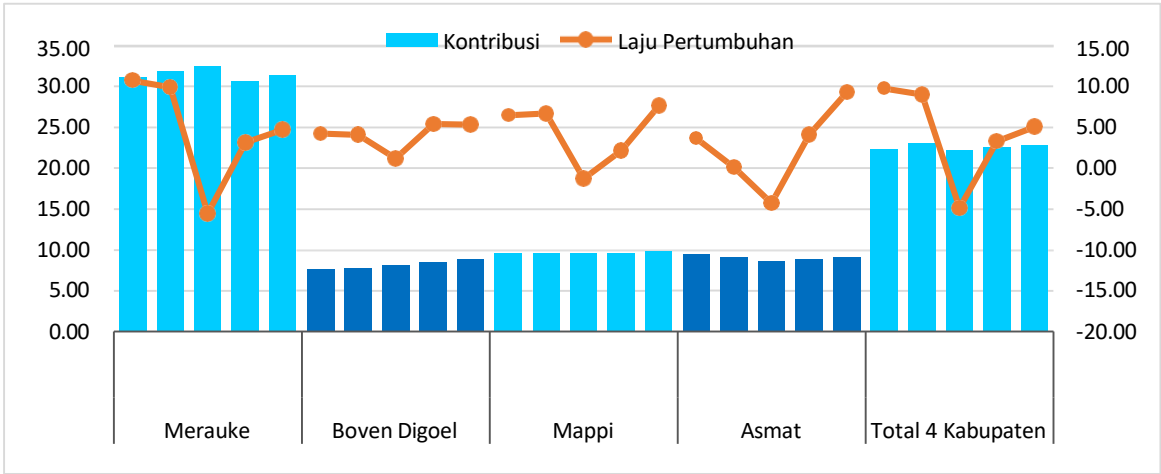
Asmat	0	0	0	133	195	0
Papua Selatan	0	0	151	943	456	0
Nilai (Rp.000)						
Merauke	0	0	3.303.132	9.646.434	3.607.230	0
Boven Digoel	0	0	0	10.239.010	4.731.640	0
Mappi	0	0	2.796.800	21.880.416	4.203.940	0
Asmat	0	0	0	9.733.200	11.088.780	0
Papua Selatan	0	0	6.099.932	51.499.060	23.631.590	0

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka")

2.2.3.2 Pariwisata

Dalam mengukur kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah diperlukan identifikasi semua sektor ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata karena pariwisata bukan merupakan sektor yang berdiri sendiri. Terdapat 4 sektor utama yang menjadi komponen perhitungan pendapatan regional sektor pariwisata, yaitu: (1) penyediaan akomodasi dan makan minum; (2) transportasi dan pergudangan; (3) informasi dan komunikasi; serta (4) perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2018-2022 pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten di Provinsi Papua Selatan berada dalam kondisi fluktuatif karena mengalami trend menurun pada 2018-2020 namun mengalami peningkatanpada 2020-2022 (lihat Gambar 2. 7 8 dan Tabel 2.111).

Gambar 2. 78 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pariwisata Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (data diolah)

Tabel 2. 111 Kontribusi Sektor Pariwisata dan Sektor Pembentuknya Terhadap Perekonomian (PDRB) di Papua Selatan 2016-2020 (%)

Wilayah	Sektor	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten					Laju Pertumbuhan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	Sektor Pariwisata	31,14	31,89	32,55	30,73	31,39	10,75	9,95	-5,56	3,15	4,73
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	14,13	14,32	14,46	14,29	14,29	9,68	9,01	0,03	0,30	4,54
	Transportasi dan Pergudangan	7,88	8,10	8,23	6,04	6,54	11,17	9,29	- 27,31	9,92	11,74
	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	1,31	1,34	1,35	1,16	1,25	10,25	8,59	- 14,53	8,67	4,73
	Informasi dan Komunikasi	7,82	8,13	8,50	9,23	9,32	12,31	12,48	7,52	2,48	0,09
Boven Digoel	Sektor Pariwisata	7,63	7,81	8,12	8,50	8,81	4,25	4,09	1,19	5,42	5,34
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	5,37	5,51	5,80	6,15	6,37	1,87	1,35	-0,87	0,75	2,35
	Transportasi dan Pergudangan	1,73	1,76	1,75	1,75	1,84	4,95	5,14	1,31	0,24	0,26
	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24	2,06	-3,84	- 10,34	- 3,13	- 0,38
	Informasi Dan Komunikasi	0,30	0,31	0,34	0,35	0,36	0,00	13,33	0,00	5,88	5,56
Mappi	Sektor Pariwisata	9,56	9,61	9,61	9,61	9,85	6,49	6,73	-1,26	2,16	7,65
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	6,71	6,77	7,08	7,06	7,07	6,82	7,06	3,28	1,93	5,22
	Transportasi dan Pergudangan	2,09	2,09	1,75	1,76	1,97	5,73	5,88	- 17,01	2,75	17,66

		Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten	Laju Pertumbuhan
--	--	------------------------------------	------------------

Wilayah	Sektor	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
	Penyediaan Akomodasi dan Informasi	0,23	0,24	0,22	0,22	0,22	8,49	8,50	-7,57	1,19	5,23
	Informasi dan Komunikasi	0,53	0,52	0,56	0,57	0,58	4,53	5,23	5,73	3,72	7,82
Asmat	Sektor Pariwisata	9,52	9,09	8,65	8,83	9,19	3,65	0,08	-4,28	4,15	9,33
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,32	5,86	5,73	5,81	5,83	2,96	-2,87	-1,61	3,66	5,26
	Transportasi dan Pergudangan	2,33	2,37	2,01	2,05	2,37	5,12	6,75	-14,89	4,28	21,50
	Penyediaan Akomodasi dan Informasi	0,28	0,26	0,26	0,26	0,26	6,47	-1,05	0,19	0,28	6,80
	Informasi dan Komunikasi	0,60	0,61	0,66	0,71	0,73	4,12	5,78	9,53	9,50	8,43
	Sektor Pariwisata	22,32	23,05	22,18	22,58	22,79	9,78	9,02	-4,87	3,30	5,07
Total	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,81	11,03	11,20	11,17	11,24	8,54	7,77	0,40	1,22	4,69
	Sektor Pariwisata	22,32	23,05	22,18	22,58	22,79	9,78	9,02	-4,87	3,30	5,07
PDRB Kabupaten	Transportasi dan Pergudangan	5,61	5,78	4,38	4,69	5,05	10,24	8,71	-25,01	8,67	12,01
	Penyediaan Akomodasi dan Informasi	0,89	0,91	0,80	0,85	0,86	9,82	8,08	-13,41	7,98	4,67
	Informasi dan Komunikasi	5,02	5,33	5,80	5,86	5,65	12,01	12,21	7,51	2,61	0,31

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2.111 dapat diketahui bahwa rata-rata kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian kabupaten di Papua Selatan pada tahun 2018 adalah 22,32%, mengalami peningkatan menjadi 23,05% pada tahun 2019, namun terjadi penurunan kontribusi kembali menjadi 22,18% pada tahun 2020 sebagai dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, sebagai

dampak recovery ekonomi pasca pandemi, mulai terjadi perbaikan ekonomi di Papua Selatan termasuk peningkatan kontribusi pariwisata menjadi 22,58% pada tahun 2021 dan terus mengalami peningkatan menjadi 22,79% pada tahun 2022.

Tabel 2. 112 Destinasi Wisata di Provinsi Papua Selatan

Kategori		Atraksi Wisata		Lokasi	
				Distrik	Kabupaten
1	Wisata Bahari	1	Pantai Lampu Satu	Merauke	Merauke
		2	Pantai Pombo (nama lain: "Pulau Ular")	Kimaam	
		3	Pantai Payum	Merauke	
		4	Pantai Onggaya	Naukenjerai	
		5	Pantai Onggari	Malind	
		6	Pantai Ndalir	Merauke dan Naukenjerai	
		7	Taman Wisata Pulau Kimaam	Kimaam	
		8	Rawa Biru	Sota	
		9	Pulau Ikan Ampera	Mandobo	Boven Digoel
		10	Pantai Bokap	Agats	Asmat
		11	Pantai Pek	Agats	
		12	Pantai Bayun	Pantai Kasuari	
2	Wisata Alam	1	Cagar Alam Kumbe		Merauke
		2	Taman Nasional Wasur		
		3	Rumah Semut (Musamus)		
		4	Kawasan Sungai Ampera	Mandobo	Boven Digoel
		5	Gunung Koreom	Ambatkwi	
		6	Pulau Terek	Subur	
		7	Agrowisata Kebun Raya Kelapa Sawit	Jair	
		8	Air Terjun Aman D. Tayon	Arimop	
		9	Air Terjun Kun	Iniyandit	
		10	Air Terjun Atakat	Iniyandit	
		11	Air Terjun Kali Komen	Waropko	
		12	Pemancingan Kali Munum Desa Patriot	Arimop	

Kategori		Atraksi Wisata		Lokasi	
				Distrik	Kabupaten
		13	Danau Wegi Boma Bomakia II	Bomakia	
		14	Taman Nasional Lorenz	Sawa Erma	Asmat
		15	Pulau Tiga/Somel	Joerat	
		16	Pulau Sengsara/Fumaripits	Akat	
		17	Pulau Lak/Mamats	Sawa Erma	
		18	Rawa Baki	Sirets, Akat, Suru-suru	
		19	Ekowisata Folklor	Seluruh distrik	Mappi
		20	Kampung Soba (dengan nama lain "kampung batu" di Kota Sejuta Rawa)	Kepi	
3	Wisata Budaya	1	Upacara Tanam Sasi		Merauke
		2	Jembatan Maro atau Tujuh Wali-Wali (TWW)		
		3	Wisata perbatasan	PLBN Sota	
		4	Rumah pohon dan kehidupan tradisional Suku Koroway dan Kombay	Yaniruma	Boven Digoel
		5	Pesta ulat sagu	Yaniruma	
		6	Museum Kebudayaan dan Kerajinan	Agats	Asmat
		7	Ukiran dan Kerajinan Asmat	Seluruh distrik	
		8	Rumah Panjang	Seluruh distrik	
		9	Perahu	Seluruh distrik	
		10	Tarian Sambutan, Tarian Memangil Roh	Seluruh distrik	
		11	Adventure dan Rumah di Atas Pohon	Suator	
		12	Kawasan sekolah budi pekerti khas Asmat	Sawa Erma	
		13	Pesta Budaya Asmat	Agats	
		14	Kampung Suku Korowai		Mappi
4	Wisata Sejarah	1	Tugu LB. Moerdani	Tanah Miring	Merauke
		2	Tugu Perbatasan		
		3	Tugu Kembaran Sabang-Merauke	Sota	

Kategori		Atraksi Wisata		Lokasi	
				Distrik	Kabupaten
		4	Tugu Pepera	Merauke	Boven Digoel
		5	Monumen Perjuangan Kemerdekaan		
		6	Puncak Adil Mandala		
		7	Penjara Situs Boven Digoel	Mandobo	
		8	Tugu Monumen Bung Hatta	Mandobo	
		9	Tanah Tinggi Maryam	Mandobo	
		10	Rumah Pengasingan Bung Hatta		
		11	Patung Uni Mimio	Bomakia	
		12	Taman makam pahlawan (perintis)	Mandobo	
		13	Mappi Pos	Edera	Mappi
5	Wisata Religi	1	Tugu 100 Tahun Gereja Katolik		Merauke
		2	Gua Bunda Maria	Mandobo	Boven Digoel
		3	Goa Bunda Maria Autriop	Iniyandit	
		4	Gua Bunda Maria Kandon Kakuna	Mindiptana	

Sumber: RTRW Provinsi Papua 2013-2033 Website Pemerintah Kabupaten Asmat (<https://www.asmatkab.go.id/page/pariwisata>) Website Pemerintah Kabupaten Boven Digoel(https://bovendigoelkab.go.id/halaman/pariwisata_kebudayaan)Website Pemerintah Kabupaten Merauke (<https://portal.merauke.go.id/news/2267/wisata-pantai-di-kota-merauke.html>)

Gambar 2. 79 Beberapa Atraksi Wisata di Provinsi Papua Selatan

Pantai Lampu Satu, Merauke

Kampung Rawa Biru, Merauke

Tugu LB. Moerdani, Merauke



Rumah Semut Masamus



Taman Nasional Lorentz



Taman Nasional Wasur



Seni dan Ukiran
Asmat

Rumah pohon

Wisata Perbatasan



Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Selatan dapat dikatakan belum optimal apabila dilihat dari besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Papua Selatan jika dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Provinsi Papua Selatan memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh Provinsi Papua Selatan ialah: Taman Nasional Lorentz di Asmat, dan Taman Nasional Wasur di Merauke. Meskipun demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek wisata potensial di Papua Selatan dikelompokkan menjadi 4 kawasan yaitu obyek wisata bahari, obyek wisata budaya, obyek wisata sejarah, dan obyek wisata alam. Selain itu, ada beberapa obyek wisata lainnya di Provinsi Papua Selatan yaitu Tugu Kembar Sabang Merauke di Merauke, Pantai Lampu Satu di Merauke, dan Museum Kebudayaan dan Kerajinan di Asmat. Pemanfaatan potensi wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi. Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Selain akses konektivitas melalui pembangunan infrastruktur, perkembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua Selatan sangat didukung oleh beberapa fasilitas penunjang kenyamanan dalam berwisata seperti sarana akomodasi/hotel. Berdasarkan Tabel 2.113 diketahui terdapat peningkatan jumlah akomodasi di

Provinsi Papua Selatan dari 34 unit pada tahun 2017 menjadi 47 unit pada tahun 2021. Kabupaten yang memiliki sarana akomodasi terbanyak adalah Kabupaten Merauke (tahun: 23 unit) dan Boven Digoel (tahun 2022: 15 unit) Adapun jumlah sarana akomodasi di wilayah lainnya masih terbatas yaitu

sebanyak 3 unit di Kabupaten Mappi dan 6 unit di Kabupaten Asmat.

Tabel 2. 113 Banyaknya Sarana Akomodasi di Provinsi Papua Selatan Tahun 2017-2021

Kabupaten	Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
Merauke	Akomodasi	16	18	18	18	23
	Kamar	363	362	410	434	483
	Tempat Tidur	480	486	550	599	627
Boven Digoel	Akomodasi	9	14	14	15	15
	Kamar	97	155	158	205	181
	Tempat Tidur	110	172	173	203	205
Mappi	Akomodasi	5	7	5	3	3
	Kamar	76	98	84	60	60
	Tempat Tidur	95	147	124	73	79
Asmat	Akomodasi	4	4	5	5	6
	Kamar	68	75	100	130	77
	Tempat Tidur	93	123	153	126	126
Papua Selatan	Akomodasi	34	43	42	41	47
	Kamar	604	690	752	829	801
	Tempat Tidur	778	928	1000	1001	1037

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023")

Tabel 2.114 menunjukkan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu domestik di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan Tabel 2.114 diketahui bahwa tamu asing dan domestic memiliki preverensi menginap lebih lama di hotel berbintang, dibandingkan dengan hotel non-bintang. Adapun rata- rata lama menginap tamu asing dan domestik di hotel berbintang adalah 3,25 hari, sedangkan rata-rata lama menginap di hotel non-bintang adalah 2,69 hari. Di hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu asing adalah 5,48 hari, sedangkan rata-rata lama menginap tamu domestik hanya mencapai 3,25 hari.

Tabel 2. 114 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik di Provinsi Papua Selatan (hari) Tahun 2021

Kabupaten	Hotel Bintang			Hotel Non-Bintang		
	Tamu Asing	Tamu Domestik	Asing+ Domestik	Tamu Asing	Tamu Domestik	Asing+ Domestik
Merauke	5,48	2,67	2,67	-	1,83	1,83
Boven Digoel	-	3,83	3,83	-	3,76	3,76
Mappi	-	-	-	-	2,62	2,62
Asmat	-	-	-	-	2,46	2,54
Rata-rata	5,48	3,25	3,25	-	2,67	2,69

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023")

Tabel 2.115 menunjukkan persentase tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi lainnya menurut jenis hotel di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021. Berdasarkan tabel 2.115 diketahui terdapat penurunan rata-rata tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi di kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang menurun dari 54,87% pada tahun 2018 menjadi 31,91% pada tahun 2021. Adapun tingkat penghunian kamar hotel non-bintang menurun dari 38,61% pada tahun 2018 menjadi 13,33% pada tahun 2021. Penurunan tingkat penghunian hotel serta rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten dalam upaya peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Tabel 2. 115 Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel di Papua Selatan Tahun 2021

Kategori	Kabupaten	2018	2019	2020	2021
Hotel Bintang	Merauke	54,87	n.a	31,56	42,88
	Boven Digoel	-	n.a	12,44	20,94
	Mappi	-	n.a	-	-
	Asmat	-	n.a	-	-
	Rata-rata 4 Kabupaten	54,87	n.a	22,00	31,91
Hotel Non	Merauke	27,90	n.a	7,60	13,98
	Boven Digoel	54,71	n.a	21,65	28,23

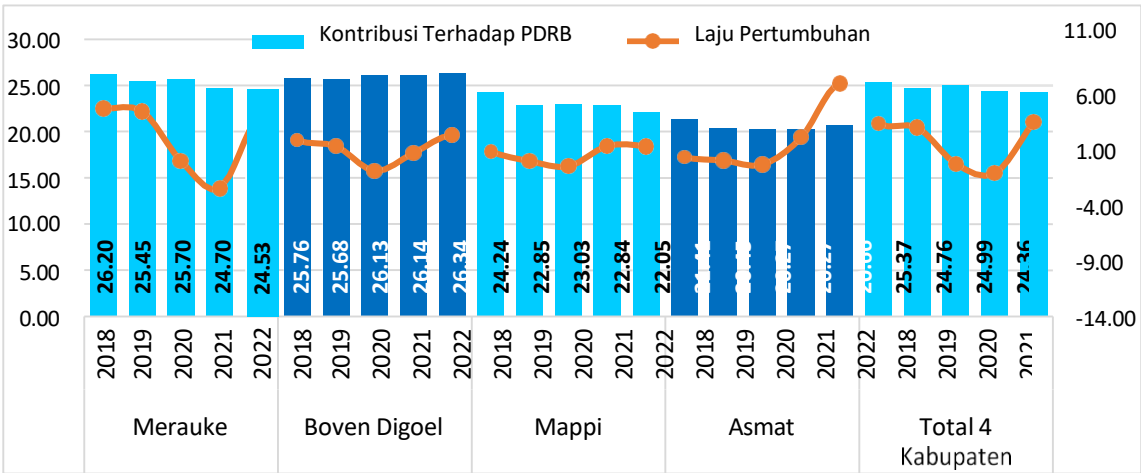
Bintang	Mappi	-	n.a	0,80	8,22
	Asmat	33,21	n.a	2,84	2,90
	Rata-rata 4 Kabupaten	38,61	n.a	8,22	13,33

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Papua Dalam Angka Tahun 2023")

2.2.3.3 Pertanian

Pertanian mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat Provinsi Papua Selatan sebagai penyangga ketahanan pangan sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Berdasarkan Gambar 2 . 8 0 diketahui bahwa secara umum kontribusi sektor pertanian di Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan dari 25,37% pada tahun 2018 menjadi 24,23% pada tahun 2022. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, daerah yang mengalami penurunan kontribusi sektor pertanian adalah Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Adapun Kabupaten Boven Digoel merupakan daerah yang mengalami peningkatan kontribusi sektor pertanian dari 25,76% pada tahun 2018 menjadi 26,34% pada tahun 2022. Penurunan kontribusi ini secara umum disebabkan karena (1) menurunnya produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; (2) kurangnya penerapan teknologi tepat guna; (3) rendahnya kapasitas petani di bidang usaha agribisnis; serta (4) belum adanya ketersediaan lahan khusus usaha agribisnis dan kurangnya pembukaan lahan pertanian potensial.

Gambar 2. 80 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022(dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, maka sektor pertanian di Provinsi Papua Selatan perlu dioptimalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM serta peningkatan daya saing daerah. Selain itu, diharapkan adanya percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan, serta pengembangan kawasan strategis pertanian. Adapun pembahasan urusan

pertanian lebih lanjut dalam subbab ini terdiri atas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Dalam hal ini, pembahasan akan berfokus pada komoditas lokal dan komoditas strategis pertanian yang bernilai ekonomi cukup tinggi untuk menjaga ketahanan pangan (stabilitas harga) agar tidak terjadi inflasi.

2.2.3.4 Tanaman Pangan

Berdasarkan Tabel 2.116 diketahui bahwa secara umum produksi tanaman pangan terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah padi (350 ribu ton), ubi kayu (40,66 ribu ton), serta ubi jalar (23,97 ribu ton). Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, hanya Kabupaten Merauke dan Boven Digoel saja yang dapat diidentifikasi produksi pertaniannya dengan adanya keterbatasan data. Terdapat perbedaan produksi komoditas tanaman pangan antara Kabupaten Merauke yang mengutamakan produksi padi (349,59 ribu ton), sedangkan Kabupaten Boven Digoel yang lebih dominan dalam produksi ubi kayu (25,53 ribu ton) dan ubi jalar (16,74 ribu ton).

Tabel 2. 116 Tanaman Pangan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021 (ton)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat *	Papua Selatan
Padi	349.588,00	1.211,00	...	...	350.799,00
Ubi Kayu	15.136,35	25.530,00	...	...	40.666,35
Ubi Jalar	7.238,48	16.736,00	...	...	23.974,48
Talas	4.850,90	1.099,00	...	...	5.949,90
Jagung	4.050,66	...	...	...	4.050,66
Kacang Tanah	897,70	1.019,50	...	...	1.917,20
Gembili	1.899,90	...	...	...	1.899,90
Kacang Hijau	152,83	...	...	...	152,83
Kedelai	25,54	10,00	...	...	35,54

*Kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

Sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga ketahanan pangan dan mengembangkan sektor pertanian tanaman pangan di Provinsi Papua Selatan maka pengembangan produksi tanaman pangan di Provinsi Papua Selatan perlu sejalan dengan arahan RTRW tentang penetapan kawasan budidaya peruntukkan pertanian pangan. Apabila diperlukan kedepannya dapat ditentukan penetapan Kawasan Strategis agropolitan/ minapolitan/agribisnis dalam penyusunan RTRW Provinsi Papua Selatan. Apabila dilakukan analisis terhadap capaian produksi pertanian tanaman pangan dan arahan RTRW Provinsi

Papua Selatan sebagai provinsi induk, maka dapat diketahui bahwa -dari seluruh kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan- Kabupaten Mappi, Asmat dan Boven Digoel belum dapat memproduksi komoditas tanaman pangan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), hal ini tercermin juga dalam Indeks Ketersediaan (IK) pangan yang bernilai 0,00 di 3 (tiga) kabupaten tersebut . Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat ketahanan pangan merupakan hal yang vital dalam pemenuhan kebutuhan penghidupan masyarakat.

2.2.3.4.1 Holtikultura

Tabel 2.117 menunjukkan produksi sayuran berdasarkan kabupaten di Provinsi Papua Selatan tahun 2021. Berdasarkan Tabel 2.118 diketahui bahwa secara umum, produksi sayuran terbesar di Provinsi Papua Selatan adalah tomat (24,97 ribu kuintal), sawi/petsai (17,73 ribu kuintal), dan cabe rawit (17,03 ribu kuintal). Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, hasil produksi Kabupaten Merauke mendominasi atau memiliki proporsi yang sangat besar terhadap produksi sayuran regional di Papua Selatan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan produksi holtikultura di Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat dalam rangka mencapai ketahanan pangan daerah.

Tabel 2. 117 Produksi Sayuran di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021 (kuintal)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Bawang Daun	2.744,00	...	...	...	2.744,00
Bawang Merah	2.768,00	...	...	...	2.768,00
Bawang putih	...	...	...	...	0,00
Bayam	4.685,00	...	...	...	4.685,00
Buncis	8.182,00	...	...	...	8.182,00
Cabe Besar	9.330,00	30,00	280,00	25,33	9.665,33

Cabe Rawit	15.544,00	1.456,00	0,00	30,00	17.030,00
Kacang Panjang	9.252,00	...	350,00	74,57	9.676,57
Kangkung	12.697,00	...	300,00	243,18	13.240,18
Kembang Kol	1.849,00	...	...	...	1.849,00
Kentang	...	...	...	...	0,00
Ketimun	7.984,00	...	...	22,31	8.006,31
Kubis	12.647,00	2.200,00	...	...	14.847,00
Labu siam	82,00	...	...	...	82,00
Sawi/Petsai	17.426,61	...	270,00	34,04	17.730,65
Terung	7.443,00	...	...	66,56	7.509,56
Tomat	20.420,00	4.320,00	210,00	27,50	24.977,50

*Kawasan peruntukkan pertanian hortikultura berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033 Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

Tabel 2.118 menunjukkan produksi buah-buahan di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2020. Berdasarkan Tabel 2.118 diketahui bahwa komoditas buah-buahan yang paling banyak diproduksi di Provinsi Papua Selatan tahun 2020 adalah manga (59,63 ribu kuintal) dan jeruksiam/keprok/orang (41,14 ribu kuintal) yang Sebagian besar diproduksi di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke merupakan wilayah yang paling banyak memproduksi buah- buahan dengan hasil produksi unggulan yaitu manga (59,04 ribu kuintal), jeruk siam/keprok/orang (40,98 ribu kuintal), durian (7,3 ribu kuintal), dan melinjo (7,23 ribu kuintal).

Tabel 2. 118 Produksi Buah-buahan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (kuintal)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Alpukat	1.145,00	...	...	...	1.145,00
Anggur	8,00	...	...	...	8,00
Apel	0,00	...	...	...	0,00
Belimbing	1.559,00	...	...	...	1.559,00
Duku/ Lang sat/ Kokosan	32,00	...	...	...	32,00
Durian	7.303,00	...	590,00	...	7.893,00
Jambu Air	2.598,00	...	...	...	2.598,00
Jambu Biji	3.737,00	...	...	77,80	3.814,80

Jengkol	8,00	...	...	...	8,00
Jeruk Besar	1.330,00	...	...	55,60	1.385,60
Jeruk sia m/ Keprok/ Orange	40.984,00	...	160,00	...	41.144,00
Mangga	59.042,00	...	530,00	63,90	59.635,90
Manggis	2.340,00	...	...	...	2.340,00
Markisa	0,00	...	...	...	0,00
Melinjo	7.227,00	...	...	...	7.227,00
Nanas	...	...	540,00	181,60	721,60
Pisang	...	...	1.990,00	2.429,00	4.419,00
Pepaya	...	...	0,00	98,10	98,10
Rambutan	...	598,50	500,00	48,80	1.147,30
Salak	...	14,48	...	...	14,48
Sirsak	...	9,78	...	...	9,78
Sukun	...	179,40	...	...	179,40

*Kawasan peruntukkan pertanian holtikultura berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033
Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

2.2.3.4.2 Perkebunan

Tabel 2.119 menunjukkan produksi perkebunan di Provinsi Papua Selatan pada Tahun 2020. Dalam Tabel 2.119 dapat diketahui bahwa komoditas perkebunan yang paling banyak diproduksi di Provinsi Papua Selatan adalah sagu (5.317 ton), kelapa (4.273 ton), jambu mete (917 ton) dan pinang (123 ton). Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat variasi produksi perkebunan antar kabupaten di Provinsi Papua Selatan yang mencerminkan kekhasan daerah. Kabupaten Merauke merupakan wilayah penghasil kelapa (3.408 ton), jambu mete (917 ton), kapuk randu (68 ton), pinang (53 ton), sagu (13 ton), dan lada (2 ton). Kabupaten Boven Digoel merupakan wilayah penghasil kelapa (175 ton) dan kakao (4 ton). Kabupaten Mappi merupakan wilayah penghasil kelapa (475 ton), pinang (70 ton), kakao (8 ton), cengkeh (7 ton) dan kapuk rindu (2 ton). Adapun Kabupaten Asmat merupakan wilayah penghasil sagu (5.304 ton) dan kelapa (215 ton).

Tabel 2. 119 Produksi Perkebunan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020 (ton)

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat	Papua Selatan
Kelapa Sawit	0	0	0	0	0
Kelapa	3.408	175	475	215	4.273
Karet	0	0	0	0	0
Kopi	0	0	0	0	0
Kakao	0	4	8	0	12
Tebu	0	0	0	0	0
The	0	0	0	0	0
Tembakau	0	0	0	0	0
Sagu	13	0	0	5.304	5.317
Pinang	53	0	70	0	123
Vanili	0	0	0	0	0
Jambu Mete	917	0	0	0	917
Lada	2	0	0	0	2
Kapuk Randu	68	0	2	0	70
Cengkeh	0	0	7	0	7

*Kawasan peruntukkan perkebunan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka")

2.2.3.5 Peternakan

Tabel 2.120 menunjukkan populasi ternak dan unggas di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022. Berdasarkan Tabel 2.120 diketahui bahwa populasi ternak dan unggas yang paling banyak di Provinsi Papua Selatan tahun 2022 adalah ayam kampung (2,13 juta ekor), itik (47.470 ekor), sapi (44.460 ekor), dan babi (15.140 ekor). Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang paling banyak terdapat ternak dan unggas adalah Kabupaten Merauke, sedang 3 (tiga) kabupaten lainnya (terutama Kabupaten Asmat) relatif memiliki ternak yang sedikit dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Tabel 2. 120 Populasi Ternak dan Unggas (ekor) di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Komoditas	Merauke*	Boven Digoel*	Mappi*	Asmat	Papua Selatan
Sapi	43.220	878	60	302	44.460
Kerbau	661	0	0	0	661
Kuda	2.902	35	0	0	2.937
Babi	13.547	1.153	130	310	15.140

Domba	15.835	6.332	3.151	2.205	27.523
Ayam Kampung	2.075.619	12.440	33.617	8.455	2.130.131
Itik	41.923	1.890	1.952	1.705	47.470

*Kawasan peruntukkan peternakan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Dalam Angka")

Tabel 2.121 menunjukkan produksi daging ternak/unggas dan telur di Provinsi Papua Selatan tahun 2022. Berdasarkan Tabel 2.121 diketahui bahwa ayam kampung merupakan komoditas peternakan yang paling banyak memenuhi konsumsi daging di Provinsi Papua Selatan yaitu 3,57-ton daging dan 2,87 butir telur. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, terdapat variasi produksi daging antar kabupaten yang mencerminkan preverensi peternak dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi hewani. Dalam hal ini, terdapat pola produksi dagingyang berbeda terjadi di Kabupaten Boven Digoel dengan adanya mayoritas produksi daging babi (53,03 ton) dibandingkan dengan daging sapi (53,01 ton) dan daging ayam (20,88 ton).

Tabel 2. 121 Produksi Daging Ternak dan Telur Unggas di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

Komoditas	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
DAGING (KG)					
Sapi	702.650	53.010	5.049	3.967	764.676
Kerbau	19.261	0	0	0	19.261
Kuda	17.250	0	0	0	17.250
Kambing/Domba	23.909	3.150	316	89	27.464
Babi	23.096	53.029	24.705	9.480	110.310
Ayam Kampung	3.484.135	20.882	56.430	14.193	3.575.639
Ayam Petelur	144.927	9.755	391	2.927	157.999
Itik	26.408	1.222	1.246	1.125	30.001
TELUR (KG)					
Ayam Kampung	2.793.584	16.743	45.245	11.380	2.866.952
Itik	338.624	12.600	14.297	9.360	374.881

*Kawasan peruntukkan peternakan berdasarkan RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Sumber: BPS Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen "Provinsi Dalam Angka")

2.2.3.6 Kehutanan

Hutan merupakan suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta fisik lingkungannya. Peranan sumber daya hutan didalam lingkup pembangunan daerah adalah sebagai produsen alam yang menghasilkan produk ganda yaitu barang dan jasa. Jenis barang yang dihasilkan oleh sumber daya hutan diantaranya: 1). Komoditas berbagai kayu; 2). komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti kulit, daun, bunga, buah, satwa liar, rotan, dan sebagainya. Sementara dalam aspek jasa, hutan merupakan sarana bagi pengatur air, pencegahan erosi dan banjir, penstabil iklim, dan sebagainya. Berdasarkan SK.6632/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2021, menunjukkan bahwa kawasan di Provinsi Papua Selatan didominasi oleh Hutan Produksi seluas kurang lebih 25.04 persen dari luas total wilayah Provinsi Papua Selatan, dan hampir sebagian kawasan tersebut berada di Kabupaten Boven Digoel. Untuk Kawasan Hutan Lindung, sebaran terbesar berada di Kabupaten Asmat seluas kurang lebih 1,109,997.28 hektar, sedangkan untuk sebaran luas Kawasan Suaka Alam tertinggi berada di Kabupaten Merauke seblaus kurang lebih 1,402,520.76 hektar. Gambar dan tabel berikut ini menunjukkan sebaran luas fungsi kawasan hutan per Kabupaten di Provinsi Papua Selatan

No	Fungsi Kawasan Hutan	Kawasan Hutan per Kabupaten (ha)				Kawasan Hutan Provinsi Papua Selatan	
		Kab. Asmat	Kab. Boven Digoel	Kab. Mappi	Kab. Merauke	Luas (ha)	Luas (%)
1	Area Penggunaan Lain	7,264.75	377,114.36	164,875.46	463,597.47	1,012,852.05	8.59
2	Hutan Lindung	1,109,997.28	84,976.53	228,596.75	265,741.71	1,689,312.26	14.33
3	Hutan Produksi	84,734.95	1,331,097.56	634,823.65	900,563.41	2,951,219.56	25.04
4	Hutan Produksi Konversi	38,150.04	171,348.34	489,674.05	1,237,490.00	1,936,662.43	16.43
5	Hutan Produksi Terbatas	962,339.66	384,002.71	852,305.52	221,257.33	2,419,905.22	20.53
6	KSA/KPA	287,207.97	3,672.17		1,402,520.76	1,693,400.90	14.37
7	KSAL	19.92			7.14	27.06	0.00
8	Perairan	14,269.50	2,067.47	56,021.61	10,147.19	82,505.77	0.70
Luas Total		2,503,984.06	2,354,279.13	2,426,297.05	4,501,325.00	11,785,885.25	100.00

Sumber: Peta RTRW Provinsi Papua, 2013, Data RBI dan Pengolahan Data Tahun 2022

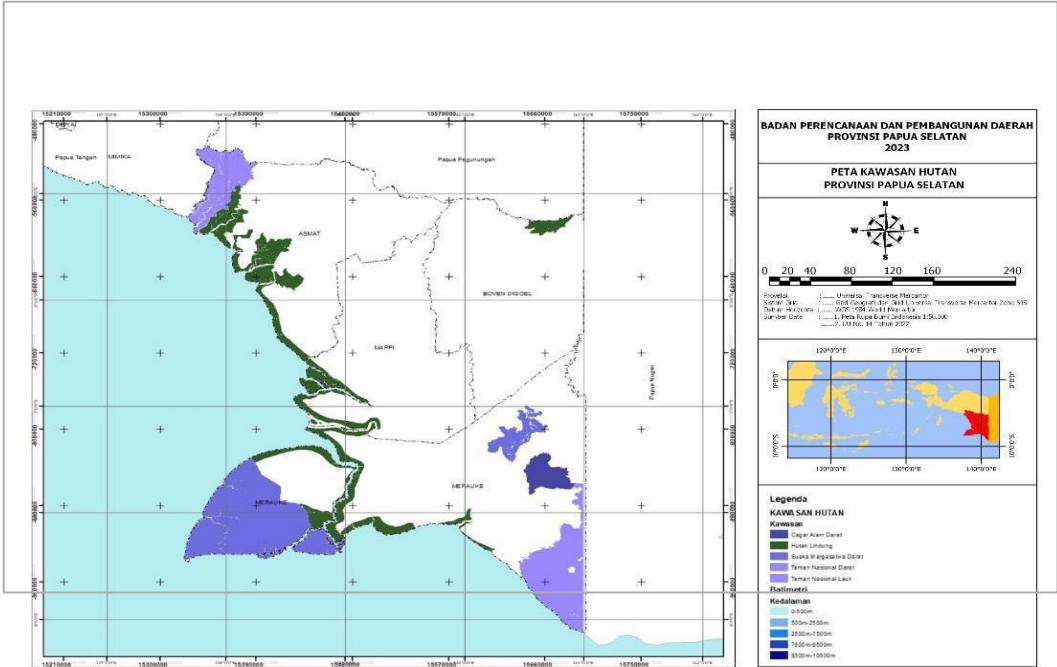
Gambar 2. 81 Peta Kawasan Hutan Provinsi Papua Selatan

2.2.3.7 Energi dan Sumber Daya Mineral

Ketersediaan energi saat ini menjadi salah satu kebutuhan dasar hampir seluruh elemen pembangunan mulai dari kebutuhan rumah tangga, pelayanan masyarakat, pengolahan komoditas industri, hingga distribusi dan pemasaran

barang. Untuk itu ketersediaan energi merupakan hal yang krusial dan wajib terpenuhi bagi setiap daerah. Salah satu indikasi ketersediaan akses terhadap energi adalah penggunaan listrik PLN untuk kebutuhan harian rumah tangga. Penggunaan energi listrik untuk kebutuhan rumah tangga dinilai lebih efisien dibandingkan penggunaan energi bahan bakar. Tabel 2.123 menyajikan data sumber penerangan utama rumah tangga Kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Data menunjukkan mayoritas sumber penerangan telah menggunakan energi listrik baik PLN maupun non-PLN. Terlihat pula jumlah yang cukup signifikan pada penggunaan sumber penerangan bukan bersumber dari listrik. Kabupaten Asmat tercatat sebagai kabupaten dengan sumber penerangan utama non listrik terbesar di Provinsi Papua Selatan.

Tabel 2. 122 Persentase Rumah Tangga berdasarkan Sumber Penerangan Utama 2020-2022



Kabupaten	2020			2021			2022		
	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik	Listrik PLN	Listrik Non-PLN	Bukan Listrik
Merauke	87,76	6,50	5,73	89,36	4,87	5,76	90,54	1,68	7,78
Boven Digoel	53,09	36,92	10,00	42,93	35,65	21,43	45,70	39,01	15,30
Mappi	21,66	53,23	25,11	26,55	62,83	10,62	32,99	55,03	11,97
Asmat	18,65	40,97	40,38	21,75	20,76	57,49	23,44	17,99	58,56
Rata-rata	45,29	34,41	20,31	45,15	31,03	23,83	48,17	28,43	23,40

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022

Kebutuhan energi dalam skala rumah tangga lainnya yang perlu diperhatikan adalah sumber energi atau sumber bahan bakar yang digunakan untuk memasak. Sebagian besar rumah tangga di Provinsi Papua Selatan masih banyak yang menggunakan bahan bakar kayu (58,98%)dan minyak tanah (38,08%). Kabupaten dengan pengguna minyak tanah mayoritas berada di Kabupaten Boven Digoel dan Merauke, sementara bahan bakar memasak kayu masih sangat mayoritas digunakan di Kabupaten Mappi dan Asmat.

Tabel 2. 123 Persentase Distribusi Rumah Tangga Menurut Kabupaten dan Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Provinsi Papua Selatan 2022

Kabupaten	Listrik	Gas/Elpiji	Minyak Tanah	Arang/Briket	Kayu	Lainnya
Merauke	0,38	5,35	68,3	0,2	25,55	0,22
Boven Digoel	4,18	7,69	49,37	0	45,6	0
Mappi	0,21	0	16,19	0	83,61	0
Asmat	0	0,37	18,46	0	81,17	0
Rata-rata	1,19	3,35	38,08	0,05	58,98	0,06

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2022

2.2.3.8 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan bentuk kapitalisasi faktor dan sistem produksi yang memutar pergerakan roda ekonomi. Semakin besar modal yang digunakan, semakin besar dan kompleks pula skala industri yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan harapan efisiensi pada penggunaan faktor-faktor ekonomi. Peningkatan sektor ekonomi harus mendukung pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Semakin panjang rantai produksi yang dilakukan secara lokal, semakin besar pula dampak pertambahan nilai ekonomi yang dirasakan oleh daerah. Pengembangan industri juga harus memerhatikan kelestarian alam dengan tidak bersifat ekstraktif, serta menggunakan sumber energi terbarukan. Pengolahan limbah industri juga perlu diperhatikan secara ketat agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

Tabel 2.125 memperlihatkan jumlah perusahaan, pekerja, nilai investasi dan produksi yang dihasilkan oleh industri besar dan sedang di tiap Kabupaten Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke dan Boven Digoel memiliki jumlah industri yang sama. Namun demikian besarnya investasi, jumlah pekerja, dan nilai produksi yang dimiliki oleh Industri di Boven Digoel jauh lebih besar dibandingkan Industri di Merauke.

Tabel 2. 124 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Papua

Kabupaten	Jumlah Industri	Jumlah pekerja	Investasi (ribu rupiah)	Nilai Produksi (ribu rupiah)
Merauke	2	110	n.a.	34.256.269
Boven Digoel	2	2.732	9.986.204	8.359.138.442
Papua Selatan	4	2.842	9.986.204	8.393.394.711

Sumber: Provinsi Papua Dalam Angka 2023

Tabel 2.126 menyajikan data jumlah industri mikro menurut kabupaten dan modal usaha di Provinsi Papua Selatan. Kabupaten Merauke memiliki jumlah usaha paling tinggi dengan Kabupaten Asmat dengan jumlah usaha yang paling sedikit. Sebagian besar usaha berasal dari modal yang dimiliki sendiri. Kabupaten Merauke memiliki industri dengan modal usaha non- milik sendiri terbanyak di Provinsi Papua Selatan. Hal ini menunjukkan tingkatan kerja sama modal industri di Kabupaten Merauke lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya.

Tabel 2. 125 Jumlah Industri Mikro dan Kecil Berdasarkan Sumber Modal Usaha di Papua Selatan, 2020

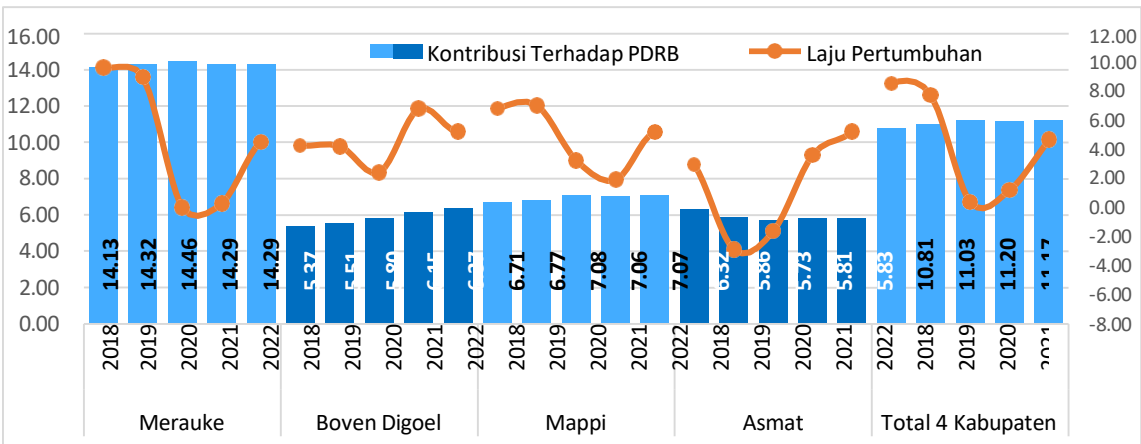
Kabupaten	Banyaknya Usaha	Sepenuhnya Milik Sendiri	Sumber Modal Utama Lainnya					Tenaga Kerja
			Bank	Koperasi	Perorangan	Program Pemerintah	Lainnya	
Merauke	1572	1312	193	1	15	27	24	3313
Boven Digoel	289	269	20	20				512
Mappi	446	404	42	34		8		667
Asmat	61	59	2	2				85
Papua Selatan	2368	2044	257	57	15	35	24	4577

Sumber: Profil Industri Mikro dan Kecil Papua Tahun 2020

2.2.3.9 Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB secara umum mengalami tren yang cenderung meningkat dari 10,81% pada tahun 2018 menjadi 11,24% pada tahun 2022 (lihat Gambar 2.82 dan Tabel 2.127). Meskipun demikian, laju pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan dari 8,54 % pada tahun 2018 menjadi 4,69% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pengembangan sektor perdagangan di Provinsi Papua Selatan meskipun terdapat potensi perdagangan yang sangat besar.

Gambar 2. 82 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2019-2023

Tabel 2. 126 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan di 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

Kabupaten	Kontribusi Terhadap PDRB Kabupaten					Laju Pertumbuhan				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	14,13	14,32	14,46	14,29	14,29	9,68	9,01	0,03	0,30	4,54
Boven Digoel	5,37	5,51	5,80	6,15	6,37	4,27	4,24	2,44	6,84	5,24
Mappi	6,71	6,77	7,08	7,06	7,07	6,82	7,06	3,28	1,93	5,22

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Berdasarkan Tabel 2.129 diketahui rata-rata pengeluaran per kapita 4 Kabupaten di Provinsi Papua Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional. Pengeluaran per kapita penduduk di Provinsi Papua Selatan mengalami trend peningkatan dari rata-rata 7,70 juta rupiah pada 2018 menjadi 7,73 juta pada tahun 2022.

Tabel 2. 128 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022
Merauke	10.430	10.498	10.097	10.201	10.424
Boven Digoel	8.211	8.300	7.947	7.864	8.086
Mappi	6.268	6.513	6.353	6.327	6.550
Asmat	5.882	6.066	5.733	5.736	5.860
Rata-rata 4 Kabupaten	7.698	7.844	7.533	7.532	7.730
Nasional	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023

Apabila meninjau kondisi Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, wilayah yang memiliki pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kabupaten Merauke (10,42 juta rupiah). Adapun wilayah dengan pengeluaran per kapita yang paling rendah di Papua Selatan adalah Kabupaten Asmat (5,86 juta rupiah) dan Kabupaten Mappi (6,55 juta rupiah).

2.3.1.2 Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan

Perubahan pendapatan dan kapasitas ekonomi masyarakat akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Pola pengeluaran merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan (ekonomi) penduduk. Seperti yang dikatakan pada hukum Engle bahwa akan terjadi sebuah pergeseran dari proporsi pengeluaran konsumen untuk produk makanan saat pendapatan meningkat, artinya pada titikdimana pemenuhan kebutuhan makanan sudah tercukupi saat pendapatan meningkat maka peningkatan pendapatan

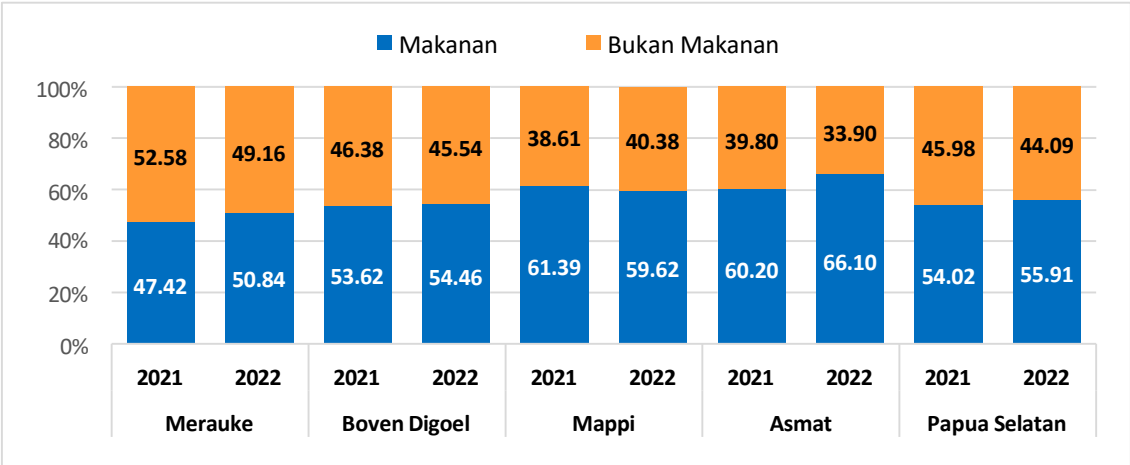
tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau disimpan sebagai tabungan/investasi.

Tabel 2. 129 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2022

Kabupaten	Satuan	Konsumsi Makanan		Konsumsi Bukan Makanan		Jumlah	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Merauke	Rupiah	751.944	900.434	833.790	870.530	1.585.734	1.770.965
	%	47,42	50,84	52,58	49,16	100,00	100,00
Boven Digoel	Rupiah	553.790	587.152	478.935	490.961	1.032.725	1.078.113
	%	53,62	54,46	46,38	45,54	100,00	100,00
Mappi	Rupiah	409.437	503.458	257.548	340.943	666.984	844.401
	%	61,39	59,62	38,61	40,38	100,00	100,00
Asmat	Rupiah	619.718	581.727	409.723	298.343	1.029.441	880.071
	%	60,20	66,10	39,80	33,90	100,00	100,00
Rata-rata 4 Kabupaten	Rupiah	2.888.679	3.159.923	2.458.931	2.491.738	5.347.609	5.651.663
	%	54,02	55,91	45,98	44,09	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka 2023”)

Gambar 2. 84 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021-2022



Sumber: BPS Provinsi Papua, 2023 (dalam dokumen “Provinsi Papua Dalam Angka 2023”)

Gambar 2.84 menampilkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Papua Selatan. Secara umum, terdapat penurunan kapasitas masyarakat Papua

Selatan untuk dapat mengkonsumsi kebutuhan non-makanan dari 45,98% pada tahun 2021 menjadi 44,09% pada tahun 2022. Apabila ditinjau berdasarkan wilayah, kabupaten dengan persentase pengeluaran konsumsi makanan tertinggi adalah Kabupaten Asmat (tahun 2022: 66,10%), sedangkan kabupaten dengan konsumsi makanan terendah adalah Kabupaten Merauke (tahun 2022: 50,84%). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat di Kabupaten Merauke telah memiliki kapasitas ekonomi / pendapatan yang lebih besar untuk membeli kebutuhan non-pangan, sedangkan masyarakat Kabupaten Asmat masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja menjadi salah satu faktor yang menentukan daya saing wilayah Provinsi Papua Selatan. Apabila tenaga kerja suatu daerah berkualitas dan berpendidikan tinggi, maka tingkat produktifitas tenaga kerja akan semakin membaik. Diketahui bahwa mayoritas angkatan kerja di Provinsi Papua Selatan memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah (tidak/belum tamat SD/memiliki ijazah SD) yaitu sebesar 51,39% atau 134.089 orang. Dari 134.089 orang tersebut, sebanyak 131.502 orang atau 98,07% telah bekerja. Angkatan kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi (Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas) tergolong rendah yaitu sebesar 10,67% atau 27.844 orang angkatan kerja. Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki proporsi angkatan kerja

berpendidikan tinggi terbesar adalah Kabupaten Merauke yaitu sebesar 12,16% atau 15.459 jiwa. Adapun kabupaten dengan angkatan kerja berpendidikan tinggi paling sedikit adalah Kabupaten Mappi yaitu hanya mencapai 6,79% atau 2.819 orang angkatan kerja.

Tabel 2. 130 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021

Wilayah	Kategori	Tidak/Belum Tamat SD/SD	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Diploma I/II/III/ Akademi/ Universitas	Jumlah
Merauke	Bekerja	52.282	23.153	34.106	14.850	124.391
	Pengangguran	824	117	1.236	609	2.786
	Jumlah	53.106	23.270	35.342	15.459	127.177
	%	41,76	18,30	27,79	12,16	100,00
Boven	Bekerja	16.372	5.520	10.206	3.771	35.869
	Pengangguran	636	298	1.401	255	2.590
	Jumlah	17.008	5.818	11.607	4.026	38.459

Digoel	%	44,22	15,13	30,18	10,47	100,00
	Bekerja	24.475	4.221	8.314	2.819	39.829
Mappi	Pengangguran	1.067	254	386	0	1.707
	Jumlah	25.542	4.475	8.700	2.819	41.536
Wilayah	Kategori	Tidak/Belum Tamat SD/SD	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Diploma I/II/III/Akademi/Universitas	Jumlah
	%	61,49	10,77	20,95	6,79	100,00
	Bekerja	38.373	4.050	5.551	5.540	53.514
	Pengangguran	60	0	180	0	240
Asmat	Jumlah	38.433	4.050	5.731	5.540	53.754
	%	71,50	7,53	10,66	10,31	100,00
	Bekerja	131.502	36.944	58.177	26.980	253.603
Papua Selatan	Pengangguran	2.587	669	3.203	864	7.323
	Jumlah	134.089	37.613	61.380	27.844	260.926
	%	51,39	14,42	23,52	10,67	100,00

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2022 (dalam dokumen "Kabupaten Dalam Angka 2022")

2.3.2.2 Kapasitas Aparatur Pemerintah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintahan yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal tersebut sesuai dengan tugas aparatur pemerintahan yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan tertentu. Untuk dapat menjalankan tugs-tugas dimaksud maka

setiap aparatur harus memiliki manajemen yang baik, yaitu manajemen yang dapat memperbandingkan (merit system) antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan yang dimiliki oleh calon pejabat pada saat rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi jabatan. Kebijakan pembangunan kepegawaian daerah diarahkan pada penyiapan ketersediaan sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional di semua instansi dengan menata keseimbangan jumlah aparatur dengan beban kerja di setiap satuan kerja pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur melalui pengelolaan sumber daya aparatur berdasarkan standar kompetensi.

Tabel 2. 131 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2022

	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Jumlah 4 Kabupaten
--	---------	--------------	-------	-------	--------------------

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Sekolah Dasar (SD)	43	0,83	21	0,86	104	3,46	108	4,03	276	2,08
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	114	2,20	21	0,86	148	4,92	672	25,07	955	7,18
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1.407	27,19	687	28,21	935	31,07	57	2,13	3.086	23,20
Diploma I, II, III	1.038	20,06	488	20,04	690	22,93	576	21,49	2.792	20,99
S1, S2, S3	2.573	49,72	1.218	50,02	1.132	37,62	1.267	47,28	6.190	46,54
Jumlah	5.175	100,00	2.435	100,00	3.009	100,00	2.680	100,00	13.299	100,00

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023 (dalam dokumen “Kabupaten Dalam Angka 2023”)

Pada tahun 2022, total jumlah aparatur sipil negara di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan sebanyak13.299 personil. Berdasarkan Tabel 2.132, dapat dilihat bahwa mayoritas aparatur sipil negara merupakan lulusan sarjana / magister / doktoral (46,54% atau 6.190 personil). Namun, masih terdapat personil yang belum mendapatkan kualifikasi pendidikan di perguruan tinggi (sebanyak 2,08% atau 276 personil kelulusan SD/ sederajat, 7,18% atau 955 personil kelulusan SMP/ sederajat, dan 23,20% atau 3.086 personil kelulusan SMA/ sederajat). Diharapkan, pada masa mendatang kualitas pendidikanaparatur di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan, dikarenakan kapasitas SDM merupakan aspek penting dalam optimalisasi pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah ke depannya diharapkan dapat mendukung pengembangan kapasitas, baik dalam bentuk pendidikan formal, maupun dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi kepada aparaturnya.

2.3.2.3 Rasio Ketergantungan

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting karena semakin tinggi persentase dependency ratio, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2. 132 Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020

Kategori	Merauke	Boven Digoel	Mappi	Asmat	Papua Selatan
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur:					

0-4	35.260	12.311	19.240	27.745	94.556
5-9	26.640	9.672	17.073	14.251	67.636
10-14	19.076	5.208	11.360	10.699	46.343
15-19	15.334	4.055	8.226	8.796	36.411
20-24	18.138	4.904	7.832	7.445	38.319
25-29	17.606	4.734	7.635	7.373	37.348
30-34	17.996	5.510	7.855	7.676	39.037
35-39	17.787	4.696	6.909	6.422	35.814
40-44	13.599	3.718	5.882	5.995	29.194
45-49	12.482	3.338	4.591	4.228	24.639
50-54	9.282	2.155	3.549	3.630	18.616
55-59	9.158	1.733	2.972	2.343	16.206
60-64	6.345	948	2.012	1.602	10.907
65-69	5.163	693	1.474	946	8.276
70-74	3.326	333	884	523	5.066
75+	3.740	277	801	431	5.249
Penduduk Usia Belum Produktif (<15 tahun)	80.976	27.191	47.673	52.695	208.535
Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	137.727	35.791	57.463	55.510	286.491
Penduduk Usia Tidak Produktif (≥65 tahun)	12.229	1.303	3.159	1.900	18.591
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	67,67	79,61	88,46	98,35	79,28

Sumber: BPS Kabupaten di Provinsi Papua Selatan, 2023

Tabel 2.133 menunjukkan rasio ketergantungan Provinsi Papua Selatan dan setiap kabupaten di Papua Selatan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan Papua Selatan sangat tinggi yaitu sebesar 79,28. Tingginya rasio ketergantungan ini disebabkan karena tingginya penduduk usia belum produktif (< 15 tahun) dan tingginya angka kelahiran di Provinsi Papua Selatan. Apabila meninjau berdasarkan kabupaten, wilayah yang memiliki rasio ketergantungan paling tinggi di Papua Selatan adalah Kabupaten Asmat (98,35) dan Mappi (88,46). Adapun wilayah yang memiliki rasio ketergantungan paling rendah di Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke (67,67) dan Boven Digoel (79,61). Tingginya rasio ketergantungan di Provinsi Papua Selatan menunjukkan

terbatasnya keleluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri, seperti untuk mengakses pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, maupun akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Hal ini disebabkan karena penduduk usia produktif di Provinsi Papua Selatan perlu membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi

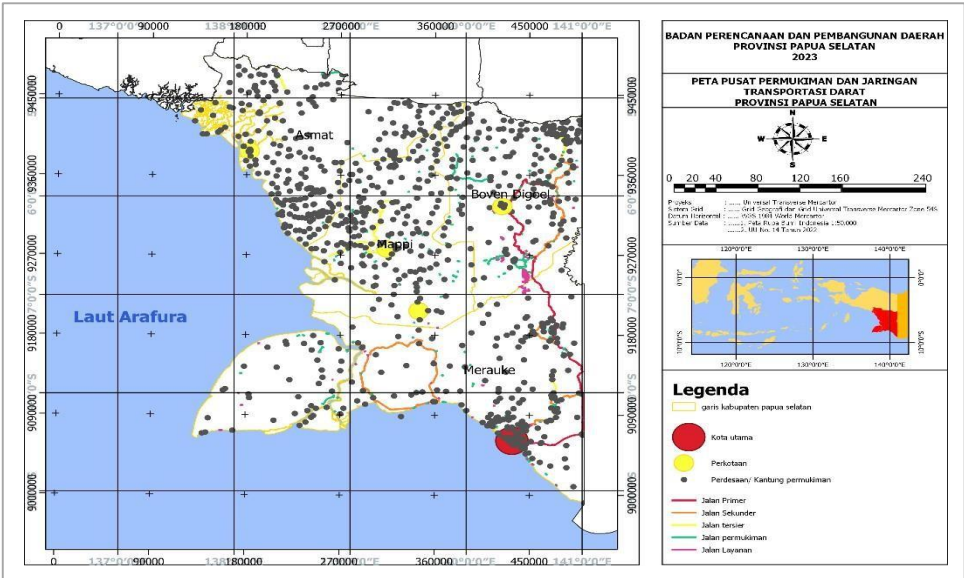
2.3.3 Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Sarana Transportasi

Sarana Transportasi khususnya jaringan infrastruktur jalan berfungsi untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial dalam hal perpindahan orang dan barang. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan memberikan efisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu, maupun risiko perjalanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi antara lain mudahnya perpindahan orang, meningkatnya frekuensi pengiriman

barang, barang lebih murah dan mudah didapatkan, serta mendorong aktivitas pada umumnya untuk lebih mudah dan sering dilakukan. Hal-hal ini merupakan faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya pembangunan.

Gambar 2. 85 Peta Pusat Permukiman dan jaringan Transportasi Darat Provinsi Papua Selatan



Sumber: Data OpenStreetMap dan Hasil Analisis, 2023

Dalam pelayanan skala wilayah, infrastruktur transportasi menghubungkan pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan. Pusat-pusat aktivitas ini merupakan bentuk lokasi strategis tempat terjadinya fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa sesuai skala aktivitas ekonomi yang bersangkutan, mulai dari skala rumah tangga hingga nasional. Pusat- pusat aktivitas ini harus terhubung satu sama lainnya untuk menjamin keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih luas sehingga aktivitas sosial ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi. Pada Gambar 2.85 ditampilkan pusat-pusat aktivitas di Papua Selatan beserta infrastruktur darat yang menghubungkan pusat-pusat tersebut. Data pusat- pusat aktivitas yang berasal dari sumber terbuka OpenStreetMap

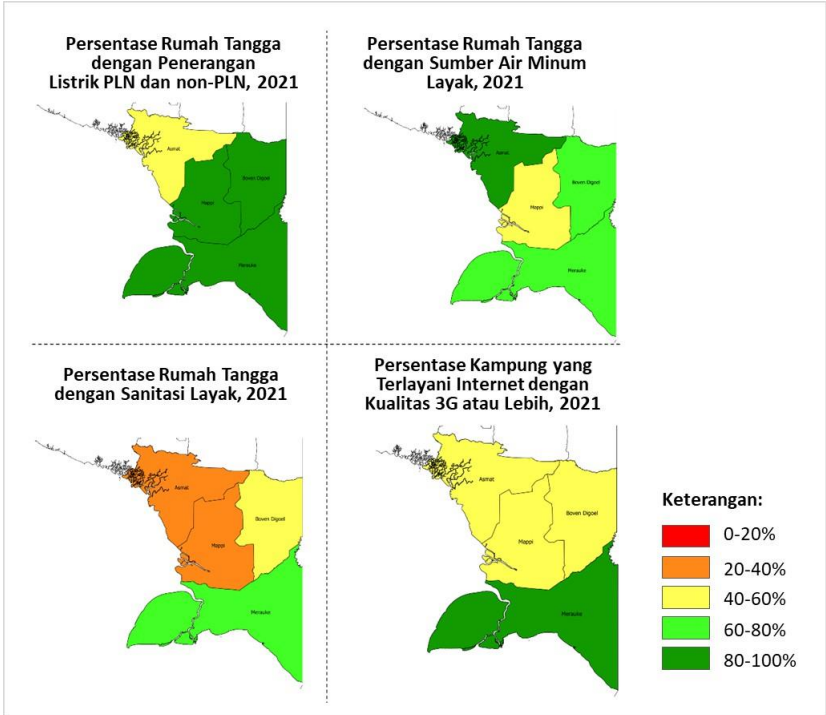
menunjukkan Merauke sebagai kota utama di Provinsi Papua Selatan secara langsung terhubung dengan pusat Kabupaten Boven Digoel melalui jaringan transportasi darat. Pusat Kabupaten Mappi dan Asmat belum terhubung secara langsung dengan pusat aktivitas kabupaten lainnya melalui jalur darat. Sementara itu pusat aktivitas kabupaten ini terhubung dengan permukiman- permukiman kecil di sekitarnya melalui jaringan jalan sekunder dan tersier. Sementara itu untuk menghubungkan antar perdesaan atau permukiman sudah terdapat beberapa wilayahyang terlayani jalan permukiman walaupun sebagian besar belum terlayani fasilitas tersebut.

2.3.3.2 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, dan akses internet merupakan indikator dasar yang menjadi tolak ukur daya saing daerah. Dalam Gambar 2.86 tersaji persentase rumah tangga tiap kabupaten yang memiliki akses terhadap fasilitas tersebut. Untuk akses terhadap listrik, hampir seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap listrik (>80%), hanya kabupaten Asmat yang masih terkendala pada akses listrik (40-60%). Untuk akses sumber air minum layak, kabupaten Asmat

meraih persentase tertinggi, rumah tangga di Merauke dan Boven Digoel terlayani 60-80% dan Kabupaten Mappi sudah terlayani 40-60%. Rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak tertinggi pada Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel 40-60%, Kabupaten Asmat dan Mappi relatif masih sedikit akses ke sanitasi layak yaitu sekitar 20-40%. Untuk akses terhadap informasi melalui internet, Kabupaten Merauke terlayani lebih dari 80%, sementara kabupaten lainnya rata-rata terlayani 40-60%.

Gambar 2. 86 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet Provinsi Papua Selatan, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Provinsi Papua Selatan 2023, data diolah

2.3.3.3 Fokus Daya Saing Iklim Investasi

Sejalan dengan kebijakan percepatan pembangunan di Papua, kegiatan investasi perlu ditingkatkan dengan mengembangkan potensi wilayah, meliputi sumber daya alam dengan kandungan minyak dan gas, kandungan mineral logam, sumber daya hutan dan perairan, pengembangan pertanian dan agribisnis, serta potensi pariwisata yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian

daerah dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu diperhatikan adalah kelembagaan yang ramah dunia usaha. Pencapaian nilai tambah pada komponen investasi diantaranya dipengaruhi oleh pembenahan sarana infrastruktur, pengurusan perizinan usaha, kepastian hukum dan kondisi keamanan suatu daerah. Agar daya saing iklim investasi di Papua Selatan tinggi diperlukan IDSDB (Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan) yang meliputi 4 pilar yakni lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola berkelanjutan. Keempat pilar ini cenderung masih rendah di wilayah Papua Selatan. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan

infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumberdaya manusia (SDM). Tanpa itu, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang. Pemerintah perlu melakukan

upaya pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan SDM secara tepat dan berkelanjutan, dengan alokasi anggaran yang memadai.

Tingkat daya saing investasi menjadi salah satu parameter yang memperlihatkan iklim investasi suatu daerah. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin kondusif pula iklim investasi yang tercipta yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintahan. Indeks Daya Saing Investasi merupakan alat ukur yang tepat dan saat ini banyak dimanfaatkan sebagai acuan bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Penyusunan Indeks Daya Saing ini diharapkan dapat mendorong kompetisi antar daerah dalam meningkatkan daya saing investasinya, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dan menjadi pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi.

Permasalahan yang terjadi di Papua Selatan (pada pilar ekonomi berkelanjutan) adalah kendala teknis dan kualitas SDM pada proses perizinan, etos kerja yang rendah, hingga sulitnya berinvestasi di Papua Selatan. Proses perizinan melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) di Provinsi ini, masih terkendala lemahnya jaringan internet dan rendahnya kualitas SDM dimana tim teknis masih belum paham terkait tupoksinya sehingga persyaratan perizinan dilimpahkan ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Yang kedua, etos kerja masyarakat masih rendah, sehingga perusahaan besar di Papua Selatan cenderung menggunakan tenaga kerja dari luar Papua Selatan. Terakhir, masalah sengketa tanah/hak ulayat adat yang menjadi salah satu penyebab rendahnya investasi di wilayah ini akibat kendala persengketaan lahan dan resolusi konflik yang tidak solutif.

Indonesia adalah negara yang berisiko tinggi terhadap perubahan iklim dan sekaligus berkontribusi besar terhadapnya. Energi sebagai salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam emisi total Indonesia. Diperlukan perubahan secara urgent untuk mengurangi risiko terhadap Indonesia dan juga dunia. Papua Selatan

sebagai salah satu bagian dari Indonesia mempunyai peranan penting untuk berkontribusi dalam menurunkan emisi total Indonesia, sebagai bagian dari aspek pelayanan umum terkait energi dan sumber daya mineral. Hal ini berhubungan erat juga dengan aspek daya saing daerah Papua Selatan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Indonesia berpotensi menyumbang EBT (Energi Baru Terbarukan) angin dan tata surya kedua tertinggi di dunia melalui energi angin air. Wilayah Papua sebagai salah satu wilayah di Indonesia penyumbang energi angin terbesar, oleh sebab itu sangat penting meningkatkan daya saing Papua agar bisa dapat bersaing secara global. Beberapa aspek dan indikator kerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Papua perlu dikuatkan sebagai faktor kuat aspek daya saing daerah Papua Selatan. Beberapa aspek daya saing daerah yang diperlukan untuk Papua selatan di antaranya pengeluaran konsumsi rumah tangga, daya beli petani, produktivitas total daerah, tingkat ketergantungan penduduk, angkatan kerja yang berpendidikan tinggi, bank dan lembaga keuangan, kondisi

politik dan keamanan, serta realisasi investasi PMDN dan PMA.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang merupakan rasio antara tambahan output dengan tambahan modal dapat dijadikan suatu indikator penentu keberhasilan dalam meningkatkan daya saing investasi. Dengan adanya indikator ini, para penyusun rencana pembangunan ekonomi bisa mengetahui berapa investasi yang diperlukan agar ekonomi tumbuh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pakar ekonomi biasanya menggunakan nilai ICOR moderat antara 2² 4 poin sebagai indikasi iklim investasi di suatu wilayah dalam kondisi yang menguntungkan.

Tabel 2. 133 Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022* *	Rata-rata 2018-2022
1	PDRB ADHK 2010 (Triliun Rp)	16,03	16,99	16,79	17,04	17,74	16,92
2	Perubahan PDRB ADHK 2010 (Triliun Rp)	1,01	0,96	(0,2)	0,25	0,7	0,54
3	PMTB ADHK 2010 (Triliun Rp)	5,17	5,46	5,43	5,85	6,14	5,61
4	ICOR	5,14	5,72	(27,48)	23,3	10,34	10,34

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Selatan Menurut Pengeluaran 2018-2022

Rata-rata nilai ICOR Provinsi Papua periode 2018-2022 adalah sebesar 3,09 per tahun. Nilai ICOR ini bermakna untuk meningkatkan PDRB Papua sebesar 1 rupiah diperlukan investasi per tahun rata-rata sebesar 10,34 rupiah. Nilai ICOR tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 23,30 dan terendah di tahun 2018 sebesar 5,14. Pada Tahun 2020, nilai ICOR bernilainegatif berarti investasi belum efisien ditahun ini.

Tabel 2. 134 Rencana dan Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Papua Selatan 2014-2016

Kabupaten /Kota	Tahun		Jumlah Proyek PMDN (buah)	Jumlah Proyek PMA (buah)	Nilai Investasi PMDN (Rp juta)	Nilai InvestasiPMA (Rp juta)	Jumlah TK PMDN (orang Ind)	Jumlah TK PMA(orang Ind)
Merauke	2014	Rencana			110323064	110323064	67352	72307
		Realisasi	7	7	5569126	5569126	2975	10898
	2015	Rencana			109642864	2371904	64847	77267
		Realisasi	19	20	9744297	4804568	1026	11889
	2016	Rencana			109672864	2531850	65047	77267
		Realisasi	20	21	12038298	11735521	1990	11889
Asmat	2014	Rencana	-	-	5218	5218	50	-
		Realisasi	-	-	-	-	-	-
	2015	Rencana	-	-	5218	0	50	-
		Realisasi	1	-	0	0	-	-
	2016	Rencana	-	-	5218	-	-	-
		Realisasi	1	-	-	-	-	-

Mappi	2014	Rencana	-	-	20358826	20358826	23027	-
		Realisasi	1	1	62500	62500	1	-
	2015	Rencana	-	-	20358826	0	23027	-
		Realisasi	7	0	125000	0	2	-
	2016	Rencana	-	-	20358826	-	23027	-
		Realisasi	7	-	125000	-	2	-
Boven Digoel	2014	Rencana	-	-	1441065	1441065	11106	7685
		Realisasi	3	3	1315109	1315109	2387	1502
	2015	Rencana	-	-	1441065	954400	11106	7685
		Realisasi	6	7	7047540	457944	2472	1458
	2016	Rencana	-	-	1441066	954400	11106	7685
		Realisasi	6	7	8293921	429084	2496	1458

Sumber: Papua.bps.go.id
Tabel 2. 135 Rencana dan Realisasi PMDN dan PMA di Provinsi Papua Tahun 2011-2023

Tahun		Jumlah Proyek PMDN (buah)	Jumlah Proyek PMA (buah)	Nilai Investasi PMDN (Rp juta)	Nilai Investasi PMA (Rp juta)	Jumlah TKPMDN (orang Ind)	Jumlah TK PMA(orang Ind)
2011	Rencana			62331309,00	5440764,00	50530	114526
	Realisasi	30	79	3263477,00	8596401,00	12400	20131
2012	Rencana			138398402,00	7008568,00	92843	123870
	Realisasi	42	87	8353523,00	11120015,00	11113	33887
2013	Rencana			167194544,00	9358965,00	158564	138320
	Realisasi	65	95	10679551,00	18545113,00	40992	34281
2014	Rencana			173144314,00	10908658,00	408954	139895
	Realisasi	78	403	19437376,00	29563670,00	42091	36405
2015	Rencana			172477114,00	14022236,00	406653	144931
	Realisasi	78	108	46650707,00	47393235,00	14735	39886
2016	Rencana			183760084,00	13122953,00	427058	136523
	Realisasi	84	122	59483954,00	70378818,00	14823	62386
2017	Rencana			172474114,00	18286750,00	427261	144069
	Realisasi	78	125	46650707,00	71314128,00	15363	61625
2018	Rencana			183760084,00	13133953,00		427058
	Realisasi	87	146	10462000,00	1132270,00		14823
2019	Rencana			43754633,00	13923695,00	868870	
	Realisasi	104	146	149034958,00	2912243514,00	44469	
2020	Rencana			2722182,50	567671,30		

Sumber: Provinsi Papua dalam Angka 2023

No	Sektor Ekonomi	Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN)	Penanaman ModalAsing (PMA)
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	51	50
2	Kehutanan	9	19
3	Pertambangan	1	16
4	Industri Makanan	-	31
5	Industri Kayu	4	19
6	Indusri Karet dan Plastik	1	-
7	Listrik, Gas, dan Air	17	2

8	Konstruksi	19	-
9	Perdagangan dan Reparasi	139	7

Tabel 2. 136 Jumlah Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Papua, 2023

Sumber:Provinsi Papua dalam angka 2023

Tabel 2. 137 Rencana dan Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Papua, 2023

No.	Sektor Ekonomi	Penanaman Modal DalamNegeri (PMDN)		Penanaman Modal Asing(PMA)	
		Rencana Target	Realisasi	Rencana Target	Realisasi
1	Tanaman Pangan, Perkebunan,dan Peternakan		165.791,70		34.333,10
2	Kehutanan		193,10		
3	Pertambangan				514.011,10
4	Industri Makanan				16.230,00
5	Industri Kayu		65.828,50		961,40
6	Indusri Karet dan Plastik				
7	Listrik, Gas, dan Air		2.006.937,80		0,40
8	Konstruksi		29.750,00		
9	Perdagangan dan Reparasi		67.232,60		1.220,70
10	Hotel dan Restoran				216,00
11	Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi		385.684,30		
12	Perumahan, KawasanIndustri,dan Perkantoran		16,00		
13	Jasa Lainnya		748,50		698,60

Sumber: Provinsi Papua dalam Angka 2023

A. Ketentraman dan Perlindungan umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Perlindungan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentraman dan ketertiban umum, karena mencakup persiapan dan pembekalan masyarakat dalam penanganan bencana, maupun keikutsertaan dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berikut merupakan tabel mengenai jumlah kejahatan yang terjadi dan persentase penyelesaian kejahatan atau tindak pidana di Provinsi Papua Selatan selama tahun 2020-2022.

Tabel 2. 138 Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2022

Kabupaten	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
	2020	2021	2022
Merauke	503	385	808
Boven Digoel	127	185	89
Mappi	127	109	61
Asmat	23	40	8
Papua Selatan	780	719	966

Sumber : BPS Provinsi Papua 2023

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kejahatan yang terjadi di kabupaten yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua Selatan mengalami penurunan dari tahun 2021. Kejahatan yang terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 719 kasus namun meningkat pada tahun 2022 hingga 966 kasus dengan daerah yang memiliki kasus tertinggi yaitu Kabupaten Merauke sebanyak 808 kasus dan terendah berada di Kabupaten Asmat yang hanya 8 kasus.

Tabel 2. 139 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana menurut Kabupaten di Provinsi Papua Selatan Tahun 2020-2022 (%)

Kabupaten	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
	2020	2021	2022
Merauke	39,76	41,30	22,50
Boven Digoel	10,24	4,32	2,50
Mappi	31,50	33,03	1,70
Asmat	21,74	57,50	0,20
Papua Selatan	25,81	34,04	6,73

Sumber : BPS Provinsi Papua 2023

Persentase penyelesaian kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pihak berwajib diantaranya kepolisian dan satpol pp pada tahun 2021 yaitu sebesar 34,04% dan menurun pada tahun 2022 hingga 6,73. Artinya masih tingginya angka kriminalitas yang masih belum dapat ditangani oleh pihak berwajib di Provinsi Papua Selatan.

2.4 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

2.4.1 Hasil Capaian Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

Evaluasi RPJPD merupakan salah satu tahapan penting dalam menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Kurun waktu RPJPD yang akan berakhir pada 2025 diperlukan input atau umpan balik yang berkualitas bagi penyusunan RPJPD 2025-2045. Evaluasi merupakan perumusan faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian kinerja sasaran pokok Pembangunan jangka Panjang daerah. Evaluasi RPJPD ini akan menjadi rekomendasi kebijakan yang strategis dan efektif untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan pencapaian tujuan pembangunan, maka Provinsi Papua Selatan sebagai provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua Induk, melaksanakan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sejak tahun 2022 akhir sampai dengan Tahun 2025. Adapun progress pencapaian pembangunan di Provinsi Papua dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 2. 140 Evaluasi Capaian Indikator Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian KinerjaAwal Periode Perencanaaan (2005)	2011	2018	Capaian Kinerja 2022	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir Periode (2025)	Pertumbuhan /Penurunan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	62,75	55,01	60,06	61,39	63,00	(2,16)
2.	Angka Kemiskinan	40,83	34,11	27,74	26,56	25,00	34,95
3.	Angka Pengangguran	7,31	3,94	3,2	2,83	2,5	61,29
4.	Pertumbuhan Ekonomi	6,21	-4,28	7,32	8,97	6,43-7,58	30,17
5.	Ketimpangan Pendapatan	0,42	0,274	0,384	0,393	0,34-0,39	6,43
6.	PDRB Per Kapita (juta Rp)	23,44	26,08	63,38	59,41	60,00	60,55

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Tabel 2. 141 Target dan Realisasi Indikator Makro Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Target RPJPD Tahun 2025	Target RPJMD tahun 2023	Realisasi 2022	Target 2024	Ket
1	IPM	70	65	61,39	62,10	<
2	% Penduduk Miskin	< 19	20	26,56	25,73-26-28	<
3	Pertumbuhan ekonomi	6,21	5 - 6,5	8.97	6,43-7,58	>
4	PDRB Perkapita tanpa Tambang	> 40	50	36,48	29,95-30,27	<
5	Gini Rasio	-	0,38	0,315	0,34-0,39	>
6	Pengangguran Terbuka	-	2,00	2,83	2,73	<

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Pembangunan daerah menunjukkan kemajuan di beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi. Namun, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti IPM, persentase penduduk miskin, PDRB per kapita tanpa tambang, Gini Rasio, dan pengangguran terbuka.

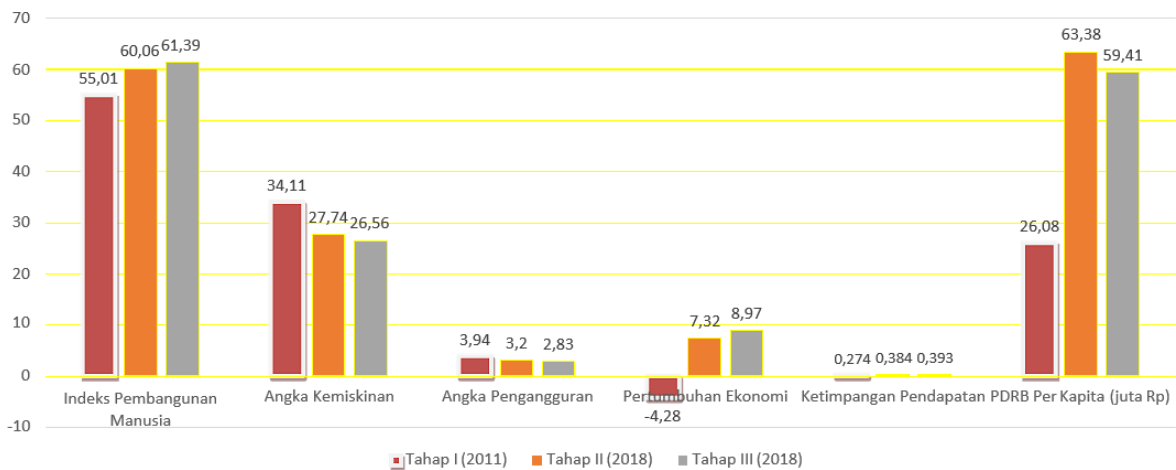
Tabel 2. 142 Capaian Indikator Makro Pembangunan

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	2011	2018	Capaian Kinerja 2022	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir Periode (2025)	Pertumbuhan /Penurunan (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	62,75	55,01	60,06	61,39	63,00	(2,16)
2.	Angka Kemiskinan	40,83	34,11	27,74	26,56	25,00	34,95
3.	Angka Pengangguran	7,31	3,94	3,2	2,83	2,5	61,29
4.	Pertumbuhan Ekonomi	6,21	-4,28	7,32	8,97	6,43-7,58	30,17
5.	Ketimpangan Pendapatan	0,42	0,274	0,384	0,393	0,34-0,39	6,43
6.	PDRB Per Kapita (juta Rp)	23,44	26,08	63,38	59,41	60,00	60,55

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Kinerja Pembangunan daerah menunjukkan kemajuan di beberapa indikator, seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita. namun, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian, seperti IPM, ketimpangan pendapatan, dan proyeksi per kapita di tahun 2025 yang masih di bawah target. Diperlukan Upaya keras dan terarah dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target Pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan RPJPD 2025.

Gambar 2. 88 Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Jangka Panjang Daerah



Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Kinerja Pembangunan daerah menunjukkan kemajuan di beberapa indikator, seperti; penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun,masih ada beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian,

seperti; angka pengangguran, ketimpangan pendapatan, penurunan PDRB per Kapita di tahun 2022. Diperlukan Upaya keras dan terarah dari pemerintah daerah daerah.

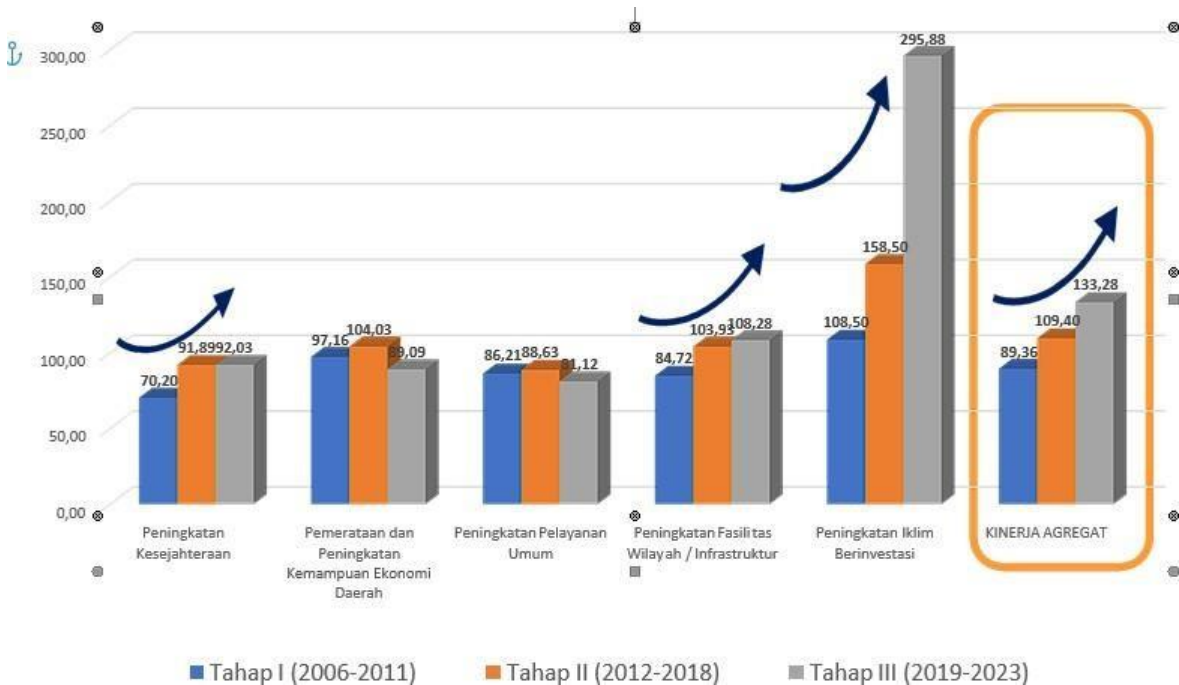
Tabel 2. 143 Capaian Evaluasi sasaran pokok RPJPD

NO	SASARAN POKOK	RATA2 KINERJA	PENILAIAN
1.	Peningkatan Kesejahteraan	94,71	Sangat Tinggi
2.	Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah	96,76	Sangat Tinggi
3.	Peningkatan Pelayanan Umum	91,41	Sangat Tinggi
4.	Peningkatan Fasilitas Wilayah / Infrastruktur	88,66	Tinggi
5.	Peningkatan Iklim Berinvestasi	156,36	Sangat Tinggi
TOTAL RATA2 KINERJA		105,58	SANGAT TINGGI

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Evaluasi RPJPD Provinsi Papua menunjukkan hasil yang sangat positif. Pencapaian pelaksanaan Pembangunan melampaui target, dengan progress 105, 58 persen. Dari lima sasaran pokok, peningkatan iklim berinvestasi mencapai 100 persen, menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investor di Papua. Sasaran pokok peningkatan fasilitas wilayah/infrastruktur juga menunjukkan capaian yang tinggi, dengan kemajuan signifikan dalam Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua.

Gambar 2. 89 Rekapitulasi Capaian kinerja RPJPD Provinsi Papua 2025-2025



Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Kinerja Pembangunan jangka Panjang di provinsi Papua menunjukkan hasil yang sangat positif. Capaian kinerja agregat mengalami peningkatan signifikan dari 89, 36 persen pada periode 2006-2011 menjadi 109, 40 persen pada periode 2012-2018, dan terus meningkat hingga 133 persen pada periode 2019 -2023.

Peningkatan signifikan terlihat pada beberapa aspek; peningkatan iklim berinvestasi, menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di Papua. Peningkatan fasilitas wilayah, menunjukkan kemajuan signifikan dalam Pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan terakhir Peningkatan kesehatan, menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Dan dua aspek yang perlu menjadi perhatian adalah pemerataan dan peningkatan kemampuan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan umum.

Tabel 2. 144 Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Kesejahteraan

SASARAN POKOK	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET SASARAN POKOK RPJPD PROVINSI				CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD PROVINSI				TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD PROVINSI				Nilai Peningkat Kinerja	
			6				7				8				9	
			Periode 1 (2006-2011)	Periode 2 (2013-2018)	Periode 3 (2019-2023)	Periode 4 (2021-2025)	Periode 1 (2011)	Periode 2 (2018)	Periode 3 (2022)	Periode 4 (2025)	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	%	Agregat
Peningkatan Kesejahteraan	1. IPM	Indeks	62,7	65,3	70	75	80	55,01	60,06	61,39	84,24	85,80	81,85		83,87	Tinggi
	2. AMH	%	75,4	75,8	77	80	85	75,81	76,79	81,19	100,01	99,73	100,49		100,41	Sangat Tinggi
	3. Umur harapan hidup	Tahun	67,6	70,29	72,02	73,79	75	64,46	65,36	71,83	91,71	90,75	97,37		93,28	Sangat Tinggi
	4. Penolong kelahiran Dengan Tenaga medis	%	48,9	55,04	62,49	69,94	75	52,78	73,79	79,91	95,89	118,08	114,26		109,41	Sangat Tinggi
	5. Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,5	6,7	8	10	12	5,8	6,5	7,0	83,58	81,50	70,20		78,43	Tinggi
	6. AKD per 1000 kelahiran hidup	jiwa	41	28	23	19	19	54	10	7	7,34	158,30	164,72		110,05	Sangat Tinggi
	7. AKI per 100.000 kelahiran hidup	jiwa	326	200	100	160	115	573	166	163	0,00	34,02	98,08		44,03	Sangat Rendah
	8. Persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan pendidikan SMP+	%	36,4	41,43	50,00	60,00	70,00	32,53	42,44	47,36	78,52	84,88	78,94		80,78	Tinggi
	9. Persentase penduduk miskin (2011)	%	40,78	31,20	22,00	15,00	5,00	34,11	27,74	26,80	90,67	73,91	21,33		61,97	Rendah
											78,20	91,89	92,03		84,70	

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Evaluasi RPJPD Provinsi Papua menunjukkan hasil yang positif pada sasaran pokok peningkatan kesejahteraan. Pencapaian pelaksanaan Pembangunan mencapai 84,70 persen, termasuk dalam kategori yang sangat tinggi. Dari 9 indikator, 2 indikator mencapai 100% menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua di beberapa aspek. Namun terdapat satu indikator yang memiliki kategori sangat rendah, yaitu angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Papua

Tabel 2. 145 Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah

SASARAN POKOK	INDIKATOR	UNIT	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	CAPAIAN KINERJA	RPJMD PROVINSI	TERHADAP SASARAN	AN POKOK RPJPD	TINGKAT TERHADAP	CAPAIAN KINERJA	ERJAN POKOK RPJPD	PROVINSI	Nilai	IPeningkat Kin	kinerja Agregat
				(2006-2011)	(2013-2018)	(2019-2023)	(2022-2025)	Periode 1 (2011)	Periode 2 (2018)	Periode 3 (2022)	Periode 4 (2025)	Periode 1 (2011)	Periode 2 (2018)	Periode 3 (2022)	Periode 4 (2025)	%		
Pemerataan dan Peningkatan	1 Laju Pertumbuhan PDRB Non tambang	%/Tahun	8,8	7,00	7,00	7,00	7,00	9,97	6,9	2,04		142,43	98,57	29,14		90,05	Tinggi	
Kemampuan Ekonomi Daerah	2 Gini Ratio	%	0,42	0,4	0,38	0,35	0,31	0,274	0,384	0,393		131,50	98,55	87,71		106,05	Sangat Tinggi	
	3 Produksi Padi	Ton/Ha	3,85	3,83	4,63	5,38	6,00	3,95	4,26	4,31		103,00	91,94	80,19		91,71	Sangat Tinggi	
	4 Produksi Ubi Jalar	Ton/Ha	10,07	10,07	11,07	11,82	12,57	10,13	13,99	14,19		100,55	126,38	120,08		115,66	Sangat Tinggi	
	5 Produksi Ubi Kayu	Ton/Ha	11,89	11,89	12,96	13,71	14,46	12,17	20,23	18,75		102,38	156,10	136,77		131,75	Sangat Tinggi	
	6 Produksi Jagung	Ton/Ha	1,75	1,75	2,42	3,17	3,92	1,80	2,85	4,63		102,86	117,33	145,90		122,16	Sangat Tinggi	96,76
	7 Perikanan	Ton	240.115	240.115	292.136	355.428	432.433	281.041	255.307	294.426		117,04	87,39	82,84		95,76	Sangat Tinggi	
	8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77,82	78,05	79,60	80,45	81,20	78,45	79,11	68,63		100,51	99,38	85,31		95,07	Sangat Tinggi	
	9 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,8	3,9	2,5	2,5	2,5	5,02	3,00	2,83		71,28	80,00	86,80		79,36	Tinggi	
	10 Persentase rumah sehat	%		69,4	69,4	75,4	81,4		58,23	27,28			83,00	36,18		40,03	Sangat Rendah	
												97,16	104,03	89,09				

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Pencapaian Evaluasi RPJPD Provinsi Papua berdasarkan sasaran pokok Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah memiliki progress positif dimana pencapaian pelaksanaan pembangunan mencapai progress 96,76dengan kategori capaian sangat tinggi. Terdapat 4 indikator yang memiliki capaian 100% dari 10 indikator secara keseluruhan. Terdapat 1 indikator yang memiliki kategori sangat rendah yaitu indikator persentase Rumah Sehat

Tabel 2. 146 Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Pelayanan Umum

SASARAN POKOK	INDIKATOR	UNIT	CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	CAPAIAN KINERJA	RPJMD PROVINSI	TERHADAP SASARAN	AN POKOK RPJPD	TINGKAT TERHADAP	CAPAIAN KINERJA	ERJAN POKOK RPJPD	PROVINSI	Nilai	IPeningkat Kin	kinerja Agregat
				(2006-2011)	(2013-2018)	(2019-2023)	(2022-2025)	Periode 1 (2011)	Periode 2 (2018)	Periode 3 (2022)	Periode 4 (2025)	Periode 1 (2011)	Periode 2 (2018)	Periode 3 (2022)	Periode 4 (2025)	%		
Peningkatan	1 Rasio Elektrifikasi	%	36,7	36,7	40	50	60	40,32	65,9	79,96		109,86	164,75	159,92		144,84	Sangat Tinggi	
Pelayanan Umum	2 Rasio Guru SD Terhadap Sekolah	%	7	8	9	11	12	6	6	8		75,00	66,67	72,73		71,46	Rendah	
	3 Rasio Murid SD Terhadap Ruang Belajar	%	29,08	31	35	30	30	30	27	26		96,77	77,14	86,67		86,86	Tinggi	
	4 Rasio Murid SD Terhadap Guru	%	29,6	32	32	30	30	32	28	23		100,00	87,50	76,67		88,06	Tinggi	
	5 Rasio Guru SMP Terhadap Sekolah	%	15	9	10	12	14	9	12	13		100,00	120,00	108,33		109,44	Sangat Tinggi	
	6 Rasio Murid SMP Terhadap Ruang Belajar	%	34	35,18	35	35	40	33	28	29		93,80	80,00	82,86		85,55	Tinggi	
	7 Rasio Murid SMP Terhadap	%	14	21,33	25	30	30	22	16	15		103,14	64,00	50,00		72,38	Rendah	

		Guru																	
	8	Rasio Guru SMA/MA Terhadap Sekolah	%	24	16	17	20	22	16	19	19		100,00	111,76	95,00		102,25	Sangat Tinggi	91,41
	9	Rasio Murid SMA/MA Terhadap Ruang Belajar	%	30	30	35	35	40	32	30	28		106,67	85,71	80,00		90,79	Tinggi	
	10	Rasio Murid SMA/MA Terhadap Guru	%	11	19	25	30	40	17	15	14		89,47	60,00	46,67		65,38	Rendah	
	11	Rasio Dokter Terhadap Penduduk	per penduduk	5646	3865	3400	3000	2500	3966	4514	2901		97,39	67,24	103,30		89,31	Tinggi	
	12	Rasio Bidan Terhadap Penduduk	per penduduk	1169	1022	1000	900	700	937	583	478		108,32	141,70	146,89		132,30	Sangat Tinggi	
	13	Rasio Perawat Terhadap Penduduk	per penduduk	827	730	700	600	500	1779	1355	1223		0,00	6,43	0,00		2,14	Sangat Rendah	
	14	Proporsi Akses Air Bersih	%	31,1	35	40	50	70	39,43	45,07	35,77		112,66	112,68	71,54		98,96	Sangat Tinggi	
	15	Persentase Rumah Sehat	%	63,4	63,4	69,4	75,4	81,4		58,23	27,28			83,90	36,18		40,03	Sangat Rendah	
													86,21	88,63	81,12				

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Pencapaian Evaluasi RPJPD PProvinsi Papua Berdasarkan sasaran pokok Peningkatan Pelayanan Umum memiliki progress positif dimanapencapaian pelaksanaan pembangunan mencapai progress 91,41 persen dengan kategori capaian sangat tinggi. Terdapat 2 indikator yang memiliki capaian 100% dari 15 indikator secara keseluruhan. Terdapat 2 indikator yang memiliki kategori sangat rendah yaitu Rasio Perawat terhadap Penduduk dan Persentase rumah Sehat

Tabel 2. 147 Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Wilayah / Infrastruktur

SASARAN POKOK	INDIKATOR	UNIT UKURAN	PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET SASARAN POKOK RPJPD PROVINSI					CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD PROVINSI				TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD PROVINSI				Nilai Peringkat Kinerja	
				6					7				8				9	
				Periode 1 (2006-2011)	Periode 2 (2013-2018)	Periode 3 (2019-2023)	Periode 4 (2022-2025)	1700	Periode 1 (2011)	Periode 2 (2018)	Periode 3 (2022)	Periode 4 (2025)	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	%	Agregat
Peningkatan	1	Panjang Jalan Nasional	km	1387,2	1400	1500	1600	1700	2072	2637	2778		148,03	175,80	173,63		165,82	Sangat Tinggi
Facilitas	2	Panjang Jalan Provinsi	km	4758	6000	7000	8000	9000	1499	2362	2362		24,98	33,74	29,53		29,42	Sangat Rendah
Wilayah / Infrastruktur	3	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	km/unit	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0940	0,0973	0,0452		493,82	313,41	380,13		387,45	Sangat Tinggi
	4	Jumlah Barang Dibongkar Melalui Pelabuhan Udara	Kg	83.839.163,00	83.839.163,00	107.002.378,00	136.565.162,10	174.295.598,50		174.704.973	116.264.000			163,27	85,13		82,80	Tinggi
	5	Jumlah Barang Dimuat Melalui Pelabuhan Udara	Kg	84.453.427,00	84.453.427,00	107.786.351,80	137.565.733,50	175.572.609,20		163.324.426	14.819.000			151,53	10,77		54,10	Rendah
	6	Jumlah Barang Antar Negara Dibongkar Melalui Pelabuhan Laut	Ton	1.489	1.489	1.565	1.645	1.729	78.836	95.267							0,00	
	7	Jumlah Barang Antar Negara Dimuat Melalui Pelabuhan Laut	Ton	5	5	7	9	10	376.652	310.202							0,00	88,66
	8	Jumlah Barang Antar Pulau Dibongkar Melalui Pelabuhan Laut	Ton	1.386.958	1.386.958	1.386.960	1.400.831	1.386.963	756.000	1.397.723			54,51	100,78			51,76	Rendah
	9	Jumlah Barang Antar Pulau Dimuat Melalui Pelabuhan Laut	Ton	154.657	154.657	162.546	170.838	179.552	104.000	145.173			67,25	89,31			52,19	Rendah
	10	Akses air bersih	%	58,7	60	60	70	75	39,43	45,07	35,77		65,72	75,12	51,10		63,98	Rendah
	11	Luas Kawasan Hutan Lindung	%	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	97,02	92,76	92,38		102,14	97,65	97,25		99,01	Sangat Tinggi
	12	Persentase Luas Hutan Produksi	%	61,45	61,45	61,45	61,45	61,45	26,22	25,74	26,97		42,67	41,89	43,89		42,82	Sangat Rendah
	13	Persentase Luas Hutan Perakumulasi	%	33,54	33,54	33,54	33,54	33,54	48,00	48,81	47,15		143,13	145,52	140,57		143,07	Sangat Tinggi
	14	Area Penggunaan Lain	%	5,01	5,01	5,01	5,01	5,01	4,20	3,36	3,55		83,81	67,00	70,81		73,87	Tinggi
													84,72	103,89	108,28			

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Pencapaian Evaluasi RPJPD Provinsi Papua berdasarkan sasaran pokok Peningkatan Fasilitas Wilayah/Infrastruktur memiliki progress positif dimana pencapaian pelaksanaan pembangunan mencapai progress 88,66 persen dengan kategori capaian tinggi. Terdapat 3 indikator yang memiliki capaian 100% dari 14 indikator secara keseluruhan. Terdapat 2 indikator yang memiliki kategori sangat rendah yaitu indikator Panjang Jalan Provinsi dan Persentase Luas Hutan Lindung

Tabel 2. 148 Capaian Evaluasi Sasaran Pokok RPJPD Peningkatan Iklim

SASARAN POKOK	INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET SARAN POKOK RPJPD PROVINSI	CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD PROVINSI										TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD PROVINSI TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD PROVINSI		Nilai Peringkat Kinerja	
				6				7				8					9
				2	3	4	Periode 1 (2006-2011)	Periode 2 (2013-2018)	Periode 3 (2019-2023)	Periode 4 (2022-2025)	Periode 1 (2011)	Periode 2 (2018)	Periode 3 (2022)	Periode 4 (2025)	Periode 1	Periode 2	Periode 3
Peningkatan Iklim	1. Jumlah Proyek PMDN	Unit	29	29	47	75	121	25	87	754	86,21	186,28	1002,41	424,97	Sangat Tinggi	156,36	
	2. Jumlah Proyek PMA	Unit	79	79	96	117	142	51	146	86	64,56	151,90	73,54	96,67	Sangat Tinggi		
Berinvestasi	3. Realisasi nilai investasi	trilyun	9,5	3,87	6,23	10,03	10,03	3,26	10,46	1,31	84,33	167,93	13,08	88,45	Tinggi		
	PMDN	rupiah															
	4. Realisasi nilai investasi PMA	trilyun	4,3	11,04	14,78	19,77	19,77	8,60	1,13	17,65	77,87	7,66	89,26	58,26	Rendah		
		rupiah															
	5. Total Investasi	trilyun	10,65	10,65	14,91	21,00	29,80	11,86	11,59	18,96	111,34	77,77	90,27	93,12	Sangat Tinggi		
		rupiah															
	6. Jumlah Unit Bank	Unit	203	203	210	240	280	240	422	506	118,23	200,95	210,83	176,67	Sangat Tinggi		
											108,50	158,50	295,88				

Sumber: Hasil Evaluasi RPJPD Papua, 2023

Pencapaian Evaluasi RPJPD Provinsi Papua berdasarkan sasaran pokok Peningkatan Iklim Berinvestasi memiliki progress positif dimana pencapaian pelaksanaan pembangunan mencapai progress 156,36 persen dengan kategori capaian sangat tinggi. Terdapat 2 indikator yang memiliki capaian 100% dari 6 indikator secara keseluruhan. Terdapat 1 indikator yang memiliki kategori rendah yaitu indikatorRealisasi nilai Investasi PMA.

Berikut ini adalah rincian gambaran perkembangan hasil pembangunan yang dilakukan pada empatkabupaten di Provinsi Papua Selatan.

Tabel 2. 149 Statistik Indikator Pembangunan Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Indikator	Kabupaten Merauke					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (ribu)	222390	225710	227410	230930	231696	237197
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	unpublishe d	8,11	7,55	-0,95	1,51	4,58
PDRB (Juta Rupiah)	12.880,20	14.536,82	16.023,14	16.037,19	16.731,24	17.326,13
Pertumbuhan Ekonomi (%)	unpublishe d	8,11	7,57	-0,77	2,02	unpubli shed
Indeks Gini	unpublishe d	Unpublishe d	0,386	0,380	0,385	unpubli shed

Pendapatan per kapita					44.990.000	
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	24060	23720	23490	22890	22830	unpublished
Kemiskinan (%)	10,82	10,51	10,33	9,91	9,85	10,10
IPM	68,64	69,38	69,98	70,09	70,49	71,24

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber (BPS Papua, BPS Merauke dan Pemda Kab. Merauke)

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten dengan kemajuan pembangunan paling baik atau paling maju dibandingkan dengan ketiga kabupaten lainnya yang ada dalam Provinsi Papua Selatan. Hal ini antara lain digambarkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang cukup tinggi kecuali pada saat terjadinya perlambatan ekonomi Indonesia akibat Covid-19 pada tahun 2020.

Indeks gini Kabupaten Merauke walupun terendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Selatan, tetap menunjukan angka yang relatif tinggi. Ini menunjukan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Hal lain yang berkaitan dengan ketimpangan ekonomi adalah bahwa jumlah penduduk miskin mengalami pengurangan yang tidak signifikan selama lima tahun terakhir. Walaupun demikian, Kabupaten Merauke adalah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit di seluruh Papua.

Hal terakhir yang perlu menjadi catatan adalah bahwa Kabupaten Merauke merupakan kabupaten dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi ke lima di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang berjumlah 29, dan tertinggi di Provinsi Papua Selatan.

Tabel 2. 150 Statistik Indikator Pembangunan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan

Indikator	Kabupaten ASMAT					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (ribu)	92910	95610	97490	110110	111632	116.200
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Unpublished	5,77	4,79	0,59	2,1	4,99
PDRB (Juta Rupiah)	2.038,2	2.258,8	2.469,6	2.230.16	2.694,79	2.885,88
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,85	5,77	4,72	Unpublished	unpublished	4,99
Indeks Gini	Unpublished	unpublished	0,398	0,403	0,405	Unpublished
Pendapatan per kapita		23,63	25,34	23,81	24,14	25,42
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	25050	26020	25800	25120	25040	Unpublished
Kemiskinan (%)	26,96	27,21	26,46	22,81	22,43	24,87
IPM	48,49	49,37	50,37	50,55	51,29	52,22

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber (BPS Papua, BPS Merauke dan Pemda Kab. Merauke)

Kabupaten Asmat merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan ekonomi

kedua terendah dibandingkan dengan kabupayen lainnya di Provinsi Papua Selatan dengan nilai di sekitar angkat 5% per tahun. Dengan jumlah penduduk separuh dari Kabupaten Merauke, besaran nilai ekonominya yang ditandai dengan jumlah PDRB-nya jauh lebih kecil (seperlima) dibandingkan dengan Kabupaten Merauke. Besaran dan pertumbuhan ekonominya yang kecil juga ditandai dengan ketimpangan ekonomi yang cukup besar yaitu di sekitar 0.4. Pada tahun 2022, BPS Papua mencatat jumlah orang miskin di Kabupaten Asmat mencapai nilai mendekati 25%. Kabupaten Asmat juga dicatatkan sebagai Kabupaten dengan nilai IPM yang rendah dan berada di rangking ke 18 dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua. Dalam info grafisnya diberi tanda merah (buruk). Namun dari tahun ke tahun masih terlihat adanya kenaikan nilai IPMnya, walaupun dengan nilai yang cukup kecil.

Tabel 2. 151 Statistik Indikator Pembangunan Kabupaten Mappi Provinsi Papua Selatan

Indikator	Kabupat en MAPPI					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pendu duk (ribu)	94670	99600	103290	108300	109579	113.259
Laju Pertumbu han PDRB (%)	Unpublished	6,31	6,11	-1,15	2,23	5
PDRB (Juta Rupiah)	1.670,5	1.775,9	2.957,6	2,995	3.100,2	1.997,29
Pertumbu han Ekonomi (%)	7,03	6,31	6,11	-1,15	2,23	5
Indeks Gini	Unpublished	Unpublished	0,416	0,427	0,384	unpublished
Pendapatan per kapita					18.000.000	
Jumlah Pendu duk Miskin (ribu)	24310	25210	26100	26910	26360	unpublished
Kemiskinan (%)	25,68	25,31	25,27	24,85	24,06	26,04
IPM	57,10	57,72	58,30	58,15	58,70	59,61

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber (BPS Papua)

Kabupaten Mappi merupakan kabupaten dengan besaran ekonomi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Asmat sebelum sampai tahun 2018, namun meningkat secara signifikan pada tahun 2019. Seperti kabupaten lain, pertumbuhan ekonominya negatif pada saat pandemi dan sampai saat ini

belum pulih seperti sebelum terjadinya pandemic Covid-19. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Mappi kurang lebih sama denganyang terjadi pada Kabupaten Asmat yaitu berada pada kisaran nilai 0,4. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mappi lebih tinggi di Kabupaten Mappi dengan nilai 26% lebih pada tahun 2022. Nilai IPM kabupaten inipun tergolong buruk walupun sedikit di atas Kabupaten Asmat. Kedua kabupaten ini oleh BPS Papua diberi warna merah yang mengindikasikan masih buruknya hasil pembangunan manusia pada kabupaten ini, dan berada pada rangking 13 dari seluruh 29 kabupaten/kota di Papua.

Berikutnya adalah gambaran umum tentang Kabupaten Boeven Digul. Kabupaten Boven Digoel merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling rendah di Provinsi Papua Selatan dengan besaran ekonomi kedua setelah Kabupaten Merauke. Produk Domestik Regional Brutonya berada pada nilai mendekati 5 Trilyun rupiah. Laju pertumbuhan ekonominya relative yang paling kecil di antara kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan.

Tabel 2. 152 Statistik Indikator Pembangunan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan

Indikator	Kabupaten BOVEN DIGOEL					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk (ribu)	66210	67720	69210	64290	64716	67760 (2023)
Laju Pertumbuhan PDRB (%)	unpublished	3,26	1,66	-2,6	1,03	1,55
PDRB	4.264,6	4.566,5	4.818,1	4,821	4.958,6	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,07	3,26	1,66	-2,60	1,03	unpublished
Indeks Gini	unpublished	unpublished	0,392	0,448	0,407	unpublished
Pendapatan per kapita						
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	13100	13700	13540	13860	13880	unpublished
Kemiskinan (%)	19,79	20,23	19,56	21,56	21,45	20,04
IPM	60,14	60,83	61,51	61,53	61,62	62,52

Sumber: Dihimpun dari berbagai sumber (BPS Papua), diolah

Dengan jumlah penduduk yang paling sedikit, besaran ekonomi Boven Digoel ternyata lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Asmat dan Mappi. Kabupaten Boven Digoel unggul pada berbagai sektor seperti Pertanian dan Kehutanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan (bahkan yang paling tinggi di antara kabupaten yang lain), Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran.

Dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin maka dapat dikatakan Kabupaten Boven Digoel berada pada rangking yang cukup baik di Papua, yaitu ke 7 dari 29 kabupaten/kota yang ada. Nilai Indeks Pembangunan Manusiaupun relatif baik dibandingkan dengan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi, dan rangking ke 12 di Papua. Pada Info Grafis yang dikeluarkan BPS Papua IPMnya diberi warna kuning, belum bagus namun tidak seburuk Kabupaten Asmat dan Mappi yang berwarna merah.

2.4.2 Rekomendasi hasil evaluasi RPJPD 2005-2025

Penyusunan RPJPD Periode 2025-2045 perlu memperhatikan berbagai hal penting:

- 1) Penetapan indikator dan target yang lebih SMART (Specific, measurable, attainable, relevant dan time bound) hal ini akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi RPJPD di masa depan
- 2) Peningkatan kelembagaan Monev, perlu dilakukan untuk memastikan proses evaluasi RPJPD berjalan efektif dan efisien.
- 3) Sinkronisasi arah kebijakan dan indikator, arah kebijakan dan indikator RPJPD 2025- 2045 harus disinkronkan dengan Perpres RIPPP dan RPJPN 2025-2045. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan Pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Isu strategis yang masih relevan untuk dibahas dalam penyusunan RPJPD 2025- 2045:

- 1) Capaian kinerja **pemerataan dan peningkatan kemampuan ekonomi daerah** (sasaran 2) **dan Peningkatan pelayanan umum** (sasaran 3) **mengalami trend penurunan** sehingga kedepannya **perlu dikaji kembali dalam penentuan target pembangunan maupun perumusan strategi pembangunan.** Capaian peningkatan **peningkatan iklim berinvestasi, peningkatan Fasilitas wilayah, dan peningkatan kesejahteraan** yang telah dilakukan dalam 20 tahun terakhir perlu dipertahankan untuk **menjadi *enabling environment* dalam mencapai** target percepatan **pembangunan kesejahteraan** masyarakat Papua pada periode RPJPD 2025-2045
- 2) Penciptaan ketentraman, ketertiban, dan stabilitas wilayah: hal ini penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi Pembangunan
- 3) Peningkatan pelayanan umum yang berkualitas: peningkatan kualitas pelayanan public seperti Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- 4) Pelestarian lingkungan dengan peningkatan aksesibilitas wilayah/infrastruktur: Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- 5) Produktivitas masyarakat dalam penghasilan nilai tambah ekonomi: Peningkatan produktivitas masyarakat melalui pengembangan UMKM dan sektor ekonomi lainnya perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan dasar: peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat

2.5 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

Dinamika kependudukan di Papua Selatan menunjukkan angka semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi kependudukan. Pertumbuhan penduduk mengindikasikan adanya kebutuhan sarana dan prasarana yang harus dilayani oleh Pemerintah Daerah.

2.5.1 Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045

Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua diuraikan sebagai berikut:

2.5.1.1 Pertumbuhan penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022, tercatat sebesar 522.215 jiwa (Sumber data : BPS Papua). Jumlah penduduk ini dihitung berdasarkan agregasi 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan, yaitu kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di kabupaten Merauke berjumlah 232.357 jiwa (44,49% dari total penduduk di Papua Selatan), diikuti Kabupaten Asmat sebanyak 113.524 jiwa (21,74%), dan Kabupaten Mappi sebanyak 111.141 jiwa (21,28%). Sementara itu, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Boven Digoel yaitu sebanyak 65.193 jiwa (12,48%). Jumlah penduduk Papua Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya antara lain disebabkan oleh banyaknya migrasi penduduk yang

masuk ke wilayah Papua Selatan (imigrasi) yang biasanya didorong oleh perkembangan kegiatan perekonomian wilayah maupun adanya Provinsi Papua Selatan sendiri yang mendorong orang untuk melakukan aktifitas mencari pekerjaan dan sebagainya.

Tabel 2. 153 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan

No	Kabupaten	2022	Persentase Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Merauke	232.357	44.49	1.67	5.16
2	Boven Digoel	65.193	12.48	1.43	2.77
3	Mappi	111.141	21.28	2.86	4.58
4	Asmat	113.524	21.74	3.70	4.52
		522.215			

Sumber: BPS Provinsi Papua dan Kabupaten, 2023 (diolah)

Distribusi penduduk Provinsi Papua Selatan terpusat di kabupaten Merauke sebagai ibukota provinsi dan tujuan urbanisasi di wilayah selatan Papua. Migrasi terbesar berasal dari kabupaten Boven Digoel dan Mappi, karena berbatasan langsung dengan kabupaten Merauke. Penduduk kabupaten Mappi dan Asmat relatif stabil dalam 3 tahun terakhir.

2.5.1.2 Trend Proyeksi Pertumbuhan penduduk per lima tahun

Proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 sebagai berikut:

Tabel 2. 154 Proyeksi Kependudukan Provinsi Papua Selatan

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merauke	232.357	233.685	237.037	240.438	243.887	247.386
2	Boven Digoel	65.193	66.158	68.632	71.199	73.862	76.624
3	Asmat	113.524	117.405	127.697	138.891	151.067	164.310
4	Mappi	111.141	114.332	122.717	131.716	141.375	151.743
Total		522.215	531.579	556.082	582.244	610.191	640.063

Sumber: BPS diolah, 2023

2.5.1.3 Kepadatan penduduk

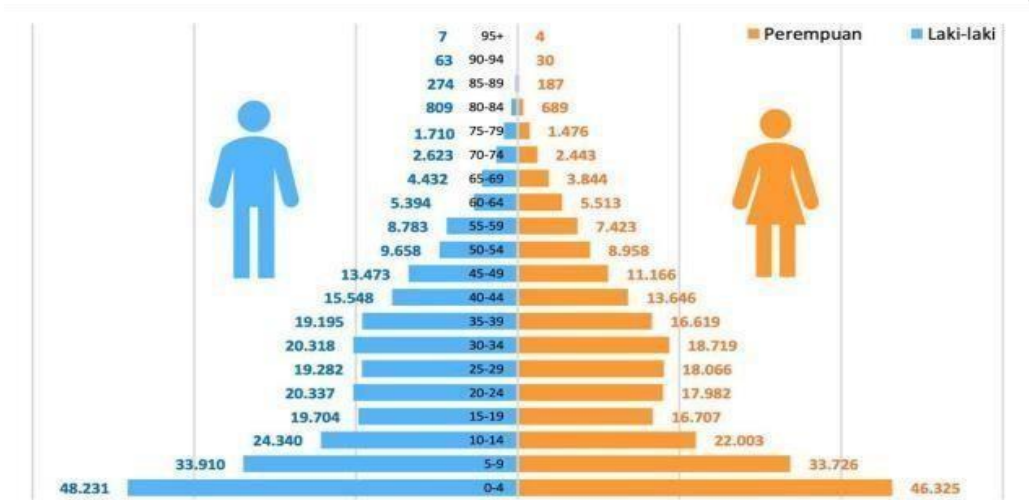
Kepadatan penduduk Provinsi Papua Selatan tertinggi berada di kabupaten Merauke dan terjarang di kabupaten Boven Digoel. Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Papua Selatan adalah 4,26 jiwa/km2 atau tergolong kepadatan menengah untuk kondisi kota kecil. Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat dari 0,78 tahun 2020 ke 0,89 (2022) dengan pertumbuhan penduduk 0,11%. Tabel 2.156 Kondisi kependudukan Provinsi Papua Selatan

2.5.1.4 Struktur usia dan rasio jenis kelamin serta bonus demografi

Rasio penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2020 didapati angka sebesar

1,09, artinya sebanyak 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Jumlah laki-laki relatif lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Menurut perhitungan BPS tahun 2020, kelompok usia 0 – 4 tahun menjadi kelompok terbanyak yaitu 94.556 jiwa, diikuti oleh kelompok usia 5 – 9 tahun yaitu 67.636 dan kelompok usia 10 – 14 (46.343 jiwa), Gambar 2.90 Struktur usia ini menunjukkan generasi Z mendominasi kondisi kependudukan di Provinsi Papua Selatan.

Gambar 2. 90 Struktur usia dan rasio jenis kelamin

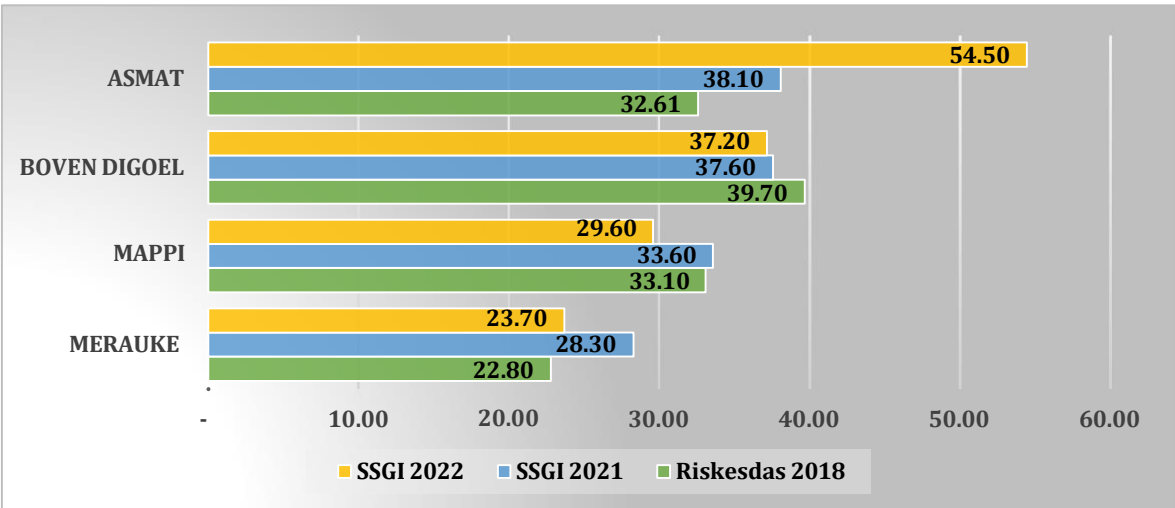


Sumber: BPS 2023

Bonus demografi memiliki implikasi jika dikelola dengan baik menjadi sumberdaya manusia yang produktif maka akan sangat potensial untuk menjadi penggerak ekonomi wilayah, namun apabila tidak terkelola dengan baik maka akan menjadi penyebab permasalahan sosial dan ekonomi di wilayah Provinsi Papua Selatan.

Bonus demografi ini juga memiliki ancaman yang harus diwaspadai dengan tingginya angka stunting di Papua Selatan, tahun 2022 mencapai 36.25% dengan penyumbang terbesar angka stunting di Kabupaten Asmat mencapai 54.50% (2022)

Gambar 2. 91 Stunting di Papua Selatan



Sumber: BPS 2023

Tabel 2. 155 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kab upat en Kota	Penduduk Tahun 2022 (Jiwa)			Tahun Proyeksi														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		Laki- Laki	Pere mpu an	Rasi o	Laki- Laki	Pere mpua n	Rasi o	Laki- Laki	Pere mpua n	Rasio	La ki- La ki	Pere mpua n	Ras io	Laki- Laki	Per emp uan	Ra sio	La ki- La ki	Per em pua n	Rasio
1	Merauk e	121.237	111.120	109	121.709	112.646	108	122.500	115.236	106	123.297	117.885	105	124.098	120.595	103	124.905	123.367	101
2	Boven Digoel	34.564	30.629	113	35.171	31.475	112	36.206	32.938	110	37.272	34.469	108	38.148	35.744	107	39.499	37.747	105
3	Asmat	57.210	53.931	106	59.413	56.551	105	63.275	61.203	103	67.387	66.238	102	70.869	70.562	100	76.432	77.584	99
4	Mappi	58.708	54.816	107	61.461	57.935	106	66.339	63.534	104	71.605	69.673	103	76.117	75.009	101	83.423	83.789	100

Tabel 2. 156 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Papua Selatan

No	U m u r	Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)			Tahun Proyeksi														
					2025			2030			2035			2040			2045		
		Laki- Laki	Perem puan	Jum lah	Laki- Laki	Pere mpua n	Rasi o	Laki- Laki	Pere mpua n	Rasi o	Laki- Laki	Pere mpua n	Ra sio	Laki- Laki	Pere mpua n	Rasi o	Laki- Laki	Pere mpua n	Rasi o
1	0-4	48.231	46.325	94.556	50.691	48.688	104	53.277	51.172	104	55.995	53.782	104	58.851	56.525	104	61.853	59.409	104
2	5-9	33.910	33.726	67.636	35.640	35.446	101	37.458	37.254	101	39.368	39.155	101	41.377	41.152	101	43.487	43.251	101

3	10-14	24.340	22.003	46.343	25.582	23.125	111	26.887	24.305	111	28.258	25.545	111	29.699	26.848	111	31.214	28.217	111
4	15-19	19.704	16.707	36.411	20.709	17.559	118	21.765	18.455	118	22.876	19.396	118	24.043	20.386	118	25.269	21.426	118
5	20-24	20.337	17.982	38.319	21.374	18.899	113	22.465	19.863	113	23.611	20.877	113	24.815	21.941	113	26.081	23.061	113
6	25-29	19.282	18.066	37.348	20.266	18.988	107	21.299	19.956	107	22.386	20.974	107	23.528	22.044	107	24.728	23.168	107
7	30-34	20.318	18.719	39.037	21.354	19.674	109	22.444	20.677	109	23.589	21.732	109	24.792	22.841	109	26.056	24.006	109
8	35-39	19.195	16.619	35.814	20.174	17.467	116	21.203	18.358	116	22.285	19.294	116	23.422	20.278	116	24.616	21.313	116
9	40-44	15.548	13.646	29.194	16.341	14.342	114	17.175	15.074	114	18.051	15.843	114	18.972	16.651	114	19.939	17.500	114
10	45-49	13.473	11.166	24.639	14.160	11.736	121	14.883	12.334	121	15.642	12.963	121	16.440	13.625	121	17.278	14.320	121
11	50-54	9.658	8.958	18.616	10.151	9.415	108	10.668	9.895	108	11.213	10.400	108	11.785	10.930	108	12.386	11.488	108
12	55-59	8.783	7.423	16.206	9.231	7.802	118	9.702	8.200	118	10.197	8.618	118	10.717	9.057	118	11.264	9.519	118
13	60-64	5.394	5.513	10.907	5.669	5.794	98	5.958	6.090	98	6.262	6.400	98	6.582	6.727	98	6.917	7.070	98
14	65-69	4.432	3.844	8.276	4.658	4.040	115	4.896	4.246	115	5.145	4.463	115	5.408	4.690	115	5.684	4.930	115
15	70-74	2.623	2.443	5.066	2.757	2.568	107	2.897	2.699	107	3.045	2.836	107	3.201	2.981	107	3.364	3.133	107
16	>75	2863	2.386	5.249	3.009	2.508	120	3.163	2.636	120	3.324	2.770	120	3.493	2.911	120	3.672	3.060	120
Jumlah		268.091	245.526	513.617	281.766	258.050	109	296.139	271.213	109	311.245	285.048	109	327.122	299.588	109	343.808	314.870	109

2.5.2 Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045

No	Analisi Proyeksi Kebutuhan	2030	2035	2040	2045
1.	Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusatpermukiman pada PKN Merauke;	✓	✓	✓	✓
2.	Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Mutingdan PKW Bade;	✓	✓	✓	✓
3.	Indikasi arahan zonasi untuk sistempusa permukiman pada PKSN TanahMerah dan PKSN Merauke.	✓	✓	✓	✓
4.	Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusatpermukiman pada PKN Merauke;	✓	✓	✓	✓
5.	Perkotaan Kimaam di KabupatenMerauke;	✓	✓	✓	✓
6.	Perkotaan Okaba di Kabupaten Merauke;	✓	✓	✓	✓
7.	Perkotaan Wanam di Kabupaten Merauke;	✓	✓	✓	✓
8.	Perkotaan Kepi di Kabupaten Mappi;	✓	✓	✓	✓
9.	Perkotaan Moor di Kabupaten Mappi;	✓	✓	✓	✓
10.	Perkotaan Eci di Kabupaten Mappi;	✓	✓	✓	✓
11.	Perkotaan Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel;	✓	✓	✓	✓
12.	Perkotaan Mindiptana di KabupatenBoven Digoel;	✓	✓	✓	✓
	Perkotaan Asiki di Kabupaten Boven				

Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan (sesuai dengan kondisi daerah sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RTRW Papua Selatan tahun 2023).

Tabel 2. 157 Kebutuhan rumah/tempat tinggal dan permukiman

13.	Digoel;	✓	✓	✓	✓
14.	Perkotaan Kouh di Kabupaten Boven Digoel;	✓	✓	✓	✓
15.	Perkotaan Bomakia di Kabupaten BovenDigoel;	✓	✓	✓	✓
16.	Perkotaan Agats di Kabupaten Asmat;	✓	✓	✓	✓
17.	Perkotaan Atsy di Kabupaten Asmat;	✓	✓	✓	✓
18.	Perkotaan Tomor di Kabupaten Asmat;	✓	✓	✓	✓

19.	Perkotaan Sawa Erma di Kabupaten Asmat	✓	✓	✓	✓
-----	--	---	---	---	---

Tabel 2. 158 Kebutuhan sarana dan prasarana air bersih

No	Analisi Proyeksi Kebutuhan	2030	2035	2040	2045
	Perwujudan sistem jaringan air minum (SPAM)				
1.	Pembangunan SPAM Regional	✓	✓	✓	✓
2.	Pembangunan SPAM	✓	✓	✓	✓
3.	Peningkatan/pembangunan SPAM	✓	✓	✓	✓
4.	Peningkatan/ Pembangunan Masyarakat SPAMBerbasis	✓	✓	✓	✓
5.	Pemanfaatan air baku yang telahterbangun	✓	✓	✓	✓
6.	Peningkatan/ Pembangunan Masyarakat SPAMBerbasis	✓	✓	✓	✓
	Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)				
7.	Pembangunan IPAL Regional	✓	✓	✓	✓
8.	Pembangunan IPAL terpusat	✓	✓	✓	✓
9.	Pengembangan IPLT	✓	✓	✓	✓
10.	Pembangunan IPLT	✓	✓	✓	✓
	Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)				
11.	Pengembangan pengelolaan limbah industri dan pertambangan	✓	✓	✓	✓
12.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3	✓	✓	✓	✓

Tabel 2. 159 Kebutuhan sarana dan prasarana energi

No	Analisi Proyeksi Kebutuhan	2030	2035	2040	2045
	Perwujudan Infrastruktur Minyak Dan Gas Bumi				
1.	Pengembangan pipa bawah laut minyak dangas bumi	✓	✓	✓	✓
	Perwujudan Jaringan Minyak Dan Gas Bumi				
2.	Pengembangan jaringan minyak dangas bumi	✓	✓	✓	✓

Tabel 2. 160 Kebutuhan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan

No	Analisi Proyeksi Kebutuhan	2030	2035	2040	2045
	Perwujudan Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan SaranaPendukungnya				
1.	Pengembangan Pembangkit ListrikTenaga air (PLTA)	✓	✓	✓	✓
2.	Pengembangan Pembangkit ListrikTenaga Uap (PLTU)	✓	✓	✓	✓
3.	Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	✓	✓	✓	✓
4.	Pengembangan Pembangkit ListrikTenaga Diesel (PLTD)	✓	✓	✓	✓
5.	Pengembangan Pembangkit ListrikTenaga Surya (PLTS)	✓	✓	✓	✓
6.	Pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	✓	✓	✓	✓
7.		✓	✓	✓	✓
8.		✓	✓	✓	✓
9.		✓	✓	✓	✓
10.		✓	✓	✓	✓
11.		✓	✓	✓	✓

Tabel 2. 161 Kebutuhan sarana dan prasarana persampahan

No	Analisi Proyeksi Kebutuhan	2030	2035	2040	2045
	Perwujudan sistem jaringan persampahan				
1.	Pengembangan TPA Regional	✓	✓	✓	-
2.	TPA Bokem di Kabupaten Merauke;	✓	✓	✓	-
3.	TPA Mandobo di Distrik Boven Digoel	✓	✓	✓	-

4.	TPA Gimikya, TPA Agham dan TPA Eci diKabupaten Mappi	✓	✓	✓	-
5.	TPST Agats di Kabupaten Asmat.	✓	✓	✓	-
6.	Pengembangan TPS di setiap distrik pada4 kabupaten Provinsi Papua Selatan.	✓	✓	✓	-
7.	Rencana pengembangan TPA di pusat permukiman baru yang direncanakan)	✓	✓	-	-

Tabel 2. 162 Kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan

No	Analisi Proyeksi Kebutuhan	2030	2035	2040	2045
1.	Rumah Sakit Umum TIpe B – Muting	✓	✓	✓	✓
2.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Kimaam	✓	✓	✓	✓
3.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Harapan Baru	✓	✓	✓	✓
4.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Okaba	✓	✓	✓	✓
5.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Wanam	✓	✓	✓	✓
6.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Tanah Merah	✓	✓	✓	✓
7.	Rumah Sakit Umum Tipe C – ASiki	✓	✓	✓	✓
8.	Rumah Sakit Umum Tipe C – MIndiptana	✓	✓	✓	✓
9.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Kouh	✓	✓	✓	✓
10.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Bomakia	✓	✓	✓	✓
11.	Rumah Sakit Umum Tipe B – Bade	✓	✓	✓	✓
12.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Kepi	✓	✓	✓	✓
13.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Moor	✓	✓	✓	✓
14.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Eci	✓	✓	✓	✓
15.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Agats	✓	✓	✓	✓
16.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Atsy	✓	✓	✓	✓
17.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Tomor	✓	✓	✓	✓
18.	Rumah Sakit Umum Tipe C – Sawa Erma	✓	✓	✓	✓

Tabel 2. 163 Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan

No	Analisi Proyeksi Kebutuhan	2030	2035	2040	2045
	Kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan				

1.	Fasilitas sarana dan prasarana pendidikan berskala nasional dan regional – Merauke	✓	✓	✓	✓
2.	Fasilitas sarana dan prasarana pusat pelayanan Pendidikan berupa perguruan tinggi setingkat S1 - Muting	✓	✓	✓	✓
3.	Fasilitas sarana dan prasarana pusat pelayanan Pendidikan setingkat akademi Tingkat Diploma 3 - Muting	✓	✓	✓	✓
4.	Fasilitas sarana dan prasarana pusat pelayanan pelatihan / life skill serta vokasi-vokasi untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sentra industri perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan – Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel	✓	✓	✓	✓
5.	Mendirikan Pusat Riset Biodiversitas Papua Selatan yang berpusat di Merauke	✓	✓	✓	✓

2.6 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Jika dilihat dari perkembangan fungsi wilayah Provinsi Papua Selatan, maka Kabupaten Merauke merupakan lokasi pertama munculnya berbagai aktivitas baik berupa aktivitas politik maupun ekonomi pada jaman kolonial belanda di bagian selatan Provinsi Papua. Walter Christaller dalam Teori Tempat Sentral (central place theory) menyatakan bahwa suatu lokasi dapat melayani berbagai kebutuhan yang terletak pada suatu tempat yang disebutnya sebagai tempat sentral. Tempat sentral adalah wilayah yang menyediakan barang dan jasa untuk penduduk sekitar dan juga kota. Jadi, dapat dikatakan bahwa pusat kota adalah pusat distribusi atau penyaluran barang dan jasa, dengan tingkatan- tingkatan tertentu sesuai kemampuannya melayani kebutuhan wilayah tersebut.

Teori Cristaller bertitik tolak dari letak perdagangan dan pelayanan dalam sebuah kota seperti rumah sakit, sekolah, bank, dan sebagainya. Semakin besar pusat pelayanan atau perdagangan semakin luas penduduk yang dapat dilayani, dan sebaliknya semakin kecil semakin sedikit penduduk yang dilayani. Kawasan yang berpengaruh luas terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, pusat pertumbuhan dapat dicitrakan dengan titik-titik simpul yang berbentuk geometris heksagonal (segi enam). Wilayah segi enam itu merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya terlayani oleh tempat sentral yang bersangkutan. Tempat-tempat sentral yang dimaksud dapat berupa pusat-pusat perbelanjaan, kota, atau pun pusat-pusat kegiatan lainnya. Oleh tempat-

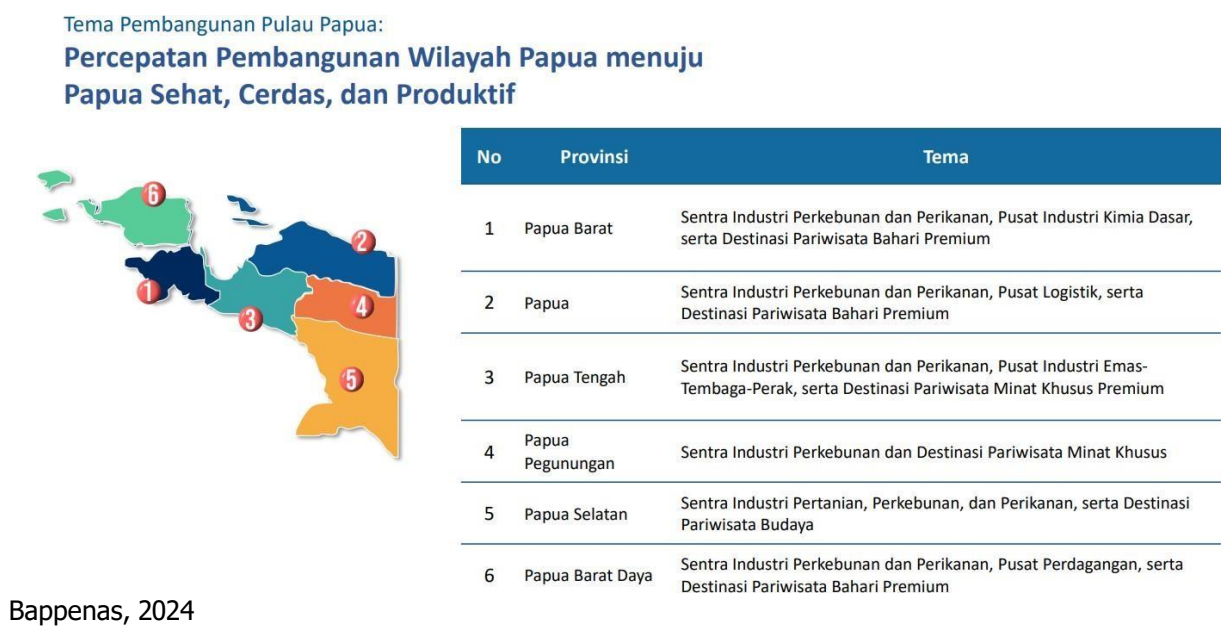
tempat sentral itu, wilayah atau tempat-tempat lain di sekitarnya akan tertarik. Teori ini berlaku apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Wilayahnya datar dan tidak berbukit;
 2. Tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama; dan
 3. Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah.
- Perkembangan aktivitas wilayah di Provinsi Papua Selatan sangat berkaitan erat dengan budaya rumpun suku-suku yang mendominasi wilayah adat Animha ini. Budaya patriarki (hak kaum lelaki) secara tradisional pada umumnya sangat mendominasi kaum wanita. Pada hal secara sosial dan ekonomi, perempuan memiliki peran sangat penting. Misalnya, perempuanlah yang sehari-hari berurusan menjaga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Umumnya, di kampung perempuan jugalah yang bertanggungjawab atas ekonomi keluarga, mulai dari mencari makan, memasak dan menghidangkannya bagi seisi rumah tangga. Lingkungan alam, umumnya daerah di pesisir pantai, dataran rendah, berawa, dan memiliki banyak sungai-sungai besar dan kecil, kecuali wilayah Bouven Digul yang jauh dari pantai dan berada di daerah berbukit-bukit. Tumpuan hidup masyarakat di wilayah budaya ini, khususnya orang Asmat, Marind- Anim,

Yakhai, Awyu, Citak-Mitak, Korowai hidup dari sagu, sungai dan sampan di singkat S-3. Mereka juga mengenal berburu, mencari akar-akaran, beternak babi umumnya, dan bercocok tanam secara terbatas. Khusus untuk orang Muyu dan Mandobo di wilayah Kabupaten Bouven Digul, umumnya mereka hidup dari bercocok tanam, beternak, berburu, menangkap ikan dan berdagang. Sejak dimekarkannya 3 (tiga) kabupaten di sekitar kabupaten Merauke pada tahun 2002, maka berbagai aktivitas pemerintah dan pelayanan masyarakat sudah dilaksanakan di masing-masing kabupaten antara lain aktivitas di kabupaten Asmat berpusat di Agats, aktivitas di Kabupaten Mappi berpusat di Keppi, dan aktivitas di Kabupaten Bovendigoel di Tanah Merah. Namun dikarenakan keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar kepada masyarakat di 3 (tiga) kabupaten ini, menyebabkan ketergantungan pada Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induk yang telah terlebih dahulu memiliki sejumlah fasilitas sarana prasarana pelayanan publik terus terjadi hingga saat ini. Kondisi ini yang menyebabkan perkembangan wilayah kabupaten Merauke terus meningkat sebagai pusat pelayanan dan perdagangan dalam mendukung aktivitas- aktivitas pada wilayah- wilayah yang ada disekitarnya.

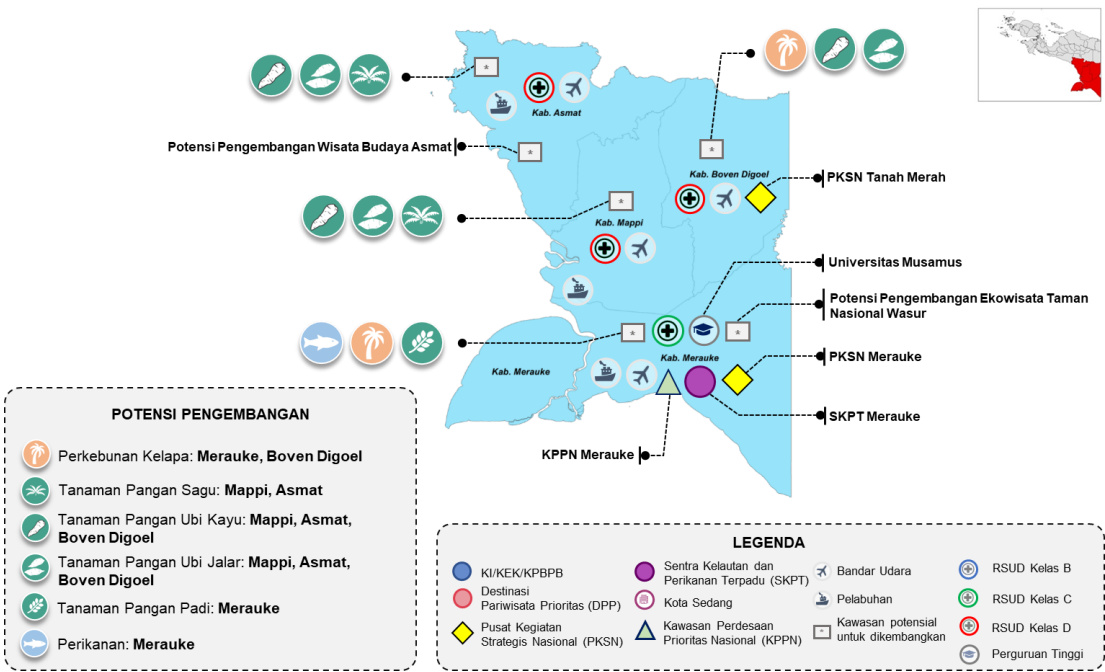
Dalam konteks saat ini, maka Papua Selatan dapat melakukan pengembangan pusat – pusat pertumbuhan. Adapun tema pembangunan Papua Selatan telah diarahkan sebagai sentra industri pertanian, perkebunan, perikanan serta destinasi pariwisata budaya.

Gambar 2. 92 Tema Pembangunan Papua Selatan



Gambar 2. 93 Potensi Pengembangan di Provinsi Papua Selatan

Sumber : Bappenas



2.6.1 Arahkan sentra industri pertanian

Kawasan pertanian adalah kawasan budi daya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/ataudapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air. Pertanian merupakan salah satu sector unggulan di Kawasan Merauke dan sekitarnya. Pusat penelitian dan pengembangan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan juga ada di Merauke.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparanLahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dankedaulatan pangan Daerah dan nasional. Pembangunan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan. Kebijakan pola ruang Nasional berupa kawasan lindung dan kawasan andalan Penetapan kawasan lindung dan andalan Nasional yang berada di Provinsi Papua Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 164 Arahan Pola Ruang Nasional Terhadap Provinsi Papua Selatan

Pola Ruang	Lokasi Penetapan
1. Kawasan Lindung	• Suaka Margasatwa Danau Bian • Suaka Margasatwa Pulau Komolon • Cagar Alam Bupul • Taman Nasional Lorentz • Taman Nasional Wasur
2. Kawasan Andalan	Kawasan Merauke dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, kehutanan, perkebunan, perikanan dan pertanian

Sumber : PP Nomor 13 Tahun 2017

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional meliputi kawasan peruntukan pertanian permukiman terkait Provinsi Papua Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2. 165 Arahan Kawasan Budi daya Yang Memiliki Nilai Strategis Pulau Papua Terhadap Provinsi Papua Selatan

Kawasan Peruntukan Pertanian		
1.	Pengembangan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung dan/atau lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke
2	Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakanyang didukung industri pengolahan dan jasa yang ramah lingkungan	Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke
3	Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	Kabupaten Merauke
4	Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lokal yang didukung industri pengolahan, industri jasa dan pemasaran hasil pertanian dilakukan pada kawasan peruntukan pertanian	Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014

Pengembangan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian, perkebunan dan peternakan ada di Kabupaten Merauke. Pengembangan Kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa pertanian yang ramah lingkungan serta memperhatikan Kampung Masyarakat Adat di wilayah Kabupaten Merauke. Berikut merupakan indikasi program perwujudan ruang kawasan pertanian meliputi:

1. pengembangan kawasan tanaman pangan, diarahkan untuk:
 - a. Kawasan Untuk Tanaman Pangan
 - b. Pengembangan kawasan Agropolitan (padi)
 - c. Pencetakan sawah baru pada kawasan potensial
 - d. Pengembangan pertanian perkotaan
 - e. Pengembangan pertanian organik
 - f. Penerapan mekanisme komprehensif dan pengembangan rekayasa teknologi
 - g. penetapan kawasan pertanian pangan khususnya lahan pertanian sawah irigasi sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
 - h. Pemberian insentif kepada masyarakat yang mempertahankan lahan pertanian sawah irigasi
2. pengembangan kawasan hortikultura, diarahkan untuk:
 - a. Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk hortikultura
 - b. Terjalinnnya kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha
 - c. Pengembangan kawasan Agropolitan berbasis Hortikultura
 - d. Berkembangnya industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan
 - e. Meningkatnya penggunaan benih bermutu
 - f. Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan tani
 - g. Meningkatnya kualitas lingkungan, dengan diterapkannya aspek konservasi lahan, pola tanam dan penanganan PHT dalam pengelolaan OPT

2.6.2 Arahana sentra industri perkebunan

Kawasan perkebunan adalah Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan di pasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Luas tutupan lahan perkebunan berdasarkan Kabupaten di Provinsi Papua Selatan hanya 1,11% atau seluas 131.280,66 Ha. Dengan perincian Kabupaten Asmat 45,78 Ha, Kabupaten Boven Digoel 34.323,53 Ha, Kabupaten Mappi 10.207,18 Ha, dan Kabupaten Merauke 86.704,16 Ha. Seluruh kenampakan hasil budidaya tanaman keras yang termasuk kelompok perkebunan, antara lain sawit, karet, kelapa, coklat, kopi, dan teh.

Berdasarkan kondisi tutupan lahan Provinsi Papua Selatan tahun 2022, Hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan tutupan lahan yang dominan yaitu masing-masing sekitar 2,3 juta ha dengan presentase 18,99%

dan 2,1 juta ha dengan presentase 17,98%. Wilayah lain berupa non hutan yaitu permukiman, pelabuhan, perkebunan, dan lainnya hanya mencakup sekitar 30% dari luas wilayah. Sisanya berupa KSA/KPA, Hutan Sekunder, Hutan Lindung, dan Rawa.

Perkebunan besar adalah perkebunan yang diselenggarakan atau di kelola secara komersial

oleh perusahaan yang berbadan hukum yang terdiri dari perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Bentuk produksi perkebunan contohnya seperti : kelapa, sagu, kakao, Pinang, Lada, Kapuk, Cengkeh. Sedangkan luas perkebunan dihitung pada keadaan akhir tahun dan tidak termasuk yang luasnya kurang dari 5 hektar.

Untuk mendapatkan Kawasan perkebunan di Provinsi Papua Selatan bisa didapatkan dari Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan perkebunan dari Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi (HPK).

Menurut UU. No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. Penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Seperti diketahui sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang mengalami pertumbuhan paling konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi.

Selain itu, sektor perkebunan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, khususnya pada penyerapan tenaga kerja pada industri hilir. Beberapa komoditas perkebunan yang dipandang mempunyai nilai penting dan strategis di Indonesia adalah karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, teh, dan tebu. Kelapa sawit, karet dan kakao tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya dengan laju pertumbuhan di

atas angka 5% per tahun. Pertumbuhan yang pesat dari ketigakomoditas tersebut pada umumnya berkaitan dengan tingkat keuntungan pengusaha komoditas tersebut relatif lebih baik dan sektor perkebunan di Provinsi Papua Selatan memiliki potensi besar karena didukung dengan kondisi bentang alam yang relatif datar dan memiliki banyak lahan yang produktif. Dengan potensi besar pada sektor perkebunan maka akan berpotensi juga untuk meningkatkan pendapatan provinsi. Tujuan pengelolaan kawasan perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. meningkatkan penerimaan negara;
- c. meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g. mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Kawasan perkebunan di Provinsi Papua Selatan diarahkan pengembangannya pada Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke seluas 487.567,91 Ha. Kawasan perkebunan diarahkan untuk perkebunan sektor swasta dan perkebunan rakyat. Untuk perkebunan sektor swasta diarahkan untuk perkembangan kelapa sawit, sedangkan perkebunan rakyat diarahkan untuk komoditas lain yang potensial seperti karet, kelapa, pinang dan kopi. Berikut peta sebaran perkebunan di Provinsi Papua Selatan.

Komoditas perkebunan lain yang potensial menjadi sumber penghidupan petani adalah cokelat yang dikembangkan di Distrik Mindiptana dan jambu mete di Distrik Mandobo, Mindiptana, dan

Waropko. Kopi juga diusahakan oleh petani di Distrik Jair, Mindiptana, Waropko, dan Kauh. Selain tanaman tanaman tersebut, masih ada pula usaha tanaman vanilli yang dikembangkan di Distrik Waropko.

Hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disingkat HPK adalah Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional meliputi kawasan peruntukan perkebunan terkait Provinsi Papua

Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2. 166 Arahan kebijakan struktur ruang pulau papua terhadap provinsi papua Selatan

Strategi Operasionalisasi Struktur Ruang		
Pengembangan dan/atau peningkatan fungsi PKN, PKW dan PKSN		
1.	Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan	PKW Muting, PKW Merauke, dan PKSN Tanah Merah
2	Pusat penelitian dan pengembangan hasil pertanian tanaman, perkebunan, dan peternakan	PKW Merauke

Pengembangan Kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa perkebunan yang ramah lingkungan serta memperhatikan Kampung Masyarakat Adat di wilayah Kabupaten Merauke. Berikut merupakan indikasi program perwujudan ruang kawasan perkebunan meliputi:

1. pengembangan kawasan perkebunan, diarahkan untuk:
 - a. peningkatan ketersediaan teknologi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai
 - b. rehabilitasi dan pemeliharaan kawasan perkebunan
 - c. intensifikasi komoditi perkebunan
 - d. pembinaan industri pengolahan hasil perkebunan
 - e. diversifikasi dan intensifikasi produk melalui pengembangan teknologi budidaya tanaman
 - f. peningkatan manajemen pengairan
 - g. pengembangan kelompok tani menjadi kelompok pengusaha yang mandiri dan profesional
2. pengembangan kawasan perkebunan rakyat, diarahkan untuk:
 - a. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Perkebunan Rakyat
 - b. Pemanfaatan perkebunan rakyat

2.6.3 Arahana sentra industri perikanan

Kawasan perikanan adalah kawasan budi daya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Tabel 2. 167 Distribusi Lokal Pusat Pertumbuhan dan Pelabuhan Perikanan

Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan		
Nam a	Distri k	Kabupaten
PP. Kelapa Lima	Merauke	Kabupaten Merauke
Dwikarya Reksa Abadi	Ilwayab	Kabupaten Merauke
PP. Merauke	Merauke	Kabupaten Merauke
PP. Sumuraman	Minyamur	Kabupaten Mappi
PP. Omor	Unir Sirau	Kabupaten Asmat
Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap		
SKPT Merauke	Merauke	Kabupaten Merauke

Strategi operasionalisasi perwujudan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional meliputi kawasan peruntukan perikanan terkait Provinsi Papua Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2. 168 Arahana Kawasan Budi daya Yang Memiliki Nilai Strategis Pulau Papua Terhadap Provinsi Papua Selatan

Kawasan Peruntukan Perikanan		
1.	Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang ramah lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat	Kabupaten Merauke
2	Pengembangan Kawasa nminapolitan berbasis masyarakat	Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Mappi.
3	Peningkatan keterpaduan antara kegiatan peruntukan perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari	-
4	Pengendalian kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan Koridor Ekosistem	Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke.

Pengembangan Kawasan peruntukan industri pengolahan dan industry jasa perikanan yang ramah lingkungan serta memperhatikan Kampung Masyarakat Adat di wilayah Kabupaten Merauke. Berikut merupakan indikasi program perwujudan ruang kawasan perikanan

meliputi:

1. Perwujudan kawasan perikanan tangkap
 - a. Menerapkan manajemen pengendalian input, proses dan output
 - b. Memanfaatkan sumberdaya ikan secara lestari dan berkelanjutan
 - c. Menjaga keamanan mata pencaharian (livelihood security) masyarakat pesisir
 - d. melaksanakan revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan
 - e. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil
 - f. meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan
 - g. menerapkan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjagakuualitas hasil tangkapan.
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian stok ikan
2. Perwujudan kawasan perikanan Budi daya
 - a. Pengembangan budi daya laut bagi kesejahteraan masyarakat pesisir
 - b. Menata dan mengembangkan usaha perikanan budi daya berbasis klaster
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budi daya
 - d. Mengembangkan sumberdaya manusia dan menerapkan teknologi budi daya laut yang produktif dan ramah lingkungan
 - e. Pencegahan Pencemaran perairan dan mengganggu kegiatan perikanan budi daya.

2.6.4 Arahana sentra destinasi pariwisata budaya.

Kawasan Pariwisata Kabupaten Merauke:

- a) **Potensi Alam dan Budaya:** Kabupaten Merauke, sebagai bagian dari provinsi Papua, memiliki kekayaan alam yang melimpah dan keanekaragaman budaya yang unik. Potensi ini mencakup hutan tropis, pantai indah, dan beragam suku adat yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.
- b) **Destinasi Wisata Utama:**
 - Pantai Papua: Kabupaten Merauke memiliki pantai-pantai yang eksotis dengan pasir putih, air biru, dan keindahan alam bawah laut yang menakutkan.
 - Hutan Tropis: Menawarkan pengalaman wisata alam yang luar biasa dengan keanekaragaman flora dan fauna yang langka.
- c) **Wisata Budaya:**

Suku Asli Papua: Pengalaman budaya dengan berinteraksi langsung dengan suku-suku asli Papua, seperti suku Marind atau suku Asmat, dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan yang mencari pengalaman budaya autentik.

Kawasan wisata alam yang sangat potensial sebagai daerah kunjungan para wisatawan yakni Taman Nasional Wasur. Taman Nasional Wasur dengan iklim Taman

Nasional Wasur dengan iklimgeografis yang eksotis merupakan perwakilan dari lahan basah yang

paling luas di Papua dan sedikit mengalami gangguan oleh aktivitas manusia. Sekitar 70 % dari luas kawasan taman nasional berupa vegetasi savana, sedang lainnya berupa vegetasi hutan rawa, hutan musim, hutan pantai, hutan bambu, padang rumput dan hutan rawa sagu yang cukup luas. Jenis tumbuhan yang mendominasi hutan dikawasan Taman Nasional ini antara lain, api-api (*Avicennia.sp.*), tancang (*Bruguiera.sp.*), ketapang (*terminalia.sp.*), dan kayu putih (*melaleuca.sp.*) Jenis satwa yang umum di jumpai antara lain kanguru pohon (*dendrolagus spadix*) kesturi raja (*psitttrichus fulgidus*), kasuari gelambir (*casuarius sclateri*), burung mambruk (*goura cristata*), cenderawasih kuning besar (*paridisea apoda novaeguineae*), cenderawasih raja (*cicinnurus regius rex*), cenderawasih merah (*paradisea rubra*), buaya air tawar (*crocodylus novaeguineae*) dan buaya air asin (*crocodylus porosus*). Keanekaragaman hayati bernilai tinggi dan mengagumkan di Taman Nasional Wasur, menyebabkan kawasan ini lebih dikenal sebagai "Serengiti of Papua".

Selanjutnya berdasarkan data dari Kabupaten Merauke juga didapatkan adanya

Gambar 2. 94 Taman Wasur



keanekaragaman jenis fauna di kawasan TN Wasur antara lain mamalia besar seperti, kangguru lapang (*Macropus Agilis*), Kangguru hutan/biasa (*Darcopsis veterum*) dan Kanguru tanah (*Thylogale brunii*). Disamping itu terdapat mamalia lain yaitu musang hutan, kus-kus berbintik yang dikenal masyarakat setempat sebagai tupai dan lain-lain. Pisces (Ikan) Kawasan TN Wasur merupakan lahan basah yang luas, dimana banyak kehidupan aquatik yang menjadi komponen penting bagi keanekaragaman hayati dalam kawasan. Terdapat 39 jenis ikan dari 72 jenis yang ada, 32 jenis diantaranya terdapat di Rawa Biru dan 7 jenis terdapat di sungai maro. Reptil dan Amfibi hasil survey terdapat 26 jenis reptil yaitu 2 jenis buaya, 3 jenis biawak, 4 jenis kura-kura, 5 jenis kadal, 8 jenis ular, 1 jenis bunglon, 3 jenis katak. Serangga (insekta) terdapat 48 jenis.

Selain itu Merauke juga menyuguhkan begitu banyak pesona alam, Pantai Lampu Satu, taman Nasional Wasur, Sarang Semut Raksasa, Taman Sota, Budaya sebagai contoh Pulau Habe. Pulau ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki permukaan yang berlumpur. Meski begitu Pulau habe sudah terkenal memiliki pesona alam yang begitu indah. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Rio de Janeiro-nya Indonesia.

Gambar 2. 95 Wisata Pulau Habe



Gambar 2. 96 Pantai Payum Merauke

Gambar 2. 97 Danau Biru



Gambar 2. 98 Taman Sota



2.6.4.1 Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Asmat

Kabupaten Asmat, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia, memiliki potensi wisata yang unik, terutama terkait dengan budaya, seni, dan keindahan alam. Festival budaya asmat adalah festival tahunan yang melegenda di dunia pariwisata dan ekonomi kreatif nasional maupun internasional dengan ciri khas mengukir atau ukiran tanpapola/sketsa yang sangat khas dengan berbagai motif primitif yang mistik dan misterius. Suku asmat sangat terkenal di manca Negara karena seni patungnya sangat unik, artistik dan mempesona dan dapat dikatakan bahwa patung tersebut merupakan hasil karya budaya dunia.

Karya ukir khas suku asmat adalah salah satu kekayaan budaya nasional yang sudah memiliki nama bagi para turis asing. Karakteristik ukiran suku asmat mempunyai pola yang unik dan bersifat naturalis. Dari pola-pola itu terlihat kerumitan cara membuatnya sehingga membuat karya ukir mereka bernilai tinggi dan cukup banyak diminati para turis asing.

Gambar 2. 99 Karya Ukir khas Asmat



Berikut adalah beberapa obyek wisata yang dapat ditemui di Kabupaten Asmat:

a) Desa Tradisional Asmat:

Desa-desa tradisional di Kabupaten Asmat merupakan daya tarik utama. Desa-desa ini memiliki rumah adat yang dihiasi dengan seni ukir Asmat yang khas. Wisatawan dapat mengalami kehidupan sehari-hari masyarakat Asmat dan menyaksikan langsung proses pengukiran seni mereka.

b) Seni Ukir Asmat:

Seni ukir Asmat adalah salah satu kekayaan budaya terbesar di Indonesia. Wisatawan dapat mengunjungi pusat-pusat seni ukir di berbagai desa untuk melihat seniman-seniman Asmat dalam proses menciptakan karya seni mereka yang indah dan bernilai tinggi.

c) Festival Budaya:

Kabupaten Asmat sering menggelar festival budaya untuk memamerkan keanekaragaman seni dan budaya mereka. Festival ini melibatkan tarian, musik, dan pameran seni yang memperkaya pengalaman wisatawan.

Gambar 2. 100 Festival Budaya Asmat atau Pesta Budaya Asmat di Distrik Agats.



d) Ekowisata Sungai dan Hutan:

Keindahan alam Kabupaten Asmat mencakup sungai-sungai yang membelah hutan-hutan tropisnya. Ekowisata sungai dan hutan memberikan kesempatan untuk menikmati keanekaragaman hayati dan pemandangan alam yang memesona. (rawa baki, taman Lorenz, Pantai Bokap)

e) Monumen Perdamaian Lembaga Budaya Asmat:

Monumen ini dibangun untuk memperingati peristiwa Perdamaian Asmat pada tahun 2004. Monumen ini juga menjadi tempat untuk menampilkan koleksi seni ukir dan artefak budaya Asmat.

f) Pusat Konservasi Penyu:

Beberapa pantai di Kabupaten Asmat berfungsi sebagai tempat konservasi penyu. Wisatawan dapat mengunjungi pusat konservasi untuk mempelajari dan mendukung upaya pelestarian penyu.

g) Pulau-pulau dan Pantai:

Kabupaten Asmat memiliki pulau-pulau kecil yang indah dan pantai berpasir putih. Beberapa pulau dapat dijadikan destinasi wisata untuk kegiatan seperti snorkeling, menyelam, dan piknik pantai. (Pulau Mamat, Pulau Pek, Pulau Tiga, Pantai Bokap)

Gambar 2. 101 Pesona Pantai



h) **Wisata Sejarah:**

Beberapa obyek wisata sejarah seperti situs-situs prasejarah atau peninggalan kolonial mungkin juga dapat ditemukan di beberapa bagian

Kabupaten Asmat.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa potensi wisata di Kabupaten Asmat sangat besar, pengembangan dan promosi wisata perlu diintegrasikan dengan pelestarian budaya dan lingkungan, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Untuk memberikan analisis pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Asmat, perlu diperhatikan beberapa aspek yang relevan.

2.6.4.2 Pengembangan Kawasan Pariwisata Kabupaten Mappi

Kabupaten Mappi, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia, memiliki keindahan alam dan kekayaan budaya yang dapat menjadi daya tarik wisata. Namun, informasi tentang obyek wisata di daerah ini mungkin terbatas. Berikut beberapa potensi obyek wisata yang mungkin dapat ditemui di Kabupaten Mappi:

a) **Pemandangan Alam:**

Kabupaten Mappi dikelilingi oleh hutan-hutan tropis Papua yang menawarkan keindahan alam yang alami. Pemandangan alam, termasuk perbukitan, sungai, dan keanekaragaman hayati, dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman alam yang autentik.

b) **Desa-desa Tradisional:**

Seperti halnya wilayah Papua lainnya, Kabupaten Mappi kemungkinan memiliki desa-desa tradisional dengan rumah adat dan seni ukir khas. Desa-desa ini dapat menjadi tujuan untuk wisatawan yang ingin memahami budaya dan gaya hidup masyarakat setempat. (Kampung Suku Korowai

Gambar 2. 102 rumah suku Korowai



c) Festival dan Acara Budaya:

Festival budaya dan acara lokal dapat memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk merasakan kehidupan masyarakat dan menikmati seni dan budaya Papua yang khas.

d) Pusat Konservasi Alam:

Potensi konservasi alam dan ekowisata juga dapat dijelajahi di Kabupaten Mappi, termasuk upaya pelestarian satwa liar atau ekosistem khusus.

e) Spot Wisata Air:

Kabupaten Mappi mungkin memiliki sungai atau danau yang menawarkan kegiatan wisata air seperti perjalanan perahu, memancing, atau menikmati pemandangan alam dari tepi air.

f) Wisata Sejarah dan Budaya:

Beberapa situs sejarah atau artefak budaya lokal, meskipun mungkin tidak terlalu terkenal, dapat memberikan wawasan tentang sejarah dan warisan Kabupaten Mappi (Mappi Pos : Mappi Pos ini berada di Kampung Hasto Mappi dan merupakan salah satu tempat bersejarah di Papua. Pasalnya, Mappi Pos pernah menjadi saksi pertempuran dalam rangka mempertahankan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda

g) Kegiatan Petualangan:

Jika infrastruktur dan aksesibilitas memungkinkan, kegiatan petualangan seperti berdasarkan dathiking, trekking, atau menjelajahi alam liar mungkin dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan peminat kegiatan luar ruangan.

2.6.4.3 Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Boven Digoel

Kabupaten Boven Digoel dengan ibu kotanya Tanah Merah adalah tempat bersejarah. Selain situs atau tempat-tempat bersejarah. Boven Digoel umumnya menjadi tujuan para wisatawan yang tertarik dengan aspek sejarah, khususnya Penjara Boven Digul yang pada masa lalu difungsikan sebagai tempat pengasingan untuk tawanan pergerakan nasional, dengan total jumlah tawanan mencapai 1.308 orang. Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang pernah diasingkan ke sana meliputi nama-nama seperti Sayuti Melik, Ilyas Yacub (tokoh Permi dan PSII Minangkabau), dan Sultan Syahrir.

Gambar 2. 103 Wisata Sejarah Penjara Penjara Boven Digoel



Penjara ini terdiri dari beberapa bagian, termasuk Tanah Merah, Gunung Arang (lokasi penyimpanan batu bara), area militer yang juga digunakan sebagai tempat bagi petugas pemerintah, serta Tanah Tinggi. Ketika rombongan pertama tiba, Boven Digoel masih belum memiliki pemukiman yang signifikan. Rombongan pertama, yang terdiri dari sekitar 1.300 orang, sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, diberangkatkan pada bulan Januari 1927. Pada akhir Maret 1927, ratusan orang lainnya dari Sumatra juga bergabung. Awalnya, mereka ditempatkan di Tanah Merah, namun dua tahun kemudian, melalui seleksi ketat, sebagian dari mereka dipindahkan ke daerah Tanah Tinggi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa selain kekayaan sejarah yang dimiliki oleh Kabupaten Boven Digoel, terdapat potensi wisata lain yang dapat menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Berikut adalah beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan:

a) Wisata Alam:

Kabupaten Boven Digoel memiliki keindahan alam yang belum terjamah, termasuk hutan-hutan tropis, sungai-sungai yang mengalir indah, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pengunjung dapat menikmati kegiatan seperti trekking, bird watching, atau menyusuri sungai untuk mengeksplorasi keindahan alam yang masih alami. (Air Terjun Bitin Bondut, Air Terjun Atakat

b) Wisata Budaya:

Selain warisan sejarah, Kabupaten Boven Digoel juga kaya akan keanekaragaman budaya. Potensi wisata budaya ini dapat diwujudkan melalui pertunjukan seni tradisional, festival budaya, dan kegiatan interaksi dengan masyarakat setempat untuk memahami lebih dalam kehidupan dan adat istiadat mereka. (Tanah Tinggi)

c) Wisata Kuliner:

Mempromosikan kekayaan kuliner lokal dapat menjadi daya tarik tersendiri. Menyajikan hidangan khas daerah, baik yang berasal dari tradisi Melayu atau suku-suku asli Papua, dapat memberikan pengalaman kuliner yang unik bagi para wisatawan.

d) Wisata Petualangan:

Bagi mereka yang mencari pengalaman petualangan, Kabupaten Boven Digoel dapat menawarkan kegiatan seperti rafting di sungai-sungai yang deras, hiking ke puncak-puncak gunung, atau bahkan camping di lokasi-lokasi yang indah di alam terbuka. (Rumah Pohon)

e) Wisata Ekowisata:

Mengembangkan konsep ekowisata dapat menjadi langkah yang baik untuk melestarikan lingkungan alam sekitar. Program-program ekowisata dapat mencakup edukasi lingkungan, penanaman pohon, dan partisipasi dalam kegiatan konservasi alam.

f) Wisata Agrowisata:

Melihat potensi pertanian dan kebun-kebun di daerah tersebut, pengembangan wisata agrowisata dapat menarik minat para pengunjung. Mereka dapat terlibat dalam kegiatan panen, mengenal proses pertanian lokal, atau bahkan mencoba produk-produk pertanian setempat.

Boven Digoel juga memiliki berbagai objek wisata lainnya, yaitu objek wisata budaya, wisata alam dan wisata rohani antara lain:

1. Rumah di atas pohon Suku Kombay dan Koroway (Rumah yang dibuat di atas pohon, dengan maksud menghindari binatang buas) di Distrik Yanimura.
2. Penjara Boven Digoel dan TMP Perintis Kemerdekaan (Penjara ini digunakan pada jaman penjajahan Belanda dan TMP Perintis Kemerdekaan adalah tempat dikuburnya pahlawan-pahlawan perintis kemerdekaan yang dibuang di Boven Digoel.) sebagai situs sejarah di Distrik Mandobo.
3. Tanah Tinggi (merupakan tempat pengasingan Bung Hatta pada masa sebelum kemerdekaan RI.) Sebagai situs sejarah di Distrik Mandobo.
4. Wisata Alam Gunung Koreyam (Distrik Ambatkwi)

5. Wisata Rohani Gua kandom Kampung Kakuna (merupakan Goa Maria dimana Umat Katolik melakukan ziarah rohani, di Distrik Mindiptana)
6. Wisata Budaya Pesta Ulat Sagu (di Distrik Firiwage. Pesta ini diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hasil bumi.

Berdasarkan data yang didapat dari dinas pariwisata kabupaten Boven Digoel didapatkan beberapa potensi wisata yang bisa dikembangkan yakni dari aktivitas ritual yang merupakan ekspresi budaya yang telah mentradisi di sekitar Boven Digoel:

- Pesta Babi
- Pesta Rumah Baru
- Pesta Kenari
- Pesta Kumbili (Ubi Jalar)
- Tradisi Penguburan
- Tradisi Perkawinan
- Pesta Anak Pertama

2.7 PENERAPAN KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA

Sesuai amanat UUD 1945, salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan merupakan tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan Papua, namun saat ini realisasinya masih jauh dari harapan. Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001 yang mengakui dan memberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua secara otonom berdasarkan aspirasi dan hak asasinya. Namun, pada penerapannya seringkali belum sesuai dengan peraturan hukum dan perundangan yang berlaku. Di sisi lain, adanya otonomi khusus yang dimiliki Papua sudah seharusnya menjadi babak baru yang memungkinkan negara Papua berorganisasi dan berkembang sesuai praktik dan potensinya serta berhasil mengatasi berbagai permasalahan mendasar. Beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala dan menjadi agenda nasional adalah kebijakan dan arah pembangunan sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, melainkan terbagi antar kelompok, wilayah, dan sektor sehingga menimbulkan ketimpangan di antara keduanya. Kegagalan institusi sosial dan hukum juga sering terjadi sehingga menimbulkan ketidakadilan di bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum, sehingga seringkali menjadi tantangan utama yang menghambat proses pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, untuk kurun waktu 2025 - 2045, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan

arah pembangunan jangka panjang daerah, di mana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua harus dapat menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD di empat kabupaten kedepannya dan yang akan diturunkan lagi sebagai acuan Renstra dan RKPD. Kesemua dokumen ini berpedoman pada visi dan misi arah pembangunan jangka panjang sehingga terdapat koherensi dan target sasaran yang utuh dengan tujuan utama pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Provinsi Papua Selatan baru berumur satu tahun, dan merupakan pemekaran dari Provinsi Papua sebagai provinsi induk. Oleh karenanya Refleksi Pembangunan Daerah yang digambarkan dalam bagian ini merupakan refleksi pembangunan daerah yang mencakup empat kabupaten yang ada dalam Propinsi Papua Selatan yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel serta Kabupaten Mappi.

Tanah Papua sudah mengalami beberapa kali pemekaran Provinsi sejak secara sah menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan nama Provinsi Irian Barat. Saat ini terdapat 6 provinsi di Tanah Papua dan salah satu provinsi yang baru saja satu tahun berdiri adalah Provinsi Papua Selatan. Papua secara keseluruhan mengalami perubahan status dengan lahirnya Otonomi Khusus (Otsus) bagi berbagai provinsi di Papua.

Pembangunan Papua diarahkan pada Program Strategis Bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota dan selama periode Tahun 2014-2020 terdapat 6 Program yang bersifat regular dan mendapatkan alokasi Dana Otonom Khusus (DOK) setiap tahunnya yaitu PROSPEK, Kartu Papua Sehat, Gerbang Mas, Bantuan Perumahan, Pendidikan dan Beasiswa Unggul Papua, serta Bangsa Papua.

2.7.1 Penerapan Otonomi Khusus

Provinsi Papua Selatan adalah gabungan empat kabupaten yang sebelumnya merupakan daerah otonom secara terpisah yaitu; Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6697). Yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730). Undang-undang Otsus yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua dalam menjalankan Otonomi Khusus. Otonomi khusus ini diberikan sebagai salah satu cara untuk membangun kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan meletakkan dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Provinsi Papua.

Seiring berkembangnya dinamika pengelolaan Otsus di Papua, Pada Tahun 2021 turut ditetapkan beberapa Peraturan Pemerintah yang melengkapi implementasi Peraturan Pemerintah terkait Otsus, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2011); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebelumnya, Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua

tahap I (RAPPP I) tahun 2023- 2024 ditujukan untuk penataan kembali pembangunan wilayah Papua di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Adapun arahan pembangunan wilayah Papua, yaitu :

- 1) Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) **bidang kesehatan** yang diarahkan pada:
 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan strategi:
 - Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan akreditasi.
 - Peningkatan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan kuantitas dengan mengutamakan tenaga kesehatan orang asli Papua (OAP).
- 2) Penataan budaya perilaku hidup sehat dan tata kelola pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan strategi:
 - Peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku

hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan kabupaten/kota dan implemntasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

- Peningkatan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan.
- 3) Penataan budaya dan peningkatan prestasi olahraga, dengan strategi:
- Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat.
 - Peningkatan tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
 - Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi.
- 4) Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) **bidang pendidikan** yang diarahkan pada penataan budaya belajar serta menjamin akses dan kualitas pelayanan pendidikanpapua secara merata dengan strategi:
- Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan dan pendistribusian pendidik dantenaga kependidikan
- 5) Pembangunan **ekonomi** yang diarahkan pada:
- 1) Penataan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja, dengan strategi:
- a. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasiuntuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
- b. Peningkatan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill development center).
- 2) Penataan pelaksanaan perlindungan sosial untuk kehidupan yang adil dan merata, dengan strategi:
- a. Peningkatan jangkauan pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk data terpilah OAP.
- b. Peningkatan dukungan dan afirmasi perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat **Anim Ha** yaitu: Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terstandar, serta pengembangan wilayah adat Anim Ha sebagai sentra tanaman pangan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041

2.7.2 Perlindungan, Keberpihakan, dan Pemberdayaan

Penerapan Otonomi Khusus di Provinsi Papua didasari dengan Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua, dimana orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan, dan pembangunan diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur kampung dan

pemberdayaan ekonomi. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya

alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian seluas-luasnya. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat. Pemberian kesempatan berusaha Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan penanam modal harus melibatkan masyarakat adat setempat.

2.7.3 Hak-Hak Dasar

Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.

Orang asli Papua berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Dalam hal mendapatkan pekerjaan di bidang peradilan, orang asli Papua berhak memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim atau Jaksa di Provinsi Papua. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Untuk hal

itu Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki.

Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tugas Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi. Dalam hal keagamaan, setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban untuk menjamin :

1. Kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
2. Menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama.
3. Mengakui otonomi lembaga keagamaan.
4. Memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi wajib melindungi, membina, dan mengembangkan kebudayaan asli Papua. Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri orang Papua. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di jenjang pendidikan dasar sesuai kebutuhan.

2.7.4 Politik, Hukum dan HAM

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai badan eksekutif. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. Jumlah anggota DPRP adalah 1/4 (satu seperempat) kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh

mudah, jika jumlah anggota DPRD Papua menurut UU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah 100 kursi maka jumlah kursi DPRP adalah 125 kursi.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan Provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua memerlukan syarat khusus, diantaranya adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

1. Orang asli Papua.
2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua.
3. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.
4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Keanggotaan dan jumlah anggota MRP ditetapkan dengan Perdasus. Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun. Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. MRP mempunyai tugas dan wewenang, yang diatur dengan Perdasus, antara lain:

1. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP.
2. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur.

2.7.5 Kewenangan Pemerintahan Otonomi Khusus

Sedangkan untuk peraturan daerah, Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU 21/2001. Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perdasi dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur. Dalam Peraturan Pemerintah No.106 Tahun 2021 diatur kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut adalah sebagai berikut:

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan bidang: a. politik luar negeri; b. pertahanan keamanan; c. moneter dan fiskal; d. agama; e. yustisi; dan f. kewenangan tertentu.

Kewenangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro;
- b. dana perimbangan keuangan;
- c. sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara;
- d. kewenangan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia; dan
- e. pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang: a. pendidikan dan kebudayaan; b. kesehatan; c. sosial; d. perekonomian; e. kependudukan dan ketenagakerjaan; dan f. pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.

Kewenangan Khusus bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi bidang urusan: a. pangan; b. pertanian; c. koperasi, usaha kecil dan menengah; d. penanaman modal; e. energi dan sumber daya mineral; f. kelautan dan perikanan; g. pemberdayaan masyarakat dan Kampung/kampung adat; h. perhubungan; i. komunikasi dan informatika; j. pariwisata dan ekonomi kreatif; k. perdagangan; l. perindustrian; dan m. persandian.

Kewenangan Khusus bidang kependudukan dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi bidang urusan: a. administrasi kependudukan dan pencatatan

sipil; b. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan c. tenaga kerja. Kewenangan Khusus bidang pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi bidang urusan: a. kehutanan; b. lingkungan hidup; c. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; d. pertanahan; e. kepemudaan dan keolahragaan; f.

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; g. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; h. perpustakaan; dan i. kearsipan. Untuk melaksanakan Kewenangan Khusus terkait urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan di bidang perangkat daerah dan manajemen ASN. Pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan

Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya.

Berikut ini adalah kewenangan di bidang keuangan secara umum untuk provinsi-provinsi di wilayah di Papua. Dalam UU No.21 tahun 2001 diatur tentang jenis-jenis pendapatan

daerah yang dapat diklafisikan menjadi dua jenis penerimaan. Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan memberikan prioritas kepada ProvinsiPapua. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setaradengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun. Dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antaraPemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

BAB III PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu strategis Provinsi Papua Selatan berdasar pada analisis hasil pembangunan periode sebelumnya untuk membangun Provinsi Provinsi Papua Selatan 20 tahun ke depan 2025-2045, hal ini dianalisis dari hasil capaian kinerja pembangunan Tahun sebelumnya. Beberapa isu strategis di Provinsi Provinsi Papua Selatan bersumber dari telaah hasil pembangunan periode sebelumnya, dokumen RPJPD Provinsi Papua Induk 2005-2025, RPJMN 2020-2024, dan isu aktual yang sedang berlangsung termasuk kondisi pemerintahan Provinsi Provinsi Papua Selatan sebagai Daerah Otonomi Baru.

3.1 Masalah Pembangunan Daerah

				0,395.
		Masih rendahnya pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Selatan Tahun 2016-2021	IPM Provinsi Papua Selatan meningkat dari 57,82 pada tahun 2016 menjadi 60,52 pada tahun 2021. Meskipun selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun angka IPM di Provinsi Papua Selatan berada dalam kategori rendah dari tahun 2016 sampai 2018, dan masuk pada kategori sedang di tahun 2019 hingga 2021
		Tingkat kemiskinanmasih tinggi	Tingkat Kemiskinan Provinsi Provinsi Papua Selatan Tahun 2018-2020	persentase kemiskinand di Provinsi Papua Selatan masih tinggi yaitu 20,99% pada tahun2018, dan 19,99% pada tahun 2020.

		Tingginya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Selatan Tahun 2019-2021	Tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di Provinsi Papua Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 2,82% menjadi 4,92%. Kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2021 yaitu 3,01%
--	--	--------------------------------	---	--

Kesenjangan (GAP) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi saat ini merupakan permasalahan pembangunan yang ada di Provinsi Papua Selatan. Permasalahan pembangunan berikut ini adalah indikator kinerja di setiap bidang yang belum mencapai hasil sesuai dengan standar pelayanan minimal maupun standar nasional SDGs. Berikut permasalahan pembangunan yang terjadi di Provinsi Papua Selatan:

Tabel 3. 1 Permasalahan Pembangunan Makro di Provinsi Papua Selatan

No	Aspek Permasalahan	Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Kualitas Hidup, Kesehatan, dan Pendidikan serta Kesejahteraan OAP dan Non OAP	Ketimpangan meningkat	Indeks Gini Provinsi Papua Selatan	Nilai Gini Ratio Provinsi Papua Selatan selama periode 2016 s/d Maret 2021 terus mengalami fluktuasi, data terakhir di 2021 menunjukkan indeks gini ratio Provinsi Papua Selatan sebesar
		Masih kurangnya partisipasi sekolah SD, SMP, dan SMA	Angka Partisipasi Murni di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021	Angka Partisipasi Murni jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun 2021 masing-masing 85,74%, 52,82%, dan 38,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik pada jenjang tersebut masih rendah. Capaian ini menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik pada jenjang tersebut masih rendah.
		Masih kurangnya fasilitas Kesehatan	Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Pembantu di Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 257 Puskesmas Pembantu, menurun dari tahun sebelumnya yaitu 309 Puskesmas Pembantu.
		Masih kurangnya kondisi panjang jalan	Panjang Jalan di Provinsi Papua Selatan tahun 2021	Di Provinsi Papua Selatan telah terbangun 663,75 km jalan, dengan 273,1 km permukaan aspal dan 390,65 km permukaan lainnya.
2	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rendahnyapemahaman SDM dalam menjalankan roda pemerintahan	Manajemen Aparatur yang profesional dan berbasis kompetensi serta berkinerja baik	Pengelolaan Aparatur yang profesional dan berbasis kompetensi serta berkinerja baik masih rendah
		Rendahnyapeningkatan kualitas Aparat		
		Kualitas pelayanan yang belum memenuhi standar pelayanan		Manajemen & kondisi kelembagaan belum sesuai kinerja beban kerja

		Rendahnya partisipasi masyarakat sipil dalam memantau kebijakan pemerintah		Partisipasi masyarakat rendah
		Belum efektifnya kinerja pembangunan dan kinerja keuangan dan lemahnya fungsi pengawasan, atas aktivitas manajemen		Masih terdapat ketimpangan pembangunan kinerja pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah
		Masih terbatasnya akses teknologi dan informasi	Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya peraturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu	Nilai SPBE di Provinsi Papua Selatan masih rendah
3	Pertumbuhan Ekonomi, Pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah / lokal serta pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan	Kondisi geografis wilayah Provinsi Papua Selatan yang berdampak pada pendapatan masyarakat Masyarakat miskin yang kurang produktif karenanya mengharapkan bantuan dari pemerintah Masih banyaknya pencari kerja yang tidak memiliki ijazah Penyerapan alokasi pupuk bersubsidi tidak mencapai alokasi yang ditetapkan Masih kurangnya tingkat pemahaman teknologi terkait pengelolaan usaha tani		

		Terbatasnya hasil Produksi untuk konsumsi keluarga dan belum berorientasi pada profit dan komersil Terbatasnya jumlah obyek wisata		
		Kurang tertariknya investor di bidang pariwisata		
4	Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Masih kurangnya kesadaran dalam mengelola lingkungan hidup		

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kelemahan yang belum terselesaikan, peluang yang belum terealisasi, dan ancaman dari luar daerah yang tidak dapat diantisipasi, dimana hal utama yang perlu dilakukan yaitu melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan memastikan bahwa rencana pembangunan yang dikembangkan mampu menjawab permasalahan tersebut secara memadai.

Dengan diketahuinya permasalahan pembangunan daerah Provinsi Provinsi Papua Selatan, diharapkan juga dapat mengungkap berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan kinerja pemerintah daerah dalam membangun Provinsi Provinsi Papua Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan menyangkut pada akses pelayanan publik lainnya. Misalnya, akta kelahiran sebagai syarat pendaftaran sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari itu, penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hal yang paling fundamental untuk memastikan pengakuan hukum seorang individu oleh negara, sehingga mudah bagi individu tersebut untuk memperoleh pelayanan publik yang menjadi hak-nya. Secara umum, masih banyak yang perlu di perbaiki dalam peningkatan cakupan penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Provinsi Papua Selatan. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Provinsi Papua Selatan dapat dilihat dalam Tabel 3.2 Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memegang peran penting dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan. Pemerintah provinsi berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan akurasi data kependudukan untuk mendukung efektivitas pembangunan daerah. Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Provinsi Papua Selatan meningkat signifikan, dari 37.32% pada tahun 2017 sampai 63.64% pada tahun 2020. Namun, kepemilikan akta lahir masih sangat rendah. Pada tahun 2021, masih ada 44.64% anak berusia 0-4 tahun yang belum memiliki akta lahir.

Tentunya, hal ini akan menghambat mereka untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan pencatatan sipil juga masih sangat buruk. Rasio pasangan yang berakate nikah pada tahun 2021

hanya ada 37.73%.

Adapun permasalahan yang disebutkan tersebut disebabkan karena terbatasnya saranaprasarana kependudukan, seperti ketersediaan gedung perkantoran serta alat perekaman KTP. Selain itu, sumberdaya manusia atau kader di tingkat kampung sebagai fasilitator tenaga registrasi masih terbatas. Adapun rumusan masalah pada bidang urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Kependudukan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum maksimalnya pelayanan administrasi kependudukan yang transparan, akuntabel, dan menjangkau semua masyarakat	1	Rendahnya Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	1	Belum optimalnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan akta catatan sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik
			2	Rendahnya penerbitan akta kelahiran bagi anak di setiap daerah
			3	Cakupan pendataan data terpilah OAP dan non OAP belum 100%
			4	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan
	2	Terbatasnya sarana prasarana kependudukan	1	Sarana dan prasarana pendataan Dukcapil (Gedung perkantoran dan alat perekaman KTP) yang masih sangat terbatas dan menyebar tidak merata
			2	Terbatasnya kuantitas dan kapasitas tenaga kerja atau kader untuk pencatatan dokumen kependudukan
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	3		1	Kemudahan pembuatan akte pada setiap bayi lahir
Pertumbuhan Penduduk Tidak Seimbang	4	Masih tingginya disparitas TFR dan Kondisi demografi antar wilayah	1	Kurangnya kapasitas dankapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;
			2	Belum optimalnya sinergitas pelaksanaanpengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
			3	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangsa Kencana

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.2 Pendidikan

Permasalahan Pendidikan di Provinsi Papua Selatan telah lama menjadi perhatian

nasional, demi mencapai pemerataan kualitas Pendidikan antarwilayah. Berbagai studi menunjukkan terdapat kesenjangan antara kondisi Pendidikan di Provinsi Papua Selatan dengan wilayah lain, baik pada jenjang Pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Meskipun menunjukkan trend yang meningkat selama lima tahun terakhir, tetapi capaian kedua indikator tersebut di Provinsi Papua Selatan masih tertinggal dengan rata- rata di tingkat nasional.

Identifikasi permasalahan Pendidikan di Provinsi Papua Selatan menunjukkan terdapat tiga permasalahan utama, yaitu; (1) Rendahnya akses terhadap layanan Pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu/kualitas layanan Pendidikan; dan (3) Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan Pendidikan. Permasalahan akses menyangkut kemudahan bagi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Sementara masalah mututerkait bagaimana proses Pendidikan dapat dijalankan secara efektif sehingga menghasilkan keluaran yang kompetitif. Sementara tata kelola merupakan sebuah hubungan institusi dan aktor-aktor terkait, terutama pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk pendidikanTerkait dengan ketiga faktor tersebut, uraian terhadap rumusn masalah dan akar masalahnya bisa dilihat pada

Tabel3.3.

Tabel 3. 3 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pendidikan di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
				Rendahnya tingkatpartisipasi
Akses, kualitas dan tata kelola pendidikan yang belum optimal	1	Rendahnya akses Terhadap layanan pendidikan	1	pendidikan, terutama untuk jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi
			2	Rendahnya proporsi pengeluaran per kapita rumah tangga terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan
			3	Belum meratanya ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Beberapa kabupaten mengalami kekurangan fasilitas sekolah menengah.
				Kondisi topografi yang sangat ekstrim dan
			4	variatif sehingga menyulitkan peserta didik mengakses sekolah
				Belum optimalnya pemerataan dan
			1	peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung

				peningkatan kualitas pendidikan
			2	Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap pelaksanaan tugas relatif masih rendah
			3	Belum maksimalnya melek Calistung (membaca, menulis dan berhitung)
			4	Fasilitas sekolah yang kurang memadai,
	2	Belum optimalnya mutu/ kualitas layanan pendidikan	5	seperti kelas dalam kondisi rusak, kekurangan fasilitas laboratorium, dsb
			5	Rendahnya sekolah yang bersertifikasi A dan B
			6	Pendidikan ekstrakurikuler dan program pengayaan belum berkembang dengan optimal
			7	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran
			8	Belum berkembangnya sekolah menengah, politeknik dan perguruan tinggi yang berbasis potensi pengembangan kawasan lokal seperti jurusan pertanian, pariwisata, pertambangan
			9	Rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di sekolah menengah, politeknik dan universitas, serta kurangnya program pemagangan yang terstruktur sehingga kompetensi lulusan kurang relevan
	3	Belum optimalnya tata kelola penyelenggara pendidikan	1	Belum maksimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
			2	Belum optimalnya pengembangan database tenaga pendidik yang telah memperoleh sertifikasi
			3	Belum memadainya penerapan SPM pendidikan di setiap sekolah
			4	Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas pembelajaran
			5	Belum ada konsep bersama antara provinsi dan kabupaten terkait kerangka besar pendidikan sehingga tidak tercipta sinergitas dalam memajukan pendidikan di Provinsi Papua Selatan.
Pendidikan	1		1	Masih terpolanya penyelesaian pendidikan dengan mengutamakan pembangunan sarana fisik bangunan gedung sekolah yang belum tentu sesuai untuk penyelesaian masalah pendidikan karena lokasi penduduk yang tersebar

			2	Penempatan dan Penyebaran tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan profesinya
			3	Tingginya kesenjangan pembangunan untuk mengatasi gejolak masyarakat
			4	Masih tingginya angka putus sekolah
			5	Tata kelola perizinan Pembuatan Sekolah yang masih sulit
			6	Jumlah tenaga pendidik yang terbatas
			7	Standar sarana dan prasarana untuk sekolah
			8	Diperlukan dibangunnya BLK
			9	Vokasi untuk pemuda putus sekolah
			10	Pendampingan sampai par a pemuda mandiri
Stadion nasional internasional Bertaraf dan	1	Hilirisasi industri	1	Peningkatan prestasi olah raga bertaraf nasional ke internasional
Standar Guru dan Tenaga Kependidikan Sarpras Keuangan	1	Kurangnya pelayanan bidan g pendidikan	1	Formasi penerimaan PNS guru kurang
			2	Perlu pengadaan guru setiap tahun
			3	Pemerataan terhadap akses pendidikan
Budaya	1	Lunturnya nilai-nilai budaya	1	Belum maksimalnya peran lembaga masyarakat adat
	2	Bahasa	2	Belum maksimalnya keterlibatan lembaga masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
	3	Sistem pengetahuan	3	Kurang berperannya dewan kesenian
	4	Organisasi sosial	4	Belum ada regulasi yang kuat terkait pelestarian budaya
	5	Sistem peralatan dan teknologi	5	Kurangnya kegiatan - kegiatan/event bersifat kebudayaan
	6	Sistem mata pencaharian dan ekonomi	6	Kurangnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pelaksanaan pembangunan

3.1.3 Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Selatan tergolong rendah yang, rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) tingginya angka kematian ibu (AKI)

dan angka kematian bayi (AKB) serta tingginya prevalensi gizi buruk pada balita. Permasalahan-permasalahan yang memberikan sumbangan terhadap angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan kesehatan. Berikut rincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Provinsi Papua Selatan berdasarkan capaian program-program kesehatan hingga tahun 2022:

Tabel 3. 4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 Urusan Bidang Kesehatan di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan belum memadai	1	Ketersediaan dan sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas	1	Sepuluh puskesmas di Provinsi Provinsi Papua Selatan belum terakreditasi, dan yang sudah terakreditasi sebagian besar baru pada tingkat dasar dan madya
				2	Empat kabupaten di Provinsi Provinsi Papua Selatan belum memiliki rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan (masih sebagai FKTP)
				3	Rasio posyandu per jumlah balita masih rendah dan strata posyandu sebagian besar berstrata pratama dan madya Belum semua kabupaten melaksanakan
				4	Posbindu PTM, dan yang sudah terlaksana belum berjalan secara teratur Pelayanan Kesehatan di DTPK
				5	Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine belum berjalan sesuai standar Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan terutama dokter gigi dan
		2	Jumlah dan Kualitas tenaga kesehatan belumm memadai serta penyebarannya belum merata	1	tenaga preventif-promotif(Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, ATLM, Kefarmasian dan Gizi)
				2	Distribusi tenaga medis, perawat dan bidan belum merata, terutama untuk daerah-daerah sulit
				3	Kurang dari 10% puskesmas di ProvinsiProvinsi Papua Selatan yang telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan cukup
				1	Pencatatan dan Pelaporan kematian ibu dan anak tidak berjalan secara teratur
				2	Cakupan pelayanan ibu dan anak masihrendah, terutama di kabupaten yangmemiliki wilayah sulit
				3	Prevalensi penyakit menular (Tb, malaria, HIV, diare, pneumonia) masih tinggi di beberapa kabupaten
				4	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi rendah

				5	API Malaria masih tinggi, dan belum ada kabupaten/kota yang dinyatakan telah mencapai eliminasi malaria
		3		6	Belum ada kabupaten/ kota yang telah mencapai pelayanan terpadu PTM ≥80% puskesmas.
				7	Belum ada kabupaten/ kota yang memenuhi kriteria melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja dan Upaya Kesehatan Olah Raga
				8	Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) baru berjalan di 1 kabupaten dan Kabupaten/ Kota Sehat (KSS) belum berjalan
			Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum optimal	9	Pencapaian target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota masih rendah. Selain jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sudah tercakup dalam kesehatan keluarga dan pengendalian penyakit, pelayanan lain meliputi pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, usia produktif, usia

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
					lanjut, dan orang dengan gangguan jiwa berat
				10	Sebagian target-target Renstra Kemenkes di tingkat provinsi belum terpenuhi, antara lain mencakup penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat serta peningkatan sumber daya kesehatan
2	Kualitas SDM Provinsi Provinsi Papua Selatan masih rendah, yang dipengaruhi oleh faktor gizi sejak 1000 HPK		Tingginya prevalensi balita stunting	1	Belum semua kabupaten/ kota menjalankan surveilans gizi sesuai standar
				2	Peran serta lintas sektoral dalam intervensi sensitif untuk pencegahan stunting belum berjalan, hampir seluruhnya masih dilaksanakan oleh sektor kesehatan
				3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merupakan intervensi spesifik untuk pencegahan stunting masih rendah.
3	Kesehatan			1	Rendahnya budaya hidup sehat
				2	Pusat pelayanan kesehatan belum didukung dengan ketersediaan listrik dan air bersih serta sanitasi yang memadai
				3	Rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang cukup memadai hanya terdapat di beberapa daerah dengan akses yang memadai
				4	Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan
				5	Masih rendahnya kualitas SDM di bidang pelayanan kesehatan
				6	Masih tingginya angka balita dengan gizi buruk
				7	Masih tingginya kesenjangan tingkat pelayanan kesehatan antar wilayah
				8	Masih rendahnya angka harapan hidup

					masyarakat
				9	Permasalahan stunting
				10	Tidak adanya fakes dan nakes
				11	Ketersediaan obat-obatan habis digunakan pasien di kabupaten lain
				12	Keamanan nakes
				13	Dokter Provinsi Nusantara yang kurang(hanya tersedia 7 dari 20 yang dibutuhkan)
				14	Pelatihan dan pendampingan memasak makanan bergizi
4	Rumahsakit standar internasional	1	Penangan medis	1	Pasien rujukan berkurang,layanan kesehatan semakin meningkat
5	Stunting	1	Masih banyak yang kena stunting	1	Pola hidup meramu yang membuat tidak hidup teratur
				2	Pola makan yang tidak sehat
				3	Kawin tukar ikut mempengaruhi kehidupan/pernikahan dini
6	Fasilitas kesehatan	1	Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan	1	Kurangnya tenaga medis
				2	Obat yang terbatas
				3	Obat ada tapi tidak sesuai masalah
				4	Masalah keamanan nakes
				5	Program kader di kampung hilang karena ada program puskesmas keliling
7	Masih kurangnya fasilitas Kesehatan ;	1	Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan	1	Bangunan Puskesmas yang sesuai standar(Prototype) masih dibawah 50% dari jumlah Puskesmas yang ada.
				2	Masih Kurangnya Prasarana, Sarana dan Alat Kesehatan.
				3	Belum semua Kampung memiliki bangunan PuskesmasPembantu (PUSTU);
				4	Rumah Sakit Rujukan yang Representative (Type B)
8	SDM Kesehatan;	1	Pemenuhan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	1	Sarana Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM Kesehatan yang sesuai standar dalam menunjang pelayanan kesehatan
				2	Belum Terpenuhinya 9 Jenis Tenaga Kesehatan yang sesuai standart

9	Kualitas Pelayann Kesehatan.	1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Masih banyak Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum sesuai Standar.
10	Rendahnya Kapasitas Kelembagaan KBKS	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1	Masih lemahnya kapasitas dan Kelembagaan bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.4 Pekerjaan Umum

Tabel 3. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas daerah	1	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan transportasi(jalan dan jembatan) serta sistem pengendalialiran air.	1	Masih banyaknya jalan provinsi yang masih dalam status rusak dan belum optimal penanganannya
			2	Kurangnya kapasitas OPD untuk mengidentifikasidan mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan prioritas
			3	Lambatnya rehabilitasi jalan/ jembatan rusak
			4	Pembangunan jalan/jembatan yang terintegrasi dengan sasaran prioritas pembangunan sektoral dan spasial masih belum dikelola secara optimal
			5	Kurangnya akses jalan antar ibu kota kabupaten menuju ke distrik serta kampung yang bisa terakses
			6	Belum memadainya kuantitas dan kualitas jalan di wilayah Provinsi Provinsi Papua Selatan terutama ke daerah- daerah yang memiliki potensi besar baik di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, kelautan dan perikanan
			7	Belum adanya pengendali banjir untuk kawasan pemukiman dan pertanian yang terletak disepanjang aliran sungai yang berpotensi banjir.
			8	Belum optimalnya pemeliharaan saluran irigasi di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi;
			9	Belum terpenuhinya kebutuhan saluran drainase
			10	Sarana dan Prasarana Infrastruktur untuk Masyarakat

	2	Terbatasnya kapasitas tatakelola dan tingginya pembiayaan infrastruktur	1	Kondisi geografis wilayah yang sulit berimplikasi pada tingginya biaya pembangunan infrastruktur fisik daerah
			2	Sering munculnya permasalahan hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur dasar daerah
Stadion Bertaraf nasional dan internasional	1	Hilirisasi industri	1	Peningkatan prestasi olah raga bertaraf nasional keinternasional
Rendahnya aksesibilitas infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi yang berdaya dukung lingkungan	1	Infrastruktur dasar belum terdistribusi secara merata diseluruh distrik dan kampung	1	Minimnya ketersediaan infrastruktur dasar, air minum sanitasi dan air limbah
	2	Infra struktur penunjang perekonomian belum menjangkau seluruh wilayah mappi	2	Minimnya ketersediaan infrastruktur penunjang perekonomian, jalan dan irigasi
	3	Rendahnya bangunan dan lingkungan yang tertata	3	Dokumen makro perencanaan pembangunan masih dalam tahap revisi
	4	Infra struktur pejalan kaki/trotoar belum optimal	4	Bahu jalan digunakan kendaraan, mempersempit lajur kendaraan
	5	Pengelolaan sampah masih belum optimal	5	Belum tersedianya TPA , TPS
Belum optimalnya pengembangan kawasan perumahan kampung	1	Rendahnya pengawasan dan penataan perumahan dan kawasan permukiman	1	Belum optimalnya perencanaan teknis, pengembangan dan pembangunan, serta Saprasi perumahan dan kawasan permukiman
			2	Belum meratanya ketersediaan listrik di distrik dan kampung
	2	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan	3	Belum optimalnya perencanaan teknis pertanahan , penataan, pemanfaatan dan penyelesaian sengketa, serta pengukuran dan sertifikasi lahan
			1	Belum terpenuhinya kebutuhan sapras
			2	Rendahnya kualitas SDM aparatur
Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan public	1	Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja kelembagaan	1	Belum optimalnya pelayanan internal
			2	Minimnya sapras yang berkualitas dan layak

			3	Masih rendahnya kualitas aparatur perangkat daerah
			4	Belum optimalnya kualitas administrasi perangkat daerah
	2	Belum optimalnya sarana listrik di tingkat distrik dan kampung	1	Minimnya Fasilitas sumber pembangkit listrik (PLTD, PLTA, PLTS)
Belum optimalnya pembangunan ekonomi Yang inklusif dan berkelanjutan	1	Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah dan kawasan strategis	1	Integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan belum optimal
			2	Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum masal
			3	Belum efektifnya pengelolaan sapras transportasi
	2	Minimnya ketersediaan PSU perumahan dan pemukiman	1	Masih terdapat kondisi lingkungan perumahan dan pemukiman yang buruk
			2	Perlunya upaya pengoptimalan pelayanan pengelolaan air minum, air limbah dan sampah
	3	Masih terjadinya genangan banjir dan Rob	1	Minimnya ketersediaan saluran dan gorong gorong yang belum berfungsi secara optimal
			2	Saluran drainase belum tersedia dan terintegrasi secara menyeluruh
	4	Perlunya peningkatan pengelolaan tata ruang	1	Belum optimalnya kesesuaian tata ruang
			2	Pembangunan kawasan yang mendukung perwujudan tata ruang yang berdaya guna perlu dioptimalkan
	5	Pengelolaan kualitas LH yang masih belum optimal	1	Masih terjadi pencemaran dan kerusakan LH
			2	Belum optimalnya pengelolaan persampahan
Pembangunan kawasan terpadu	1	Tidak terkoneksi wilayah	1	Kurangnya tempat-tempat bagi masyarakat
Akses Jalan		Ketersediaan Air Baku		Pembebasan Lahan
Air Baku		Pengairan/Irigasi Pertanian		Jumlah Ketersediaan Air Baku yang terbatas
Pangan		Perumahan Layak		Tinggi rendahnya Curah Hujan

		Huni		
Perumahan		Ketersediaan Air Baku		Minimnya kepemilikan rumah layak huni
Belum tersedianya bangunan gedung kantor OPD, Air Bersih, Air Kotor, Air Limbah, dan Persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi	1	Ditetapkannya Lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/ KIPP Provinsi Papua Selatan pada lahan baru.		Pembentukan DOB oleh Pemerintah Pusat
	2	Jarak yang jauh antara Ibukota Provinsi dan KIPP		
	2	Kerusakan pada system pengelolaan Air Minum		
Provinsi Papua Selatan	3	Tidak adanya Operasi dan Pemeliharaan terhadap SPAM		
Banjir pada wilayah perkotaan dan permukiman	1	Pembangunan Saluran Drainase tidak terintegrasi		Tidak tersedianya jaringan system pembuangan Air Kotor/Drainase
	2	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan saluran drainase		
	3	Pembangunan jalan tidak disertai Dengan saluran Drainase		
Limbah yang dibuang sembarangan		Limbah rumah tangga dan industri kecil dibuang pada lahan kosong.		Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik dan terpusat
Kurangnya penggunaan fungsi ruang terhadap kesesuaian ruang	1	Belum tersedianya fasilitas pedestrian di perkotaan		Tidak tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) Publik
	2	Kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas RTH Publik		

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.5 Perhubungan

Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan ketidakoptimalan konektivitas transportasi. Permasalahan ini menimbulkan dampak yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan fasilitas transportasi serta aliran orang, barang dan jasa. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di Provinsi Papua Selatan terdapat dalam Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perhubungan di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya konektivitas transportasi	1	Kurangnya tingkat kesesuaian, kecukupan keandalan pelayanan transportasi idalam pemenuhan kebutuhan transportasi dan	1	Kurang optimalnya pemanfaatan bandara perintis
			2	Kurang maksimalnya keberadaan titikterminal untuk mengangkut kendaraan umum dan penumpang
			3	Belum optimalnya fungsi Fasilitasterminal karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan
			4	Rendahnya ketersediaan moda transportasi antar daerah
			5	Belum optimalnya kualitas pelayanan bandara dan fasilitas bandara
			6	Biaya angkutan umum yang belum terstandar
			7	Masih terisolasinya beberapa wilayah distrik
	2	Lemahnya implementasi transportasi berwawasan lingkungan	1	Belum berjalannya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi seperti penurunan emisi gas buang kendaraan dan penurunan volume limbah B3 dari sisa oli kendaraan
	3	Masih rendahnya tingkat keselamatan dan keamanan perjalanan	1	Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat (Lampu jalan, rambu-rambu)
			2	Kurangnya koordinasi antar tingkatan
	4	Belum optimalnya tata kelola urusan perhubungan	3	pemerintahan telah mengakibatkan kurang efektifnya fasilitasi pelayanan transportasi darat, laut dan udara Proses perencanaan (studi-pengusulan) dan proses pembangunan sarana dan
			1	prasarana fisik sarana prasarana infrastruktur perhubungan memakan waktu yang lama
			2	Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan
			3	tenaga pendidik transportasi
			4	Sering munculnya permasalahan Hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Rendahnya tingkat kelsamatan atautingginya tingkat keslamatan	1	Kecelakaan lintas lalu	1	Kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak dan kondisi jalan yang rusak

	2	Rendahnya a kinerja pelayanan angkutan umum	2	Tingkat disiplin pengetahuan dan operator angkutan yang rendah
	3	Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan ruas jalan di PPSmarka, rambu,RPPJ dan paku jalan	3	Keterbatasan anggaran yang dimiliki
	4	Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan mental pengguna jalan dan lemahnya penegakan hukum Bagi pelanggar lalu lintas	4	Mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas
	5	Rendahnya penggunaan angkutan umum yang berkapasitas besar (kondisi angkutan umum masal yg belum memenuhi harapan pengguna jasa transportasi)	5	Kondisi angkutan umum masal yang belum memenuhi harapan masyarakat
Lamanya waktu tempuh	1	Belum terkonetifitasnya semua kabupaten di pps sehingga memerlukan beberapa moda (transit) sehingga dari kab Merauke ke kab lain memakan waktu lama	1	Jalan yang tersedia sebagian besar mengalami rusak berat 36% dan 29% yang masih baik dari sepanjang jalan 1.313, 79 km
	2	Belum mantabnya infrastruktur jalan pada transportasi beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan begitu juga sebaliknya	2	Armada angkutan umum masal yang umur kendaraan yg sudah tua (perlu peremajaan)
	3	Angkutan dalam satu provinsi baik darat dan penyeberangan masih terbatas dalam kondisi rusak		
Tingginya biaya transformasi	1	Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana secara menyeluruh	1	Penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority
	2	Belum mantabnya manajemen kepengurusan angkutan masal di Merauke	2	Banyaknya pribadi yang mengelola angkutan umum yang dilakukan secara tradisional
	3	Belum optimalnya pembinaan atau pemantauan dan pengendalian angkutan darat	3	Kendaraan yang melintas overloading dan menggunakan moda bukan utk peruntukannya
	4	Belum optimalnya pengembangan angkutan multi Moda	4	Masih dominannya angkutan berbasis jalan lewat darat sementara harus melewati sungai
	5	Belum optimalnya pengelolaan di kawasan Bandar udara Dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan baik dari aspek tanah, merah, ewer, kamur dan lainnya	5	Masih dominannya angkutan berbasis udara karena pps didominasi antar kabupaten dg pesawat udara
	6	Belum tersedia pelabuhan pengumpan regional yg dapat menampung pengiriman logistic dan penumpang	6	Diharapkan pelabuhan ditambah perluasan

	7	Logistic ekspor impor di pps lebih kecil dibandingkan provinsi lain		
Infra struktur internet masih terbatas	1	Jaringan internet untuk publik	1	Kurangnya akses masyarakat terhadap jaringan data
Moda transportasi i kereta	1	Moda transportasi i antar kabupaten	1	Konektifitas antar kabupaten meningkat
Kurangnya akses masyarakat terhadap jaringan data	1	Pengaruh pasang surut	1	Memperlancar arus logistic dari dan keluar PPS (calon lokasi di wanam)
Konektifitas antara wilayah dalam kabupaten dan provinsi	1	Belum adanya akses jalan dari kabupaten dan provinsi	1	Perlu pembangunan jalan
	2	Transportasi laut yang terbatas	2	Penyediaan dermaga
	3	Transportasi udara belum mencapai semua wilayah di asmat	3	Penyediaan kapal
	4	Pengembangan konektifitas mendukung pengembangan propinsi papua pegunungan dari sawaerma- batas batu abe am-wamena. (membangun papua pegunungan melalui asmat)	4	Pengembangan bandara revitalisasi yang tidak operasional
	5	Kawasan Pembangunan Petikemas	5	Pengembangan penyediaan transportasi yang terjadwal menghubungkan antar kabupaten dan distrik

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.6 Ketahanan Pangan

Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan masyarakat memiliki kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang ketahanan pangan di Provinsi Papua Selatan terdapat dalam Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Tingginya kerawanan pangan masyarakat	1	Rendahnya ketahanan pangan masyarakat	1	Terbatasnya diversifikasi pangan lokal. Belum dikembangkan dan dipromosikan dengan baik sumber pangan alternatif seperti Komoditas sagu, ubi jalar dan keladi sebagai potensi bahan pangan lokal
			2	Terbatasnya akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas
			3	Persentase daerah rentan pangan di Provinsi Provinsi Papua Selatan masih cukup tinggi
			4	Belum optimalnya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
	2	Terbatasnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan barang-	1	Rendahnya daya beli penduduk berpenghasilan rendah terhadap pangan. Hal ini ditunjukkan dengan konsumsi pangan yang berada di bawah standar kecukupan gizi

		barang konsumsi	2	Akses pangan masyarakat terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal masih terbatas
			3	Masih terbatasnya infrastruktur pengolahanpangan (laboratorium uji mutu, peralatan, dll) yang akan turut menentukan kapasitas produksi dan ketersediaan bahan pangan
	3	Belum optimalnya tata kelola dan SDM pemenuhan kebutuhan pangan dan kecukupan gizi	1	Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas supply bahan pangan
			2	Terbatasnyajumlah dan kapasitaspetugas penyuluh/pemdamping pengolahanpangandangi untuk mendorongpeningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan pangan
			Belum optimalnya produktivitas pertanian	
			1	Rendahnya kapasitas SDM bidangpertanian (petani dan penyuluh pertanian)
			2	Terbatasnya akses permodalan bagipetani, peternak maupun pembudidaya
			3	Belum adanya konsistensiproduksi pertanian,peternakan dan
				perikanandalam mendukung ketersediaan pangan.
			4	Belum adanya hilirisasi bidang pertanian
			5	Rendahnya pengembangan teknologi pertanian
			6	Mekanisasi pertanian terkendala penguasaan peralatan dan BBM
			7	Rendahnya jaminan ketersediaan pupuk
			8	Sistem pengendalian hama pertanian rendah
			9	Adanya konflik kepemilikan lahan
			10	Tata kelola kelembagaan petani masih rendah yang berdampak pada hasil pertanian rendah.
			11	Rendahnya penyediaan infrastruktur di wilayah pertanian
			12	Dukungan perluasan lahanpertanian bagi masyarakat lokal rendah
Degradasi ketahanan Pangan pangan lokal berbasis	1	Suku Marind diMerauke Provinsi Papua Selatan, bergelut dengan malnutrisi dan kerentanan pangan,sejakpemerintah menyulap jutaan hektar hutan Papua menjadi lumbung padi diIndonesiaTimur. Meredupnyatradisilokal olehkebijakan pangannasionalsejaklama melemahkanketahanan pangan masyarakat adat, jauhsebelum penebangan hutan demi industrialisasi,yangkemudian berujung fatal.Selain itu, penyeragaman pangan juga memicu kerentanan pangan, merusak kedaulatan tubuh, menghancurkan daya hidup dan budayalokal, sertamerusak ekologi Indonesia sendiri. Kasus malnutrisidiZanegitahun ini	1	Kondisi geografis wilayah yang didominasi rawa berlumpur dan sungai-sungai, yang dapat mempengaruhi produksi pangan
			2	Harga bahan bakar minyak (BBM) yang relatif lebih mahal akibat suplai BBM yang tidak lancar di wilayah tersebut
			3	Ketergantungan pada bantuan pangan dari pemerintah yang tidak selalu terjamin ketersediaannya
			4	Keterbatasan akses ke sumber daya pangan seperti lahan pertanian dan perikanan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
		sudah banyak berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perbaikan dicapai lewat intervensi pemerintah melalui pembagian sembako atau suplemen bernutrisi .		
Pangan			1	Kemandirian petani sagu yang rendah
			2	Minimnya ketersediaan pasar untuk masyarakat menjual hasil tangkapan
Penganeka ragam konsumsi pangan dan gizi masyarakat stabilitas pasokan, harga dan harga pangan				Pengetahuan rendah, aksesibilitas rendah, kebijakan
Belum adanya perwilayahan komoditas				Pengetahuan rendah, aksesibilitas rendah, kebijakan
Pemasaran		Jalur transportasi belum optimal		Pengetahuan rendah, aksesibilitas rendah, kebijakan
SDM yang tidak tersedia dan masih rendah		Penempatan sdm belum optimal		Pengetahuan rendah, aksesibilitas rendah, kebijakan
Pertanian (karet yang ditanam oleh OAP)	1	Proyek tanaman karet tidak berjalan	1	Masalah tanah yang digunakan
			2	Model penyuluhan yang tidak sesuai dengan OAP
	1	Belum dikelola dan ditata dengan baik	1	Tidak ada yang tanam sagu
			2	Sagu masih tumbuh secara liar
Terbatasnya penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat;			3	Pemanfaatan sagu masih untuk kebutuhan sehari-hari
Stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan tidak merata.			4	Belum adanya jenis produksi lain untuk sagu
Belum terintegrasinya Pengembangan Komoditas berbasis Kewilayahan dan kearifan local termasuk rendahnya pertanian terpadu dari hulu ke hilir termasuk Peternakan dan perikanan				

Rendahnya Keberpihakan terhadap petani asli Papua				
Rendahnya Penguatan kapasitas dan pendampingan berkelanjutan kelembagaan petani				
Rendahnya Prasarana dan sarana pertanian (Pupuk, BBM)				
Rendahnya Sumber daya Manusia baik petani/peternak/nelaya maupun petugas.				
Budidaya sagu				
Ketersediaan dan Cadangan pangan terbatas;	1	Masyarakat cenderung menanam hanya untuk kebutuhan jangka pendek	1	Rendahnya Pengetahuan
Masih ada daerah Kerawanan Pangan;	2	Masyarakat tinggal di wilayah	2	Rendahnya Aksesibilitas

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak termarginalisasi dalam proses-proses pmebangunan. Selain itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Dari sisi kesenjangan gender, angka IPG di Provinsi Papua Selatan masih tertinggal jauh di bawah nasional. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan isu besar di Provinsi Papua Selatan. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Papua Selatan dapat dilihat dalam Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
	1	Belum optimalnya perlindungan hak serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan	1	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah publik dengan spektrum yang semakin luas.
			2	Banyaknya perkawinan yang tidak sah
			3	Kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang dikelola perempuan
			4	Rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja dan migran Indonesia Tenaga Kerja Perempuan di sektor informal
			5	Masih terjadinya kasus diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan perempuan
				Rendahnya pemenuhan hak anak dalam pelayanan publik, yaitu: a. kepemilikan akte kelahiran; b. Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang
Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak daerah			1	Tua/Keluarga; C. puskesmas ramah anak, d. kampung anak sejahtera; e. sekolah ramah anak; f. pusat kreatifitas anak; g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); h. Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah
		Belum optimalnya pemenuhan hak		(RASS); i. media informasi layak anak seperti PISA

	2	anak dan perlindungan khusus anak		(Pusat Informasi Sahabat Anak)
			2	Masih terdapat kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang
				termasuk minuman keras pada anak
			3	Masih terdapat kasus konsumsi Video porno untuk anak di bawah umur
			4	Masih terdapat kekerasan anak dalam rumah tangga
			5	Belum ada penyediaan rumah layak anak (panti) untuk anak di keluarga yang tidak mampu
			6	Masih terjadinya kasus diskriminasi dan eksploitasi anak
	3	Belum optimalnya kontribusi perempuan terhadap pembangunan		Masih terdapat kasus pernikahan dini pada anak usia remaja
			8	Pelayanan untuk anak yang sedang dalam masa tahanan kurang maksimal
			1	Masih kurangnya tenaga perempuan yang bekerja di DPR, lembaga eksekutif, dan PNS
			2	Terdapat pola patrilineal kesukuan, menyebabkan partisipasi aktif dari perempuan dalam proses pembangunan menjadi sulit
	4	Belum optimalnya tata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1	Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
			2	Belum optimalnya pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah di Provinsi Papua Selatan
			3	Lemahnya pemahaman tentang diskriminasi gender di kalangan aparat penegak hukum dan penyusun peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi ketidakharmonisan substansi antar undang-undang, dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban, khususnya korban perempuan

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			1	Penanganan Kultur atau budaya masyarakat, dimana pemahaman tentang hak dasar perempuan belum dipahami oleh sebagian masyarakat
			2	Mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan
Anak		Lem Aibon	1	Pembiaran oleh pihak produsen untuk menjual secara bebas
			2	Kurangnya pengawasan orang tua
			3	Kurangnya pengawasan pemerintah
			4	Kurangnya tindakan atas pelanggaran
			5	Belum adanya regulasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah banyaknya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan kebakaran disertai dengan pembangunan daerah yang harus disertai dengan pengelolaan berbasis lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Salah satu permasalahan fundamental dalam bidang lingkungan hidup adalah belum adanya dokumen perencanaan dan analisis tertulis yang mengakomodir potensi dan masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan, maka dapat dipetakan permasalahan dan akar masalah sebagaimana Tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan yang mendukung	1	Belum optimalnya perencanaan dan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan	1	Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dan aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup
			2	Belum adanya dokumen yang mengakomodir pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal, dan hak MHA yang berkaitan dengan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			3	Belum adanya penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
				Penurunan kualitas udara karena
keberlanjutan sektor lingkungan hidup	2	Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan	1	pembakaran kendaraan bermotor, asap pabrik-pabrik industri, serta kebakaran hutan dan lahan Penurunan kualitas air karena
			2	pencemaran limbah domestik, kondisi sanitasi tidak layak dan tingginya paparan beban pencemaran sungai
				Penurunan kualitas tutupan lahan karena

			3	deforestasi hutan/lahan, serta belum signifikannya reforestasi hutan/lahan dan kegiatan penanaman lainnya
			4	Terdapat tekanan demografi kepada kawasan konservasi yang menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa dan berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa dilindungi
			5	Penerapan pola penanganan/pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan. Belum optimalnya kontribusi jasa lingkungan dan pengembangan circular economy dari pemanfaatan sampah dan limbah menggunakan metode 3R (reduce, reuse and recycle).
			6	Meningkatnya investasi berbasis lahanskala luas yang belum menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan
			7	Tingginya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di beberapa wilayah
			1	Kesadaran masyarakat rendah dalam pengelolaan lingkungan
			2	Pertambangan tradisional dan ilegal di masyarakat
			3	Kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah
			4	Belum optimalnya penyediaan data lingkungan hidup
Ancaman kerusakan Lingkungan Hiduptinggi			5	Masih adanya perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi
			6	Belum optimalnyapenanggulangan kerusakan lingkungan termasukdi Kawasan pesisir
			7	Belum adanya badan pengelolaan limbah B3
			8	Belum adanya laboratorium lingkungan
			9	Masih rendahnya pengawasan lingkungan hidup
			10	Penyediaan lahan untuk pembangunan sapras lingkungan hidup berbenturandengan konflik pembebasan lahan
Hilangnya Konektivitas Kawasan Konservasi ,dan degradasi ekosistem penting	1	Pelestarian MigrasiHewan Terancam: Konektivitas ekosistem memungkinkan hewan untuk bermigrasi, mencari makanan, atau berkembangbiak, yang penting untuk kelangsungan hidup spesies	1	Perubahan penggunaan lahan di daerah sekitar kawasan konservasi, seperti perluasan pemukiman, pembukaan lahan pertanian, dan pembangunaninfrastruktur
	2	Kerentanan Terhadap BencanaAlam: Kawasan konservasi yang terhubung denganbaikdapat membantu mengurangi risikobencana alamseperti banjir dan tanah longsor	2	Pembalakan liar yang merusak hutan danmengurangi luas kawasan konservasi
	3	Kehilangan Keanekaragaman Hayati: Hilangnya konektivitas kawasan konservasi dapat mengurangi keanekaragaman hayati dan mengancam kelangsungan hidup spesies	3	Pencemaran lingkungan yang merusak ekosistem dan mengurangi kualitas hidup makhluk hidup di kawasan konservasi
	4	Ketersediaan Air Menurun: Kawasan konservasi yang terjaga dengan baik dapat membantu menjaga ketersediaan air yang baik dan meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat	4	Perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi lingkungan hidup di kawasan konservasi
Kerentanan iklim dan risiko bencana	1	Kekeringan dan kelaparan yang dapat mengancam ketersediaan pangan dan kehidupan masyarakat	1	Perubahan iklim global yang mempengaruhi kondisi lingkungan hidup di wilayah tersebut
		Banjir, ROB dan tanah longsor yang dapat merusak		Perubahan penggunaan lahan di daerah sekitar wilayah tersebut,

	2	infrastruktur dan mengancam keselamatan jiwa	2	seperti perluasan pemukiman, pembukaan lahan pertanian, dan pembangunan infrastruktur
		Perubahan komposisi dan penyebaran	3	Pengurangan jumlah tutupan hutan akibat Pembalakan liar dll. dan mengurangi luas kawasan konservasi

	3	pembibitan tanaman kehutanan masih belum optimal		kehutanan yang berkualitas
			2	Ketersediaan sumber benih berkualitas yang terbatas
			3	Keterbatasan kapasitas SDM untuk pengembangan bibit tanaman
Belum optimalnya kinerja pertanahan	1	Penataan administrasi pertanahan belum optimal	1	Keterbatasan SDM penataan administrasi tanah
			2	Ketersediaan data tanah minim
			3	Ketersediaan data rencana kebutuhan pertanahan minim
Timbulan sampah meningkat	1	Kemampuan TPA kabupaten tidak mampu menampung	1	Kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan sampah 3R Reduce, Reuse dan recycle
Pemanfaatan satwa endemik		Pengawasan	2	Zonasi
Bandara standar internasional (pemindahan bandara)	1	Pembukaan Rut ke australia	1	Kebisingan udara, Perluasan lahan, bandara AU, Perintis (usulan di kebun coklat, muting, jagebog 13)
Perlu adanya TPA di luar daerah	1	Kepadatan TPA	1	Timbulan sampah terlalu banyak
Abrasi pantai sangat tinggi	1	Pembangunan Talut pemecah ombak	1	Perubahan bentuk garis pantai, kerusakan bangunan pantai
Infrastruktur jembatan, Jembatan penghubung antar kabupaten, jembatan yang bentangan antara 500 m agar akses lebih cepat	1	Kurangnya aksesibilitas antar kabupaten	1	Pengangkutan logistic terhambat
Industrialisasi kelapa sawit	1	Belum ada industrialisasi, hanya pengelolaan CPO	1	Hilirisasi industri

Pelaksanaan Pembangunan belum memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan	1	Rendahnya pengelolaan dan penataan lingkungan hidup	1	Maraknya eksploitasi hutan, pertambangan dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kerusakan lingkungan
			2	Pengelolaan sampah dan limbah masih rendah
			3	Belum adanya regulasi daerah untuk perlindungan dan pengelolaan LH di daerah
	2	Masih lemahnya kelembagaan	1	Sapas penunjang yang belum memadai
			2	Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur
Bencana alam	1	Tingginya resiko bencana terutama abrasi kebakaran lahan , banjir	1	Penanggulangan bencana alam banjir, abrasi dan sering terjadinya kebakaran
	2	Mitigasi bencana yang masih kurang baik secara struktur dan nonstruktur		
Pengelolaan Sampah	1	Masih terbatasnya infrastruktur persampahan	1	Penetapan lokasi TPA
	2	Belum adanya TPA/TPS	2	Penyediaan sarana
			3	Pengembangan pengelolaan sampah
			4	Peningkatan pengangkutan sampah
Tumbuhan wati	1	Komoditi ekspor	1	Dilarang di Indonesia
			2	Tanaman sakral
Energi	1	Desa berlistrik rasionya kecil	1	Data kabupaten belum ada
			2	Satu desa dianggap sudah dialiri listrik jika ada satu rumah yang lain sudah menyala
BBM	1	Kesediaan terbatas	1	Data kebutuhan BBM dari kabupaten tidak di support dari kabupaten
			2	Kerjasama antar pemerintah daerah kurang berjalan baik
			3	SDM tiap kabupaten belum di eksplor dengan baik
			1	Kebakaran hutan menyebabkan berkurang kawasan hutan

Kehutanan	1	Belum dikelola sumber daya hutan yang berkelanjutan	2	Regulasi yang masih berada di provinsi
			3	Hutan lindung, hutan adat ikut berpengaruh terhadap pengelolaan
			4	Belum adanya program reboisasi
Perikanan Darat dan Laut	1	Tidak dikelola dengan baik	1	Tidak ada penampung hasil perikanan
			2	Ditutupnya perusahaan
			3	Kesulitan dalam pekerjaan
			4	Ketersediaan listrik untuk penampungan ikan
			5	Pengembangan perikanan air tawar
			6	Pemberdayaan mandiri secara ekonomi
			7	Belum ada industri pelayanan terpadu
Pernakan	1	Pernakan sapi	1	Pengembangan kawasan peternakan sapi
	2	Pernaka nkambing	2	Rumah potong hewan
	3	Pernakan unggas	3	Pembinaan peternak
	4	Pernakan babi	4	Alokasi bantuan bagi peternak
	5	Pernakan rusa	5	Belum ada penangkaran rusa

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.8 Perekonomian dan Keuangan Daerah

Urusan keuangan berkaitan dengan kinerja pendapatan daerah, alokasi belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta pelaporan keuangan. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang keuangan di Provinsi Papua Selatan terdapat pada Tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya birokrasi dalam memberi pelayanan publik secara transparan dan akuntabel	1	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan daerah	1	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah
			2	Belum akuratnya database pajak Dan retribusi serta objek pendapatan daerah lainnya
			3	Belum optimalnya pelayanan pajak Dan retribusi daerah, baik melalui Samsat maupun instansi pemungut lainnya
			4	Masih rendahnya kontribusi unit usaha BUMD dalam pengelolaan potensi unggulan daerah terhadap PAD
			1	Penyampaian LKPD tidak tepat waktu
			2	Penyusunan APBD yang tidak tepat

	2	Belum optimalnya Kualitas akuntabilitas kinerja		waktu
			3	Belum optimalnya evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD
			4	Belum optimalnya Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah
			5	Prinsip value for money dalam perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya dipahami Dan diimplementasikan
			6	Belum optimalnya penerapan SIPD Pengelolaan Keuangan Daerah
	3	Belum optimalnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus	1	Belum optimalnya implementasi regulasi pengelolaan dana Otonomi Khusus
			2	Kurang optimalnya pelaporan pengelolaan dana otsus
			3	Belum tersedianya nomenklatur belanja dan program kegiatan khusus Otonomi Khusus
	4		1	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi
		Belum optimalnya kapasitas aparatur Keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2	Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja
	5	Pertumbuhan Ekonomi Belum Optimal	1	Pertumbuhan IKM masih mikro (belum industri kecil) masih sebatas produk rumahan
			2	Belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK).
			3	Belum memiliki sistem pergudangan dalam mengakomodasi barang yang baru masuk ke Merauke
			4	Pembinaan pelaku usaha produk ekspor unggulan belum dilaksanakan
			5	Ketidakjelasan potensi pengembangan industri kelapa sawit (produk CPO/Crude Palm Oil)
			6	Belum terpenuhinya 3 aspek dasar dalam perencanaan pengembangan pariwisata yang disingkat dengan 3A (atraksi, amenitas, aksesibilitas)
			7	Tingginya biaya transportasi darat, laut, dan udara menuju di dan pulang dari Kabupaten Merauke, maupun ke destinasi wisata
			8	Kurangnya promosi pariwisata
			9	Belum Optimalnya pembinaan Pelaku ekraf
			10	Tidak dapat diketahui data UKM aktif Dan tidak aktif
			11	UKM yang ada masih tradisional (home industry) belum berteknologi tinggi

			12	dalam berproduksi Masih rendahnya kegiatan investasi dan iklim berusaha sehingga tingkat kesempatan kerja rendah.
			13	Lapangan Pekerjaan yang terbatas
			14	BBM Solar
			15	Ketersediaan modal usaha untuk OAP
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum optimal			1	Kualitas SDM aparatur masih rendah
			2	Belum memiliki komitmen yang kuat untuk pelaksanaan RB
			3	Belum adanya perubahan pola pikir aparatur
			4	Lemahnya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat
			5	Kurangnya sosialisasi regulasi dan kebijakan
			6	Akuntabilitas kinerja aparatur belum optimal
			7	Akses TI yang terbatas
			8	Belum adanya TPP berbasis kinerja
			9	Kualitas perencanaan yang belum baik
			10	Pelaksanaan monitoring evaluasi, penilaian dan pengawasan pembangunan belum optimal
			11	Penempatan SDM aparatur yang belum tepat sesuai dengan kompetensi dan kapasitas
Pelayanan publik yang masih Belum sesuai harapan			12	Sarana dan prasarana pendukung yang kurang
			1	Belum adanya pelimpahan kewenangan ke tingkat distrik
			2	Kapasitas dan komitmen SDM masih rendah (misal pendidik dan tenaga Kesehatan di wilayah terpencil)
			3	Akses Teknologi Informasi yang terbatas
			4	Pelayanan masih terpusat di Kabupaten
			5	Kondisi geografis dan luas wilayah
			6	Adanya konflik kepemilikan tanah untuk fasilitas Pendidikan maupun kesehatan
			7	Pemahaman regulasi pelayanan publik baik oleh SDM aparatur maupun Masyarakat masih rendah
			8	Pembinaan ke pemerintah kampung belum maksimal
			9	Belum diselenggarakan penilaian pelayanan publik secara rutin
			10	Rendahnya kreatifitas dan inovasi pelayanan publik
			11	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung
Pariwisata pentas budaya asmat	1	Turis tidak maubeli karena pemda sudah beli	1	Turis tidak beli karena mahal
			2	Sudah dibeli habis oleh pemda
Sektor ekonomi	1	Minyak kayu putih	1	Pendanaan

	2	Minyak sereh	2	Pengembangan teknologi
	3	Minyak ikan gastor	3	Regulasi
	4	Kayu Gaharu	4	Pendanaan, pengembangan teknologi, rugulasi
	5	Gelembung ikan	5	Pendanaan, pengembangan teknologi, regulasi

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.9 Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal ini terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait dengan erat dengan aspek agraria. Cita-cita pembangunan fisik masih terkendala oleh tingginya konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak milih dan tanah adat. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Provinsi Papua Selatan. Pelayanan administrasi pertanahan juga bukan hal yang mudah di Provinsi Papua Selatan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan pertanahan di Provinsi Papua Selatan

Tabel 3. 11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Selatan	1	Belum optimalnya penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	1	Banyaknya tanah yang terlantar, dengan status kepemilikan yang belum jelas
			2	Belum adanya database/pemetaan tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Provinsi Papua Selatan
			3	Pelayanan administrasi pertanahan masih belum menjangkau secara efektif sampai dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geografis
			4	Rendahnya penerbitan sertifikat tanah dan izin lokasi
			5	Belum harmonisnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kesesuaian undang-undang pemerintahan daerah dengan undang- undang sektoral
	2	Belum optimalnya pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat	1	Tingginya konflik pertanahan khususnya berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah adat
			2	Belum maksimalnya pengakuan negara/ pemerintah daerah atas tanah adat/tanah ulayat

			3	Belum ada harmonisasi data sertifikat hak ulayat yang diterbitkan oleh pemilik tanah
Hilangnya Tempat Penting Masyarakat Adat dan Wilayah Adat	1	Peningkatan pemanfaatan lahan dan hutan di Provinsi Papua Selatan berpotensi meningkatkan hilangnya tempat penting masyarakat adat dan wilayah adat	1	Masyarakat adat kehilangan tempat penting mereka karena alasan politis dan ekonomi
			2	Banyak wilayah adat yang telah berpindah tangan, seperti yang telah diberikan kepada pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
			3	Pengembangan pembangunan wilayah
			4	Masyarakat adat juga menghadapi masalah pengakuan oleh negara dan perlindungan hak mereka

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.10 Ketersediaan Listrik

Tabel 3. 12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Bidang Ketersediaan Listrik di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Rendahnya produktifitas sektor energi	1	Rendahnya akses masyarakat terhadap sumber daya energi	1	Minimnya ketersediaan energi listrik untuk kegiatan rumah tangga, industri dan perkantoran
			2	Penyediaan sumber daya energi listrik pada kampung yang sangat terbatas dan tidak merata
			3	Rendahnya pemanfaatan energi listrik baru terbarukan
	2	Potensi Listrik Tenaga Angin di Distrik Waan	1	Kewenangan Provinsi
Kelistrikan dan telekomunikasi	1	Kondisi wilayah tidak memungkinkan untuk pembangunan jaringan listrik	1	Pengembangan PLTD atau PLTS terpusat
	2	Belum semua kampung mempunyai jaringan listrik	2	Pembangunan BTS dan WIFI gratis di sarana umum, sekolah puskesmas rumah sakit
	3	Belum semua Wilayah mempunyai jaringan telkomunikasi		
	4	Belum semua masyarakat menikmati akses internet/wifi gratis		
	5	Penambahan provider internet		

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.11 Sarana Air Bersih

Tabel 3. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Bidang Sarana Air Bersih di Provinsi Papua Selatan

POKO K MASAL AH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas daerah	1	Belum memadainya kuantitas dan kualitas ketersediaan infrastruktur dasar penyediaan air baku dan air bersih	1	Manajemen infrastruktur dasar yang masih sangat rendah
			2	Belum adanya regulasi daerah yang mengatur tentang pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat
			3	Belum tercukupinya kesiapan sarana pendukung air bersih
			4	Belum maksimalnya optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air baku
Degradasi kualitas dan kuantitas Kawasan Hidrologi	1	Peningkatan risiko banjir termasuk ROB dan kekeringan karena ketersediaan air yang tidak terjaga dengan baik	1	Perubahan penggunaan lahan di daerah hulu DAS dari kawasan konservasi hutan menjadi penggunaan perkebunan, pertanian, dan permukiman sehingga terjadi peningkatan laju erosi dan sedimentasi.
	2	Pencemaran air yang dapat mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya	2	Pencemaran air oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian

	3	Kehilangan keanekaragaman hayati karena hilangnya habitat dan ketersediaan air yang baik	3	Perubahan iklim yang menyebabkan perubahan pola curah hujan dan suhu udara, sehingga mempengaruhi ketersediaan air dan kualitas air
	4	Kerusakan ekosistem yang dapat mempengaruhi ketersediaan air dan kualitas tanah		
Air bersih	1	Air baku sumber air dari alam masih kurang	1	Air baku sumber air dari alam masih kurang
	2	Sumber air masih dari hujan	2	Penyediaan penampungan air hujan
	3	Kurangnya reservoir penampungan air hujan	3	Penyediaan penampungan air hujan
Belum terpenuhinya pelayanan dasar Air Minum sehat dan layak bagi Masyarakat	1	Kurangnya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum bagi lokasi-lokasi yang tidak tersedianya air minum	1	Jumlah Ketersediaan Air Baku yang terbatas
	2	Kerusakan pada system pengelolaan Air Minum		
	3	Tidak adanya Operasi dan Pemeliharaan terhadap SPAM		

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.12 Sanitasi

Tabel 3. 14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sanitasi di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas daerah	1	Belum memadainya kuantitas dan kualitas infrastruktur sanitasi	1	Belum adanya sarana pengolahan sampah untuk masyarakat dan TPA di berbagai wilayah di Provinsi Papua Selatan
			2	Rendahnya implementasi Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (SPALD)
			3	Tingginya persentase perilaku buang air besar sembarangan (BABS)
Sanitasi	1	Jaringan perpipaan belum menvcapai semua rumah	1	Penyediaan sapiteng MCK individu dan komunal bagi masyarakat dan sekolah
		Belum semua	2	Penyediaan perumahan layak bagi

	2	rumah memiliki sanitasi yang baik		masyarakat
	3	Masyarakat masih BAB sembarang		
	4	Masih terbatas perumahan layak huni (satu rumah bisa lebih dari satu keluarga)		

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.13 Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Provinsi Papua Selatan masih cukup rendah, dimana angkanya pada tahun 2020 adalah sebesar 69.55%. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa masih Banyak penduduk Angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua Selatan juga tidak menunjukkan adanya penurunan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Selain itu, tenaga kerja yang terserap diindikasi masih memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan OPD yang membidangi peningkatan sumberdaya manusia untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal yang sesuai dengan sektor tenaga kerja yang dibutuhkan. Tabel 3.15 akan memberikan pemetaan antara rumusan masalah dan akar masalah di bidang urusan ketenagakerjaan.

Tabel 3. 15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH		RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Rendahnya daya saing tenaga kerja dalam perekonomian wilayah	1	Belum optimalnya pengembangan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja, serta penempatan dan perluasan kesempatan kerja	1	Rendahnya kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) tenaga kerja Untuk mendukung produktivitas industri, karena mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah
				2	Meningkatnya jumlah pengangguran terdidik (lulusan SMK dan universitas) karena adanya mismatch antara bidang pendidikan dengan lapangan kerja yang tersedia
				3	Belum tersedianya Balai Latihan Kerja di Provinsi Papua Selatan yang memberikan pendidikan/pelatihan nonformal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

					di tingkat pedesaan sesuai dengan SDA yang tersedia. Balai Latihan Kerja yang ada di Provinsi Papua Selatan hanya satu di Kota Sorong dan merupakan BLK milik Kementerian Tenaga Kerja Longgarnya ikatan kerja (engagement)
				4	serta tingginyakecenderungan pencarian kerja baru/ meninggalkan pekerjaan (turnover rate) yang dapat meningkatkan tidak bekerja untuk risiko Tingkat kepatuhan perusahaan dalam
		2	Belum terjalinnya hubungan industrial antara perusahaan dan tenaga kerja	1	menerapkan UMP yang ditetapkan masih sangat rendah
				2	Tingginya angka kasus perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHK)
				3	Penanganan perselisihan tenaga kerja belum maksimal
				4	Belum terealisasinya pemetaan/ Data dukung kebutuhan tenaga kerja perusahaan yang berinvestasi di Papua Selatan sehingga belum dapat direncanakan secara baik
		3	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang ketenagakerjaan	1	Kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Papua Selatan
				2	Belum optimalnya koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja
				3	Belum ada sinergisitas antar OPD yang membidangi peningkatan sumber dayamasyarakat untuk mengurangi pengangguran baik dari sisi pendidikan formal maupun dari pendidikan non formal sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia maupun pelaku
				44	usaha yang sudah berinvestasi di Provinsi Papua Selatan baik itu pada bidang perkebunan, pariwisata, perikanan, gas bumi & perminyakan
	Belum optimalnya penanggulangan terhadap ketenaga-kerjaan		Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja, serta penempatan	1	Pemutusan hubungan kerja (PHK) Atau penurunan pendapatan buruh/karyawan sebagai dampak pandemi Covid-19
				2	Meningkatnya pekerja sektor pertanian-informal di

			dan perluasan kesempatan kerja		perdesaan Yang berpotensi meningkatkan pekerja miskin di perdesaan
3	Kesenjangan orang asli papua dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1	Terbatas nya ruang dan kesempatan dalam akses terhadap pekerjaan	1	Rendahnya literasi dasar
POKOK MASALAH RUMUSAN MASALAH				AKAR MASALAH	
		2	Rendah nya partisipasi masyarakat adat, perempuan adat dan pemuda adat dalam pengembangan ekonomi	2	Masih rendah nya pendampingan pemberdayaan yang tepat
		3	Belum optimal pengembangan UMKM berbasis OAP	3	Program belum terintegrasi dengan potensi dan kekuatan kampung
		4	Terbatas nya literasi keuangan kepada OAP	4	Regulasi belum implementatif
		5	Terbatas nya akses pasar yang sesuai dengan	5	Rendahnya monitoring dan evaluasi

			potensi UMKM OAP		
		6	Terbatas nya kesempatan dalam akses informasi untuk peluang pendanaan		
		7	Model pemberdayaan yang belum optimal		
		8	Terbatas nya inovasi dan teknologi dalam mendukung pengembangan ekonomi		
4	Kualitas SDM yang masih kurang berdaya saing			1	Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat rendah
				2	Dukungan dan kesadaran Orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya masih rendah
				3	Banyak anak usia Sekolah yang membantu orang tua untuk bekerja
				4	Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan masih jauh
				5	Keterbatasan Tenaga Pendidik
				6	Penguasaan Teknologi Informasi yang masih rendah
				7	Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat masih rendah
				8	Sebaran fasilitas Kesehatan belum merata
				9	Kurangnya tenaga Kesehatan Khususnya Dokter
				10	Masih banyaknya kelahiran di luar Fasilitas Kesehatan
				11	Pasangan Usia Subur ber KB masih Rendah
				12	Pernikahan usia anak
				13	Pernikahan tanpa ikatan masih tinggi
5	Tenaga Kerja			1	Masih rendahnya kualitas SDM
				2	Masih rendahnya tingkat penyerapan Tenaga kerja
				3	Pelatihan UMKM agar mandiri
				4	Ketersediaan lapangan kerja
				5	Minimnya pelatihan umum
6	Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Belum optimalnya kompetisi distribusi dan pelayanan ASN	1	Ketersediaan ASN di PPS belum mencukupi kebutuhan daerah
				2	Rendahnya kualitas kompetensi SDMASN sesuai tugas dan fungsi
				3	Rendahnya kemampuan pengelola data informasi berbasis computer

				4	Masih kurangnya penempatan ASN pada jabatan tertentu berdasarkan ko,petensi jabatan
				5	Masih rendahnya jumlah ASN yang telah mengikuti diklat pimpinan
				6	Rendahnya jumlah calon PNS yang mengikuti diklatsar PNS
				7	Belum terbentuknya kebihakan kepegawaian yang disesuaikan dengan kebijakan Otsus Papua
		2	Belum optimalnya kelembagaan dan tata laksana aparatur dan kepegawaian	8	Rendahnya mentalitas ASN terkait disiplin dan kinerja
				9	Percepatan birokrasi
				1	Belum efektifnya sosialisasi system penilaian beban kerja pegawai
				2	Belum berkembangnya sisten reward untuk ASN berprestasi dan punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
				3	Belum adanya system database dan informasi ASN yang terintegrasi, komprehensif dan berbasis kinerja
				1	Kurangnya sarana penunjang akses informasi dan computer
		3	Belum optimalnya system pemerintahan berbasis elektronik	2	Model e-government masih didominasi perspektif provider tunggal dan tidak terintegrasi
				3	Belum adanya tata kelola system pemerintahan berbasis elektronik yangterpadu
7	Sosial Budaya	1	Keseragaman hidup/urbanisasi	1	Banyak urbanisasi
				2	Kesulitan dalam pemenuhan hak hidupdasar
				3	Sektor ekonomi menjadi masalah
				4	Kebutuhan gizi kurang terpenuhi

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.14 Penataan Ruang

Tabel 3. 16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Bidang Penataan Ruang di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Rendahnya ketersediaan infrastruktur dan konektivitas daerah	1	Belum optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan rencana tata ruang	1	Belum optimalnya implementasi dan pengawasan pemanfaatan ruang
			2	Rendahnya kualitas data tata ruang wilayah, baik data pemetaan, kuantitatif, serta kualitatif
			3	Evaluasi implementasi rencana tata ruang masih belum memadai
			4	Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Provinsi Provinsi Papua Selatan
			5	Tingginya egosektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan
Kepatuhan ruang tata	1	Pembangunan belum mengacu RTRW	1	Sosialisasi peningkatan kualitas tata ruang
	2	Kawasan hutan indung dengan fungsi lindung masih sangat luas	2	Integrasi tata ruang dan perijinan
	3	Tata ruang belum terintegrasi online	3	Peningkatan kualitas data internet
			4	Perubahan fungsi kawasan hutan

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.15 Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan berkaitan dengan perencanaan daerah dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; perencanaan wilayah dan tata ruang; serta berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan.

Permasalahan dalam implementasi urusan perencanaan, pembangunan daerah di Provinsi Papua Selatan terdapat dalam Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3. 17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan di Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
	1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil	1	Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas Data untuk mendukung perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan
			2	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan kajian dalam pengembangan pembangunan daerah
			3	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM perencanaan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah
			4	Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya memperhatikan masalah lingkungan hidup khususnya terhadap dampak lingkungan hidup yang diakibatkan
			5	Belum optimalnya kajian-kajian dan perencanaan khusus kontekstual Provinsi Papua Selatan
		Belum optimalnya sinergi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1	Koordinasi dalam rangka upaya Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan belum berjalan optimal Lemahnya tingkat pemahaman terhadap
			2	mekanisme perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien
			1	Cakupan pendataan OAP secara berkala dengan menggunakan SIO Papua yang terintegrasi belum 100%. Padahal, cakupan pendataan OAP berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan OTSUS bermanfaat bagi OAP.
		Belum optimalnya Penyelenggaraan Perencanaan	2	Terdapat OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang belum memahami dan menjalankan sepenuhnya pembagian kewenangan urusan berdasarkan PP 106 Tahun
	3	Otonomi Khusus Papua		2021
				Belum tersedianya instrumen perencanaan khusus untuk pelaksanaan otonomi khusus di level Provinsi, kabupaten/kota dan juga Kampung.
			3	Perencanaan Otsus saat ini masih digabung dengan perencanaan umum daerah
			4	Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang OTSUS masih digabung dengan Musrenbang RKPD
	4	Terdapat permasalahan pengelolaan dan manajemen perencanaan	1	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan
			2	Belum terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu
			3	Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas OPD, termasuk hubungan perencanaan dengan provinsi dan pemerintah pusat
			4	Belum optimalnya penjangkaran aspirasi masyarakat di semua jenjang pemerintahan melalui mekanisme Musrenbang
			5	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
			6	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (ter-cascading)
Minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat	1	Belum optimalnya informasi yang disampaikan ke masyarakat	1	Masih kurangnya badan public terbuka
			2	Belum optimalnya peran PPID pembantu
			3	Masih kurangnya komunikasi public dan desiminasi informasi

			4	Masih kuranya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah
Rendahnya peningkatan layanan pemerintahan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi	2	Belum adanya Regulasi SPBE yang ditetapkan	1	Masih kurangnya kebijakan dan dokumen yang mengatur tata kelola SPBE
	3	Belum optimalnya infra struktur dan integrasi SPBE	2	Masih kurangnya aplikasi FO yang menghubungkan perangkat daerah
			3	Masih kurangnya aplikasi yang terintegrasi
			4	Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM yang mengelola SPBE
Persandian dan keamanan informasi	4	Tingginya resiko keamanan informasi	1	Kurangnya self assessment keamanan informasi dan persandian
			2	Masih kurangnya sarana spras keamanan informasi
			3	Masih kurangnya kapasitas pengelola keamanan informasi
Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal	5	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral	1	Masih kurangnya kapasitas pengelola data sektoral
			2	Masih kurangnya kebijakan dalam pengelola data sektoral

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.16 Pemberdayaan Masyarakat, Distrik dan Kampung

Bidang pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk mengembangkan potensi masyarakat, misalnya dalam sektor ekonomi kerakyatan. Kemudian, pengelolaan institusi lokal masyarakat dalam suatu unit wilayah juga di pegang oleh bidang urusan ini. Di sisi lain, kampung yang saat ini dipandang strategis sebagai unit pembangunan dalam paradigma baru membutuhkan upaya pemberdayaan. Khususnya di Provinsi Papua Selatan, saat ini kebijakan Provinsi banyak mendorong terbentuknya pemberdayaan tersebut. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung di Provinsi Papua Selatan terdapat dalam Tabel 3.18.

Tabel 3. 18 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Distrik dan Kampung di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya perencanaan, penganggaran dan pembangunan kampung berbasis sumber daya kampung	1	Masih rendahnya penggunaan dana kampung untuk kebutuhan prioritas pembangunan kampung.	1	Masih lemahnya pemahaman Masyarakat kampung dalam manajemen pengelolaan anggaran kampung.
			2	Belum maksimalnya Pembinaan manajemen pengelolaan Anggaran kepada setiap aparat kampung.
			3	Belum berjalannya fungsi Evaluasi Anggaran pendapatan dan Belanja kampung (APBK).
			4	Belum terbentuk / belum dimanfaatkannya Badan Usaha Milik Kampung sebagai sumber pendapatan kampung
			5	Pemenuhan aspirasi kebutuhan Program kampung masih bersifat kekeluargaan belum sampai pada pemenuhan

					kebutuhan umum kampung.
		2	Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahankampung	1	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung (Bamuskam dan Baperkam).
				2	Masih rendahnya kualitas aparatur di tingkat kampung dalam menjalankan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat
				3	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem administrasi kampung, termasuk Sistem Informasi Orang Papua (SIO Papua)
		3	Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat kampung	1	Kurangnya pengetahuan Masyarakat mengenai program prioritas kampung untuk kepentingan bersama.
				2	Belum tersedianya instrument kebijakan Dan petunjuk pelaksanaan standar pemenuhan kebutuhan sosial dasar OAP secara terpadu serta pelaksanaan pemberdayaan OAP sesuai kewenangan Otsus di kampung
				3	Belum optimalnya pembinaan kaderkampung dalam mendukung administrasi pemerintahan, pembangunan dan informasi kampung
				4	Rendahnya sosialisasi dan contoh perilaku hidup yang jauh dari budaya konsumerisme
		4	Belum optimanlnya pembangunan Kampung	1	Belum tersedianya petunjuk pelaksanaan percepatan pembangunan kampung sesuai dengan kewenangan Otonomi Khusus
				2	Belum optimalnya pelaksanaan model sinergi perencanaan kampung dengan unit layanan untuk kesejahteraan masyarakat kampung Penetapan target sasaran penerima manfaat dalam

				pembangunan kampung belum secara maksimal didukung ketersediaan data by name by address terpilah OAP dan non- OAP di tingkat kampung Cakupan implementasi program strategis
			4	pemberdayaan masyarakat dan kampung belum dilaksanakan oleh seluruh kampung dan kabupaten/kota
Pemberdayaan Masyarakat dan desa/kampung Penduduk,dan Keluarga berencana			1	Mencegah praktek "tukar nikah" Di masyarakat
			2	Edukasi penggunaan alat kontrasepsi
Koperasi UMKM dan Penanaman Modal			1	Fasilitasi Pasar
			2	Regulasi penjualan miras
			3	Meningkatkan Pemberdayaan OAP
Kepemudaan dan Olahraga			1	Pembuatan wadah untuk anak-anak yang berprestasi olahraga
Pengembangan Ekonomi OAP	1	Sarana Produksi belum ada	1	Pendidikan
	2	Sarana pasar khusus belum ada	2	Kekurangan tenaga pendamping
	3	Penjualan yang khusus (pinang) hanya untuk OAP saja	3	Tenaga kerja kurang terampil
	4	Penyerapan tenaga kerja OAP		
Pemabuk	1	Orang mabuk tidak kerja	1	Pendidikan yang rendah
	2	Keamanan kurang	2	Tidak ada penegakan aturan
	3	Perlakuan terhadap OAP dan non OAP	3	Penjualan minuman keras secara bebas
Afirmasi terhadap OAP	1	OAP tidak diperhatikan	1	Mengerti situasi yang ada
			2	Kebiasaan menabung
			3	Pelatihan tenaga kerja
			4	Sekolah vokasi
			5	Pendampingan kepada OAP
			6	Penyaluran tenaga kerja OAP
			7	Pekerjaan proyek dilakukan oleh orang lain
Pemberdayaan pemuda	1	Kurangnya ruang bagi pemuda	1	Kurang pelatihan bagi pemuda
			2	Kurangnya wadah bagi pemuda
Pariwisata	1	Belum dikelola Dan ditatadengan baik	1	Kurangnya pelatihan
			2	Kurangnya akses informasi
Mama-mama Papua	1	Perlu peningkatan pelatihan kepada mama-mama papua	1	Pendidikan
			2	Kesempatan kerja

			3	Tempat bagi mama-mama Papua melakukan aktifitas
			4	Pelatihan dan pendampingan Dan pelatihan bagi mama-mama Papua
Pengembangan destinasi wisata	1	Tempat wisata belum dikelola	1	Kurang marketing
			2	Kurang promosi
Pendidikan	1	Pendidikan belum berjalan maksimal	1	Pendidikan kecil di kampung
			2	Pengelolaan asrama lewat gereja perlu dikembangkan
			3	Manajemen pengelola asrama tidak berjalan baik
Olahraga		Prestasi olahraga	1	Kurangnya event olah raga skala daerah
			2	Kurangnya keikutsertaan dalam event olah raga tingkat daerah hingga internasional
			3	Minimnya fasilitas/sarana prasarana olah raga
			4	Minimnya pembinaan olah raga dari usia dini
			5	Minimnya prestasi olah raga
			6	Minimnya alokasi anggaran
			7	Minimnya reward terhadap atlet berprestasi
Pariwisata	1	Festival asmat	1	Pariwisata belum dikelola
	2	Rumah tinggi	2	Belum dibuka untuk umum
	3	Rumah pohon	3	di promosi
	4	Festival kali obaa	4	Perlu pemberdayaan masyarakat
	5	Festival kali maro	5	Perlu pendanaan
	6	Festival ndambu	6	Pembinaan terhadap UMKM
	7	Festival babi		
	8	Pulau habe		
	9	Wisata rohani		
UMKM	1	Tata Kelola	1	Tidak ada ijin
			2	Belum ada NIB
			3	Persoalan SDM yang tidak mampu mengelola usaha dan alat produksi
			4	Tidak ada pendamping UMKM, jumlahnya terbatas
			5	Pengembangan calon wirausaha muda

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

3.1.17 Ketentraman dan Ketertiban

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat utama sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketentraman, ketertiban serta perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Provinsi Papua Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.19

Tabel 3. 19 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Provinsi Provinsi Papua Selatan

POKOK MASALAH	RUMUSAN MASALAH		AKAR MASALAH	
Belum optimalnya penanganan terhadap penyelesaian masalah keamanan, ketentraman dan	1	Belum optimalnya penyelenggaraa n keamanan, ketentraman dan ketertiban.	1	Belum optimalnya koordinasi antar instansi penegak hukum dan keamanan
			2	Belum optimalnya penegakan perda dan perkara
			3	Meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat karena belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat, serta masih tingginya tindak pidana yang belum tertangani
			4	Belum memadainya tenaga pengendali dan keamanan lingkungan
			5	Masih adanya potensi kecemburuan sosial di masyarakat antara orang asli Papua dan warga pendatang
			6	Belum optimalnya fungsi FKUB sebagai wahana untuk menjaga kerukunan umatberagama
			7	Adanya ancaman budaya dari luar yangmenggerogoti ketentraman dan kenyamanan masyarakat

ketertiban,dan perlindungan masyarakat	2	Belum optimalnya penyelenggaraa n stabilitas politi k daerah	1	Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu, pengambilan kebijakan dan pengawasan pembangunan
			2	Lemahnya peran partai politik dan DPRD sebagai lembaga demokrasi
			3	Rendahnya tingkat kebebasan sipil dalam berkumpul dan berserikat
			4	Masih terdapat tindakan atau pernyataan diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya
	3	Tingginya risiko bencana yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya Mitigasi & Adaptasi yang komprehensif	1	Provinsi Provinsi Papua Selatan termasuk provinsiyang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori tinggi
			2	Belum optimalnya penyiapan mitigasi bencana di beberapa wilayah yang memiliki kelas risiko multi bencana tinggi
			3	Belum memadainya ketersediaan sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung
			4	dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial
			5	Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
			6	Banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana yang belum ditangani dengan baik
			7	Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana
			1	Berkordinasi untuk membantu membangun pos-pos keamanan bersama dengan instansi terkait/aparat keamanan Minimnya pendampingan bagi penduduk agar siap
Ketertiban umum dan ketentraman			2	menghadapi perubahan kemajuan jaman dengan tetap menjunjung tinggi budaya Provinsi Papua Selatan
			3	Tingginya kesenjangan pembangunan untuk mengatasi gejolak masyarakat
			4	Kurangnya peran aktif dari Tomas atau Todat turut serta dalam memelihara ketentraman dan ketertiban

			6	Minimnya pendampingan oleh tenaga ahli pada pelepasan tanah ulayat
			7	Belum adanya regulasi penjualan miras
			8	Kesbangpol di aktifkan kembali bersama dinas sosial
			9	Keterbatasan pos angkatan laut dalam lintas batas negara dengan PNG
Keamanan			1	Pelanggaran lintas batas (entry passing) dari RI ke PNG dan sebaliknya
			2	Penyelundupan barang-barang ilegal dari RI ke PNG (Narkoba dan Senpi Ilegal) dan sebaliknya
Perlindungan masyarakat			1	Dibutuhkan pemimpin yang mengayomi
Hak ulayat		Permasalahan tanah	1	Masih sering terjadi palang gedung kantor dll
			2	Masalah kepemilikan tanah
			3	Pembangunan infrastruktur menjadi kendala
Miras		Belum ada Perda	1	Belum di proses oleh pemerintah
			2	Belum ada kajian terkait miras

Sumber: Hasil diskusi dengan stakeholders dan analisa, 2023

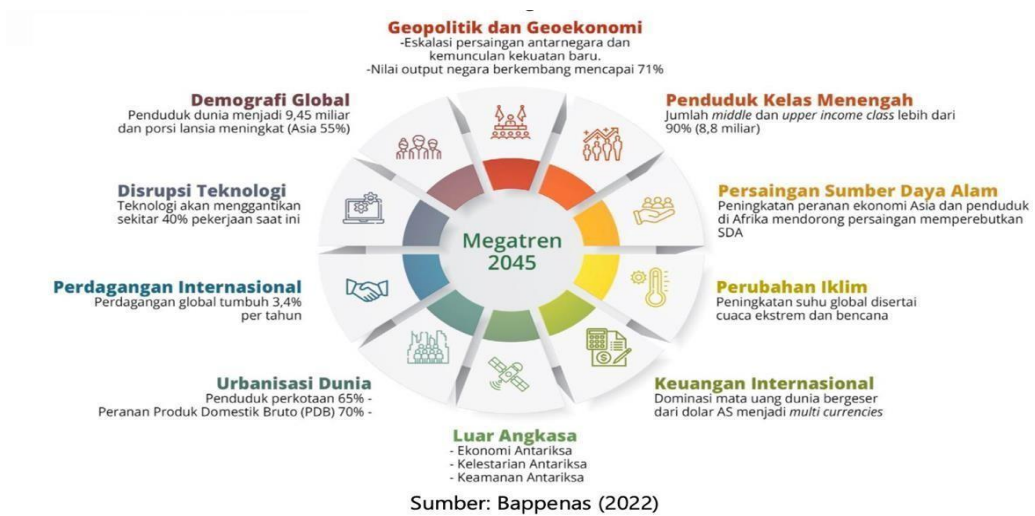
3.2 Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan yang dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah. Isu-isu strategis yang tidak dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi agar dieliminasi.

3.2.1 Isu Internasional

- Pergeseran fokus geopolitik dan geoekonomi.
- Letak geografis Pulau Papua bernilai strategis, baik dari perspektif geostrategis, geoekonomi, dan geopolitik.
- Tren perubahan teknologi yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi akan berpengaruh terhadap revolusi sektor keuangan dan transaksi perdagangan secara global.
- Perkembangan digitalisasi
- Tantangan pemanasan global
- Pembangunan berkelanjutan

Gambar 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban di Provinsi Provinsi Papua Selatan



3.2.2 Pembangunan Berkelanjutan / SDGs

Agenda SDGs 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan acuan pembangunan untuk pencapaian tujuan global, yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti. Dalam upaya merumuskan pembangunan di level Kabupaten, penyelarasan dengan SDGs sangat diperlukan bahkan sangat bermanfaat untuk membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan di level kabupaten. SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Pada dasarnya, tujuan bersama dalam SDGs ingin memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun 17 SDGs di rumuskan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan;
2. Mengakhiri kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan;
4. Pendidikan bermutu;
5. Kesetaraan gender;
6. Akses air bersih dan sanitasi;
7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Infrastruktur, industri dan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan;
11. Kota dan kokmunitas yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Menjaga ekosistem laut;
15. Menjaga ekosistem darat;
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat;

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB, dirumuskan sebuah kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen perintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpres ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencana-rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Serta dijadikan bagi ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi TPB. Dengan kata lain, untuk mencapai TPB membutuhkan dukuman dari semua elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah.

Gambar 3. 2 Sustainable Development Goals / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: United Nations, 2005

3.2.3 Isu Nasional

- **Transformasi Ekonomi Indonesia** mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan pembangunan wilayah.
- **Pemindahan Ibu Kota Negara** mendekatkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan ke wilayah timur Indonesia.
- **Bonus demografi Indonesia** dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan.

- Kebijakan **percepatan pembangunan daerah tertinggal** mendorong pengentasan kabupaten tertinggal

3.2.4 Isu Daerah

- Sumber daya alam (SDA) Papua yang bernilai **ekonomis dan strategis** berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
- Kebijakan **pembentukan daerah otonom baru** bertujuan untuk

BAB IV VISI DAN MISI PAPUA SELATAN

pembangunan Papua.

Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, di rumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah. Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara Visi Misi Jangka Panjang Provinsi Papua Selatan dengan Visi Misi Nasional. Visi dan misi pembangunan juga tidak lepas dari aspek tata ruang dan pengelolaannya sehingga visi dan misi pembangunan selaras dengan dinamika ruang dan kemungkinan pengembangannya yang mengarah pada keberlanjutan ekosistem pendukung pembangunan itu sendiri, dengan memperhatikan konsistensi dan sinkronisasi antara muatan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat Provinsi.

Berdasarkan kondisi Provinsi Papua Selatan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahunan mendatang, juga dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Papua Selatan dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2025–2045, dengan melakukan telaah terhadap terhadap Visi cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 dan Misi Jangka Panjang Nasional sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

4.1 Visi Dan Misi RPJPN 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045 : Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan, sebagaimana yang termuat dalam dokumen RPJPN yang menjadi penyusunan Visi-Misi pembangunan jangka panjang daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka dilakukan telaah terhadap Visi dan Misi pembangunan jangka Panjang nasional dan provinsi. Skenario

penyusunan RPJPN 2025-2045 dilakukan dengan memperhatikan amanat landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 merupakan acuan utama dalam setiap

pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur . Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan pada periode sebelumnya. Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas sebagaimana disajikan dalam bagan di bawah ini : Gambar 4.1

GAMBAR 4. 1 KERANGKA KONSEPTUAL VISI INDONESIA EMAS



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran utama tersebut adalah; (1) pendapatan per kapita setara negara maju, (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, (4) daya

saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

GAMBAR 4. 2 LIMA SASARAN UTAMA VISI INDONESIA 2045



Kondisi tersebut, dimana 5 (lima) sasaran utama Visi RPJPN tersebut di atas menjadi acuan dalam perumusan sasaran dan target pembangunan pemerintah provinsi Papua Selatan.

4.2 Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua

Visi percepatan pembangunan Papua 2022-2041 yaitu **"Terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera**, dimana hal ini selaras dengan Visi Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, yaitu **Papua Selatan Sejahtera, Adil, Maju dan Makmur Berkelanjutan Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim**. RIPP merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk tahun 2022-2041, secara detail diatur di dalam amanat Undang-undang No.

2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang berimplikasi pada Percepatan pembangunan Papua Selatan, dimana hal ini menitik beratkan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Adapun Misi dan sasaran serta indikator yang dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1, Yaitu Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju **Papua Sehat**, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi stunting.

Misi-2, yaitu : Pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja sama, **menuju Papua Cerdas**, dengan sasaran tercapainya kehidupan yang berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS).

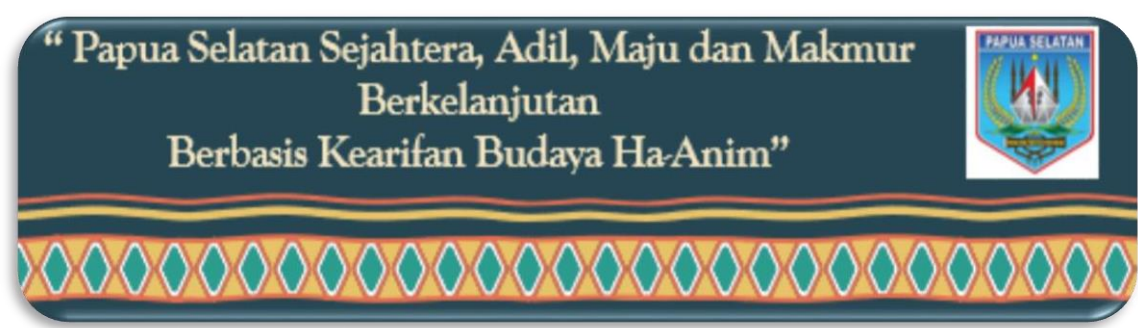
Misi-3, Yaitu meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, **menuju Papua Produktif**, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

GAMBAR 4. 3 VISI DAN MISI PAPUA SELATAN



4.3 Visi RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045

Visi pembangunan daerah tahun 2025–2045 mengarah pada pencapaian cita- cita dan harapan masyarakat Papua Selatan. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran berkelanjutan yang ingin dicapai pada tahapan 20 tahun pembangunan. Berdasarkan pada hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka Panjang, maka dirumuskan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 adalah **Papua Selatan Sejahtera, Adil, Maju dan Makmur Berkelanjutan Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim.**



Adapun penjabaran Visi Provinsi Papua Selatan, sebagai berikut:

4.3.1 SEJAHTERA

Sejahtera : Kondisi Masyarakat Provinsi Papua Selatan OAP dan non OAP. Sejahtera versi Papua Selatan adalah Sejahtera yang melingkupi segala aspek kehidupan, sejahtera jiwa dan raga, sejahtera lahir dan bathin, sejahtera secara ekonomi, sejahtera dalam sosial dan budaya.

Masyarakat Provinsi Papua Selatan OAP dan non OAP mampu mendapatkan kesejahteraan jiwa raga, sejahtera lahir bathin, sejahtera ekonomi, sejahtera sosial budaya, yaitu terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial dan spirituil serta kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata.

Indikator pencapaian kondisi sejahtera adalah **tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan** sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, **menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh** berlandaskan keunggulan kompetitif; **meningkatnya kualitas sumber daya manusia** yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada pelayanan dasar, sehingga mampu meningkatkan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), **meningkatkan perlindungan dan terwujudnya kesejahteraan sosial dan budaya** secara menyeluruh, keluarga berkualitas, pemuda dan olah raga, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; **terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender** pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan daerah serta **Terciptanya rasa aman**; bebas dari bahaya,

bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenteram tidak merasa takut, terlindung dan tersembunyi.

4.3.2 ADIL

Adil : Segenap komponen masyarakat Papua selatan mempunyai **kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya**, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Disamping itu, keadilan tercermin dari adanya **kesempatan yang sama dari semua kelompok masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, adanya perlindungan dan kesamaan di depan hukum**, di dalamnya **tidak ada kesenjangan dan tidak ada diskriminasi** dalam bentuk apapun baik antar individu, antar gender, dan antar kelompok masyarakat dan budaya.

4.3.3 MAJU

Maju : Pada tahun 2045 Papua Selatan menjadi Provinsi yang maju, memiliki kemampuan untuk **mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, daya saing yang tinggi** di kancah domestic dan global, **ketahanan ekonomi yang kuat** terhadap gejolak dan perubahan global, serta **memiliki system keadilan sosial yang kuat**.

Papua Selatan maju memiliki **infrastruktur yang mutakhir, tata Kelola yang transparan**, serta **system pemerintahan yang efektif dan responsive** terhadap kebutuhan masyarakat. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan, rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman aman dan terjangkau. Infrastruktur

ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Papua Selatan terhubung dengan dunia

4.3.4 MAKMUR BERKELANJUTAN

Makmur berkelanjutan : mampu mencapai hidup Sentosa, Aman, Damai, Nyaman, Sejahtera, Selamat, Tenang, Tenteram, Senang, Bahagia, Bangga, Gembira, Puas, Riang, Sukacita, Sukaria, Berkecukupan, Bugar, Segar, Sehat, Mampu, Mandiri, Maju, Bisa, Cakap, Kapabel, Kuasa, Kuat, Pandai, Pintar, Sanggup, Terdaya, Kreatif, Inovatif, Produktif, Berakal, Berilmu, Berpendidikan, Berpengetahuan, Bestari, Terpelajar, Berakhlak/beretika Baik. Makmur melingkupi semua hal yang berkaitan dengan **kemandirian, kemajuan suatu peradaban dan budaya, kecakapan dan teknologi**.

Selain itu Makmur juga mengejawantahkan **pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, Lestari, berkesinambungan** untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang

Makmur berkelanjutan diwujudkan dengan **melestarikan hubungan yang baik antara manusia Papua dengan alamnya** berdasarkan daya dukung, daya tampung dan peruntukan ruang yang telah disepakati bersama. Alam menjadi dasar dari segala upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Jika **kualitas alam meningkat**, meningkat pula kualitas hidup mereka. Kualitas alam

yang baik ini akan dipelihara sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Papua secara adil, merata dan berkelanjutan baik pada masa sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Makmur berkelanjutan merupakan tahapan pertama pembangunan 20 tahun Papua Selatan untuk mencapai visi kemakmuran penuh di 100 tahun ke depan.

4.3.5 BERBASIS KEARIFAN BUDAYA HA-ANIM

Pilihan pendekatan pembangunan yang berfokus atau berdasarkan pada **karakter, nilai dan potensi lokal wilayah** budaya Ha-anim yang dimiliki oleh **masyarakat hukum adat di selatan Papua** dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ha-anim adalah tipe **wilayah budaya dengan karakter kepemimpinan** manusia berwibawa/big man yang terdiri dari suku suku yang menyebar di bagian selatan Papua antaral lain suku besar malind anim di kabupaten Merauke, suku korawai kombai sampai muyu mandobo di kabupaten Boven digoel, Auyu, yaghai di kabuapten Mappi dan 12 FAR suku serta 8 suku pedalaman di Asmat seperti sawi, wiyagar dst. Kebudayaan sebagai respon dari pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia Ha-anim, kemudian membentuk berbagai pranata budaya seperti pranata ekonomi, pendidikan, perkawianan, kekerabatan, religi dan lainnya. Masing-masing pranata budaya terdiri atas 3 gejala budaya yaitu, sistem budaya (idea), sistem sosial (activity) dan kebudayaan materi (artifact). Papua Selatan dengan pendekatan **pembangunan berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim** berarti bertumpu pada enam nilai dasar orang papua yaitu :1). Nilai tentang **Kepemilikan Modal atau Kekayaan** 2). **Nilai tentang Pekerjaan** 3). Nilai tentang **Waktu** 4). Nilai tentang **Hubungan Sosial** 5). Nilai tentang **Tanah, Hutan dan Air Nilai** dan 6). Nilai tentang **Jaminan Sosial**. Masyarakat secara turun-temurun dalam adaptasi ekologi dengan bentang alam di selatan yang datar, berawa, bakau dan memiliki sungai sungai besar membentuk karakter kearifan nilai yang sangat beragam tetapi disatu sisi memiliki kesamaan, Masyarakat adat Papua selatan/Ha-anim memiliki pengetahuan pengelolaan tanah dan kekayaan alam bersumber dari pengetahuan kearifan lokal/adat dan pengalaman sosial turun temurun yang diwariskan, dikonstruksikan dari sistem nilai dan norma adat, inovasi pengetahuan, dan juga memuat pengaturan pemanfaatan, tata cara produksi dan distribusi

manfaat, hingga pengawasan dan pemberian sanksi. Secara bioetik masyarakat Ha-anim terbingkai dalam aliran Totemisme yang menempatkan alam sebagai leluhur (amai) yang pemurah. Pelestarian alam dan komponen-komponen biologis merupakan kewajiban setiap orang dan hal ini tercermin dalam langgam lagu tradisional yang sering dikumandangkan dalam berbagai upacara adat. Perempuan adat mempunyai hak dan peran penting dalam perencanaan, penataan dan pengelolaan ruang, mereka berada di garis depan pewaris pengetahuan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam, mulai dari urusan domestik, melayani, menyediakan dan menyajikan makanan dan kehidupan keluarga, hingga merawat mengamankan ruang sumber kehidupan. Peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat dipotret dalam seni tradisi Eb dalam masyarakat adat suku Yaqhai (Yahrai), Kabupaten Mappi. Meskipun, hak dan peran perempuan adat sering diabaikan dan mengalami diskriminasi. Ini harus menjadi modalitas dalam upaya membangun orang asli Papua. Hadirnya kebijakan otonomi khusus di Papua Selatan memberikan peluang utama untuk membangun rumah sendiri sesuai karakteristik budaya Ha-anim yang kuat dan dapat terintegrasi dengan nilai baru dalam perspektif percepatan pembangunan di semua aspek kehidupan manusia dan lingkungan Ha-anim.

Penjelasan 6 Nilai pandangan hidup orang Papua :

- 1) **Nilai tentang Penumpukan Modal atau Kekayaan:** Kekayaan lebih bersifat sosial, dan bukan ekonomi atau fungsional. Artinya, orang dituntut atau terdorong untuk mengumpulkan kekayaan bukan dalam rangka agar kekayaan tersebut dapat membantu memudahkan kehidupan, melainkan bahwa kekayaan akan memberikan status sosial di masyarakat, misalnya untuk upacara perkawinan, ritual adat, atau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat. Oleh karena itu, nilai kekayaan bagi masyarakat Papua tidak mengarah kepada kepemilikan uang komoditas yang dapat diperdagangkan, melainkan lebih kepada komoditas atau objek yang mengandung nilai simbolik, seperti tanah, babi dll.
- 2) **Nilai tentang Pekerjaan:** Aktivitas kerja bukanlah semata aktivitas ekonomis, melainkan juga aktivitas sosial budaya. Orang giat bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan penghasilan ekonomi, melainkan karena bekerja memiliki nilai luhur secara sosial dan komunal, dan orang yang rajin bekerja akan mendapatkan posisi dan penghargaan sosial yang tinggi di masyarakat. Sebaliknya, menganggur merupakan sifat buruk yang harus dihindari karena akan memberikan status sosial yang jelek di

masyarakat.

- 3) **Nilai tentang Waktu:** Waktu adalah ruang dimana orang dapat mengalokasikan kegiatan sesuai kebutuhan yang ada. Waktu bukanlah peluang atau kesempatan untuk mengakumulasi aktivitas, sebagaimana yang menjadi standar pemahaman modern. Sehingga, penjadwalan serta pembagian waktu kerja secara serial dan terstruktur dianggap tidak terlalu penting.
- 4) **Nilai tentang Hubungan Sosial:** Hubungan sosial lebih merupakan relasi berbasis kerangka suku dan klan. Ini mempengaruhi berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi, dimana orientasi kerjasama lebih berbasis identitas kesukuan dan cenderung kurang terbuka kepada pihak luar karena tidak didasarkan pada basis manfaat dan keuntungan.
- 5) **Nilai tentang Tanah Air dan Hutan:** Tanah, air dan Hutan memiliki dua kategori: tanah pribadi (biasanya sangat terbatas) yang boleh dijualbelikan dan diwariskan, serta tanah adat (sebagian besar tanah di Papua Selatan) yang tidak dijualbelikan dan tidak diwariskan.
Pemanfaatan tanah lebih merupakan wewenang komunal, dan bukan personal. Hal ini berlaku juga bagi air dan Hutan.
- 6) **Nilai tentang Solidaritas atau Jaminan Sosial:** Solidaritas sosial yaitu pertolongan atau bantuan yang diberikan seseorang kepada orang lain dipahami sebagai tindakan timbal balik (resiprositas) yang harus dibalas dengan cara yang seimbang. Relasi sosial seperti ini menghasilkan pola hubungan yang saling mengunci, dimana bantuan solidaritas sosial merupakan hutang yang harus dibalas, dan orang yang pernah membantu dapat menagih kembali bantuan dari orang yang pernah dibantunya.

GAMBAR 4. 4 KESELARASAN VISI RPJPD PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025-2045 DENGAN VISI RPJPN 2025-2045



4.4 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045

Sasaran visi merupakan bentuk penyalarsan yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPD) Tahun 2025-2045, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 serta Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyalarsan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maka visi RPJPD daerah harus selaras dengan Visi RPJPN yang dimujudkan dalam target Sasaran Utama Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Selatan. Adapun sasaran visi Provinsi Papua Selatan yang telah diselaraskan dengan RPJPN adalah sebagai berikut:

TABEL 4. 1 SASARAN VISI PROVINSI PAPUA SELATAN YANG TELAH DISELARASKAN DENGAN RPJPN

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD PAPUA SELATAN 2025-2045			
	Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan				Papua Selatan Sejahtera, Adil, Maju dan Makmur berkelanjutan Berbasis Kearifan Budaya Ha-Anim			
	Sasaran Visi	Indikator	2025	2045	Sasaran Visi	Indikator	2025	2045
1	Pendapat an per kapita setara negara maju	GNI Per Kapita (US\$)	5,500	30,300	Pendapatan PDRB Per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	63,15-63,57*	465,54-743,00*
		Kontribusi PDB Maritim (%)	7.6	15		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	35,31*	62,89*
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20.8	28		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	5,45-5,63*	9,01-11,18*
2	Kemiskinan menurun Dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	16,50-17,00*	0.08-0,58*
		Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Rasio Gini (indeks)	0.372*	0,318-0,341*
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28.5		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,15	0,26
						Pertumbuhan	4.91-	5.76-

						Ekonomi (%)	5.33	8.33
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dalam Megabiodiversitas dan Eco-culture	Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan	5.00	95.25
						Kinerja Eco-culture Papua Selatan	n.a	95,22
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,54 (2022)	0.73	Kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Meningkat	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,43*	0,55*
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38.6	93.5	Intensitas dan Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission (NZE)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59,00*	99,45*
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,63*	86,92*

Sumber: Hasil olah RPJPD, 2023

4.5 Misi RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045

Misi Provinsi Papua Selatan dirumuskan berdasarkan potensi dan Karakteristik yang di miliki sebagai upaya penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Jangka Panjang guna perwujudan pencapaian Visi Pembangunan Provinasi Papua Selatan sampai dengan tahun 2045.

Adapun Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

GAMBAR 4. 5 PENYELARASAN MISI RPJPD PROVINSI PAPUA SELATAN 2025-2045 DAN MISI RPJPN 2025-2045





Penjabaran Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- 1) **Mewujudkan Transformasi sosial**
Misi ini meliputi peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP.
- 2) **Mewujudkan Transformasi ekonomi**
Misi ini meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.
- 3) **Mewujudkan Transformasi tata kelola pemerintahan**
Misi ini dilakukan dengan penyelenggaraan Tata Kelola pemerintahandan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.
- 4) **Biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture)**
Misi ini dilakukan melalui mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan
- 5) **Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi**
Misi ini meliputi ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Ha-anim di Papua Selatan
- 6) **Pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta mengentaskan kemiskinan**

Misi ini diwujudkan dengan Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta mengentaskan kemiskinan di Papua Selatan khususnya kemiskinan OAP

7) **Pembangunan sarana dan prasarana, ketahanan energi, air, pangan serta konektivitas.**

Misi ini diwujudkan dengan mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, ketahanan energi, air, pangan serta konektivitas antar daerah, wilayah dan daerah tertinggal, terluar, terdepan yang berkualitas dan ramah lingkungan

8) **Kesinambungan pembangunan**

Misi ini diwujudkan melalui yang berkesinambungan sebagai komitmen terhadap kesepakatan global (Sustainable Development Goals).

TABEL 4. 2 PENYELARASAN MISI RPJP DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025-2045 DAN RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045

RPJPN 2025-2045			RPJPD PAPUA SELATAN 2025-2045			
No	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Kelompok Agenda/ Misi	Kelompok Agenda/Misi	No	Agenda/Misi
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Transformasi Papua Selatan	Mewujudkan Transformasi sosial, ekonomi serta tata kelola Papua Selatan melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan OAP dan Non OAP serta pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi	1	Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP.
		Transformasi Ekonomi			2	Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.
		Transformasi Tata Kelola			3	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang

						afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.
2	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Landasan Transformasi Papua Selatan	Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, makmur berbasis kearifan budaya Ha-anim	4	Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan
		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi			5	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Ha-anim di Papua Selatan
3	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata & Berkeadilan	Kerangka Implementasi Transformasi Papua Selatan	Kerangka Implementasi transformasi melalui peningkatan kapasitas pemerintahan dan mewujudkan pembangunan sarana prasarana, konektivitas, pemerataan pembangunan, keadilan untuk masyarakat serta kesinambungan pembangunan	6	Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta mengentaskan kemiskinan di Papua Selatan khususnya kemiskinan OAP
		Sarana Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan			7	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, ketahanan energi, air, pangan serta konektivitas antar daerah, wilayah dan daerah

						tertinggal, terluar, terdepan yang berkualitas dan ramah lingkungan.
		Kesinambungan Pembangunan			8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan Papua Selatan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN & SASARAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi PapuaSelatan 2025 – 2045

Memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarna Menuju Indonesia Emas pada bab V RPJPN Tahun 2025-2045. Penentuan sasaran pokok memperhatikan Sasaran Visi dan Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025- 2045 yang dilengkapi dengan indkator disertai target yang harus dicapai sesuai denganpentahapan arah kebijakan.

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimanapentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat) periode. Suatu sasaran pokok harus dapat menjelaskan keterhubungannya dengan visi/misi dan menunjukkan indikator kinerja beserta target masing-masing. Adapun - Misi (Agenda Pembangunan) Provinsi Papua Selatan, selaras dengan Misi Nasional disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kabupaten/kota.

Provinsi Papua Selatan memiliki arah kebijakan dengan melakukan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola serta merumuskan landasan transformasi tersebut beserta kerangka Implementasi Transformasi Papua Selatan, yang di kelompokkan sebagai berikut:

5.1.1 Transformasi Papua Selatan 20 Tahun ke Depan :

1. Transformasi Papua Selatan

Mewujudkan transformasi sosial, ekonomi serta tata kelola Papua Selatan melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan OAP dan Non OAP serta pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi. Terdapat 3 misi untuk mewujudkan transformasi ini :

- 1) Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP.
- 2) Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.
- 3) Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.

2. Landasan Transformasi Papua Selatan

Mewujudkan transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, makmur berbasis kearifan budaya Ha-anim. Terdapat 2 misi untuk mewujudkan transformasi ini:

- 1) Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan.
- 2) Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Ha-anim di Papua Selatan.

3. Kerangka Implementasi Transformasi Papua Selatan

Mewujudkan kerangka Implementasi transformasi dilakukan melalui peningkatan kapasitas pemerintahan dan mewujudkan pembangunan sarana prasarana, konektivitas, pemerataan pembangunan, keadilan untuk masyarakat serta kesinambungan pembangunan. Setidaknya terdapat 3 misi untuk mewujudkan kerangka implementasi transformasi Papua Selatan:

- 1) Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta mengentaskan kemiskinan di Papua Selatan khususnya kemiskinan OAP.
- 2) Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, ketahanan energi, air, pangan serta konektivitas antar daerah, wilayah dan daerah tertinggal, terluar, terdepan yang berkualitas dan ramah lingkungan.

3) Mewujudkan kesinambungan pembangunan Papua Selatan.

Penjabaran misi di atas selaras dengan transformasi pada RPJPN Tahun 2025 - 2045 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut

TABEL 5. 1 PENYELARASAN 8 MISI PEMBANGUNAN RPJPN KE DALAM 8 MISI PEMBANGUNAN RPJPD PROVINSI PAPUA SELATAN

RPJPN 2025-2045				RPJPD PAPUA SELATAN 2025-2045				
No	Kelompok Agenda/Misi	No	Agenda/Misi	No	Kelompok Agenda/Misi	Kelompok Agenda/Misi	No	Agenda/Misi
1	Transformasi Indonesia	1	Transformasi sosial	1	Transformasi Papua Selatan	Mewujudkan Transformasi sosial, ekonomi serta tata kelola Papua Selatan melalui peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan OAP dan Non OAP serta pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi	1	Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan non- OAP.
		2	Transformasi ekonomi				2	Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.
		3	Transformasi tata kelola				3	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.
2	Landasan Transformasi Indonesia	4	Supremasi hukum, stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	2	Landasan Transformasi Papua Selatan	Transformasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, produktif, Makmur berbasis	4	Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan

						kearifan budaya Ha-anim		
		5	Ketahanan sosial budayadan ekologi				5	Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Ha-anim di Papua Selatan
3	Kerangka Implementasi Transformasi Indonesia	6	Pembangunan kewilayah an yang m erata dan berkeadilan	3	Kerangka Implementasi Transformasi Papua Selatan	Kerangka Implementasi transformasi melalui peningkatan kapasitas pemerintahan	6	Mempercepat pemerataan pembangunan, keadilan untuk semua serta mengentaskan kemiskinan di Papua Selatan khususnya kemiskinan OAP
		7	Sarana da				7	Mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, ketahanan energi, air, pangan serta konektivitas antar daerah, wilayah dan daerah tertinggal, terluar, terdepan yang berkualitas dan ramah lingkungan.
		8	Kesinambungan pembanguna n				8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan Papua Selatan.

5.1.2 Keterkaitan Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Papua Selatan 2025-2045

Adapun keterkaitan implementasi antara Isu Strategis Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 dalam 4 tahapan pembangunan, dijabarkan sebagai berikut:

TABEL 5. 2 KETERKAITAN IMPLEMENTASI ANTARA ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025-2045

NO	ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	ARAH PEMBANGUNAN			
			Tahap 1 2025-2030	Tahap 2 2030-2035	Tahap 3 2035-2040	Tahap 4 2040-2045
			PENGUATAN	AKSELERASI	PERLUASAN/ PENGEMBANGAN	PERWUJUDAN
1	Kondisi sosial budaya di Papua yang unik menjadi modal dasar pembangunan Papua	Mewujudkan Transformasi social melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan NonOAP.	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
			Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata
			Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
2	Sumber daya alam (SDA) Papua yang bernilai ekonomis dan strategis berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua	Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
			Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
			Transformasi digital	Transformasi digital	Transformasi digital	Transformasi digital
			Integrasi Ekonomi Domestik	Integrasi Ekonomi Domestik	Integrasi Ekonomi Domestik	Integrasi Ekonomi Domestik
			Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
3	Kebijakan pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek span of control pelayanan publik	Transformasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima
4	Sumber daya alam (SDA) Papua yang bernilai ekonomis dan strategis berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua	Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat

	Kondisi sosial budaya di Papua yang unik menjadi modal dasar pembangunan Papua	wilayah, dan stabilitasekonomi makro di Papua Selatan		Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
	Kebijakan pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek span of control pelayanan publik		Keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural(eco-culture)secara berkelanjutan	Keunggulan biodiversitas Papua Selatanberbasis kultural (eco-culture)secara berkelanjutan	Keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural(eco-culture)secara berkelanjutan	Keunggulan biodiversitas Papua Selatanberbas is kultural(eco-culture)secara berkelanjutan
5	Kondisi sosial budaya di Papua yang unik menjadi modal dasar pembanguan Papua	Kerangka Implementasi transformasi melalui peningkatankap asitas pemerintahanda n mewujudkan pembangunan sarana prasarana, konektivitas,	Beragama Maslahat, Ketahanan Sosialdan Budaya berdasar kearifanbudaya Ha-anim	Beragama Maslahat, Ketahanan Sosialdan Budaya berdasar kearifanbudaya Ha-anim	Beragama Maslahat, Ketahan Sosial dan Budaya berdasar kearifan budaya Ha- anim	Beragama Maslahat, Ketahanan Sosialdan Budaya berdasar kearifan budaya Ha-anim

	Kebijakan pembentukan daerah otonom baru bertujuan untuk memperpendek span of control pelayanan publik	pemerataan pembangunan,ke adil an untukmasyarakat serta kesinambungan pembangunan	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	Keluarga BerkualitasKesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender,dan Masyarakat Inklusif
			Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
			Berketahanan Energi Air,Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi Air,Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan
			Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Terkait dengan hal diatas, maka dalam rangka mewujudkan 8 (delapan) Misi Pembangunan RPJPD Provinsi Papua Selatan, terdapat 6 (enam) rumusan Arah Kebijakan Papua Selatan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Rumusan Arah Kebijakan 1: Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP.

Untuk mewujudkan tujuan dari kelompok arah kebijakan ini, didukung oleh 33 arah kebijakan, dan 12 diantaranya (ditandai dengan cetak tebal) merupakan penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP, secara rinci dijabarkan pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

TABEL 5. 3 RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN 1: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

HIDUP, KUALITAS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN SERTA KESEJAHTERAAN OAP DAN NON OAP.

No	Arah Kebijakan	Catatan
1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.	
2	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan kesehatan primer maupun rujukan sesuai standar dan terakreditasi melalui peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan mengutamakan OAP serta telemedicine, dan mobile health services (pelayanan kesehatan bergerak) yang disinergikan dengan moda transportasi lainnya untuk daerah yang sulit dijangkau.	
3	Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kelompok agama dalam penyediaan layanan kesehatan di wilayah sulit akses.	
4	Percepatan penurunan stunting dengan pendekatan integrasi lintas sektor terutama melalui peningkatan perilaku dan lingkungan sehat serta pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal.	
5	Percepatan eliminasi malaria, tuberkolosis dan HIV AIDS	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
6	Percepatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui afirmasi pendidikan, pendayagunaan, peningkatan tenaga medis dan tenaga kesehatan lokal dengan mengutamakan OAP, serta pengembangan insentif khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah sulit akses dan perbatasan.	
7	Pendampingan daerah dengan kapasitas sistem kesehatan yang rendah untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.	
8	Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata di semua wilayah, termasuk jaringan internet, listrik dan sarana prasarana penanganan limbah medis.	
9	Percepatan peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana (KB);	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
10	Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP

11	Percepatan pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular di Papua Selatan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
12	Peningkatan kemauan dan kemampuan masyarakat dalam gerakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan komitmen/dukungan kebijakan daerah dan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
13	peningkatan kualitas tata kelola program pembangunan bidang kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
14	Peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat, serta tata kelola dalam rangka peningkatan budaya dan prestasi olahraga	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
15	Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikandan olahraga prestasi	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
16	Peningkatan pemerataan akses dan kualitas fasilitas pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui sekolah berpola asrama.	
17	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	
18	Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi (STEAM) yang sesuai dengan komoditas unggulan dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.	
19	Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.	

20	Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3 dengan mengutamakan OAP.	
21	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi wilayah di bidang industri, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, serta keterkaitan dengan DUDI.	
22	Penguatan pendidikan sepanjang hayat dan kecakapan hidup (life skills) yang berbasis kelembagaan komunitas (lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga sosial lainnya).	
23	Peningkatan kualitas pengajaran, pembelajaran, penelitian dan inovasi	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
24	Peningkatan kompetensi, pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
25	Peningkatan penjaminan mutu dan tata kelola penyelenggaraan layanan pendidikan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
26	Pengentasan kemiskinan terutama pada daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif.	
27	Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.	
28	Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.	
29	Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.	

30	Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.	
31	Penguatan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.	
32	Peningkatan pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T.	
33	Peningkatan jangkauan pendataan dan pemanfaatannya dalam penyusunan dan pelaksanaan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berdasarkan pada data terpilah Orang Asli Papua (OAP) yang kontekstual Papua Selatan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP

2. Rumusan Arah Kebijakan 2: Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.

Sasaran utama yaitu Nilai Tambah Ekonomi melalui produktivitas sektor perikanan, Perlindungan Kawasan Perairan dengan meningkatkan luas dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, Kapasitas SDM melalui penguatan kualitas pendidikan, pelatihan, dan riset berbasis maritim. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilakukan beberapa intervensi kunci di berbagai wilayah:

Produktivitas Perikanan: Pengembangan pelabuhan perikanan modern dan armada tangkap di ZEE, yang berlokasi di berbagai wilayah termasuk Papua dan Papua Selatan.

Pengembangan Pangan Akuatik: Fokus pada klaster pangan unggulan (ikan, udang, rumput laut) melalui lumbung pangan desa di sentra-sentra produksi seperti NTB, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Industri Berbasis Sumber Daya Laut: Penguatan industri seperti garam industri di Jawa Timur dan garam rakyat di berbagai provinsi (Aceh hingga Gorontalo).

Industri Transportasi Laut: Penguatan galangan kapal yang difokuskan di wilayah strategis seperti Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jakarta, dan Kalimantan Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan dari kelompok arah kebijakan ini, didukung oleh 29 arah kebijakan, dan 15 diantaranya (ditandai dengan cetak tebal) merupakan penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP, secara rinci dijabarkan pada Tabel 5.4 sebagai berikut:

TABEL 5. 4 RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN 2: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM, POTENSI UNGGULAN DAERAH/ LOKAL.

No	Arah Kebijakan	Catatan
1	Percepatan hilirisasi komoditas unggulan bernilai tambah tinggi pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui optimalisasi kawasan strategis eksisting seperti kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan, penguatan sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan serta sentra pengolahan dan pasar di kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan pusat riset, inovasi, dan teknologi (science technopark) berbasis komoditas unggulan daerah.	Sesuai kondisi Karakteristik Visi Papua Selatan melalui keunggulan biodiversitas dan eco culture
2	Pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan negara melalui peningkatan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda.	
3	Peningkatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	
4	Peningkatan keterkaitan IKM, UMKM, dan BUMKam pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha	
5	Peningkatan literasi keuangan dan digital bagi IKM, UMKM, BUMKam, dan koperasi	

6	Peningkatan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kegiatan pemasaran komoditas unggulan.	
7	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dengan Papua New Guenia, Asia Timur, Pasifik, dan Australia.	Penambahan PNG
8	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dan pengembangan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan.	
9	Pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui peningkatan aspek atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan, penguatan daya saing dan citra pariwisata, peningkatan kualitas SDM pariwisata, penguatan pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital.	
10	Pengembangan kawasan pariwisata premium yang berkelanjutan berbasis bahari dengan target wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.	
11	Pengembangan pariwisata lokal berbasis alam yang memiliki daya ungkit perekonomian untuk mendukung pusat pertumbuhan dan perekonomian masyarakat.	
12	Pengembangan ekonomi biru di kawasan Laut Arafura dengan melibatkan masyarakat lokal	
13	Pengembangan ekonomi kreatif, yaitu terutama seni ukir kayu Asmat	
14	Peningkatan anggaran IPTEKIN daerah menuju komersialisasi oleh industri.	
15	Peningkatan produktivitas BUMD.	
16	Pengembangan pusat riset biodiversitas Papua Selatan untuk mendukung ekonomi biru dan hijau	Penyesuaian pusat riset biodiversitas Papua Selatan

17	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skalakecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi)	
18	pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	
19	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke	
	seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	

20	Peningkatan literasi digital dibidang kesehatan, pendidikan, dan informasi publik	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
21	Peningkatan pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendorong pertumbuhan start up;	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
22	Perluasan pemanfaatan TIK pada sektor-sektor unggul dalam rangka peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan.	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
23	Penguatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal;	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
24	Pembangunan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skfll development)	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
25	Pengembangan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda baik OAP maupun non OAP di Papua Selatan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
26	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, serta mengembangkan kemitraan usaha baik OAP maupun Non OAP	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
27	Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
28	Peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
29	Pengembangan kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di setiap wilayah adat dengan pendekatan ekonomi hijau dan biru	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
30	Pembangunan destinasi pariwisata berorientasi global dengan prinsip ekowisata yang berkelanjutan dan inklusif;	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
31	Pengembangan sistem tata kota berkelanjutan dan kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP

32	Peningkatan peran Papua dalam perdagangan, baik dalam lingkup nasional, regional, dan global	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
----	--	--

3. Kelompok Arah Kebijakan 3: Mewujudkan Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan dari kelompok arah kebijakan ini, didukung oleh 18 arah kebijakan, dan 7 diantaranya (ditandai dengan cetak tebal) merupakan penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP, secara rinci dijabarkan pada Tabel 5.5 sebagai berikut:

TABEL 5. 5 RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN 2: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM, POTENSI UNGGULAN DAERAH/ LOKAL.

No	Arah Kebijakan	Catatan
1	Optimasi dan harmonisasi regulasi dengan proses praregulasi yang memadai di daerah, termasuk untuk pengelolaan sumber daya kelautan, pertanian, dan perkebunan.	
2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	
3	Penguatan Integritas Partai Politik.	
4	Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.	
5	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.	
6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	
7	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.	
8	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik terutama Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung.	

9	Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.	
10	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana otonomi khusus berbasis kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.	
11	Peningkatan jangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran.	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
12	Percepatan Desain Penataan Daerah	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
13	Pengembangan Kelembagaan birokrasi yang efektif dan inklusif	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
14	dukungan pelayanan dan penegakkan hukum yang inklusif	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
15	Peningkatan kesadaran dan melek budaya hukum serta antikorupsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
16	Peningkatan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP
17	Peningkatan pemenuhan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP

4. Rumusan Arah Kebijakan 4: Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan dari kelompok arah kebijakan ini, didukung oleh 10 arah kebijakan, dan 3 diantaranya (ditandai dengan cetak tebal) merupakan penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPP, secara rinci dijabarkan pada Tabel 5.6 sebagai berikut:

TABEL 5. 6 RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN 2: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM, POTENSI UNGGULAN DAERAH/ LOKAL.

No	Arah Kebijakan	Catatan
1	Peningkatan fungsi kawasan perbatasan negara dalam menopang perkembangan kawasan pusat pertumbuhan dan kawasan pengembangan ekonomi didukung oleh peningkatan konektivitas dan mobilitas pada kawasan perbatasan.	
2	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan kesejahteraan melalui strategi penguatan komunikasi sosial yang inklusif dengan tokoh adat, agama, dan masyarakat.	
3	Pengembangan komunikasi sosial yang inklusif dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
4	Penguatan sistem pertahanan dan keamanan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan yang berkelanjutan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
5	Pengembangan proses pembangunan perdamaianpeace building yang berkelanjutan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
6	Peningkatan pertahanan dan keamanan perbatasan negara.	
7	Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi untuk mewujudkan kedaulatan, terutama di pulau-pulau belum bernama dan perbatasan laut yang mencakup keamanan dan eksplorasi sumber daya kelautan (mencegah IUU), terutama di WPP 718 (berbatasan dengan perairan Australia)	
8	Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.	

9	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, obligasi biru dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) termasuk dana otonomi khusus, sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	
10	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	

Rumusan Arah Kebijakan 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi berbasis kearifan Ha-anim di Papua Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan dari kelompok arah kebijakan ini, didukung oleh 34 arah kebijakan, dan 14 diantaranya (ditandai dengan cetak tebal) merupakan penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP, secara rinci dijabarkan pada Tabel 5.7 sebagai berikut:

TABEL 5. 7 RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN 2: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM, POTENSI UNGGULAN DAERAH/ LOKAL.

No	Arah Kebijakan	Catatan
1	Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.	
2	Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai- nilai luhur budaya Papua, serta penguatan kerukunan umat beragama dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	
3	Penguatan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, dan pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan.	
4	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.	

5	Peningkatan peran kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Papua dalam kesatuan budaya bangsa sesuai kearifan budaya Ha-anim di Papua Selatan dan pengembangan etos kerja	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP dan sesuai konteks Papua Selatan
6	Pengembangan pusat dan kerja sama kebudayaan Papua sebagai bagian dari khazanah kebudayaan nasional	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
7	Penguatan moderasi beragama untuk menguatkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
8	Pengembangan sentra produksi pangan/food estate seperti sagu dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan lokal khususnya di kawasan transmigrasi yang didukung oleh sarana dan prasarana, SDM unggul dan kompeten, serta modernisasi teknologi pertanian serta penerapan pertanian regeneratif	
9	Pengurangan risiko kebencanaan khususnya bencana gempa bumi dan banjir melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini bencana alam.	
10	Penguatan kesiapsiagaan dalam menghadapi multi bencana	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
11	Percepatan penanganan saat kejadian bencana serta pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
12	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan, daratan, dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies burung dan satwa lainnya yang dilindungi.	
13	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan karakteristik kepulauan, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, serta risiko bencana.	

14	Optimalisasi pemanfaatan dan perlindungan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.	
15	Penguatan dan diversifikasi usaha subsektor perikanan untuk mendukung kemandirian pangan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri perikanan.	
16	Peningkatan kapasitas pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut agar lebih adaptif terhadap risiko perubahan iklim.	
17	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung, khususnya pada masyarakat adat.	
18	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak, dengan pelibatan tokoh adat dan agama.	
19	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, terutama pada masyarakat adat melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	
20	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
21	Pembangunan tampungan air serba guna untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat sehari-hari secara cepat.	
	Pembangunan bendungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan kebutuhan dan kesiapan pemanfaatan	
22	Pengembangan irigasi baru yang disesuaikan dengan kategori lahan dan dilakukan secara selektif mempertimbangkan kesesuaian lahan dan prinsip keberlanjutan.	
23	Pengembangan solusi berbasis alam untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.	
24	Pengembangan area yang didedikasikan sebagai kolam retensi.	

25	Penguatan karakter dan jati diri bangsa.	
26	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu kehilir.	
27	Pemngembangan masyarakat Papua Selatan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas air, air laut, udara,dantanah, serta pengelolaan sampah dan limbah;	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
28	Melindungi sumber daya alam untuk pemanfaatan jangka panjang, serta memulihkan dan meregenerasikan pola produksi dan konsumsi melalui penerapan ekonomi sirkular.	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
29	Mengatur dan menerapkan kerangka kebijakan dan instrumen terkait konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati pesisir,laut, dan pulau-pulau kecil	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
	Mengelola dan memanfaatkan potensi sumber dayaalam pesisir dan laut dengan kearifan lokal dan berkelanjutan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
31	Mengelola lanskap hutan yang berkelanjutan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
32	Mengelola dan memanfaatkan lahan danjasa lingkungan dengan kearifan lokal secara berkelanjutan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RPPP
33	Meningkatkan usaha konservasi terhadap kawasan serta spesies flora dan fauna di Papua Selatan	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
34	Upaya pembaagunan readah karbon dan ketahanan terhadap dampak penrbahan iklim	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP

5. Rumusan Arah Kebijakan 6: Kerangka Implementasi transformasi melalui peningkatan kapasitas pemerintahan dan mewujudkan pembangunan sarana prasarana, infrastruktur, konektivitas, pemerataan pembangunan, keadilan untuk masyarakat serta kesinambungan pembangunan.

Untuk mewujudkan tujuan dari kelompok arah kebijakan ini, didukung oleh 39 arah kebijakan, dan 5 diantaranya (ditandai dengan cetak tebal) merupakan penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP, secara rinci dijabarkan pada Tabel 5.8 sebagai berikut:

TABEL 5. 8 RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN 2: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM, POTENSI UNGGULAN DAERAH/ LOKAL.

No	Arah Kebijakan	Catatan
1	Penguatan kapasitas dan kelembagaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di pemerintahan daerah untuk mendorong sinergi pusat-daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik.	
2	Penguatan strategi tata kelola otonomi khusus Papua khususnya pengaturan kegiatan	
	pembangunan yang difokuskan pada OAP dengan mempertimbangkan pembagian kewenangan.	
3	Peningkatan peran Majelis Rakyat Papua dalam percepatan pembangunan.	
4	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.	
5	Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.	
6	Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.	
7	Pengembangan dan peningkatan pada pelabuhan simpul utama di wilayah Papua sebagai konektivitas dan hub ekspor ke kawasan Australia melalui pengembangan Pelabuhan Merauke.	
8	Pemanfaatan ALKI III C secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.	
9	Pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dansarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	
10	Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah Papua melalui pengembangan bandara utama (Mopah di Merauke), pembangunan dan standardisasi airstrip, pengembangan bandara perairan (waterbase) dan seaplane sesuai dengan kondisi geografis, serta layanan penerbangan sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	
11	Percepatan penyelesaian jalan Trans Papua serta pembangunan dan peningkatan jalan termasuk jalandaerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.	
12	Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan yang terintegrasi;	Penambahan arahkebijakan untuk PapuaSelatan dari RIPPP
13	Pembangunan dan Peningkatan konektivitastransportasi daratuntukmendukung distribusi barang dan mobilitas	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP

	penumpang	
14	Pembangunandan Peningkatan konektivitas transportasi laut untukmendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
15	Pembangunan dan Peningkatan konektivitas transportasi udarauntukmendukung distribusi barang dan mobilitas penumpang	Penambahan arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
16	Pembangunan waduk multiguna untuk memenuhi kebutuhan air baku, irigasi, dan energi listrik.	
17	Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dandaya tampung.	
18	Pengembangan transportasi perkotaan Papua Selatan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang di kota sedang misalnya seperti Jayapura.	
19	Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.	
20	Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.	
21	Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhanakses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air.	
22	Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.	
23	Pengembangan pengetahuan dan teknologi yangefektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.	
24	Peningkatan lembaga pelaksana penyelenggara airminum yang berkinerja baik dan optimal.	
25	Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).	
26	Peningkatan konektivitas dan akses pelayanandasar, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan.	
27	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	
28	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.	
29	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	
30	Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	
31	Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahananbencana dan iklim.	
32	Penyediaan rumah layak huni yang berkelanjutan	PenambahaN arah kebijakan untuk Papua Selatan dari RIPPP
33	Penerapan bauran pendanaan dalam Peningkatan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.	
34	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkausesuai dengan karakteristik wilayah, terutama untuk daerah afirmasi	

35	Peningkatan kolaborasi antarpemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.	
36	Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.	
37	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.	
38	Peningkatan kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.	
39	Pemenuhan akses air minum serta layanan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.	

5.1.3 PENYELARASAN 17 ARAH PEMBANGUNAN RPJPN KE DALAM RPJPD

Adapun penyelarasan 17 (Tujuh belas) arah kebijakan dijabarkan ke dalam 45 indikator pembangunan Provinsi Papua Selatan, dengan klasifikasi penjabarannya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 5. 9 PENYELARASAN 17 ARAH PEMBANGUNAN RPJPN KE DALAM RPJPD

No	RPJPN 2025-2045			No	RPJPD PAPUA SELATAN 2025-2045				K e t e r a n j a n
	Transformasi	Ara h Pembang unan			Transformasi /Arah Kebijaka n	SASARAN POKOK	Arah Pembangunan		
1	Transformasi Sosial	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan Non OAP.	1.1Terwujudnya Papua Selatan Sehat	IE1	Kesehatan untuk Semua	
		IE2	Pendidikan erualitas yang Merata			1.2Terwujudnya Papua Selatan Cerdas	IE2	Pendidikan Berkualitasyang Merata	
		IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif			1.3Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi OAP dan Non OAP.	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	
2	Transformasi Ekonomi	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	2	Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui	2.1 Terwujudnya PapuaSelatan Produktif melalui Pertumbuhan	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
		IE5	Penerapan Ekonomi Hijau		peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, pote nsiunggulan daerah/ lokal.	EkonomiInklusif Berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam, potensiunggulan daerah/ lokal yang ditopang dengan penerapan IPTEK dan Inovasi	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	
		IE6	Transformasi Digital				IE6	Transformasi Digital	
		IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				IE7	Integrasi Ekonomi Domestik	
		IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			2.2Terwujudnya pembangunan sektoral dan kewilayahan yang Berimbang	IE8	Perkotaan danPerdesaan sebagaiPusat Pertumbuhan Ekonomi	
3	Transformasi Tata Kelola	IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	3	Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.	3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif , integratif, profesional dan prima dalam penyelenggaraan Pemerintahan Papua Selatan	IE9	Regulasi dan TataKelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif,inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional danprima	
4	Supremasi Hukum, Stabilitas ,dan Kepemimpinan Indonesia	IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	4	Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis Kultural (eco- culture) secara berkelanjutan serta	4. Terwujudnya stabilitas ekonomi makro, kondusivitas wilayah, dan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural(eco- culture) secara berkelanjutan di	IE10	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat	Disesuaika n pernyataannya sesuai dengan nomenklatur kewenangan yang relevan di daerah

					meningkatkan kondusivitas	Papua Selatan			
		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro		wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	
		IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan				IE12	Keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan	Penyesuaian IE menjadi konteks keunggulan biodiversitas dan eco-culture yang menjadi kekhususan pembangunan di Papua Selatan
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	5	Kerangka Implementasi transformasi melalui peningkatan kapasitas pemerintahan dan mewujudkan pembangunan sarana prasarana, konektivitas,	5. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya dan Ekologi dalam keluarga, komunitas dan masyarakat Papua Selatan berdasarkan kearifan budaya Ha-anim	IE13	Beragama Maslahat, Ketahanan Sosial dan Budaya berdasar kearifan budaya Ha-anim	
		IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	
		IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas				IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	
		IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		pemerataan pembangunan, keadilan untuk masyarakat serta kesinambungan pembangunan	6.1 Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial, ekonomi dan pelayanan publik, konektivitas,	IE16	Berketahanan Energi Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan	menambahkan infrastruktur konektivitas sebagaimana
		IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			6.2 Terwujudnya pembangunan yang berketahanan iklim secara berkelanjutan yang sejalan dengan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola	IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	kebutuhan daerah dan arahan RIPPP

TABEL 5. 10 TAHAPAN PEMBANGUNAN PAPUA SELATAN

NO	ARAH KEBIJAKAN	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN		Tahap 1 2025-2030	Tahap 2 2030- 2035	Tahap 3 2035- 2039	Tahap 4 2040- 2045
1	Mewujudkan Transformasi sosial melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan OAP dan NonOAP.	1.1 Terwujudnya Papua Selatan Sehat	IE1	Kesehatan untuk Semua	✓	✓	✓	✓
		1,2 Terwujudnya Papua Selatan Cerdas	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	✓	✓	✓	✓
		1.3 Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi OAP dan Non OAP.	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	✓	✓	✓	✓
2	Mewujudkan Transformasi ekonomi melalui	2.1 Terwujudnya Papua Selatan Produktif melalui Pertumbuhan	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	✓	✓	✓	✓
	peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal.	Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal yang ditopang dengan penerapan IPTEK dan Inovasi	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	✓	✓	✓	✓
			IE6	Transformasi digital	✓	✓	✓	✓
			IE7	Integrasi Ekonomi Domestik	✓	✓	✓	✓
		2.2 Terwujudnya pembangunan sektoral dan kewilayahan yang berimbang	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	✓	✓	✓	✓

3	Transformasi tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif dan inklusi di Papua Selatan.	3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan Papua Selatan	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima				
4	Mengembangkan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan serta meningkatkan kondusivitas	4. Terwujudnya stabilitas ekonomi makro, kondusivitas wilayah, dan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan di Papua Selatan	IE10	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat				
	wilayah, dan stabilitas ekonomi makro di Papua Selatan		IE11	Stabilitas Ekonomi Makro				
			IE12	Keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture) secara berkelanjutan				
5	Kerangka Implementasi transformasi melalui peningkatan kapasitas pemerintahan dan mewujudkan	5. Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya dan Ekologi dalam keluarga, komunitas dan masyarakat Papua Selatan berdasar	IE13	Beragama Maslahat, Ketahanan Sosial dan Budaya berdasar kearifan budaya Ha-anim				

	pembangunan sarana prasarana, konektivitas, pemerataan pembangunan, keadilan untuk masyarakat serta kesinambungan pembangunan	kearifan budaya Ha-anim	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				
			IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas				
		6.1 Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial, ekonomi dan pelayanan publik, konektivitas,	IE16	Berketahanan Energi Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan				
		6.2 Terwujudnya pembangunan yang berketahanan iklim secara berkesinambungan secara berkelanjutan yang sejalan dengan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola	IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				

5.2 Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Selatan 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Pada tahap ini disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Terdapat 10 sasaran pokok yang kemudian diturunkan ke dalam indikator – indikator sebagai berikut:

TABEL 5. 11 RINCIAN PENYELARASAN 17 ARAH PEMBANGUNAN KE DALAM 45 INDIKATOR PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA SELATAN DAN RPJPN 2025 – 2045

RPJPN 2025-2045				No IE	RPJPD PAPUA SELATAN 2025-2045							SASARAN POKOK
No	Arah Pembangunan / Indikator Utama	Target			No	Arah Pengu- nan/ Indikator Utama	Target					
		2025	2045				2025	2030	2035	2040	2045	
TRANSFORMASI SOSIAL				TRANSFORMASI SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS DAN INKLUSIF MELALUI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP, KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESEJAHTERAAN OAP DAN NON OAP								Terwujudnya Papua Selatan Sehat
												Terwujudnya Papua Selatan cerdas
IE1	Kesehatan untuk Semua			IE1	Kesehatan untuk Semua							
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74.4	80	IE1.1	1	Usia Harapan Hidup(UHH) (tahun)	69,20	71,19	81,41	68,86	76,15	
2	Kesehatan Ibu dan Anak				2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
a.	Angka kematian Ibu(per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	IE1.2	a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	424*	320	235	105	49*	
b.	Prevalensi tunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13.5	5	IE1.3	b.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21.3*	17.22	13.12	8.05	4.3*	
3	Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk)	274	76		3	Penanganan Tuberkulosis dan Malaria:						
				IE1.4	a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)(%)	83*	85*	87*	92*	95*	

				IE1.5	b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment successrate) (%)	82,80 *	85,00	89.25	93,20	98,00*	
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99.5	IE1.7	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata				IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata						
5	Hasil pembelajaran				5	Hasil Pembelajaran:						
a.	Rata-rata nilai PISA				a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	i) Membaca	396	485	IE2.1		i) Literasi Membaca (Kab/kota)	0,00-25,00*	30,25-30,00	42.66-42,66	52,66-52,66	75,00-75,00**	
	ii) Matematika	404	490	IE2.2		ii) Numerasi (kab/kota)	0,00-	26,25-30,00	35,25-41,00	42.66-49,66	50,00-75,00**	
							25,00*					
	iii) Sains	416	487		b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensiminimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
				IE2.3		i) Literasi Membaca (Provinsi)	18,94-20,94*	25,16-28,17	43,16-45,18	53,16-56,19	60,99-62,99*	
				IE2.4		ii) Numerasi (Provinsi)	12,34-14,34*	16,20-20,55	30,55-36,70	42,5-45,88	54,37-56,37	
b.	Rata-rata lama sekolah enduduk usia di atas 15 tahun	9.46	12	IE2.5	c.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia diatas 15	7,60-7,62*	7,63-7,65*	7,68-7,88	8,60-8,88*	9,52-9,67*	

	(tahun)					tahun (tahun)						
c.	Harapan lama sekolah	13.37	14.81	IE2.6	d.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,41-12,19*	12,20-12,25*	12,26-12,35*	12,36-12,53*	12,54-16-70*	
6	Angka partisipasi kasar(APK)	33.94	60	IE2.7	6	Angka partisipasi kasar(APK) Pendidikan tinggi (%)	n.a	25	35	50	65	
	Pendidikan tinggi (%)											

						Persentase Penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,34*	9,34*	9,34*	9,34-11,29*	9,34-11,29*	
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61.87	75	IE2.8	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	77,21*	77,50*	77,99*	80,15*	85,00*	
IE3	Perlindungan sosial yang adaptif				IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif						
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	IE3.1	8	Tingkat Kemiskinan (%)	16.50-17,00*	13.50-13.00	10.65-10.90	6.05-6.15	0.08-0.58*	
						Indeks Modal Manusia	0,42*	0,47*	0.50*	0.53*	0,55*	

9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan (%)	44.1	99.5	IE3.2	8a	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	51,89*	54,15	81,71	86,39	98,41	
10	Persentasi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal(%)	20	60	IE3.3	8b	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	15	20	35	40	45	
TRANSFORMASI EKONOMI				TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN PAPUASELATAN YANG MANDIRI, MAJU DAN PRODUKTIF MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN, PEMANFAATAN SUMBER DATA ALAM, POTENSI UNGGULAN DAERAH/LOKAL YANG DITOPANG DENGAN PENERAPAN IPTEK DAN INOVASI								Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi OAP dan Non OAP
												Terwujudnya Papua Selatan Produktif melalui Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam, potensi unggulan daerah/ lokal yang ditopang dengan penerapan IPTEK dan Inovasi

IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				IE4	Iptek, Inova si, dan Produktivitas Ekonomi						
					b	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,62*	2,05*	2,62*	3,10*	3,48*	
b.	Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Aug 2022)	8	IE4.9	c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,58 *	0,76	0,92	1,0	1,23	
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10	IE4.10	d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,17 *	2,10	2,15	2,75	3,14*	
d.	Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3.4	5.6	IE4.11	e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,85	2,55	3,05	3,20	3,48*	
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5	4	IE4.12	15 a)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,65-3,12*	2,55-3,10	2,35-2,46*	1,85-2,36*	1.40-2.42*	
					b)	Proporsi Penciptaan lapangan Kerja Formal (%)	20,00*	25,00	30,00	45,00	50,00*	
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	55.4	70	IE4.14	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53.45*	65.35	78	81	89.50*	
17	Tingkat penguasaan IPTEK				17	Tingkat penguasaan IPTEK						

a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3	IE4.15	a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	n.a	35,20	50,58	65.25	75.50	
b.	Peringkat Inovasi (peringkat)	75 (2022)	30 besar	IE4.16	b.	Persentase usaha Industri kecil dan mikro yang melakukan inovasi produk, pemasaran, distribusi dan/atau teknologi	n.a	50,15	55,25	65,58	85,20	
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau			IE5	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau						
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau				18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70.8	90.65	IE5.1	a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	77-87	78-88	85-89	87-90	89,61*	
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	IE5.2	b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,60	31.05	35.22	40.25	56.18	
				IE5.3	c.	Indeks Ekonomi Biru	35.31*	40.65	50.05	57.66	62.89*	
IE6	Transformasi Digital			IE6	IE6	Transformasi Digital						
19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	IE6.	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,0	3	4	7	7	

IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			IE7	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik						
20	Biaya logistic (%PDB)	16,9 (2019)	9	IE7.1	21	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	-	-	-	-	-	
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29.8	27.2	IE7.2	22	Pembentukan ModalTetap Bruto (% PDRB)	36,99*	38,50	40,35	43,15	45,11*	
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26	40	IE7.3	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-	-	-	-	-	
IE8	Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				IE8	Perkotaan dan Pedesaan sebagaiPusat Pertumbuha nEkonomi						
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan				23	Kota dan Desa Maju, Inklusif,dan Berkelanjutan	-	-	-	-	-	

a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44.58	48.92	IE8.1	a.	Proporsi Kontribusi PDRB terhadap Nasional (%)	35	41,12	49,77	58,42	67,07	
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	IE8.2	b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	30,94*	50,57	68,25	89,25	100,00*	
c.	Persentase Desa Mandiri (%)			IE8.3	c.	Indeks Desa Membangun (%)	0.00	0.10	0.35	0.65	0.89*	
				IE8.4	d.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	8,65	9,50	10,65	11,50	12,65	

TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AFIRMATIF, INKLUSI, BAIK, ADAPTIF, INTEGRATIF, PROFESIONAL DAN PRIMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PAPUA SELATAN								Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adapatif, integratif, profesional dan prima dalam penyelenggara an pemerintahan Papua Selatan
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrias dan adaptif				IE9	Regulasi dan Tatakelola yang Berintegritas dan Adaptif						
24	Indeks Reformasi hukum	0.25	0.49	IE9.1	24	Indeks Reformasi Birokrasi	70*	75.25	80.36	90.25	100	
25	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2.34	5	IE9.2	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,5*	2,00	3,00	3,25	5,00*	

26	Indeks pelayanan publik	3.87	5	IE9.8	26	Indeks Pelayanan Publik	1,11*	3,70	4,10	4,50	5,00	
27	Anti Korupsi				27	Anti Korupsi						
a.	Indeks integritas nasional	71,94 (2022)	96.98	IE9.13	a.	Indeks integritas Papua Selatan	50,13*	56,50	62,80	69,10	75,48*	
b.	Indeks persepsi korupsi	34	60	IE9.14	b.	Indeks persepsi korupsi	45	50	55	65	75	
SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DANKEPEMIMPINAN INDONESIA				KONDUSIVITAS WILAYAH, STABILITAS EKONOMI MAKRO DANKEUNGGULAN BIODIVERSITAS DAN ECO-CULTURE PAPUA SELATAN								Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptatif, integratif, profesional dan prima dalam penyelenggaraa n pemerintahan Papua Selatan
												Terwujudnya stabilitas ekonomi makro, kondusivitas wilayah, dan keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural

												(eco-culture) secara berkelanjutan di Papua Selatan
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial				IE10	Kondusivitas wilayah yang berbasis pada harmonisasi keragaman masyarakat						
28	Indeks pembangunan hukum	0,6 (2021)	0.84	IE10.1	28	Tingkat kondusivitas wilayah (Keamanan dan ketertiban, perlindungan masyarakat)	46,60	50,00	53,35	56,85	60,00	
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80	IE10.4	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	-	73,05	82,80	95,20	80*	
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60 - 80)	Tinggi (>80)	IE10.5	30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	

						Indeks Harmoni Indonesia	62.5	72.02	80.25	90	100	
IE1 1	Stabilitas Ekonomi Makro				IE11	Stabilitas Ekonomi Makro						
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	IE11.1	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,67*	0,50	0,42	0,25	0,6*	
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 ± 1	2,0 ± 1	IE11.2	32	Tingkat Inflasi (%)	2,4-3,7*	2,0 - 3,3	1,6 - 3,1	1,00 - 3,0	0,8-3,1*	
33	Pendalaman/In termediasi sektor keuangan				33	Pendalaman/In termediasi Sektor Keuangan						
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66.9	200	IE11.3	a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	17,05*	18,00	24,20	30,40	36,6	
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	7.6	60	IE11.4	b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,29**	4.20	6.15	8.25	10,50*	
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9.1	20		c.	Aset asuransi/PDRB (%)	n. a	n. a	n. a	n. a	n. a	

d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57.8	120		d.	Nilai transaksi Saham per kapita (Rupiah)	1.881.775,98*	2.553.255,78*	3.654.355,77*	5.481.445,64*	7.393.588,38*	
e.	Total kredit/PDB (%)	37.8	80-90	IE11.5	d.	Total Kredit/PDRB (%)	12,68*	15,50	21,20	26,90	32,6	
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	IE11.6	33	Inklusi Keuangan (%)	83,75	86,61	89,49	92,35	95,22	
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan				IE12	Keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture)						
						secara berkelanjutan						
35	Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	60,4 (2023)	75,0-80,0	IE12.1	35	Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan	n.a	50,00	68,25	88,50	95.25	
36	Asia Power Index (Military Capability)	14,16 (2023)	45	IE12.2	36	Kinerja Eco-culture Papua Selatan	n.a	55,20	72.15	87.98	95.22	

KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG BERKETAHANAN DARISISI SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI, SERTA BERKETAHANAN ENERGI, AIR, IKLIM, INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN PANGAN.			Terwujudnya Ketahanan Sosial dan Budaya dan Ekologi dalam keluarga, komunitas dan masyarakat Papua Selatan berdasar kearifan budaya Ha-anim
				Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sosial, ekonomi dan pelayanan publik, konektivitas, secara berkelanjutan yang sejalan dengan transformasi sosial,

												ekonomi dan tata kelola
												Terwujudnya pembangunan yang berketahanan iklim secara berkesinambungan
IE1 3	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju				IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju						
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68.15	IE13.1	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	49,54-49,61*	51,35-51,62	53,25-53,55	55,58-55,60	57,41-58*	
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84.2	IE13.2	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,46-76,57*	77,46-77,15*	79,46-79,36*	80,75-80,89*	83,87-85*	

IE1 4	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif				IE14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80	IE14.1	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39.38- 39.51*	40.25- 40.51*	41.38- 41.51*	42.38- 42.51*	43.43- 44.36*	
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0.15	IE14.2	39a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.493- 0.492*	0.255- 0.256*	0.230- 0.2312*	0.240- 0.441*	0.245- 0.231*	
IE1 5	Lingkungan Hidup Berkualitas				IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas						
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0.7	IE15.1	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0.389	0.420	0.500	0.535	0.624	
42	Kualitas Lingkungan Hidup				42	Kualitas Lingkungan Hidup						
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	76.12	IE15.2	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80.63 *	81.57	82.83	84.09	86.92*	

b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12.5	70	IE15.3	b.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2.16*	10.22*	35.50*	40.15*	50.00*	
c.		15	90		c.	Pengelolaan Sampah						
	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	(13% terdaur ulang)	(35% terdaur ulang)	IE15.4		i)Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah(%)	0,02	21,12	42,23	63,34	84,45	
				IE15.5		ii)Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	27*	45,00	63,22	81,44	100,00	
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				IE16	Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas Dan Kemandirian Pangan						

43	Ketahanan energi, air, dan pangan				43	Ketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas Dan Kemandirian Pangan						
a.	Ketahanan Energi				a.	Ketahanan Energi						
	i) Indeks ketahanan energi	6.61	8.24	IE16.1		i) Konsumsi Listrikper Kapita (kWh)*	315*	514	773	932	1.190	
				IE16.2		ii) Intensitas EnergiPrimer (SBM/Rp milyar)*	90	92	87	76	60	
b.	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	6.2	2.1									
				IE16.4		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	34,04	28,39	20,59	10,80	5,43*	
				IE16.5		ii) Indeks Ketahanan Pangan	67.77	74.61	81.45	88.29	95.12	

c.	Ketahanan air				c.	Ketahanan Air						
	i) Kapasitas tampungan air per kapita (m ³ /kapita)	63.45	200	IE16. 6		i) Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)*	0,23	0,28	0,33	0,38	0,43	

	ii) Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39	100	IE16.7		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20*	25,00	50,00	75,00	100	
	iii) Program Penataan Bangunan Gedung						8,97	9,29				
E17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			IE17		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubaha n Iklim						
				IE17.2	44a	Indeks Risiko Bencana(IRB)	159.35*	139.50-139.67	145.85 - 145.20	125.25 - 125.725	135.71-115.42*	
5	Presentasi penurunan emisi GRK (%)				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
a.	Kumulatif	28.12	51.51	IE17.3	a.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59,00*	65.20	68,18	82,77	99,45*	
b.	Tahunan	32.65	80.89	IE17.4	b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,63*	82.15	83.77	85.35	86,92*	

5.2.1 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah. Arah Kebijakan Transformasi menurut Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 – 2045 adalah sebagai berikut:

GAMBAR 5. 1 ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI RPJPN 2025 - 2045



1. **Transformasi Sosial** (RPJPN 2025 – 2045) yang kemudian pada RPJPD Papua Selatan 2025 – 2045 diturunkan menjadi transformasi sosial untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas dan inklusif melalui peningkatan kualitas hidup, kualitas kesehatan, pendidikan, kesejahteraan OAP dan non-OAP. Arah kebijakan transformasi sebagai berikut:

TABEL 5. 12 INDIKATOR-INDIKATOR PADA ARAH TRANSFORMASI SOSIAL

TRANSFORMASI SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS DAN INKLUSIF MELALUI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP, KUALITAS KESEHATAN, PENDIDIKAN, KESEJAHTERAAN OAP DAN NON OAP							
	IE1	Kesehatan untuk Semua	2025	2030	2035	2040	2045
IE1.1	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	69,2	71,19	81,41	68,86	76,15
	2	Kesehatan Ibu dan Anak:					
IE1.2	a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	424*	320	235	105	49

IE1.3	b.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21.3*	17.22	13.12	8.05	4.3*
	3	Penanganan Tuberkulosis dan Malaria:					
IE1.4	a.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	83*	85*	87*	92*	95*
IE1.5	b.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)					
IE1.6	c.	Cakupan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	82,80*	85,00	89.25	93,20	98,00*
IE1.7	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2025	2030	2035	2040	2045
	5	Hasil Pembelajaran:					
	a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
IE2.1		i) Literasi Membaca (Kab/kota)	0,00-25,00*	30,25-30,00	42,66-42,66	52,66-52,66	75,00-75,00**
IE2.2		ii) Numerasi (kab/kota)	0,00-	26,25-30,00	35,25-41,00	42,66-49,66	50,00-75,00**
	b.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
IE2.3		i) Literasi Membaca (Provinsi)	18,94-20,94*	25,16-28,17	43,16-45,18	53,16-56,19	60,99-62,99*
IE2.4		ii) Numerasi (Provinsi)	12,34-14,34*	16,20-20,55	30,55-36,70	42,5-45,88	54,37-56,37
IE2.5	c.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,60-7,62*	7,63-7,65*	7,68-7,88	8,60-8,88*	9,52-9,67*
IE2.6	d.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,41-12,19*	12,20-12,25*	12,26-12,35*	12,36-12,53*	12,54-16-70*
IE2.7	6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	n.a	25	35	50	65
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	9,34*	9,34*	9,34*	9,34-11,29*	9,34-11,29*
IE2.8	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	77,21*	77,50*	77,99*	80,15*	85,00*

2. **Transformasi Ekonomi** (RPJPN 2025 – 2045) yang kemudian pada RPJPD Papua Selatan 2025– 2045 diturunkan menjadi transformasi ekonomi untuk mewujudkan papua selatan yang mandiri, maju dan produktif melalui pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan, pemanfaatan sumber data alam, potensi unggulan daerah/lokal yang ditopang dengan penerapan iptek dan inovasi. Arah kebijakan transformasi ini sebagai berikut:

TABEL 5. 13 INDIKATOR PADA ARAH TRANSFORMASI EKONOMI

TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN PAPUA SELATAN YANG MANDIRI, MAJU DAN PRODUKTIF MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF BERKELANJUTAN, PEMANFAATAN SUMBER DATA ALAM, POTENSI UNGGULAN DAERAH/LOKAL YANG DITOPANG DENGAN PENERAPAN IPEK DAN INOVASI							
	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	2025	2030	2035	2040	2045
IE4.1	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,45-5,63*	6,45-6,63*	7,45-7,63*	8,45-8,63*	9,01-11,18*
	12	Pengembangan Pariwisata					
IE4.2	a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,86*	0,97*	1,05*	1,10*	1,20*
IE4.3	b.	Jumlah Tamu Wisatawan (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	0,40*	0,45*	0,65*	0,75*	0,80*
IE4.4	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	n. a	n. a	n. a	n. a	n. a
	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD	n. a	n. a	n. a	n. a	n. a
IE4.8	b.	Proporsi Jumlah Industri pada Level Provinsi (%)	1.88	2	4	7	8
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	13,14*	13,55*	14,53*	15,55*	16,39*
IE4.9	c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,58*	0,76	0,92	1,0	1,23
IE4.10	d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,17*	2,10	2.15	2.75	3.14*
IE4.11	e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,85	2	3	3	3,84
IE4.12	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,65-3,12*	2,55-3,10	2,35-2,46*	1,85-2,36*	1.40-2.42*
IE4.13	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	53.45*	65.35	78	81	89.50*
IE4.14	a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
IE4.15	b.	Persentase usaha Industri kecil dan mikro yang melakukan inovasi produk, pemasaran, distribusi dan/atau teknologi	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
IE5	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	2025	2030	2035	2040	2045
	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
IE5.1	a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	77-87	78-88	85-89	87-90	89,61
IE5.2	b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	26,60	31.05	35.22	40.25	56.18
IE5.3	c.	Indeks Ekonomi Biru	35.31*	40.65	50.05	57.66	62.89*
IE6	IE6	Transformasi Digital	2025	2030	2035	2040	2045
IE6.	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.0	3	4	7	7
IE7	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik	2025	2030	2035	2040	2045
IE7.1	21	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	n. a	50.22	40.12	25.12	10
IE7.2	22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,99*	38,50	40,35	43,15	45,11*
IE7.3	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	n. a	35.55	55.85	76.88	85.77
	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	2025	2030	2035	2040	2045
	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan	8,65	9,50	10,65	11,50	12,65
IE8.1	a.	Proporsi Kontribusi PDRB Papua terhadap Nasional (%)	73	41,12	49,77	58,42	67,07
IE8.2	b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	30,94*	50,57	68,25	89,25	100,00*
IE8.3	c.	Indeks Desa Membangun (%)	0.00	0.10	0.35	0.65	0.89*
IE8.4	d.	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	8,65	9,50	10,65	11,50	12,65

3. **Transformasi Tata Kelola** (RPJPN 2025 – 2045) yang kemudian pada RPJPD Papua Selatan 2025 – 2045 diturunkan menjadi transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang afirmatif, inklusi, baik, adaptif, integratif, profesional dan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan papua selatan. Arah kebijakan transformasi ini sebagai berikut:

TABEL 5. 14 INDIKATOR PADA ARAH TRANSFORMASI TATA KELOLA

TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG AFIRMATIF, INKLUSI, BAIK, ADAPTIF, INTEGRATIF, PROFESIONAL DAN PRIMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PAPUA SELATAN							
	IE9	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	2025	2030	2035	2040	2045
IE9.1	24	Indeks Reformasi Birokrasi	70*	75.25	80.36	90.25	100
IE9.2	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,33	2,00	3,00	3,25	5,00
IE9.8	26	Indeks Pelayanan Publik	3,26	3,70	4,10	4,50	5,00
	27	Anti Korupsi					
IE9.13	a.	Indeks integritas nasional (PPS)	50,1	56,50	62,80	69,10	75,48
IE9.14	b.	Indeks persepsi korupsi	45	50	55	65	75

4. **Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** (RPJPN 2025 – 2045) yang kemudian pada RPJPD Papua Selatan 2025 – 2045 diturunkan menjadi kondusivitas wilayah, stabilitas ekonomi makro dan keunggulan biodiversitas dan eco-culture papua selatan. indikator Arah kebijakan transformasi ini sebagai berikut:

TABEL 5. 15 INDIKATOR PADA ARAH TRANSFORMASI TERKAIT SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA

KONDUSIVITAS WILAYAH, STABILITAS EKONOMI MAKRO DAN KEUNGGULAN BIODIVERSITAS DAN ECO-CULTURE PAPUA SELATAN							
	IE10	Kondusivitas wilayah yang berbasispada harmonisasi keragaman masyarakat	2025	2030	2035	2040	2045
IE10.1	28	Tingkat kondusivitas wilayah	46,60	50,00	53,35	56,85	60,00
IE10.4	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	69.31	73,05	76,80	80,50	84,31
IE10.5	30	Indeks Demokrasi Indonesia	sedang	sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	2025	2030	2035	2040	2045
IE11.1	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,30	0,36	0,42	0,50	0,6
IE11.2	32	Tingkat Inflasi (%)	2,4-3,7*	2,0 -3,3	1,6 -3,1	1,00 - 3,0	0,8-3,1*
	33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
IE11.3	a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *	11,80	18,00	24,20	30,40	36,6

IE11.4	b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,29**	4.20	6.15	8.25	10,50*
IE11.5	d.	Total Kredit/PDRB (%)	9,80	15,50	21,20	26,90	32,6
IE11.6	33	Inklusi Keuangan (%)	83,75	86,61	89,49	92,35	95,22
	IE12	Keunggulan biodiversitas Papua Selatan berbasis kultural (eco-culture)secara berkelanjutan	2025	2030	2035	2040	2045
IE12.1	35	Indeks Biodiversitas Indonesia di Papua Selatan	n.a	50,00	68,25	88,50	95.25
IE12.2	36	Kinerja Eco-culture Papua Selatan	n.a	55.50, 20	72.15	87.98	95.22

5. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** (RPJPN 2025 – 2045) yang kemudian pada RPJPD Papua Selatan 2025 – 2045 diturunkan menjadi pembangunan masyarakat yang berketahanan dari sisi sosial budaya dan ekologi, serta berketahanan energi, air, iklim, infrastruktur, konektivitas dan kemandirian pangan. Arah kebijakan transformasi ini kemudian diturunkan ke 7 indikator sebagai berikut:

TABEL 5. 16 INDIKATOR PADA ARAH TRANSFORMASI TERKAIT SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI

PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG BERKETAHANAN DARI SISI SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI, SERTA BERKETAHANAN ENERGI, AIR, IKLIM, INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMANDIRIANPANGAN.							
	IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	2025	2030	2035	2040	2045
IE13.1	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	49,54-49,61*	51,35-51,62	53,25-53,55	55,58-55,60	
							57,41-58*
IE13.2	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,46-76,57*	77,46-77,15*	79,46-79,36*	80,75-80,89*	83,87-85*
	IE14	Keluarga Berkualitas, KesetaraanGender, dan Masyarakat Inklusif	2025	2030	2035	2040	2045
IE14.1	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	39.38-39.51*	40.25-40.51*	41.38-41.51*	42.38-42.51*	43.43-44.36*
IE14.2	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.493-0.492*	0.255-0.256*	0.230-0.2312*	0.240-0.441*	0.245-0.231*
	IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	2025	2030	2035	2040	2045
IE15.1	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0.389	0.420	0.500	0.535	0.624
	42	Kualitas Lingkungan Hidup	80.31	81.57	82.83	84.09	85.35
IE15.2	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80.31	81.57	82.83	84.09	85.35
IE15.3	b.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2.16*	10.22*	35.50*	40.15*	50.00*
	c.	Pengelolaan Sampah					
IE15.4		i) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0,02	21.12	42.23	63.34	84,45
IE15.5		ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	27,11	45.00	63.22	81.44	100.00
	IE16	Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas danKemandirian Pangan	2025	2030	2035	2040	2045
	43	Ketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan					

	a.	Ketahanan Energi					
IE16.1		i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	315*	514	773	932	1.190
IE16.2		ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	26,61	34,00	41,40	48,79	56,18
	b.	Ketahanan Pangan					
IE16.3		i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)					
			34,04	28,39	20,59	10,80	5,43*
IE16.4		ii) Indeks Ketahanan Pangan	67.77	74.61	81.45	88.29	95.12
	c.	Ketahanan Air					
IE16.5		i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0.23	0.28	0.33	0.38	0.43
IE16.6		ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	20*	25,00	50,00	75,00	100
IE16.7		iii) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman (%)	n.a	50	60	75	90
		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	61.94	75.22	85.31	90	98,12
	IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	2025	2030	2035	2040	2045
IE17.1	44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)					
IE17.2	44a	Indeks Risiko Bencana (IRB)	159.35*	139.50-139.67	145.85-145.20	125.25-125.725	135.71-115.42*
	45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
IE17.3	a.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59,00*	65.20	68,18	82,77	99,45*
IE17.4	b.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,63*	82.15	83.77	85.35	86,92*

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan tahun 2025-2045 yang berisi tentang visi, misi, dan arah pembangunan Provinsi Papua Selatan, merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan 20 tahun yang akan datang. Hal dimaksud dilakukan melalui dipedomannya arah kebijakan pembangunan lima tahunan oleh calon kepala daerah dan dicantumkannya sasaran pokok dalam RPJMD di masing-masing tahap. Masyarakat Papua Selatan telah menentukan paradigma, tujuan, strategi dan inovasi pembangunannya yang sesuai dengan budaya orang Papua Selatan.

Sebagai upaya untuk penajaman dan penguatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan sebagai DOB, maka untuk mengantisipasi kekosongan regulasi yang mengatur saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, maka perlu dirumuskan Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

6.1 Pedoman Transisi

Sebagai daerah DOB Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam Menyusun RPJPD Tahun 2025-2045, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Penguatan Visi, Misi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025-2045 mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045, khususnya teknokratik RPJMD Periode 2025-2029
2. Menjadi acuan kesinambungan Perkada RPJPD Tahun 2025-2045, untuk penyempurnaan PERDA RPJPD PPS 2025-2045 sesuai kondisi RTRW PPS 2025-2045.
3. Selain itu untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RPJPD ini dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang disusun pada Tahun 2024. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2024 tetap berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024-2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan petunjuk umum pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam mengimplementasikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua Selatan secara efektif dan efisien. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi tersebut bertujuan untuk mengelola sumberdaya pembangunan secara optimal serta dapat dilakukan pembagian peran secara tepat agar mencapai tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Adapun Kaidah Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045, sebagai berikut :

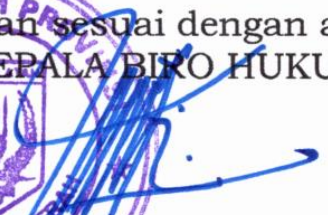
1. Menjadi acuan Perumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD selama periode perencanaan tahun 2025-2045 mengacu dan selaras dengan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045, khususnya Rancangan teknokratik RPJMD Periodisasi Tahun 2025-2029
2. Target Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Target Indikator Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dokumen RPJMD pada periode berkenaan.
3. Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 digunakan sebagai dokumen acuan Penetapan Peraturan Kepala daerah RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat umum dan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Papua Selatan 2025-2045.
4. Dalam rangka pengendalian Manajemen Resiko Pembangunan yang kontinyu dan partisipatif melalui pemanfaatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dilakukan dengan ruang lingkup meliputi:
 - a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan
 - b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko dan
 - c) Penguatan Forum Fasilitasi Perencanaan, Forum MUSRENBANG dan Forum Konsultasi Publik serta pengawasan DPRD Pasca Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045.

5. Dalam rangka perwujudan RPJPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045 akan didukung dengan kapasitas pembiayaan yang memadai, yaitu melalui Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif, serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan.

GUBERNUR PAPUA SELATAN

CAP /TTD

APOLO SAFANPO.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN, SH., MM
PENGHINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016

